RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2025-2029





BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

b. bahwa tujuan pembangunan daerah dijabarkan berupa visi, misi, dan arah kebijakan, sehingga memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka diperlukan landasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun dalam suatu peraturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Stategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
9. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029.
10. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
11. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
12. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.
13. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

14. Program Prioritas adalah progam strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang diperoleh dengan teknik penurunan kinerja.

Pasal 2

(1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman untuk:
    a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
    b. penyusunan RKPD.
(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah:
    a. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah; dan
    b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah.

Pasal 3

Sistematika RPJMD terdiri atas:

a. bab I memuat mengenai pendahuluan;
b. bab II memuat mengenai gambaran umum daerah;
c. bab III memuat mengenai visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
d. bab IV memuat mengenai program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
e. bab V memuat mengenai penutup.

Pasal 4

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
    b. Evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur penunjnag urusan pemerintahan derah bidang perencanaan pembangunan daerah.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah Kabupaten yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 16) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

(2) Peraturan Daerah ini sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2030 dalam hal dan dengan memedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2025
BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang disebut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD berpedoman pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan.

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 merupakan tahapan 5 (lima) tahun pertama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 yang ingin mewujudkan visi "Kabupaten Pasuruan Cemerlang 2045: Maju, Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan" dalam kerangka mewujudkan cita-cita Nasional menuju "Indonesia Emas Tahun 2045". Visi pembangunan Nasional dan Daerah selaras dengan tujuan pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk komitmen kinerja *(performance agreement*) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Namun demikian tetap harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 memuat hasil analisis kondisi umum daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan **visi RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029** yaitu "**Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan"**. Visi ini akan diwujudkan dengan melaksanakan 5 (lima) misi yaitu: (1) mendukung dan mendorong kualitas keimanan dan kesalehan masyarakat; (2) memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi melalui program tepat guna dan tepat sasaran; (3) membangun sumber daya manusia yang unggul dan produk asli Pasuruan yang kompetitif; (4) memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pilar membangun daerah; dan (5) meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta aparatur pemerintah yang lebih profesional dan humanis. RPJMD

Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 secara terarah dan terukur melalui rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilengkapi indikator kinerja utama beserta target yang harus dicapai selam 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan perencanaan daerah tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang menjabarkan arah kebijakan daerah secara lebih operasional berupa indikasi program, kegiatan, dan subkegiatan beserta target kinerja, sasaran lokasi, dan pagu indikatif pendanaan selama tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR ...

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-4

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-7

1.4 Maksud dan Tujuan I-10

1.5 Sistematika RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ..... I-11

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-54

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-89

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-125

2.1.5 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan II-178

2.1.6 Kerja Sama Daerah II-180

2.1.7 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda II-182

2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-182

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu II-182

2.2.2 Neraca Daerah II-196

2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II-200

2.2.4 Kerangka Pendanaan II-210

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-227

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-227

2.3.2 Isu Strategis II-236

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .. III-1

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1

3.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ..... III-1

3.1.2 Misi Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ..... III-6

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ..... III-9

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ..... III-20

3.2.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Pasuruan III-20

3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ..... III-62

3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ..... III-67

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah IV-1
4.1.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan IV-1
4.1.2 Program Perangkat Daerah IV-3
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-82
BAB V PENUTUP V-1
5.1 Kesimpulan IV-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan IV-2
5.3 Pengendalian dan Evaluasi IV-3
5.4 Pedoman Transisi IV-4

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR .... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah karena akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan yang tepat untuk menjawab isu-isu strategis sekaligus mencapai visi, tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil proses perencanaan adalah dokumen rencana pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman bagi para penyelenggara pembangunan, dunia usaha, masyarakat maupun *stakeholders* pembangunan lainnya di daerah dalam melaksanakan aktivitasnya mendukung pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang menerjemahkan komitmen kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan lima tahun sekali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pilkada serentak telah dilakukan pada bulan November 2024. Pilkada Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2025-2030 terpilih, yaitu **H.M. Rusdi Sutejo** dan **H.M. Shobih Asrori**, serta telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Proses berikutnya adalah penjabaran visi, misi, dan program komitmen Bupati dan Wakil Bupati ke dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 mengikuti tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Bab II, Bagian Keempat, Pasal 41 hingga 72 Permendagri 86/2017 tersebut telah diuraikan tata cara penyusunan RPJMD. Disebutkan bahwa terdapat 6 (enam) tahapan penyusunan RPJMD, yaitu tahap persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penyusuan Rancangan RPJMD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD, perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Menteri Dalam Negeri secara khusus mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah sekaligus sebagai upaya penyelarasan RPJMN dan RPJMD Tahun 2025-2029. Inmendagri tersebut secara rinci menjelaskan tahapan penyusunan RPJMD, yaitu: (1) persiapan penyusunan; (2) pembahasan visi dan misi secara teknokratik; (3) penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD; (4) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD; (5) Pengajuan Ranwal RPJMD kepada DPRD; (6) Pembahasan dan penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD; (7) Konsultasi Ranwal RPJMD Kabupaten ke provinsi; (8) Penyampaian Ranwal RPJMD kepada Perangkat Daerah (PD) untuk Penyusunan Racangan Rencana Strategis (Renstra) PD; (9) Forum PD/Lintas PD; (10) Verifikasi Renstra PD; (11) Penyusunan Rancangan RPJMD; (12) Musrenbang RPJMD; (13) Perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMD; (14) Reviu Rankhir oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); (15) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD kepada DPRD; (16)

Pembahasan Ranperda RPJMD; (17) Evaluasi Ranperda RPJMD Kabupaten oleh provinsi; (18) Penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) RPJMD; dan (19) Perumusan Rankhir hingga Penetapan Renstra PD berdasarkan Perda RPJMD.

Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan pembangunan daerah antara lain pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan *top-down* serta *bottom-up*. Selain itu, juga dipergunakan pendekatan *holistik, tematik, spasial*, dan *integratif* untuk memastikan proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara efektif dan efisien. Mengacu pada berbagai pendekatan pembangunan tersebut, maka penyusunan RPJMD ini juga menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai *Sustanable Development Goals (*SDGs). Untuk memastikannya, hasil rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pasuruan digunakan sebagai pijakan dalam perumusan dan pelaksanakan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Selain itu, untuk memastikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta riset dan inovasi berperan dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah, penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan riset dan inovasi di daerah, serta pemanfaatannya untuk meningkatkan tata kelola, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, serta daya saing daerah.

Sesuai arahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD tidak hanya menerjemahkan rencana realisasi visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, namun juga terkait dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga secara berkesinambungan mendukung ketercapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional. Karenanya RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 juga menjabarkan/mendetailkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 di periode yang bersesuaian, yaitu tahap pertama (2025-2029). RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 juga harus mengacu pada

kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, di tingkat kabupaten, RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 seluruh perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pasuruan. RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 pun akan menjadi acuan dalam penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya dari tahun 2026 hingga tahun 2030.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

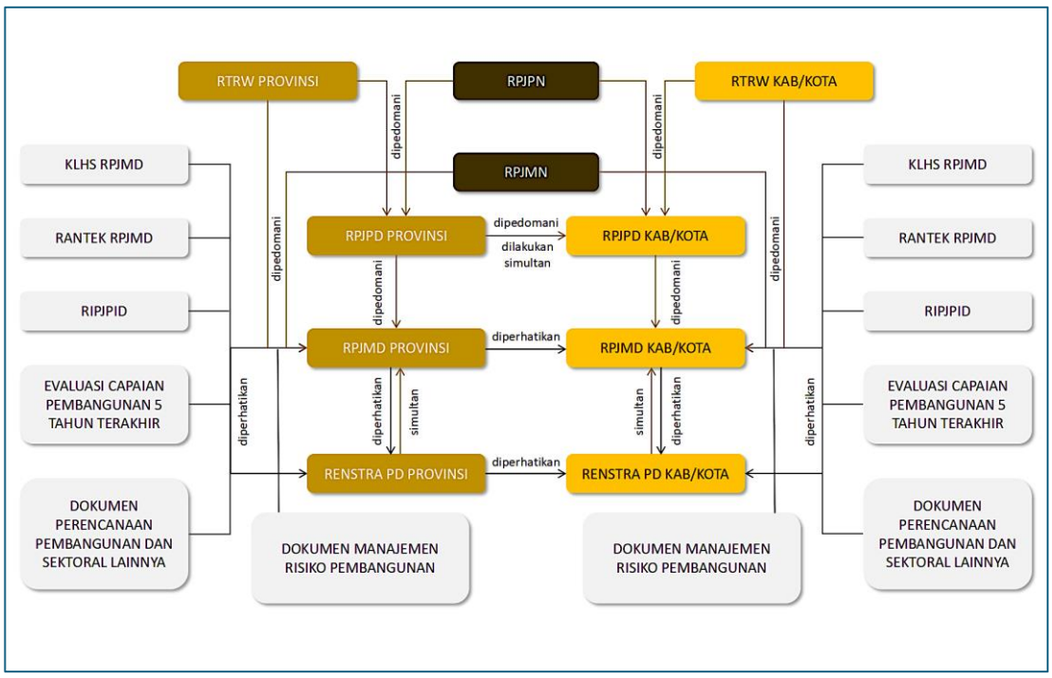
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2028 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor1419);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan (Berita Negara 2024);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor ….. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan pembangunan daerah (kabupaten) disusun dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta rencana tata ruang wilayah. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 juga menjelaskan hubungan dokumen RPJMD Kabupaten dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya secara lebih terperinci, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen
Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

1. Sebagai bagian dari pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka RPJMD Kabupaten Pasuruan harus juga mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029. Isu strategis, visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pasuruan harus selaras dan/atau mengacu pada isu strategis, visi, misi dana rah kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
2. RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045 pada tahap I atau periode 5 (lima) tahun pertama. Gambaran umum, permasalahan dan isu strategis RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJPD Kabupaten Pasuruan, khususnya di tahap I. Demikian juga dengan sasaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD tahap I, menjadi acuan perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, hingga arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029 juga harus mengacu dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2044, khususnya indikasi program 5 (lima) tahun pertama yaitu tahun 2024 – 2028;

4. RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029 juga memperhatikan berbagai rekomendasi yang diberikan oleh dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, seperti: (i) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah disusun dalam rangka penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Komitmen dunia internasional, tidak terkecuali Indonesia dan seluruh daerah otonomnya, untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan antar generasi telah menetapkan *sustainable development goals (SDGs)* atau Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang harus dicapai dalam pembangunannya. Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029 telah melaporkan evaluasi hasil pencapaian TPB di kabupaten dalam lima tahun terakhir beserta berbagai rekomendasi untuk mencapai target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Pasuruan di tahun 2030. Oleh karena itu, integrasi substansi dan rekomendasi dari dokumen ini ke dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 harus diperhatikan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan; (ii) Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029; (iii) Evaluasi capaian pembangunan 5 tahun terakhir; (iv) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RIPJPID memberikan masukan berupa isu strategis pembangunan daerah dan produk unggulan daerah beserta indikasi program pengembangan berdasarkan 6 (enam) elemen ekosistem riset dan inovasi daerah. Elemen ekosistem riset dan daerah tersebut yaitu: (1)kebijakan infrastruktur, (2)kapasitas kelembagaan dan daya dukung, (3)kemitraan, (4)budaya riset dan inovasi, (5)keterpaduan atau koherensi, dan (6)penyelarasan dengan perkembangan global; (v) rencana induk/pembangunan sektoral jangka menengah lainnya untuk periode yang bersesuaian dengan RPJMD tahun 2025-2029.
5. RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029;

6. RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029 akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2026 hingga tahun 2030;
7. Renstra perangkat daerah dan RKPD Kabupaten Pasuruan akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah di tahun yang bersesuaian.
8. RKPD Kabupaten Pasuruan akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran hingga ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

   Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan dimaksudkan untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pasuran pada periode tersebut.

b. Tujuan

   Secara terperinci tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan ini adalah:

   1. Merumuskan Gambaran Umum Kondisi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis daerah yang harus dijawab pada periode pembangunan 2025-2029;
   2. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2025-2030 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan, serta indikator kinerja pembangunan di tahun 2025-2029;
   3. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.5 Sistematika RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Sistematika RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 mengikuti arahan yang telah diberikan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menguraikan beberapa subbab tentang: (i) Kondisi daerah terkini yang digambarkan melalui penyajian data dan informasi tentang hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir. Perkembangan capaian berbagai indikator kinerja pembangunan daerah disajikan untuk memberikan kondisi daerah di aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum (penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah). Subbab ini menyajikan pula kinerja daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal, kerjasama daerah, dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendukung kinerja pelayanan pemerintah daerah; (ii) kondisi (kemampuan) keuangan daerah dan pengelolaannya selama lima tahun terakhir dalam mendukung pembangunan daerah. Kondisi lima tahun terakhir ini dijadikan dasar dalam memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan selama periode perencanaan (tahun 2025-2030); (iii) Subbab permasalahan pembangunan dan isu strategis. Permasalahan pembangunan mencakup permasalahan makro daerah maupun permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu-isu pembangunan internasional, nasional, maupun regional Kabupaten Pasuruan. Permasalahan dan isu-isu ini menjadi dasar perumusan isu-isu strategis daerah yang harus dijawab atau diselesaikan dalam pembanguan daerah tahun 2025-2029.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan dua subbab, yaitu: (i) subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2029; dan (ii) subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Subbab pertama menguraikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 serta penjabarannya ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada periode tersebut. Subbab ini menguraikan pula indikator kinerja utama dan daerah beserta target capaiannya setiap tahun selama periode perencanaan. Sementara itu, Subbab kedua memuat cara atau strategi dan arah kebijakan umum maupun khusus pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam menyelenggarakan misi untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran pembangunan di tahun 2025-2029. Dalam subbab ini disajikan pula program-program prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun prioritas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini menguraikan dua bagian, yaitu (i) subbab Program Perangkat Daerah; dan (ii) subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Subbab pertama menguraikan daftar program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Subbab ini juga memuat indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah selama periode 2026-2030. Subbab kedua merangkum berbagai indikator kinerja pembangunan Kabupaten Pasuruan beserta targetnya selama periode tahun 2025-2030. Indikator kinerja pembangunan daerah mencakup Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7° 32'42.14" - 7° 57'24.32" Lintang Selatan dan 112° 34'29.31"-113° 6'0.29" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,02 km2 dengan batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi :

Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi dalam wilayah adminsitratif sebanyak 24 kecamatan, 24 kelurahan dan 341 desa, secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya

No.	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	25	-	50,75	3,44

No.	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
		Desa	Kelurahan		
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondangwetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
	Total			**1.474,02**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Letak wilayah daerah Kabupaten Pasuruan, dilihat dari segi ekonomi sangat strategis, karena terletak pada segitiga jalur ekonomi Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, Surabaya - Malang dan Malang - Jember / Banyuwangi / Bali, dilintasi Jalur Angkutan Kereta Penumpang dan Barang Surabaya - Bangil - Banyuwangi serta Surabaya - Bangil - Malang. Terlebih lagi dengan pembangunan Jalan Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, dan Pasuruan - Probolinggo semakin membuat Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan industri, dengan semakin pendeknya waktu tempuh ke Surabaya. Peta wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Pasuruan
Sumber : Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2024

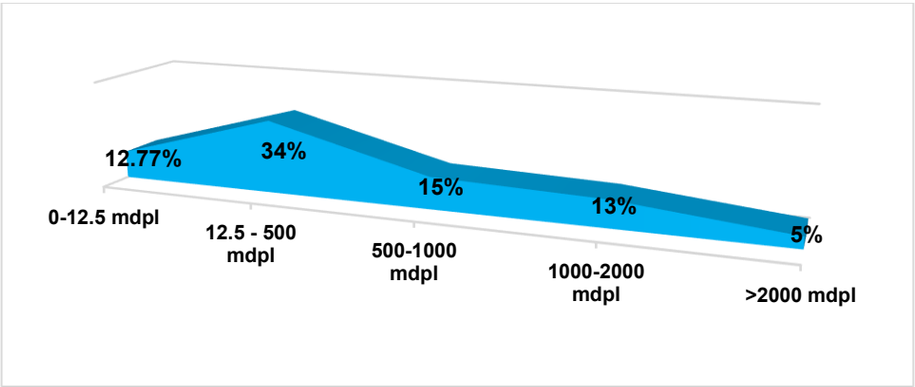
2) Potensi Sumber Daya Daerah

A. Topografi

Kabupaten Pasuruan memiliki ketinggian antara 0 – 3.313 mdpl yang dirinci per wilayah administrasi kecamatan. Dataran rendah terdapat di bagian utara, tepatnya di Pesisir Selat Madura, dengan ketinggian 0 - 290 mdpl. Kawasan tersebut memiliki ancaman bencana banjir. Dataran tinggi berada pada bagian tenggara (Kawasan Gunung Bromo) dan bagian barat daya (Kawasan Gunung Welirang). Kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan, sebagian memiliki kelerengan yang terjal atau curam, sehingga memiliki potensi bencana longsor. Berdasarkan tingkat kelerengan, Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dibagi menjadi tujuh (7) yaitu:

1. Kelerengan 0 – 2%: antara lain seluruh Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lekok, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati dan Kecamatan Nguling.
2. Kelerengan 2 – 5%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati dan Kecamatan Nguling.
3. Kelerengan 5 – 8%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan dan Kecamatan Lekok.
4. Kelerengan 8 – 15%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Winongan dan Kecamatan Grati.

5. Kelerengan 15 – 25%: antara lain adalah sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol dan Kecamatan Beji.
6. Kelerengan 25 – 45%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Gempol.
7. Kelerengan > 45%: antara lain adalah sebagian Kecamatan Tutur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, dan Kecamatan Prigen.



Gambar 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 2.2 menunjukkan kondisi topografi Kabupaten Pasuruan memiliki kondisi topografi yang bervariasi berdasarkan ketinggian. Oleh karena itu, wilayah Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis wilayah sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
1	Wilayah Pesisir	0 - 12,5	18.819,04	Kawasan pengembangan usaha perikanan dan pertambakan	Pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton,

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
					Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Winongan, Kecamatan Grati, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling
2	Wilayah dataran	12,5 – 500	50.384,02 ha.	Kawasan pengembangan pertanian, permukiman, perindustrian	Pada sebagian wilayah kecamatan – kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari
3	Wilayah Perbukitan	500 – 1000	21.877,17 ha	Kawasan untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring	Sebagian kawasan Kecamatan Lumbang, Kecamatan Gempol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Kecamatan Tosari, Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Prigen
4	Wilayah Pegunungan	1.000-2.000 mdpl	18.615,08 ha	Kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air	Sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Prigen
5	Kawasan perguruan tinggi	> 2000 mdpl	7.920,77	Kawasan hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya	Sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur, Kecamatan

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
					Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Purwosari, dan Kecamatan Prigen

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

B. Geologi dan Jenis Tanah

Secara geologi, Bagian selatan Kabupaten Pasuruan, termasuk dalam Pegunungan Malang Selatan dan didominasi oleh batuan vulkanik. Batuan ini terbentuk dari aktivitas gunung berapi di masa lalu dan mencakup berbagai jenis seperti andesit, basalt, dan batuan piroklastik. Gunung-gunung berapi seperti Gunung Arjuno, Gunung Welirang adalah contoh dari sumber batuan vulkanik di wilayah ini.

Bagian utara dan timur Kabupaten Pasuruan terdiri dari batuan sedimen. Batuan-batuan ini termasuk endapan sungai, delta, dan sedimen laut yang terbentuk dari proses-proses geologis seperti pengendapan, sedimentasi, dan tektonik. Sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Pasuruan membawa material endapan dari pegunungan dan perbukitan di sekitarnya. Di dataran rendah, terdapat endapan alluvial yang subur dan kaya akan bahan organik, menjadi dasar bagi pertanian yang makmur.

Wilayah Kabupaten Pasuruan terletak di zona yang aktif secara tektonik, dengan adanya patahan-patahan dan rekahan geologi yang berpotensi menyebabkan gempa bumi. Aktivitas tektonik ini juga berkontribusi terhadap pembentukan relief dan pola drainase di wilayah ini. Beberapa bagian Kabupaten Pasuruan juga mengandung batu gamping (batu kapur), yang sering kali terbentuk dari endapan laut dan menjadi sumber daya penting untuk industri konstruksi dan bahan bangunan.

Dilihat dari struktur geologi, Kabupaten Pasuruan terbagi atas dua kelompok besar yaitu gunung api kuarter muda *(young quarternary)* seluas 52,43% dan kuarter tua *(old quarternary)* seluas 34,95%. Kondisi Geologi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari dua belas (12) satuan batuan yaitu Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff

Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuarter atas penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api arjuno welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api kuarter tengah ringgit (Qvr), Satuan gunung api kuarter tengger tua (Qpvtr).

Jenis batuan di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: batuan permukaan, batuan sedimen dan batuan gunung api. Penjelasan masing-masing jenis batuan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Endapan Permukaan	
Batuan Alluvium	• Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur • Terdiri dari endapan sungai Rejoso dan endapan pantai sepanjang Selat Madura
Batuan Sedimen	
Formasi Kabuh	• Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan • Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji
Formasi Jombang	• Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan • Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan
Formasi Welang	• Terdiri Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batupasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan • Sebarannya tidak luas di Sungai Welang
Batuan Gunung Api	
Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis)	• Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat
Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit)	• Terdiri dari batuan gunung api ringgit, batuan gunung api tengger tua
Batuan Gunung Api Arjuna – Welirang	• Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf
Batuan Gunung Api Tengger	• Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat
Tuf Rabano	• Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus
Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan	• Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Batuan Gunung Api Bromo	• Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi, dan lahar • Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo.
Pasir Gunung Api Tengger	• Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung • Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok G. Bromo

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Proses geologi yang kompleks di Kabupaten Pasuruan membentuk banyak rekaman peristiwa geologi menarik yang perlu dijadikan sebagai Warisan Geologi, agar tetap terjaga kelestariannya dan dapat dijadikan sebagai Warisan Geologi, baik tingkat Nasional maupun tingkat Internasional.

Selanjutnya terkait jenis tanah di Kabupaten Pasuruan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 (enam) kelompok besar yaitu:

1. Alluvial
   a. Sifat dan Corak
      - Warna kelabu, tekstur liat, keasaman aneka, dengan kandungan zat organik lemah dan tingkat kejenuhan sedang hingga tinggi
      - Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: tinggi tetapi karena daerahnya datar tidak sampai lanjut tingkatnya
   b. Pemakaian: padi sawah, palawija dan perikanan
2. Regosol
   a. Sifat dan Corak
      - Warna: kelabu hingga kuning, Tekstur: pasir, Kadar liat: <40%, Keasaman: aneka, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: aneka, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: tinggi
   b. Pemakaian: padi sawah, palawija, tebu dan sayuran
3. Andosol
   a. Sifat dan Corak

- Warna: hitam hingga kuning, Tekstur: lempung hingga debu dan liat menurun, Keasaman: agak masam hingga netral, Zat organik: lemah, Kejenuhan: basa, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar

b. Pemakaian: sayuran, bunga-bungaan, teh, kopi dan hutan pinus

4. Grumusol

a. Sifat dan Corak

- Warna: kelabu hingga hitam, Tekstur: liat makin ke bawah makin meningkat, Keasaman: sedikit asam hingga alkalin, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: besar

b. Pemakaian: padi sawah, jagung, kedelai, tebu, kapas dan hutan jati

5. Mediteran

a. Sifat dan Corak

- Warna: kuning hingga merah, Tekstur: lempung liat, Keasaman: agak masam hingga netral, zat organik: rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar hingga sedang

b. Pemakaian: padi sawah, tegalan dan rumput ternak

6. Latosol

a. Sifat dan Corak

- Warna: merah hingga kuning, Tekstur: liat tetap dari atas hingga ke bawah, Keasaman: masam hingga agak masam, Zat organik: kadar rendah hingga agak sedang di lapisan atas dan menurun ke bawah, Kejenuhan: basa rendah hingga sedang, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: kecil

b. Pemakaian: padi sawah, jagung, umbian, kelapa, coklat, cengkeh, kopi maupun hutan tropika.

C. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh tiupan angin Muson. Angin Muson mempengaruhi pola iklim dan mengakibatkan terjadinya musim hujan (angin Muson Timur) dan musim kemarau (angin Muson Barat).

Kondisi iklim yang ada di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Iklim Kabupaten Pasuruan
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan penggunaan lahan merujuk pada cara dan tujuan lahan tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas, seperti pertanian, perumahan, industri, dan ruang terbuka hijau. Hal ini mencakup perencanaan dan pengelolaan lahan agar sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya, serta mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

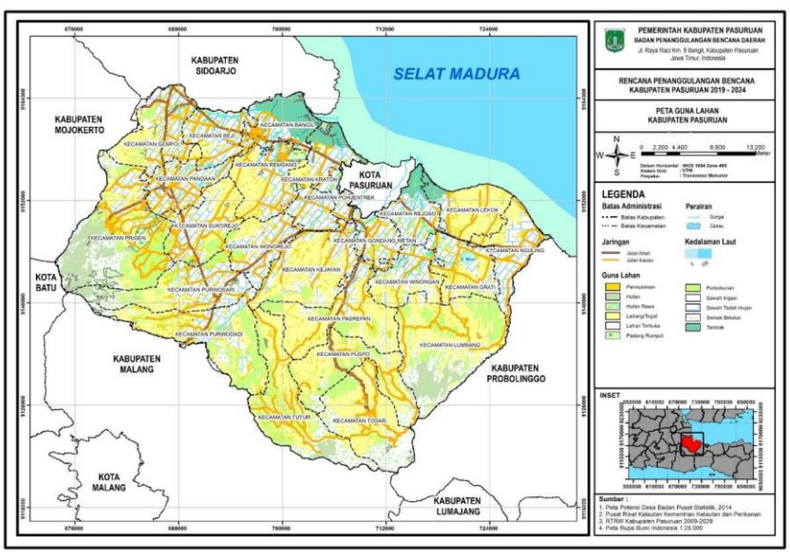
Pemanfaatan penggunaan lahan yang baik sangat penting, karena berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Berikut alasan pentingnya penggunaan lahan antara lain:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Lahan adalah sumber daya yang terbatas. Pemanfaatan yang tepat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa sumber daya alam, seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati, dikelola secara berkelanjutan.
2. Perencanaan Tata Ruang: Pemanfaatan lahan yang baik mendukung perencanaan tata ruang yang efektif, yang penting untuk menghindari penggunaan lahan yang tidak terencana dan

berpotensi menimbulkan masalah, seperti kemacetan, polusi, dan konflik penggunaan lahan.

3. Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan pemanfaatan lahan yang baik, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan ruang terbuka hijau, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup.
4. Pengembangan Ekonomi: Pemanfaatan lahan yang efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor seperti pertanian, industri, dan pariwisata, yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Mitigasi Risiko Bencana: Dengan perencanaan penggunaan lahan yang baik, risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, dapat diminimalkan. Misalnya, lahan yang rawan bencana dapat dialokasikan untuk ruang terbuka hijau atau infrastruktur yang dapat mengurangi dampak bencana.

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Pasuruan untuk sawah irigasi, dengan total luasan 38.391,34 Ha, luas lahan terbangun adalah 17.301, 60 Ha. Secara lebih detail, penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan dirincikan dalam tabel 2.4.



Gambar 2.4 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.4
Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

No	Penggunaan	Persentase terhadap Lahan Keseluruhan (%)
1	Aneka Industri	0,994%
2	Industri Kecil	0,023%
3	Jasa Permukiman	10,169%
4	Peternakan Unggas	0,021%
5	Tambak	1,696%
6	Sawah Irigasi	26,187%
7	Sawah Tadah Hujan	1,536%
8	Buah-Buahan	0,006%
9	Kebun Campuran	3,242%
10	Perkebunan	2,805%
11	Tegalan/Ladang	36,051%
12	Hutan Sejenis	11,878%
13	Padang Rumput	0,707%
14	Semak	2,708%
15	Kolam Air Tawar	0,001%
16	Lapangan Olahraga	0,215%
17	Tanah Kosong yang Diperuntukkan	0,033%
18	Tanah Terbuka	1,224%
19	Sungai	0,217%
20	Danau/Situ/Telaga	0,127%
21	Jalan Aspal	0,081%
22	Pemakaman	0,081%
	Jumlah	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

E. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Pasuruan secara ekonomis memiliki beberapa keunggulan potensi daerah, apabila dapat dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan perekonomian daerah.

1. Ketersediaan infrastruktur

Infrastruktur atau juga disebut sebagai prasarana wilayah adalah fasilitas (baik berupa fisik maupun sistem) yang dipergunakan untuk memfasilitasi suatu sarana sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Secara umum infrastruktur terdiri dari komponen utama jalan, jembatan, perumahan atau permukiman, air bersih, pengolahan sampah dan limbah, jaringan irigasi, jaringan drainase, energi, telepon dan komunikasi. Dengan adanya infrastruktur jalan yang telah menghubungkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, sangat mendukung bagi perkembangan ekonomi, pariwisata, pertanian, industri, transportasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain adanya prasarana jalan, sistem transportasi

barang dan jasa juga didukung dengan adanya jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan. Jalur kereta api yang ada melayani 2 (dua) jurusan yaitu Surabaya - Bangil - Malang - Blitar dan Surabaya - Pasuruan - Jember - Banyuwangi. Sebagai daerah yang berbasis pada sektor pertanian dan industri di Kabupaten Pasuruan telah tersedia sistem jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian serta kawasan industri. Sistem jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Pasuruan akan mampu mengairi lahan pertanian secara memadai melalui peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif. Sementara Kawasan Industri lengkap dengan infrastruktur pengelolaan limbah dan fasilitas lainnya serta terkoneksi langsung dengan tol ke arah Surabaya - Malang - Banyuwangi/Bali. Beberapa komponen infrastruktur yang lain seperti air bersih, energi listrik, pipa gas, dan telekomunikasi juga telah tersedia dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga dengan adanya infrastruktur yang telah terbangun akan sangat menunjang bagi perkembangan ekonomi dan wilayah.

2. Potensi Wisata

Kabupaten Pasuruan memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya dan religi, wisata buatan, wisata agro dan wisata minat khusus, berupa destinasi wisata yang menarik kunjungan wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Salah satu destinasi wisata yang termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah wisata Sunrise Puncak Penanjakan Gunung Bromo di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Wisata alam yang terdapat di Kabupaten Pasuruan lainnya: Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam Banyu Biru, Danau Ranu Grati, Sumber Air Umbulan, Air Terjun Coban Cemoro Gading, Air Terjun Sumber Nyonya, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Coban Baung, Air Terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, Air Terjun Coban Waru, Pantai Pasir Panjang Kecamatan Lekok, Hutan Mangrove di Pantai Penunggul Kecamatan Nguling dan Hutan Mangrove di Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Kraton. Wisata alam dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Dengan adanya wisatawan, ada insentif untuk melindungi dan merawat area alami. Wisata alam sering kali mencakup program

pendidikan yang mengajarkan pengunjung tentang ekosistem, flora, dan fauna setempat. Ini membantu meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan dan pentingnya pelestarian alam.

Selain wista alam, wisata Budaya dan Religi juga terdapat di Kabupaten Pasuruan. Wisata budaya dan religi mencakup perjalanan ke tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat. Destinasi ini sering kali meliputi situs-situs keagamaan, festival budaya, dan tradisi lokal yang memberikan wawasan mendalam tentang kepercayaan dan praktik masyarakat setempat. Wisata budaya dan religi yang terdapat di Kabupaten Pasuruan antara lain Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Sepilar, Candi Makutoromo, Candi Jawi, Goa Jepang/Inna Tretes, Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Dewa Wisata Situs Purbakala Tambak Sari, Makam Mbah Bangil, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, Makam Mbah Segoropuro, Pertapaan Abiyoso, dan Pertapaan Indrokilo.

Meningkatnya mobilitas masyarakat dan pertumbuhan kelas menengah, mengakibatkan permintaan yang lebih besar untuk pengalaman rekreasi dan hiburan sehingga muncul wisata buatan. Wisata buatan menawarkan alternatif yang menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman baru. Wisata Buatan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan antara lain Saygon Water Park dan Taman Dayu Water Park. Sedangkan Wisata Agro antara lain Agrowisata Apel di Kecamatan Tutur, Agro Kopi di Kecamatan Tutur dan Kecamatan Prigen, Agro Bunga Krisan dan Paprika di Kecamatan Tutur, Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Tutur dan Kecamatan Grati, Agro Jamur di Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Purwodadi, Agro Durian di Kecamatan Lumbang, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutur dan Kecamatan Puspo, Agro Wisata Bhakti Alam di Kecamatan Tutur, Agro PG Kedawung di Kecamatan Grati, Agro Mangga di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorejo, Kebun Pak Budi di Kecamatan Purwosari, Kebun Bunga Sedap Malam di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Bangil.

Wisatawan modern cenderung mencari pengalaman yang berbeda dan autentik. Mereka ingin terlibat dalam kegiatan yang sesuai dengan

minat dan hobi mereka, sehingga wisata minat khusus menjadi pilihan yang menarik. Wisata Minat Khusus yang terdapat di Kabupaten Pasuruan antara lain Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Finna Golf & Country Club, Kaliandra, Bukit Flora dan Baung Camp serta Desa Wisata yang tersebar di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tutur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Grati, Kecamatan Gempol, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Winongan yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Desa-Desa Wisata dan kelompok-kelompok Sadar Wisata inilah yang akan terus berkembang dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat sehingga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja di pedesaan yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan secara bertahap akan mengembangkan branding wisata halal yang tidak hanya terkonsentrasi pada infrastruktur saja tetapi juga pengembangan kuliner, destinasi wisata, akomodasi, dan lainnya.

3. Potensi Industri

Potensi industri di Kabupaten Pasuruan meliputi industri besar, menengah, dan kecil. Industri besar sebagian besar berlokasi di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Bangil dan Kecamatan Kejayan. Industri kecil dan menengah berkembang di perdesaan, antara lain bergerak dalam bidang : makanan dan minuman, bordir, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), Konveksi, Meubel kayu, dan Logam.

Salah satu industri kecil menengah yang menjadi unggulan adalah kerajinan bordir, konveksi dan batik. Kerajinan bordir di Kecamatan Bangil telah dikenal memiliki keunggulan desain dan kualitas sehingga pesanan melebihi kapasitas yang ada, solusinya pengerjaan pesanan tersebut disebar ke kecamatan-kecamatan lain seperti Kecamatan Beji, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Winongan. Produk kerajinan bordir disamping untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal juga mampu menembus pasaran ekspor (Brunei, Malaysia,

Singapura dan Timur Tengah). Sedangkan industri konveksi paling banyak di Kecamatan Gempol dengan produk utamanya celana jeans, kaos dan celana sport. Sementara industri batik warna alam telah menunjukkan jati dirinya dan dikagumi oleh konsumen dalam dan luar negeri seperti Korea, Malaysia dan Australia. Sentra industri kayu, antara lain di Desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Desa Tambaksari Kecamatan Kraton, Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo, Desa Sungikulon dan Desa Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Winongan, Kecamatan Rejoso serta Kecamatan Kraton. Pengrajin kayu menghasilkan mainan anak-anak, setir mobil, kotak tissue, handle perseneling, dashboard, catur dan lain-lain. Selain kerajinan kayu di wilayah Kabupaten Pasuruan juga berkembang industri meubel.

Pemasaran kerajinan kayu dan meubel tersebut mencakup wilayah lokal dan luar negeri. Kerajinan perak dihasilkan dari sentra-sentra industri kerajinan perak meliputi Kecamatan Bangil dan Kecamatan Gempol. Produk-produk yang dihasilkan telah menembus pasar luar negeri, antara lain Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Sementara Industri Kecil spare part kendaraan bermotor telah berkembang di Kecamatan Winongan dengan pasar terbesarnya ke Malang dan Surabaya.

Selain itu di Kabupaten Pasuruan terdapat kawasan industri yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), suatu kawasan berikat yang menjadi tempat potensial untuk berinvestasi yang aman dan menjanjikan. Di luar kawasan industri PIER masih terdapat kawasan peruntukan industri yang memungkinkan pengembangan kawasan industri baru. Industri kecil makanan minuman yang rata-rata berbahan baku lokal tumbuh pesat di seluruh kecamatan. Sentra pia di Kecamatan Gempol terus tumbuh dan berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja karena bersifat padat karya. Pia telah dipasarkan ke luar daerah utamanya Malang dan Surabaya. Industri olahan apel, kopi dan susu tumbuh di Kecamatan Tutur. Industri aneka keripik di Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, Kecamatan Tosari dan Kecamatan Purwodadi. Industri olahan ikan berkembang di Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok, Kecamatan Grati, Kecamatan Bangil dan Kecamatan Beji.

Industri minuman pokak di Kecamatan Winongan dan sirup serta dodol salak di Kecamatan Gondangwetan.

Berkembangnya sentra-sentra industri potensial memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi sektor riil di daerah yang diharapkan akan mengentaskan kemiskinan. Berkembangnya industri kecil menengah ditopang oleh berkembangnya tempat-tempat pemasaran produk seperti Kawasan Masjid Cheng Hoo dan Pasar Buah Pandaan, Sentra Produk Unggulan di Bangil, Taman Dayu serta Sentra Kulakan produk UMKM/IKM di Kecamatan Gempol.

4. Potensi Pertanian dan Perikanan

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas. Komoditas tanaman pangan antara lain padi, jagung, kedelai, dan ubi jalar, sedangkan komoditas perkebunan antara lain alpukat, mangga gadung klonal 21, mangga garifta, duku, jeruk, pisang cavendish, kentang, cabai, bawang merah, paprika, wortel, mangga, durian, apel, tanaman hias, bunga sedap malam, anggrek dan krisan. Sedangkan komoditas perkebunan yang dikembangkan meliputi tebu, cengkeh, kelapa, tembakau dan kopi. Komoditas peternakan meliputi sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik, angsa, dan kelinci. Sebaran komoditas pangan dan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sebaran Komoditas Pangan dan Pertanian di Kabupaten Pasuruan

NO	KECAMATAN	KOMODITAS			
		TANAMAN PANGAN	HORTIKULUTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN
1	Purwodadi	Padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar	Bawang merah, cabai, durian, alpukat, jeruk	Kenanga, kopi, cengkeh, kapuk, kelapa	Sapi potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Itik, Angsa, Kelinci
2	Tutur	Jagung	B.merah, cabai, durian, apel , krisan, paprika, kentang	Kopi, cengkeh, kapuk	Sapi Perah, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Angsa, Kelinci
3	Puspo	Jagung	Durian, apel , kentang	Kopi, cengkeh	Sapi Perah, Kambing, Ayam Buras
4	Tosari	Jagung	Kentang		Sapi potong, Sapi Perah, Kambing,

NO	KECAMATAN	KOMODITAS			
		TANAMAN PANGAN	HORTIKULUTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN
					Domba, Ayam Buras
5	Lumbang	Padi, jagung, ubi kayu	Durian, kentang	Kopi, kapuk	Sapi potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Angsa
6	Pasrepan	Padi, jagung	Durian, jeruk	Kopi, tebu, kapuk, tembakau	Sapi potong, Sapi Perah, Kambing, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Angsa
7	Kejayan	Padi, jagung, kedelai		Tebu, tembakau	Sapi potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Itik, Angsa
8	Wonorejo	Padi, jagung	Pisang		Sapi potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam pedaging, Itik, Angsa, Puyuh, Kelinci
9	Purwosari	Padi, jagung, ubi kayu	B.merah, durian, alpukat	Kenanga, kopi, cengkeh, tebu, kapuk	Sapi potong, Sapi Perah, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Itik, Angsa, Puyuh
10	Prigen	Padi, jagung, ubi jalar	Durian, alpukat, anggrek, tanaman hias	Kopi, cengkeh	Sapi potong, Kambing, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging
11	Sukorejo	Padi, jagung	B.merah, mangga, anggrek	Tebu	Sapi potong, Kambing, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Itik
12	Pandaan	Padi, jagung, kedelai	B.merah		Sapi potong, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Itik, Angsa, Puyuh
13	Gempol	Padi, jagung		Tebu	Sapi potong, Kambing, Ayam Buras, Ayam petelur, Itik
14	Beji	Padi, jagung, kedelai		Tebu	Sapi potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Itik, Angsa
15	Bangil	Padi, jagung	Sdp malam		Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Itik
16	Rembang	Padi, jagung	Mangga, sdp malam	Tebu	Sapi potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging

NO	KECAMATAN	KOMODITAS			
		TANAMAN PANGAN	HORTIKULUTURA	PERKEBUNAN	PETERNAKAN
17	Kraton	Padi, jagung, kedelai	B.merah		Sapi potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Itik, Angsa
18	Pohjentrek	Padi, jagung	B.merah	Tebu	Ayam Buras, Itik
19	Gondangwetan	Padi, jagung	Pisang	Tebu	Sapi potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Itik
20	Rejoso	Padi, jagung	Pisang, duku	Tebu	Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Itik
21	Winongan	Padi, jagung	B.merah	Tebu, kapuk, kelapa, tembakau	Sapi potong, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Itik
22	Grati	Padi, jagung, ubi kayu	Manga	Tebu, kapuk	Sapi potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur, Ayam pedaging, Itik, Angsa
23	Lekok	Padi, jagung		Tebu	Sapi potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam pedaging
24	Nguling	Padi, jagung, ubi kayu		Tebu, kapuk	Sapi potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam petelur

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, 2025

Potensi lain yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan adalah perikanan. Komoditas perikanan di Kabupaten Pasuruan meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Potensi perikanan budidaya antara lain : udang, bandeng, patin, tombro, nila, gurami, lele, dan sebagainya. Sedangkan potensi perikanan tangkap antara lain : tongkol, teri nasi, cumi-cumi, kakap dan lain-lain. Sebaran potensi perikanan merata di seluruh kecamatan kecuali kecamatan Tutur, Puspo, Tosari dan Lumbang. Adapun tabel sebaran perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sebaran Perikanan di Kabupaten Pasuruan

NO	KECAMATAN	TANGKAP BUDIDAYA		BUDIDAYA		
		LAUT	UMUM	KOLAM	TAMBAK	JARING APUNG
1	Purwodadi			Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin, udang galah		
2	Pasrepan			Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin		
3	Kejayan			Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin		
4	Wonorejo			Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin		
5	Purwosari		Perikanan umum	Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami , Lele, Patin, udang galah		
6	Prigen			Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami , Lele, Patin, udang galah		
7	Sukorejo			Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami , Lele, Patin		
8	Pandaan			Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin, udang galah, Bawal		
9	Gempol			Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin, Bawal		
10	Beji		Perikanan umum	Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin		
11	Bangil	Ikan laut, kepiting, udang		Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin	Bandeng, Mujair, Udang Windu, Udang Putih, Udang Vanemei, Kepiting, Nila	
12	Rembang			Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami , Lele, Patin, udang galah, Bawal		
13	Kraton	Ikan laut, kepiting, udang		Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin	Bandeng, Mujair, Udang Windu, Udang Putih, Udang Vanemei, Kepiting, Rumput laut, Nila	
14	Pohjentrek			Mujair, Nila, Gurami , Lele, Patin		
15	Gondangwetan			Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila,		

NO	KECAMATAN	TANGKAP BUDIDAYA		BUDIDAYA		
		LAUT	UMUM	KOLAM	TAMBAK	JARING APUNG
				Gurami, Lele, Patin		
16	Rejoso	Ikan laut, kepiting, udang		Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin	Bandeng, Mujair, Udang Windu, Udang Putih, Udang Vanemei, Kepiting, Nila	
17	Winongan			Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin		
18	Grati		Perikanan umum	Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin, Bawal		nila, bandeng tawar, tombro, gurame, patin dan bawal
19	Lekok	Ikan laut, kepiting, udang		Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, Patin	Bandeng, Mujair, Udang Windu, Udang Putih, Udang Vanemei, Kepiting, Nila	
20	Nguling	Ikan laut, kepiting, udang		Gurami, Lele, Patin		

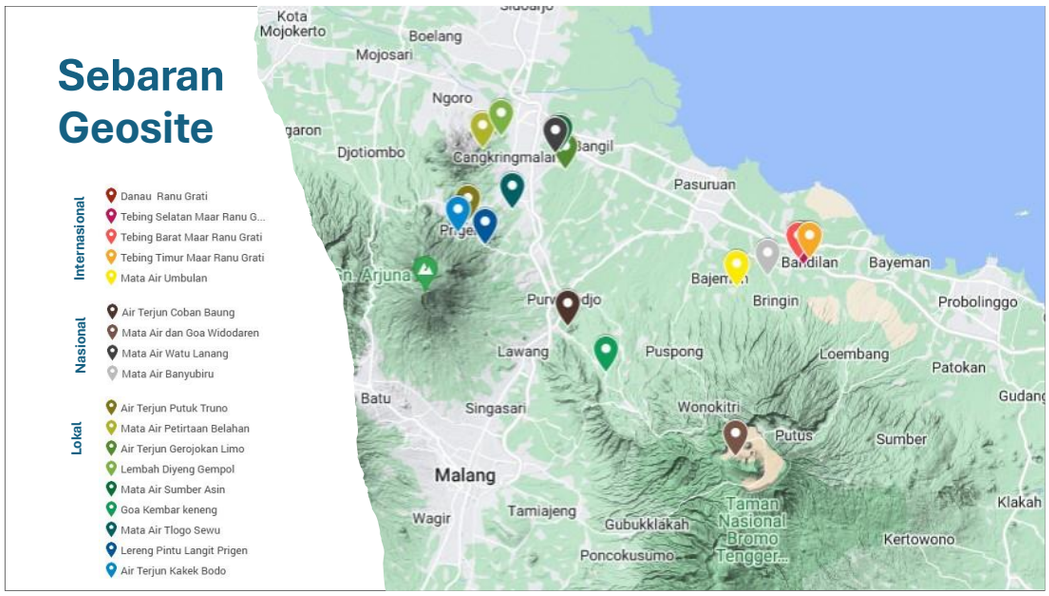
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, 2025

5. Potensi Keragaman Geologi

Keragaman geologi (Geodiversity) mencerminkan keberadaan, keadaan, dan penyebaran berbagai komponen geologi yang ada di suatu daerah. Komponen-komponen ini meliputi mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam. Keseluruhan unsur keragaman geologi tersebut menggambarkan proses evolusi geologi daerah tersebut dalam ruang dan waktu tertentu. Keragaman geologi ini menjadi kekayaan hakiki yang dimiliki oleh suatu daerah.

Berdasarkan hasil kajian Geoheritage (warisan geologi) Tahun 2024 teridentifikasi beberapa keragaman geologi. Adapun hasil geodiversity tersebut yaitu: 5 (lima) Geoheritage internasional (Mata Air Artesis Umbulan, Danau Maar Ranu Grati, Tebing Barat Maar Ranu Grati, Tebing Timur Maar Ranu Grati, Tebing Selatan Maar Ranu Grati), 4 (empat) Geoheritage Nasional (Mata Air Artesis Banyubiru, Air Terjun Coban Baung, Mata Air Watulanag, Mata Air dan Goa Widodaren), dan 9 (sembilan) Geoheritage Lokal (Mata Air Petirtaan Belahan, Air Terjun Gerojokan Limo, Mata Air Artesis Telogo Sewu, Air Terjun Kakek Bodo, Air Terjun Putuk Truno, Lereng Pintu Langit

Prigen, Mata Air Sumberasin, Goa Kembar Kaneng, Brown Canyon Gempol).



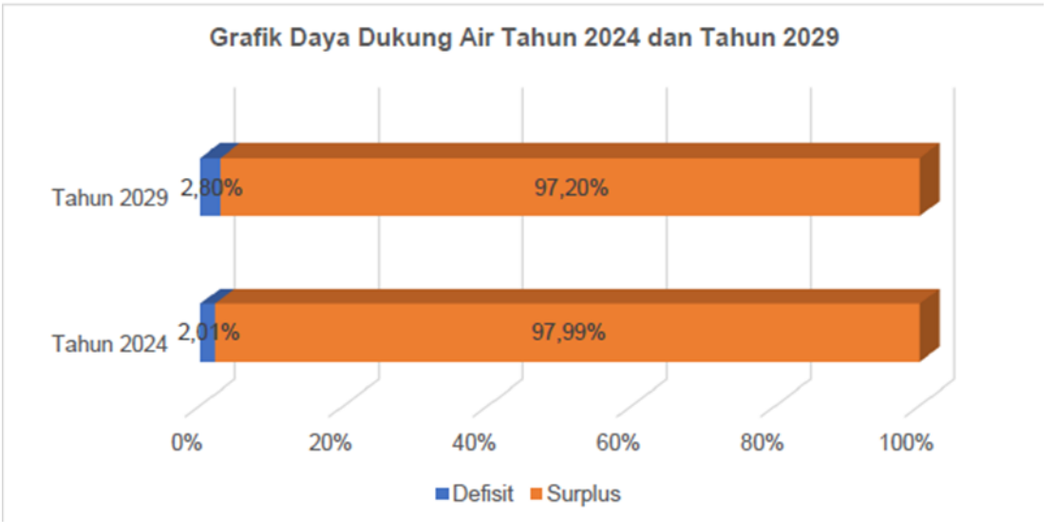
Gambar 2.4-a Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan
Sumber : Kajian Geoheritage Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 kondisi daya dukung air tanah Kabupaten Pasuruan dilakukan secara spasial dengan menggunakan *system grid*. Gambar berikut menunjukkan kondisi ketersediaan air berdasarkan proporsi surplus dan defisit. Pada tahun 2024, mayoritas kebutuhan air masih dapat terpenuhi dengan baik yang ditunjukkan oleh 97,99% berada dalam kondisi surplus. Namun, terdapat sedikit kekurangan yang perlu diperhatikan yakni 2,01% dalam kondisi defisit. Memasuki tahun 2029, terjadi peningkatan defisit menjadi 2,80%, dengan surplus air turun menjadi 97,20%. Meskipun angka defisit ini masih relatif kecil, tren peningkatan defisit dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan adanya potensi penurunan daya dukung air di masa mendatang. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan permintaan air akibat pertumbuhan penduduk atau perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya air. Peningkatan defisit ini perlu diantisipasi dengan kebijakan pengelolaan air yang lebih efektif

untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air di masa depan sebagaimana pada gambar 2.5.



Gambar 2.5 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Apabila ditinjau di tingkat masing-masing kecamatan yang ada, tabel 2.5 merupakan kondisi daya dukung air Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 dan Proyeksi tahun 2029.

Tabel 2.5
Kondisi Daya Dukung dan Proyeksi Daya Dukung Air
Kabupaten Pasuruan

KECAMATAN	DD Air 2024 (Ha)			Proyeksi DD Air 2029 (Ha)		
	Defisit	Surplus	Total	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Bangil	94,18	4.318,66	4.412,84	99,40	4.313,45	4.412,84
Kecamatan Beji	97,26	3.830,04	3.927,30	110,02	3.817,28	3.927,30
Kecamatan Gempol	25,55	6.268,70	6.294,25	28,46	6.265,79	6.294,25
Kecamatan Gondangwetan	18,78	2.684,38	2.703,16	21,85	2.681,31	2.703,16
Kecamatan Grati	31,12	4.644,38	4.675,51	48,65	4.626,86	4.575,51
Kecamatan Kejayan	333,67	7.629,89	7.963,56	348,91	7.614,65	7.963,56
Kecamatan Kraton	58,23	5.866,30	5.924,53	62,43	5.862,11	5.924,53
Kecamatan Lekok	561,22	4.332,70	4.893,92	592,22	4.301,70	4.893,92
Kecamatan Lumbang	560,17	11.721,06	12.281,23	583,61	11.697,62	12.281,23
Kecamatan Nguling	640,18	3.885,68	4.525,86	647,16	3.878,70	4.525,86
Kecamatan Pandaan	0,32	4.340,23	4.340,55	1,23	4.339,33	4.340,55
Kecamatan Pasrepan	278,58	8.285,69	8.564,27	286,06	8.278,21	8.564,27
Kecamatan Pohjentrek	43,83	1.197,23	1.241,06	44,67	1.196,38	1.241,06
Kecamatan Prigen	0,00	13.059,97	1.3059,97	15,78	13.044,19	13.059,97
Kecamatan Purwodadi	221,14	8.561,24	8.782,38	233,35	8.549,03	8.782,38
Kecamatan Purwosari	181,41	7.754,05	7.935,46	197,56	7.737,90	7.935,46
Kecamatan	81,76	7.085,23	7.166,99	98,77	7.068,21	7.166.99

KECAMATAN	DD Air 2024 (Ha)			Proyeksi DD Air 2029 (Ha)		
	Defisit	Surplus	Total	Defisit	Surplus	Total
Puspo						
Kecamatan Rejoso	80,26	3.445,04	3.525,30	85,77	3.440,23	3.525,30
Kecamatan Rembang	18,95	5.628,60	5.647,55	786,53	4.861,01	5.647,55
Kecamatan Sukorejo	0,00	5.747,31	5.747,32	71,17	5.676,15	5.747,32
Kecamatan Tosari	160,77	8.079,51	8.240,28	183,83	8.056,34	8.240,28
Kecamatan Tutur	378,56	8.356,33	8.734,89	402,24	8.332,65	8.734,89
Kecamatan Winongan	55,26	4.223,56	4.278,82	62,13	4.216,68	4.278,82
Kecamatan Wonorejo	5,37	4.459,98	4.465,35	11,08	4.454,28	4.465,35
Total	**3.926,56**	**14.5405,77**	**149.332,33**	**5.022,27**	**144.310,06**	**149.332,33**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Sedangkan analisis dan target proyeksi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup air tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

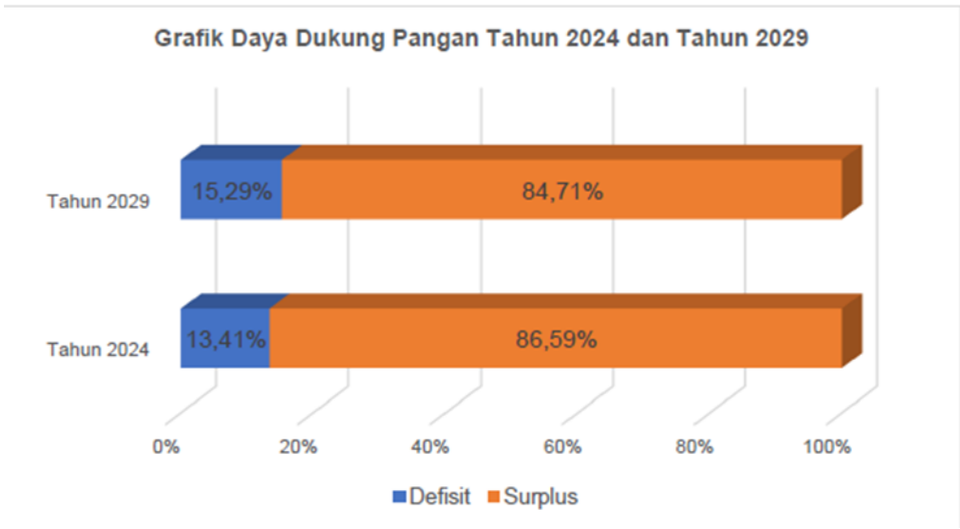
Tabel 2.6
Analisis dan Target Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Air Tahun 2025-2029

Kondisi Tahun 2023	Isu PB Terkait	Analisis Proyeksi					Target Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Daya dukung pangan terdiri dari 97,27% surplus dan 2,63% defisit	Kerawanan Pangan	Luas wilayah defisit 2,78%	Luas wilayah defisit 2,92%	Luas wilayah defisit 3,07%	Luas wilayah defisit 3,21%	Luas wilayah defisit 3,36%	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

B. Daya Dukung Pangan

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Pasuruan di tahun 2024 terdiri atas 86,59% surplus yang yang berarti pasokan pangan lebih besar daripada kebutuhan. Hanya 13,41% yang mengalami defisit, menunjukkan sebagian kecil wilayah atau kelompok yang tidak terpenuhi kebutuhan pangannya sebagaimana pada gambar 2.6.



Gambar 2.6 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Proyeksi pada tahun 2029 menunjukkan sedikit penurunan dalam persentase surplus pangan menjadi 84,71%, dengan peningkatan defisit menjadi 15,29%. Ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas kebutuhan pangan masih terpenuhi, ada peningkatan kekurangan (defisit) di beberapa area dalam lima tahun tersebut. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan bahwa meskipun daya dukung pangan masih tetap dalam kondisi baik (mayoritas surplus), ada indikasi penurunan kecil yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan populasi, perubahan iklim, atau masalah produksi dan distribusi pangan. Apabila ditinjau di tingkat masing-masing Kecamatan yang ada, table 2.6 merupakan kondisi daya dukung pangan Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.6
Daya Dukung Pangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2029

Kecamatan	DD Pangan 2024 (Ha)			Proyeksi DD Pangan 2029 (Ha)		
	Defisit	Surplus	Total	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Bangil	781,18	3.571,99	4.353,17	871,65	3.481,52	4.353,17
Kecamatan Beji	1.308,89	2.618,41	3.927,30	1.346,68	2.580,62	3.927,30
Kecamatan Gempol	2.427,36	3.866,90	6.294,25	2.530,57	3.763,69	6.294,25
Kecamatan Gondangwetan	518,56	2.184,60	2.703,16	535,69	2.167,47	2.703,16
Kecamatan Grati	820,71	3.854,80	4.675,51	893,52	3.781,99	4.675,51
Kecamatan Kejayan	907,57	7.055,99	7.963,56	1.047,02	6.916,54	7.963,56
Kecamatan Kraton	882,20	4.938,75	5.820,95	978,49	4.842,46	5.820,95
Kecamatan Lekok	690,34	4.203,58	4.893,92	750,99	4.142,93	4.893,92

Kecamatan	DD Pangan 2024 (Ha)			Proyeksi DD Pangan 2029 (Ha)		
	Defisit	Surplus	Total	Defisit	Surplus	Total
Kecamatan Lumbang	286,20	11.995,03	12.281,23	685,44	11.595,79	12.281,23
Kecamatan Nguling	736,44	3.789,60	4.526,04	794,59	3.731,45	4.526,04
Kecamatan Pandaan	1.367,64	2.972,92	4.340,55	1.417,07	2.923,49	4.340,55
Kecamatan Pasrepan	518,45	8.045,82	8.564,27	600,72	7.963,55	8.564,27
Kecamatan Pohjentrek	269,56	971,49	1.241,06	278,51	962,55	1.241,06
Kecamatan Prigen	1.266,35	11.793,62	13.059,97	1.547,67	11.512,30	13.059,97
Kecamatan Purwodadi	1.021,74	7.760,64	8.782,38	1.167,49	7.614,89	8.782,38
Kecamatan Purwosari	1.290,14	6.645,32	7.935,46	1.376,41	6.559,05	7.935,46
Kecamatan Puspo	373,93	6.793,05	7.166,99	614,62	6.552,37	7.166,99
Kecamatan Rejoso	443,12	3.078,78	3.521,91	510,61	3.001,30	3.521,91
Kecamatan Rembang	917,12	4.730,43	5.647,55	959,75	4.687,80	5.647,55
Kecamatan Sukorejo	1.105,67	4.641,65	5.747,32	1.156,86	4.590,46	5.747,32
Kecamatan Tosari	128,32	8.111,96	8.240,28	409,56	7.830,72	8.240,28
Kecamatan Tutur	861,24	7.873,65	8.734,89	1.150,67	7.584,22	8.734,89
Kecamatan Winongan	397,04	3.881,77	4.278,82	465,59	3.813,22	4.278,82
Kecamatan Wonorejo	676,21	3.789,15	4.465,35	724,71	3.740,65	4.465,35
Grand Total	**19995,98**	**129169,89**	**149165,87**	**22814,86**	**126351,01**	**149165,87**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 2024

Sedangkan analisis dan target proyeksi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pangan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Analisis dan Target Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Pangan Tahun 2025-2029

Kondisi Tahun 2023	Isu PB Terkait	Analisis Proyeksi					Target Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Daya dukung pangan terdiri dari 86,59% surplus dan 13,41% defisit	Kerawanan Pangan	Luas wilayah defisit 13,78%	Luas wilayah defisit 14,16%	Luas wilayah defisit 14,54%	Luas wilayah defisit 14,92%	Luas wilayah defisit 15,29%	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus	Surplus

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

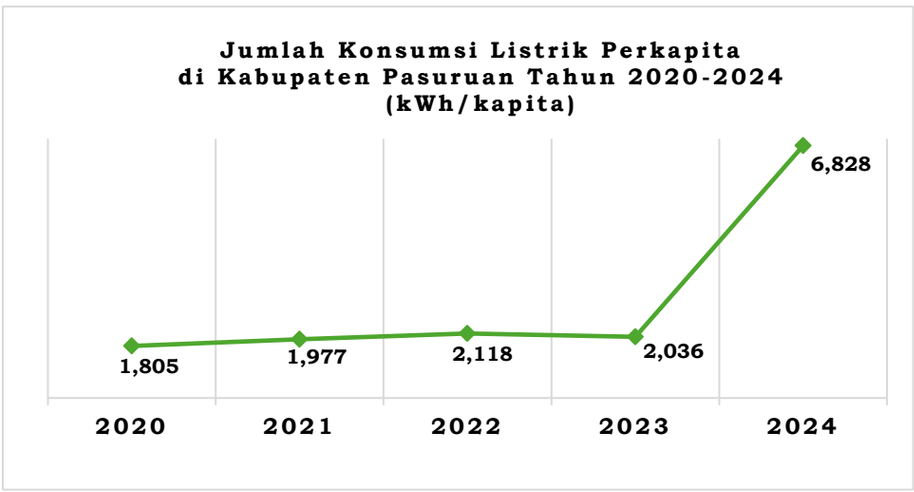
4) Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

A. Ketahanan Energi

Konsumsi Listrik per Kapita

Data demografi kependudukan Kabupaten Pasuruan juga digunakan untuk melihat kebutuhan ketahanan energi, salah

satunya direpresentasikan oleh konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita). Konsumsi listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi, berdasarkan data PLN diperoleh komsumsi listrik perkapita (kWh/kapita) tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Lonjakan drastis di tahun 2024, mengindikasikan adanya percepatan aktivitas ekonomi dan industrialisasi (sektor usaha baru bertambah). Fenomena ini mendorong kebutuhan untuk memperkuat: 1) infrastruktur energi melalui perluasan jaringan listrik,pembangunan gardu induk baru, dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik; 2) memperluas diversifikasi sumber energi dengan mengembangkan energi terbarukan untuk megurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil, serta 3) meningkatkan efisiensi pemakaian listrik guna memastikan ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan di masa depan.



Gambar 2.7 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, 2025

B. Ketahanan Air

Kabupaten Pasuruan memiliki sumber daya air yang melimpah, termasuk air permukaan dan air tanah. Selain sistem aliran sungai yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, terdapat juga danau atau waduk alami yang cukup besar, serta beberapa mata air. Potensi air tanah akan dijelaskan melalui gambaran kondisi hidrogeologi. Kondisi

hidrologi di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

Air Permukaan

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, selain 7 (tujuh) sungai besar yang telah disebutkan sebelumnya, juga terdapat beberapa sungai-sungai kecil. Sungai-sungai (air permukaan) tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dan perikanan, serta kebutuhan hidup lainnya. Selain potensi sungai, terdapat juga danau dan sejumlah mata air. Secara umum sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan sungai yang tidak terlalu panjang, di bagian hulunya memiliki kemiringan dasar sungai yang terjadi, dan ada beberapa sungai yang merupakan sungai musiman sehingga pada musim kemarau debit air tidak teratur. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Sungai-Sungai di Kabupaten Pasuruan

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Sungai Kambeng	7,22
2	Sungai Kedunglarangan	13,99
3	Sungai Masangan	5,95
4	Sungai Raci	6,87
5	Sungai Gerongan	6.22
6	Sungai Pilang	9,82
7	Sungai Welang	40,09
8	Sungai Gembong	8,57
9	Sungai Petung	14,34
10	Sungai Rejoso	15,72
11	Sungai Lawean	30,71
12	Sungai Kramat	13,61
13	Sungai Pakelan	45,60
14	Sungai Rondoningo	24,16
15	Sungai Pancarglagas	16,06

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2020

Danau

Danau yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan adalah Danau Ranu Grati. Secara geografis, Danau Ranu Grati berada di Kecamatan Grati yang merupakan danau di dataran rendah Jawa Timur dengan volume efektif sebesar 5.013 m^3 dan volume maksimum sebesar 5.217 m^3, serta mampu mengeluarkan debit maksimum 980 l/det dan debit

minimum 463 l/det. Danau Ranu Grati merupakan danau alami yang terbentuk karena aktivitas vulkanik gunung berapi. Bentuk menyerupai corong dengan dasar danau yang dalam dan mengandung sedimen mineral jadi bukti penguat status Danau Ranu Grati sebagai danau vulkanik. Selain rekreasi, danau ini juga banyak untuk keperluan irigasi.

Sumber Air

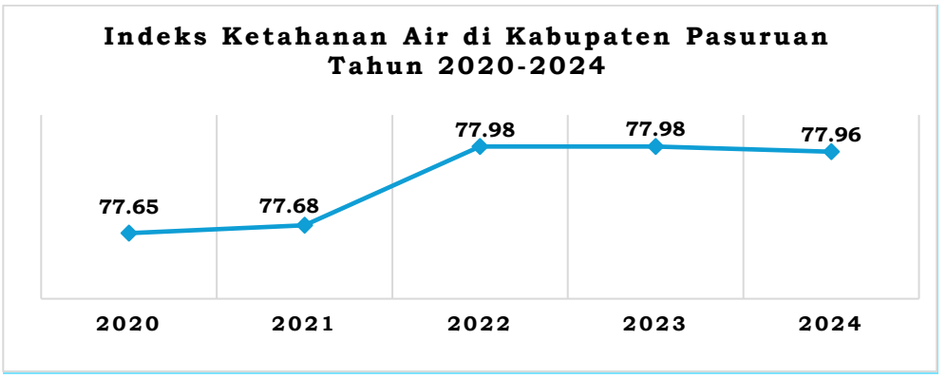
Sumber air terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya sekitar 4.000 l/det dan Sumber Air Banyu Biru yang terletak di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 225 l/det. Jumlah sumber air di Kabupaten Pasuruan disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Jumlah Sumber Air Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	Jumlah Sumber Air
1	Prigen	59
2	Pandaan	10
3	Gempol	12
4	Beji	22
5	Bangil	3
6	Rembang	14
7	Sukorejo	13
8	Purwoasri	24
9	Purwodadi	29
10	Kraton	1
11	Tutur	7
	Jumlah	**194**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Guna mencapai kebutuhan air yang berkelanjutan, dibutuhkan kondisi ketahanan air dengan terpenuhinya kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Ketahanan air sangat penting karena kondisi air yang aman bermanfaat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.



Gambar 2.8 Indeks Ketahanan Air di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas SDA, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan gambar 2.8 dapat diketahui capaian Indeks Ketahanan Air Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 secara umum mengalami peningkatan, namun ada sedikit penurunan di tahun 2024 yaitu menjadi 77,96. Kondisi penurunan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikut data debit sumber air dari 23 sumber air dan 2 sumur bor untuk air minum yang dikelola PDAM:

Tabel 2.8
Data Debit Air di Kabupaten Pasuruan

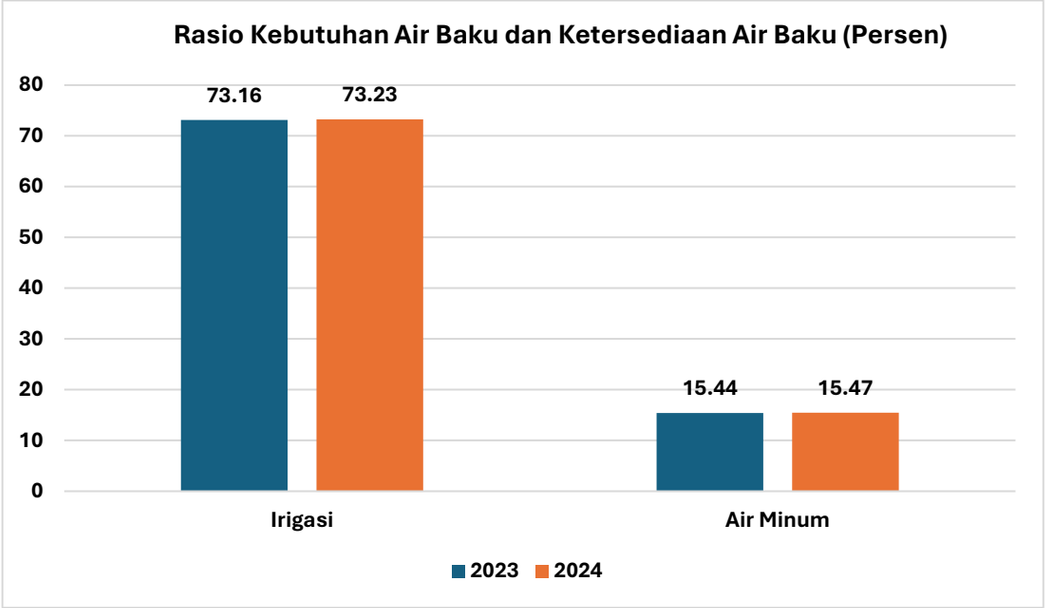
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
339 ltr/dtk	330 ltr/dtk	369,2 ltr/dtk	361,7 ltr/dtk	354,2 ltr/dtk

Sumber : PDAM Giri Nawa Tirta Kabupaten Pasuruan 2025

Kondisi tersebut akan terus diperbaiki dengan cara menambah volume ketersediaan air terutama tampungan air, membangun embung-embung berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, serta memperbaiki kondisi mata air yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui upaya konservasi dan rehabilitasi.

Rasio Kebutuhan Air Baku dan Ketersediaan Air Baku

Air baku terbagi menjadi dua peruntukan yaitu irigasi dan air minum. Rasio kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku untuk irigasi dan air minum tahun 2023-2024 mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa air baku di Kabupaten Pasuruan dalam kondisi surplus (ketersediaan lebih besar dari pada kebutuhan).



Gambar 2.8-a Rasio Kebutuhan dan Ketersediaan Air Baku Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2024
Sumber: Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2025

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di wilayah perkotaan (terlayani oleh PDAM) yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

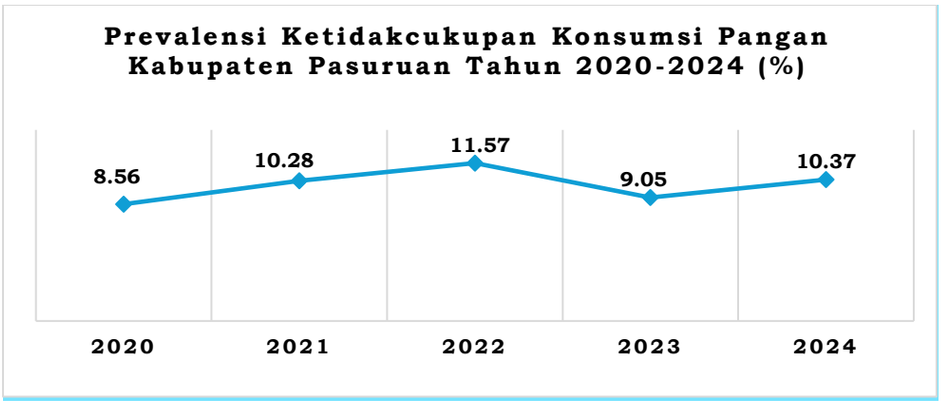
1. Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
2. Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*);
3. Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
4. Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Persentase jumlah rumah tangga perkotaan yang mendapatkan akses terhadap air siap minum perpipaan tahun 2023 sebesar 7,10% (dari 425.662 rumah tangga perkotaan) dan tahun 2024 sebesar 7,53% (dari 429.303 rumah tangga perkotaan) atau mengalami peningkatan.

C. Kemandirian Pangan

Berdasarkan potensi tersebut diharapkan Kabupaten Pasuruan dapat mewujudkan tujuan ke 2 SDGs yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero*

Hunger) yakni untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur ketercapaian tujuan tersebut adalah prevalensi ketidakcukupan pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU).* Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam persentase. Adapun Kondisi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada gambar 2.9.



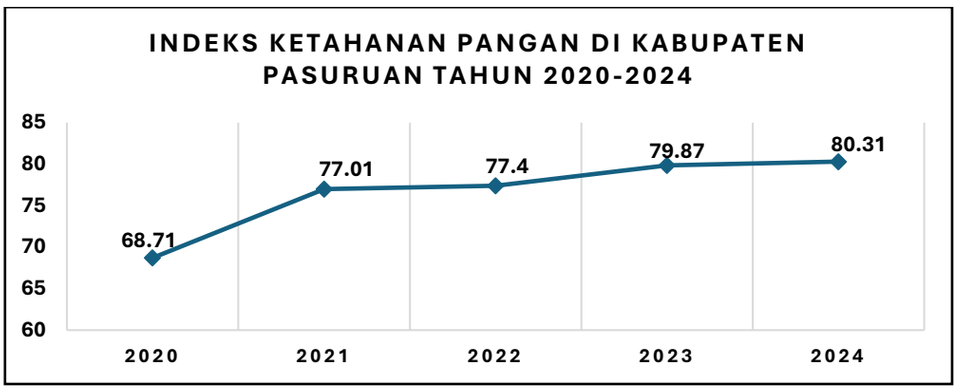
Gambar 2.9 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Informasi tentang prevalensi ketidakcukupan pangan bermanfaat untuk pemerintah. Yakni dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pangan, serta meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan secara umum menunjukkan tren peningkatan pada periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Keberhasilan Kabupaten Pasuruan dalam penyedian pangan (beras, jagung, daging, telur dan ikan) sudah diatas nilai kebutuhan. Produksi bahan pangan lebih besar dari peningkatan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan, yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan sudah terlaksana dengan baik.

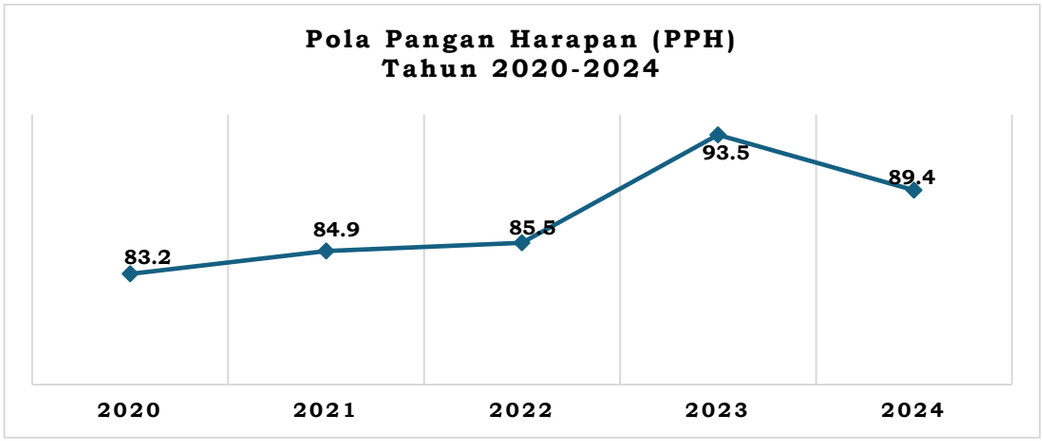


Gambar 2.10. Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2025

Beberapa masalah yang perlu diantisipasi untuk meningkatkan ketahanan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada produksi pertanian secara keseluruhan, serta anomali iklim yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian. Pada masa mendatang, diperlukan upaya untuk mendorong kemandirian pangan

Pola Pangan Harapan

Pola pangan harapan mencerminkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi baik dari segi jumlah maupun mutu. Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.10-a. Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

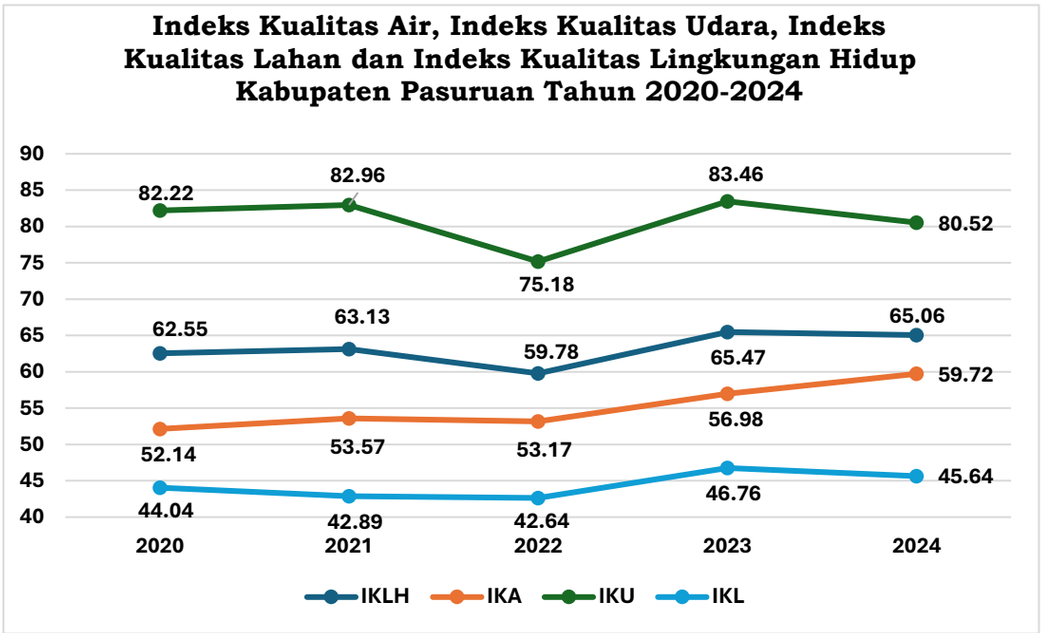
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar 2.10-a, capaian Pola Pangan Haran (PPH) di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Mulai tahun 2023, nilai Pola Pangan Harapan masuk dalam kategori “tinggi” (skor>85). Kondisi ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap hal ini adalah pelaksanaan pelatihan pengolahan pangan non beras dan non terigu (pengolahan pangan alternatif) melalui Bimtek Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Penggunaan lahan di suatu daerah memiliki dampak signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Deforestasi, urbanisasi dan pertanian intensif dapat mengurangi tutupan vegetasi, menyebabkan polusi dan degradasi tanah, serta mengurangi keanekaragaman hayati, yang semuanya menurunkan kualitas lingkungan. Sebaliknya, praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan seperti pertanian organik dan rehabilitasi lahan terdegradasi dapat meningkatkan IKLH dengan menjaga kesuburan tanah, melindungi sumber daya air, dan meningkatkan keanekaragaman hayati, karena IKLH adalah nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan.



Gambar 2.11 Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan Gambar 2.11 capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Terjadi penurunan Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024, hal ini disebabkan karena adanya penurunan kualitas udara pada daerah padat transportasi dengan sumber pencemar tertinggi dari kendaraan bermotor dan kurangnya

tegakan pohon (titik sampling exit tol Grati, jalur lalu lintas Pasuruan Probolinggo, Jalur lalu lintas Pasuruan Malang, Jalur lalu lintas Pasuruan Surabaya) sehingga selanjutnya perlu dilakukan upaya berupa penanaman pohon diarea jalur padat transportasi dan kebijakan pemenuhan kualitas emisi kendaraan bermotor.

Penurunan kualitas lingkungan hidup juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terjadinya pembuangan air limbah domestik dan/atau air limbah industri yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan hidup atau tanpa dilakukan pengolahan di IPAL, tidak dilengkapinya alat pengendali udara pada sumber-sumber pencemar udara dari kegiatan industri, terjadinya alih fungsi lahan yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, belum terpenuhinya persentase RTH wilayah perkotaan dan berkurangnya tutupan lahan.

Keterkaitan ketersediaan RTH di wilayah perkotaan maupun peningkatan tutupan lahan di wilayah Kabupaten Pasuruan signifikan dalam peningkatan kualitas udara dengan kemampuan penyerapan polutan udara (debu, CO, SO2, NO2). Sebaran RTH berada di wilayah perkotaan pada masing-masing kecamatan (24 Kecamatan), Upaya yang dilakukan untuk optimalisasi RTH Adalah sebagai berikut:

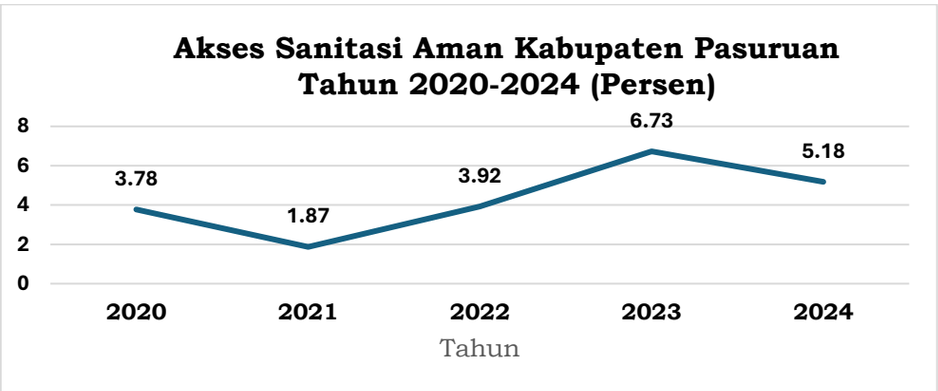
(1) Peningkatan ketersediaan RTH di wilayah perkotaan dengan membangun titik lokasi RTH baru;
(2) Optimalisasi pemanfaatan RTH pada sempadan Sungai, sempadan jalan, sempadan SUTTET, sempadan rel, sempadan danau;
(3) Optimalisasi program PJLH (Penyedia Jasa Lingkungan Hidup) terkait penyediaan lahan konservasi tanaman keras (tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan) di luar Kawasan hutan.

Indeks kualitas lahan juga mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dikarenakan terdapat kesalahan teknis penetapan deliniasi tutupan vegetasi yang diajukan pada aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup, dimana pada verifikasi tahun 2023 deliniasi tutupan lahan telah diverifikasi dan termasuk dalam perhitungan Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023, yang menunjukan peningkatan signifikan nilai IKL dibandingkan tahun 2022. Tetapi pada tahun 2024 saat dilakukan verifikasi ulang, sebagian deliniasi direject oleh verifikator dikarenakan terdapat tumpang tindih delineasi

dan titik kordinat dalam satu wilayah, sehingga luasan tutupan vegetasi berkurang dan IKL tahun 2024 mengalami penurunan akibat penyesuaian data deliniasi dimaksud. Selanjutnya perlu adanya upaya peningkatan akurasi dalam inventerisasi dan deliniasi tutupan lahan.

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses Sanitasi Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Gambar 2.12 menunjukkan capaian akses sanitasi aman di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam pada tahun 2021. Capaian angka capaian sanitasi aman Kabupaten Pasuruan masih sangat rendah sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik. Pemerintah daerah perlu mempercepat penyediaan IPLT, pendataan terintegrasi, serta penguatan regulasi sanitasi berkelanjutan.



Gambar 2.12 Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

C. Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Produksi sampah di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dibuktikan dengan semakin meningginya timbulan sampah hingga membentuk seperti gunungan. Dengan potensi timbulan sampah Kabupaten Pasuruan yang cukup besar yaitu 1.183 ton/hari dibandingkan dengan kapasitas TPA Wonokerto yang hanya 180 ton/hari

direncanakan untuk 10 tahun, maka perlu ditingkatkan upaya penanganan sampah di fasilitas pengolahan sampah di level tengah. Oleh karena itu perlu pengolahan sampah lebih awal sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Rata-rata sampah yang tertangani merupakan sampah anorganik, karena sampah organik telah terpilah-pilah. Untuk mengatasi masalah persampahan, tahun 2020 Kabupaten Pasuruan memiliki 45 tempat pengelolaan sampah reduse, reuse, recycle (TPS3R) yang tersebar di seluruh kecamatan, bahkan pada tahun menambah 18 TPS lagi.

Tabel 2.9
Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	1,7	3,3	4,2	5,3	6,2
Jumlah sampah terolah (Ton/Tahun)	6.924	13.996	17.564	22.354	26.760
Jumlah timbulan sampah (Ton/Tahun)	416.608	419.669	422.729	425.790	428.850

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Untuk itu peran para pihak sangat penting karena tidak memungkinkan jika potensi timbulan sampah tersebut hanya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup. Aspek yang diperlukan untuk keberhasilan para pihak dalam pengelolaan sampah antara lain adalah:

(1) Regulasi : peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah mulai tingkat pusat hingga desa/kelurahan, bahkan kawasan dan sumber sampah.
(2) Kelembagaan : Sumber daya Manusia yang tergabung dalam Lembaga Pengelola sampah, yang berperan sebagai operator di level tengah perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensinya.
(3) Pembiayaan : Diperlukan pembiaayan yang memadai guna melaksanakan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah.
(4) Peran serta masyarakat : Kewajiban masyarakat adalah mengurangi sampah, memilah sampah dari sumber dan

mengolahnya. Jika tidak dimungkinkan untuk mengolah di sumber, maka wajib mengikuti pelayanan persampahan dengan membayar iuran yang telah ditetapkan.

(5) Sarana prasarana dan teknologi ramah lingkungan : sarana prasarana minimal yang diperlukan adalah untuk pemilahan sampah dari sumber, kendaraan pengumpul sampah, infrastruktur/fasilitas pengolah sampah yang dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan.

(6) *Offtaker* : kepastian pemanfaatan hasil produk akhir pengelolaan sampah dalam rangka melaksanakan sirkular ekonomi untuk keberlanjutan usaha pelayanan pengelolaan sampah.

Jika salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi, maka pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan optimal.

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Salah satu upaya pengolahan sampah melalui pengolahan tingkat rumah tangga, dilakukan dengan mendorong warga terlibat dalam pemilahan sampah rumah tangga maupun Pembangunan TPS3R di sejumlah desa maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kecamatan. Keberhasilan upaya ini dapat dilihat dari nilai proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah yang mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022, tetapi tahun 2023 hingga 2024 mengalami peningkatan pada rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah sebagaimana pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan sampah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	8,31	13,34	13,85	15	15,60
Jumlah rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (Rumah Tangga)	33.875	54.779	57.288	62.494	65.461
Jumlah rumah tangga (Rumah Tangga)	407.640	410.635	413.629	416.624	419.619

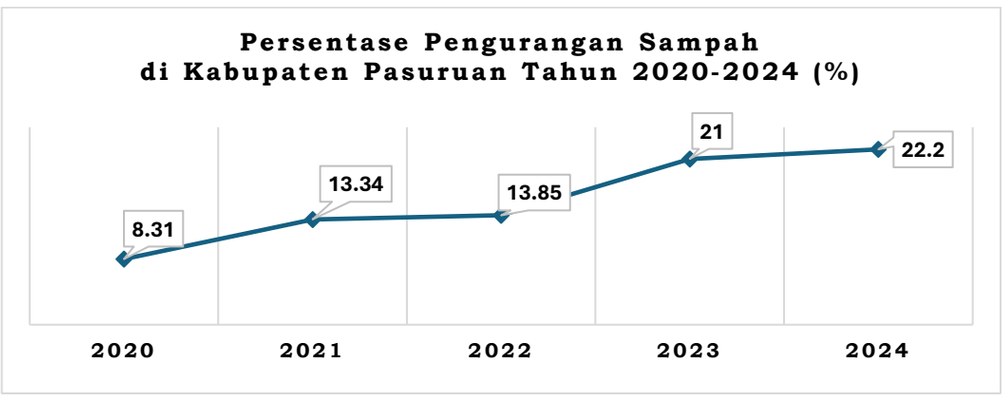
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Hal-hal yang menghambat layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Pasuruan antara lain :

1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah;
2) Kurangnya fasilitas layanan pengumpulan sampah seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS) serta tempat pengelolaan sampah (TPS3R);
3) Terbatasnya penganggaran dan sumber daya manusia untuk operasional penngumpulan sampah.

E. Persentase Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali sampah dan mendaur ulang sampah. Komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah dilihat melalui indikator persentase pengurangan sampah. Indikator ini merupakan hasil perbandingan jumlah sampah yang dikurangi dengan jumlah sampah. Dari gambar di bawah menunjukan selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Persentase Pengurangan Sampah di Kabupaten Pasuruan terus mengalami peningkatan setiap tahun sebagaimana pada gambar 2.13.



Gambar 2.13 Persentase Pengurangan Sampah
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

dalam Pasal 14, capaian Pengurangan Sampah diukur berdasarkan indikator:

(1) Penurunan jumlah timbulan sampah per kapita;
(2) Peningkatan jumlah timbulan sampah yang terdaurulang di sumber;
(3) Peningkatan jumlah sampah yang termanfaatkan kembali di sumber.

Terdapat kesulitan dalam melaksanakan pengukuran sesuai indikator tersebut di atas dikarenakan dilakukan pada sumber, yaitu setiap rumah tangga, kawasan, pelaku usaha/kegiatan yang jumlahnya tidak sebanding dengan SDM yang dimiliki.

Oleh karena itu yang dapat dilaksanakan adalah pengukuran capaian penanganan sampah yang diukur berdasarkan indikator sebagai berikut:

(1) Penurunan jumlah sampah yang terangkut dan terproses di TPA;
(2) Peningkatan jumlah sampah yang terangkut ke fasilitas pengolahan sampah untuk diolah menjadi bahan baku dan termanfaatkan menjadi sumber energi.

6) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kawasan rawan bencana adalah wilayah atau area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi untuk mengalami berbagai jenis bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan yang memiliki keberadaan gunung berapi, adanya dataran rendah dan kondisi dataran tinggi yang mulai terdegradasi menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa potensi bencana alam yaitu:

1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

   Kawasan Gunung Bromo seluas 1.320 ha dan daerah waspada seluas 751 Ha yang berada di Desa Ngadirejo, Mororejo, Wonokitri dan Desa Kedawung di Kecamatan Tosari dan Gunung Welirang, sedangkan kawasan rawan bencana gunung berapi di Gunung Welirang seluas 1.368 Ha dan waspada seluas 809 Ha yang meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, Desa Cendono, Desa Sumberejo dan Desa Tambaksari di Kecamatan Purwosari.
2. Kawasan rawan longsor/kerawanan gerakan tanah

Potensi kawasan longsor di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi seluas 37.626,4 ha, yaitu di wilayah dengan kelerengan > 40%. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Tutur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Prigen.

3. Kawasan rawan banjir

   Potensi kawasan rawan banjir di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi seluas 11.948,15 ha, berada di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Winongan, karena merupakan daerah hilir yang dipengaruhi adanya daerah aliran sungai. Kondisi banjir ini diakibatkan adanya hujan di hulu sungai cukup tinggi, sehingga mengakibatkan air meluap, serta beberapa kecamatan lagi yaitu Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton merupakan daerah rawan banjir yang biasanya disebabkan adanya rob.

4. Kawasan rawan bahaya angin puyuh/puting beliung

   Berpotensi di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo, serta kemungkinan beberapa kecamatan lain mengingat terjadinya anomali iklim pada beberapa tahun terakhir.

5. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan

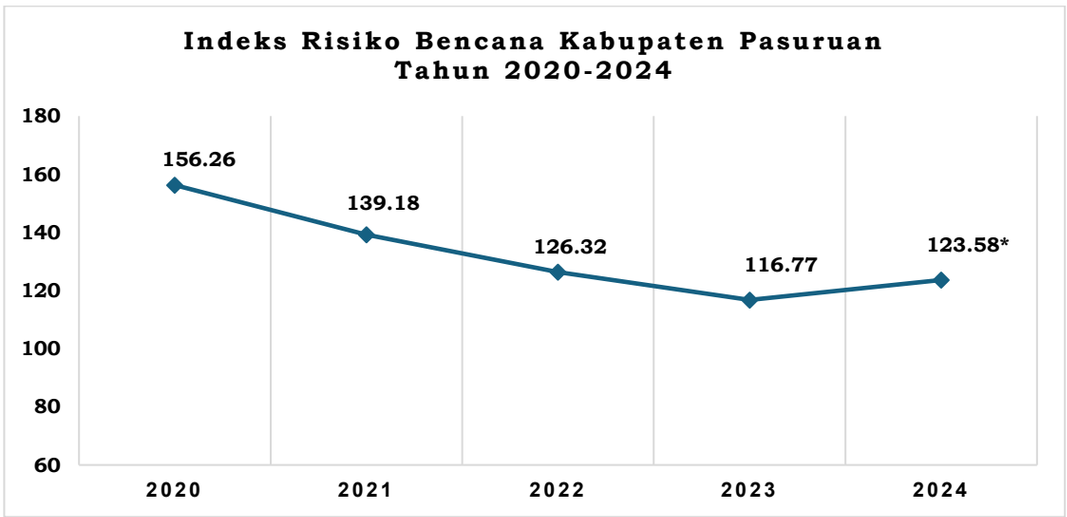
   Berpotensi terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan yang merupakan kawasan hutan dan semak belukar diantaranya beberapa yang merupakan Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi pengelolanya adalah Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, CA Gunung Abang, TWA Tretes, Kawasan Hutan/Pegunungan di R.Soeryo, Kawasan Pegunungan Arjuna Welirang dan Penanggungan (Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol).

6. Kekeringan

   Ancaman kekeringan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan terbagi atas 3 tingkatan, yaitu : a. Ancaman kekeringan tinggi, berpotensi terjadi di beberapa desa berikut ini : Kecamatan Lumbang (Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati, dan Desa

Watulumbung), Kecamatan Kejayan (Desa AmbalAmbil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron, dan Desa Benerwojo), Kecamatan Lekok (Desa Pasinan, Desa Wates, Desa Semedusari, dan Desa Branang), Kecamatan Winongan (Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo, dan Desa Sruwi), Kecamatan Puspo (Desa Palangsari, Desa Puspo, dan Desa Jimbaran), Kecamatan Gempol (Desa Bulusari), Kecamatan Grati (Desa Karanglo). b. Ancaman kekeringan sedang terjadi di Kecamatan Pasrepan (Desa Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang, Desa Tambakrejo). c. Ancaman kekeringan rendah terjadi di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang), dan Kecamatan Winongan (Desa Minggir).

Adanya potensi kebencanaan sebagaimana disebutkan di atas dipotret melalui Indeks Risiko Bencana (IRB) yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di Kabupaten Pasuruan. IRB adalah gabungan nilai indeks ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Hasil dari pengkajian resiko bencana digunakan sebagai dasar untuk upaya pengurangan resiko bencana melalui pengurangan aspek bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Tren capaian nilai IRB Kabupaten Pasuruan disajikan dalam gambar 2.14.



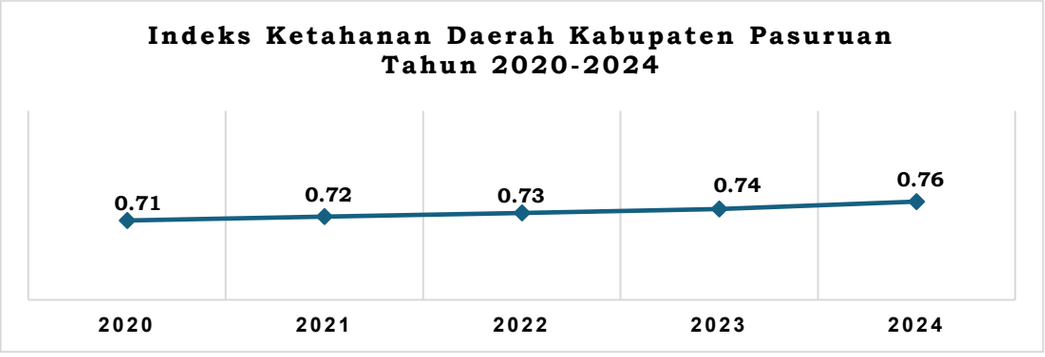
Gambar 2.14 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Catatan : *Tahun 2024 menggunakan data H&V 2021

Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan selalu mengalami penurunan disetiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang telah masuk kategori sedang. Hal ini salah satunya didorong oleh adanya perkembangan jumlah desa tangguh bencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebanyak 10 desa/kelurahan, tahun 2021 sebanyak 14 desa/kelurahan, tahun 2022 sebanyak 18 desa/kelurahan, tahun 2023 sebanyak 20 desa/kelurahan dan tahun 2024 sebanyak 30 desa/kelurahan.

Penurunan nilai IRB selaras dengan terjadinya peningkatan kapasitas pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola bencana yang diiringi komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang direpresentasikan oleh kenaikan nilai Indeks Ketahanan Daerah sebagaimana disajikan dalam gambar 2.15.

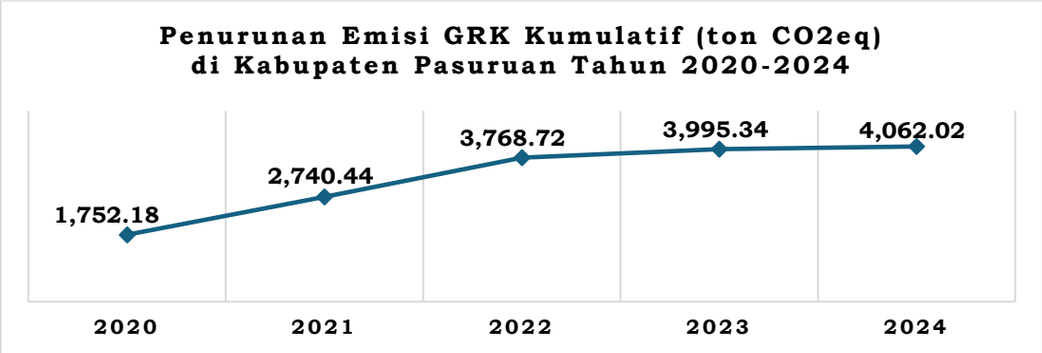


Gambar 2.15 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Bencana alam yang terjadi selain pada daerah rawan bencana dapat disebabkan dari dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan berdampak terhadap sektor ekonomi, Kesehatan manusia dan kestabilan ekosistem. Dampak perubahan iklim yang mengancam secara langsung adalah kenaikan muka air laut dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Mitigasi perubahan iklim dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan. Kegiatan inventarisasi GRK merupakan salah satu upaya mitigasi perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak negative dari perubahan iklim, perlu mengurangi emisi gas rumah kaca. Intensitas emisi GRK dapat dilihat dari penurunan emisi GRK Kumulatif dengan satuan ton CO2eq. Potensi penurunan emisi GRK kumulatif Kabupaten Pasuruan, yang dapat dilihat dari website AKSARA yang

diunduh pada 30 Mei 2024 menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2020. Kenaikan potensi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana pada gambar 2.16.



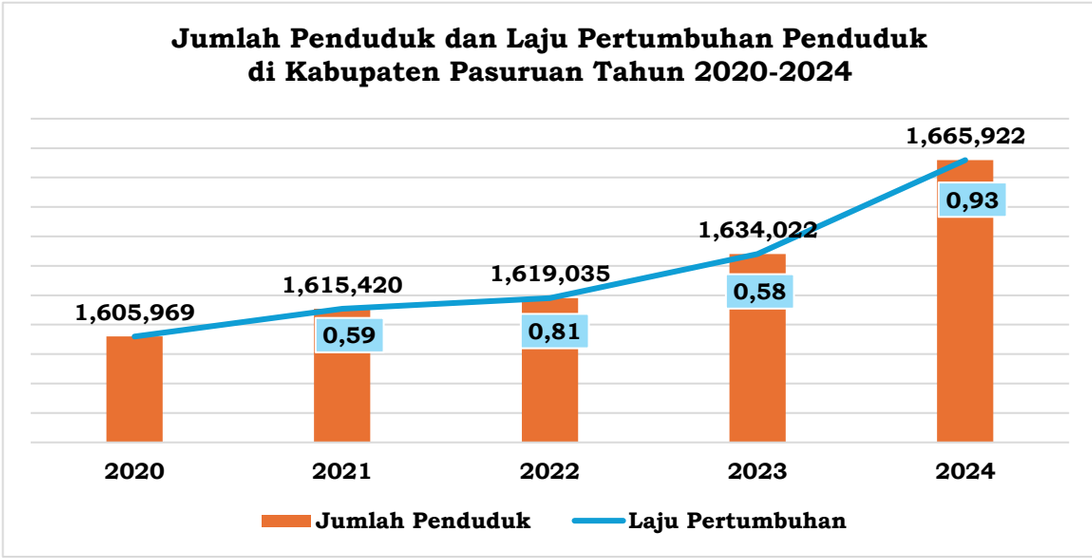
Gambar 2.16 Penurunan Emisi GRK Kumulatif
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024 (AKSARA, 30 Mei 2024)

7) Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Kondisi penduduk tidak hanya diperhatikan pada aspek kuantitas namun juga aspek kualitas. Jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas akan menimbulkan permasalahan dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu lima tahun (2020-2024) berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan paling tinggi tahun 2024. Data ini penting untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial di daerah, karena dengan tersedianya penduduk yang besar menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk berbagai lapangan usaha di sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang sehat dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia.



Gambar 2.17 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, perlambatan di tahun 2023 dan percepatan di tahun 2022 dan 2024. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian penduduk di Kabupaten Pasuruan.

B. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur adalah faktor kunci dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan publik, ekonomi, dan sosial. Dengan memahami komposisi ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang program dan kebijakan yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-Laki (Ribu Jiwa)	Perempuan (Ribu Jiwa)	Jumlah (Ribu Jiwa)
0-4	56.368	53.125	109.493
5-9	68.274	64.265	132.539
10-14	69.017	63.829	132.846
15-19	56.037	53.250	109.287
20-24	65.200	62.932	128.132
25-29	65.440	61.660	127.100
30-34	61.188	59.399	120.587

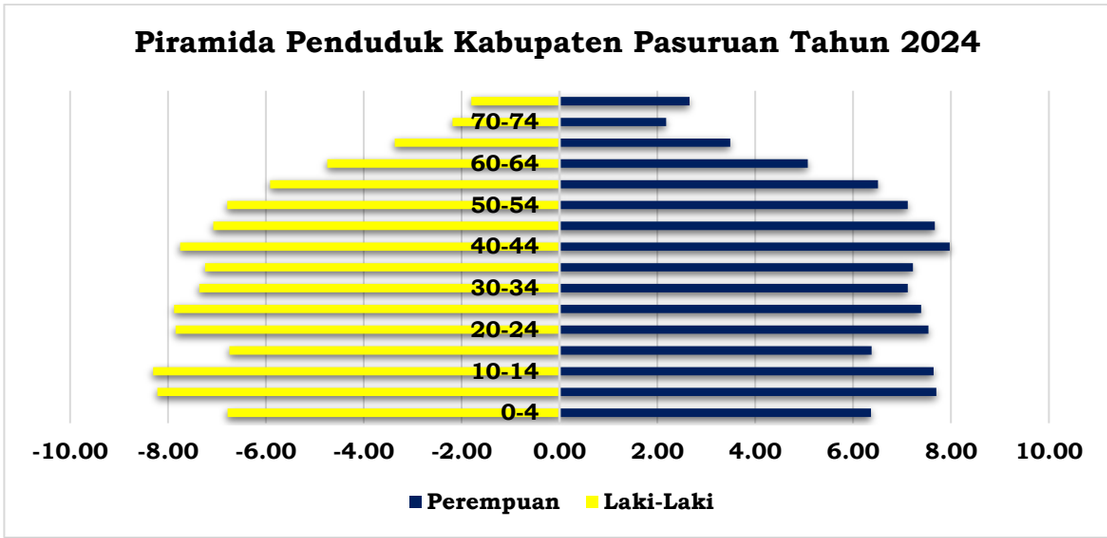
Kelompok Umur	Laki-Laki (Ribu Jiwa)	Perempuan (Ribu Jiwa)	Jumlah (Ribu Jiwa)
35-39	60.187	60.282	120.469
40-44	64.422	66.562	130.984
45-49	58.813	64.015	122.828
50-54	56.437	59.406	115.843
55-59	49.169	54.314	103.483
60-64	39.426	42.340	81.766
65-69	28.007	29.118	57.125
70-74	18.166	18.164	36.330
75+	14.954	22.156	37.110
Jumlah	**831.105**	**834.817**	**1.665.922**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan tabel 2.11 diketahui jika jumlah penduduk pada tahun 2024 dengan pengelompokkan umur tertinggi adalah pada kelompok umur 10-14 tahun, sehingga pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pendidikan dan program pengembangan anak. Sedangkan jumlah penduduk dengan pengelompokan umur terendah adalah pada kelompok umur 70-74 tahun. Angka yang rendah pada kelompok umur 70-74 tahun dapat menunjukkan bahwa ada tingkat mortalitas yang lebih tinggi di kelompok usia lanjut, yang mungkin disebabkan oleh faktor kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, atau kondisi sosial ekonomi.

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat menggambarkan piramida penduduk. Piramida penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebagaimana gambar 2.18. Piramida penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2024 merupakan jenis ekspansif. Piramida ekspansif menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan bertumbuh. Karakteristik piramida penduduk ekspansif yaitu:

1. Sebagian besar berada pada kelompok penduduk usia muda;
2. Kelompok usia tua jumlahnya sedikit;
3. Tingkat kelahiran bayi tinggi;
4. Pertumbuhan penduduk tinggi.



Gambar 2.18 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

C. Persebaran, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 sampai 2024 pada 24 kecamatan menunjukkan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Gempol. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tosari karena hanya 1,2% seluruh penduduk di Kabupaten Pasuruan tinggal di Kecamatan Tosari pada tahun 2024 sebagaimana pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	70.015	70.438	70.601	71.345	72.781
2	Tutur	53.743	53.887	53.830	55.107	56.187
3	Puspo	27.722	27.771	27.778	28.164	28.762
4	Tosari	18.799	18.818	18.837	18.550	18.925
5	Lumbang	35.174	35.385	35.464	35.879	36.681
6	Pasrepan	52.396	52.594	52.596	53.259	54.556
7	Kejayan	65.374	65.603	65.589	67.235	68.733
8	Wonorejo	59.864	60.186	60.286	61.112	62.326
9	Purwosari	84.137	84.706	84.962	86.266	88.051
10	Prigen	87.227	87.649	87.745	88.671	90.372
11	Sukorejo	87.477	88.069	88.336	88.839	90.568
12	Pandaan	111.062	111.563	111.651	112.299	114.237
13	Gempol	129.990	130.596	130.719	130.809	133.197
14	Beji	87.022	87.864	88.385	89.930	91.405

No	Kecamatan	Tahun (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
15	Bangil	83.307	83.671	83.724	84.241	85.504
16	Rembang	66.711	67.294	67.631	68.840	70.810
17	Kraton	88.525	88.912	88.969	88.535	90.315
18	Pohjentrek	31.296	31.581	31.751	31.436	31.900
19	Gondangwetan	56.264	56.589	56.705	57.339	58.533
20	Rejoso	46.766	47.036	47.132	48.366	49.070
21	Winongan	44.287	44.569	44.686	45.565	46.331
22	Grati	78.930	79.368	79.512	80.858	82.186
23	Lekok	77.514	78.176	78.551	78.286	80.139
24	Nguling	62.367	63.095	63.595	63.091	64.353
	Kab. Pasuruan	**1.605.969**	**1.615.420**	**1.619.035**	**1.634.022**	**1.665.922**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Kepadatan penduduk idealnya adalah satu kilometer persegi dihuni oleh 500 orang. Artinya, semakin besar angka kepadatan penduduk, maka semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan tahun 2024, kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Pohjentrek sebesar 2.685,19 jiwa/km2 yang artinya padat dan tidak ideal, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Tosari sebesar 193,11 jiwa/km2 dan masih ideal. Secara keseluruhan, hanya terdapat tiga wilayah kecamatan yang berada dalam kondisi kepadatan wilayah ideal yaitu Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, dan Kecamatan Puspo. Tabel 2.13 memberikan data secara lengkap kepadatan penduduk per kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.13
Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	Tahun (Jiwa/Km²)			
		2021[1]	2022	2023	2024
1	Purwodadi	687,47	689,06	696,32	710,34
2	Tutur	624,41	623,75	638,55	651,07
3	Puspo	475,94	476,06	482,67	492,92
4	Tosari	192,02	192,21	189,29	193,11
5	Lumbang	281,84	282,47	285,77	292,16
6	Pasrepan	584,70	584,72	592,10	606,51
7	Kejayan	828,84	828,67	849,46	868,39
8	Wonorejo	1.272,43	1.274,55	1.292,01	1.317,67
9	Purwosari	1.414,83	1.419,11	1.440,89	1.470,70

No	Kecamatan	Tahun (Jiwa/Km²)			
		2021[1]	2022	2023	2024
10	Prigen	719,02	719,81	728,79	741,36
11	Sukorejo	1.513,73	1.518,32	1.524,08	1.556,69
12	Pandaan	2.578,30	2.580,33	2.595,31	2.640,10
13	Gempol	2.011,65	2.013,54	2.014,93	2.051,71
14	Beji	2.202,11	2.215,16	2.253,88	2.290,85
15	Bangil	1.876,03	1.877,22	1.888,81	1.917,13
16	Rembang	1.582,64	1.590,57	1.619,00	1.665,33
17	Kraton	1.751,96	1.753,08	1.744,53	1.779,61
18	Pohjentrek	2.658,33	2.672,64	2.646,13	2.685,19
19	Gondangwetan	2.155,77	2.160,19	2.184,34	2.229,83
20	Rejoso	1.271,24	1.273,84	1.307,19	1.326,22
21	Winongan	969,52	972,07	991,19	1.007,85
22	Grati	1.562,98	1.565,81	1.592,32	1.618,47
23	Lekok	1.678,68	1.686,73	1.681,04	1.720,83
24	Nguling	1.481,10	1.492,84	1.481,01	1.510,63
	Kabupaten Pasuruan	**1.095,93**	**1.098,38**	**1.108,55**	**1.130,19**

Catatan: 1 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Berdasarkan tabel 2.13 dapat diketahui bahwa dari tahun 2021 dan 2022 jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Akan tetapi pada tahun 2023 dan 2024, jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesetaraan pendapatan, sementara secara sosial, hal ini dapat mengubah dinamika keluarga dan peran masyarakat, sehingga berpotensi mengarah pada peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan gender.

Tabel 2.14
Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	Tahun			
		2021[1]	2022	2023	2024
1	Purwodadi	103,00	103,10	101,09	101,62
2	Tutur	101,78	101,72	100,76	101,09
3	Puspo	99,06	99,10	98,51	99,49
4	Tosari	99,47	99,29	99,36	99,78
5	Lumbang	98,90	98,90	98,07	98,35
6	Pasrepan	97,32	97,35	96,82	96,89
7	Kejayan	96,96	97,15	96,52	96,62
8	Wonorejo	97,77	97,87	97,28	97,32
9	Purwosari	101,45	101,47	100,93	100,88
10	Prigen	102,20	102,14	101,73	101,78
11	Sukorejo	99,43	99,32	99,23	99,55
12	Pandaan	100,28	100,32	100,30	100,29
13	Gempol	101,41	101,30	101,20	101,11
14	Beji	101,09	101,07	100,38	100,55
15	Bangil	99,80	99,63	99,38	99,32
16	Rembang	97,23	97,20	96,54	96,75
17	Kraton	103,06	102,88	100,09	100,08
18	Pohjentrek	102,27	102,25	101,49	101,26
19	Gondangwetan	102,31	102,62	100,91	100,89
20	Rejoso	101,89	101,83	101,63	101,65
21	Winongan	99,40	99,30	99,47	99,30
22	Grati	99,09	98,99	97,98	98,02
23	Lekok	98,37	98,49	97,80	98,24
24	Nguling	96,40	96,33	96,42	96,40
	Kabupaten Pasuruan	**100,13**	**100,11**	**99,45**	**99,56**

Catatan: 1 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja selalu mengalami penurunan. Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami penurunan pada tahun 2023, akan tetapi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2024. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2024 dikarenakan jumlah

penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sedangkan jumlah penduduk yang menganggur menurun sebagaimana pada tabel 2.15.

Tabel 2.15
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	Jiwa	893.726	916.175	915.507	978.581
	➢ Bekerja	Jiwa	839.861	862.062	865.336	929.468
	➢ Pengangguran	Jiwa	53.865	54.113	50.171	49.113
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	401.053	389.023	370.123	320.809
	➢ Sekolah	Jiwa	80.310	70.415	82.044	78.547
	➢ Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	247.535	258.013	237.580	201.369
	➢ Lainnya	Jiwa	73.208	60.595	50.499	40.893
3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	1.294.779	1.305.198	1.285.630	1.299.390
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21	71,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Tabel 2.16
Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Pekerjaan	Tahun (Jiwa)			
		2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja	366.672	378.282	391.685	397.661
2	Mengurus Rumah Tangga	230.025	238.608	246.299	249.523
3	Pelajar/Mahasiswa	235.356	224.234	213.833	208.582
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	16.834	16.664	16.565	16.465
5	Petani/Peternak/Nelayan	189.977	189.391	189.410	189.490
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20.114	20.111	21.479	21.818
7	Perdagangan/Industri/Kontruksi/Transportasi	1.862	1.814	1.844	1.839
8	Buruh Harian Lepas	8.948	9.122	11.640	12.448
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorer	351.171	357.574	359.011	359.929
10	Guru/Dosen	11.896	12.306	12.524	12.693
11	Pembantu Rumah Tangga	638	622	625	626
12	Tukang Batu/Kayu	2.149	2.184	2.650	2.730
13	Pedagang/Wiraswasta	157.972	159.497	154.107	161.038
14	Kepala/Perangkat Desa	1.186	1.152	1.106	1.089

No	Pekerjaan	Tahun (Jiwa)			
		2021	2022	2023	2024
15	Lainnya	7.123	4.629	11.244	4.807

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 2.16 dapat diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2021-2024 jika dilihat dari pekerjaan, paling banyak bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorer. Hal tersebut dipengaruhi banyaknya perusahan di Kabupaten Pasuruan sehingga sebagian besar penduduknya memilih untuk bekerja sebagai karyawan swasta. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit dilakukan oleh Penduduk di Kabupaten Pasuruan adalah pembantu rumah tangga.

E. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2021-2024 jika dilihat dari tingkat pendidikan paling banyak yang masih Tamat SD/sederajat sedangkan yang paling sedikit adalah S2/S3. Jika dilihat dari kontribusinya, penduduk yang belum tamat SD/sederajat, tamat SD/sederajat dan tamat SLTP/sederajat mengalami penurunan sedangkan penduduk yang tidak/belum sekolah, penduduk yang tamat SLTA/sederajat, D1/D2/D3, D4/S1 dan S2/S3 mengalami peningkatan. Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2024

No	Pendidikan	2021		2022		2023		2024	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Tidak/belum sekolah	324.914	20,28	341.313	21,12	357.417	21,87	364.634	22,22
2	Belum tamat SD/sederajat	244.233	15,25	235.317	14,56	229.615	14,05	226.048	13,78
3	Tamat SD/sederajat	505.584	31,56	501.397	31,02	498.965	30,54	497.614	30,33
4	Tamat SLTP/sederajat	217.145	13,55	216.089	13,37	216.327	13,24	217.241	13,24
5	Tamat SLTA/sederajat	260.185	16,24	269.151	16,65	276.243	16,91	278.598	16,98
6	D1/D2/D3	9.614	0,60	9.871	0,61	10.118	0,62	10.237	0,62

No	Pendidikan	2021		2022		2023		2024	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
7	D4/S1	38.552	2,41	41.085	2,54	43.275	2,65	44.244	2,70
8	S2/S3	1.825	0,11	1.967	0,12	2.062	0,13	2.122	0,13
	Total	**1.602.052**	**100**	**1.616.190**	**100**	**1.634.022**	**100**	**1.640.738**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025, diolah

F. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut

Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2024 jika dilihat dari agama yang dianut sebagian besar menganut agama Islam sedangkan yang paling sedikit menganut agama Konghuchu. Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan yang dianut di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Agama dan Kepercayaan	2021		2022		2023		2024	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Islam	1.580.238	98,455	1.591.629	98,480	1.609.458	98,497	1.616.155	98,501
2	Kristen	6.974	0,435	6.883	0,426	6.885	0,421	6.863	0,418
3	Katholik	2.430	0,151	2.402	0,149	2.377	0,145	2.362	0,144
4	Hindu	14.991	0,934	14.891	0,921	14.937	0,914	14.999	0,914
5	Budha	367	0,023	351	0,022	326	0,020	319	0,019
6	Konghuchu	11	0,001	11	0,001	15	0,001	17	0,001
7	Kepercayaan	26	0,002	23	0,001	24	0,001	23	0,001
	Total	**1.605.037**	**100**	**1.616.190**	**100**	**1.634.022**	**100**	**1.640.738**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025 (Data diolah)

G. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Data proyeksi penduduk lima tahun ke depan sangat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan karena membantu pemerintah dalam merencanakan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan serta memungkinkan penentuan kebutuhan perumahan, penciptaan lapangan kerja, dan perancangan kebijakan ekonomi yang efektif. Selain itu, data ini penting untuk

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, proyeksi penduduk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan.

1. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan

Proyeksi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 2.19. Hsil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan terus meningkat setiap tahunnya dengan jumah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.19
Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1.669,40	1.681,02	1.692,08	1.702,57	1.712,51	1 721,87
Laki-Laki (Ribu Jiwa)	834,72	840,21	845,38	850,23	854,76	858,96
Perempuan (Ribu Jiwa)	834,68	840,82	846,7	852,34	857,74	862,91
Laju Pertumbuhan (%)	0,73	0,70	0,66	0,62	0,58	0,47
Rasio Jenis Kelamin (%)	100,00	99,93	99,84	99,75	99,65	99,54
Kepadatan (Jiwa/Km2)	1.132,55	1.140,43	1.147,94	1.155,05	1.161,80	1.153,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan

Proyeksi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Tahun (dalam ribu juwa)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	116,68	115,51	114,41	113,36	112,38	111,48
5-9	119,32	118,11	116,66	115,32	114,72	116,14
10-14	122,46	122,97	123,41	123,47	122,45	119,01
15-19	119,49	119,84	120,33	120,87	121,41	121,95

Kelompok Umur	Tahun (dalam ribu juwa)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
20-24	120,88	119,94	119,22	118,74	118,53	118,59
25-29	126,64	125,25	123,77	122,29	120,93	119,79
30-34	130,29	129,64	128,85	127,91	126,82	125,57
35-39	129,71	130,16	130,27	130,09	129,71	129,19
40-44	123,59	124,11	125,14	126,43	127,64	128,50
45-49	123,63	123,93	123,51	122,74	122,13	122,03
50-54	111,75	113,70	115,96	118,23	120,08	121,22
55-59	101,45	103,18	104,50	105,61	106,83	108,34
60-64	83,06	85,88	88,77	91,61	94,16	96,33
65-69	63,40	66,17	68,73	71,14	73,57	76,10
70-74	40,34	43,18	46,14	49,14	52,04	54,75
75+	36,72	39,47	42,44	45,64	49,12	52,88
Jumlah	**1.669,40**	**1.681,02**	**1.692,08**	**1.702,57**	**1 712,51**	**1 721,87**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

3. Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan dan Bonus demografi di Kabupaten Pasuruan

Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan dan Bonus demografi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 2.21. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dalam lima tahun ke depan penduduk Kabupaten Pasuruan diprediksi akan menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,66%.

Tabel 2.21
Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan dan Bonus demografi di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2025-2030

Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-14 Tahun	21,47%	21,21%	21,54%	20,68%	20,41%	20,13%
15-64 Tahun	70,11%	69,93%	71,71%	69,57%	69,39%	69,20%
65 tahun ke atas	8,41%	8,85%	6,75%	9,75%	10,20%	10,67
Angka Ketergantungan	42,62	42,99	39,45	43,74	44,12	44,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024 (Data diolah)

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk table 2.21, dapat dilihat bahwa dalam lima tahun ke depan angka ketergantungan penduduk

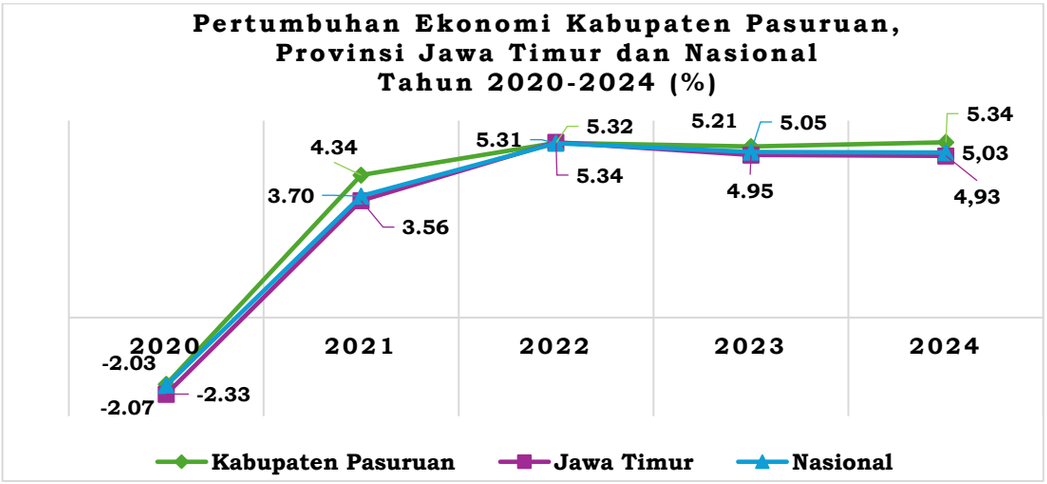
Kabupaten Pasuruan diprediksi akan menunjukkan tren peningkatan yang menggambarkan beban penduduk usia produktif semakin bertambah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan PDRB, dalam hal ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB menunjukkan nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah, terdiri dari 17 lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 beserta perbandingan dengan angka Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar 2.19.



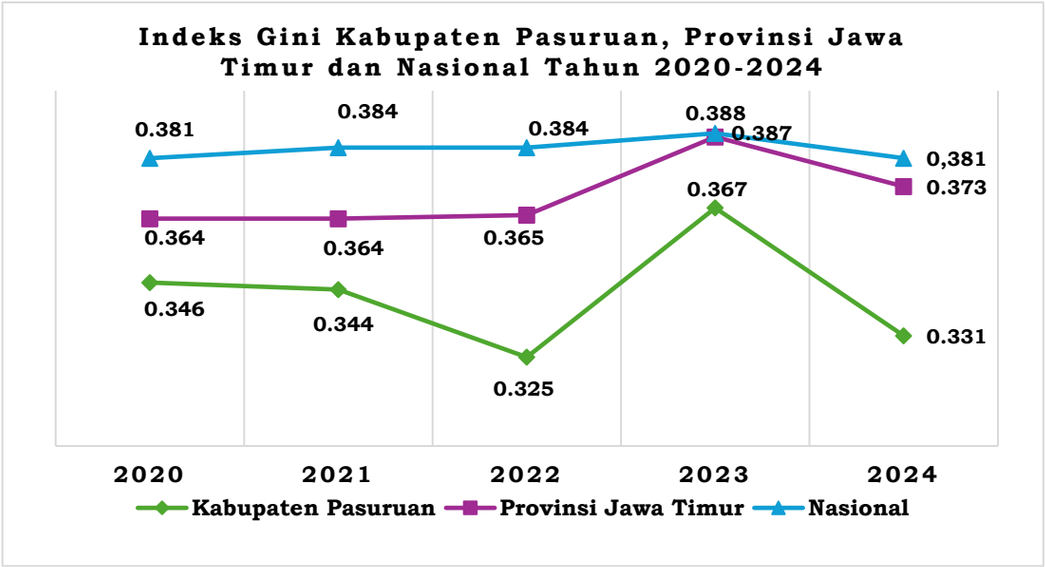
Gambar 2.19 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional, namun sangat mudah berubah-ubah karena masalah mendasar seperti infrastruktur yang belum maksimal (indeks infrastruktur wilayah sebesar 68,73), ketidakseimbangan antar sektor (dominan kuat oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 60%), kurangnya inovasi dan teknologi (indeks masyarakat digital 43,92 klasifikasi cukup), promosi produk unggulan yang minim (kondisi ekosistem riset dan inovasi produk unggulan daerah khususnya pada elemen promosi dan kampanye inovasi frekuensi dan kontinuitas kegiatannya masih sangat minim), serta lemahnya kerjasama dan peran BUMD

(Perumdam Giri Nawa Tirta, cakupan layanan masih 14,47% dan tingkat kebocoran cukup tinggi 25,42%. PT. BPR Mina Mandiri, Non Performing Loan (NPL) atau pinjaman bermasalah yaitu NPL Nett 6,26% dan NPL Gross 9,66% dengan kategori tidak sehat) sehingga penanganan masalah-masalah ini menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan kuat.

B. Indeks/Rasio Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan masyarakat suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Tidak ada "nilai ideal" yang berlaku untuk semua kabupaten atau kota, tetapi secara umum, semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan. Kabupaten atau kota dengan nilai Indeks Gini mendekati 0 cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih rendah, yang sering dianggap sebagai indikator kesejahteraan sosial yang lebih baik. Namun, nilai Indeks Gini yang sangat rendah juga bisa mencerminkan adanya kesulitan dalam mengukur pendapatan secara akurat di daerah tersebut.



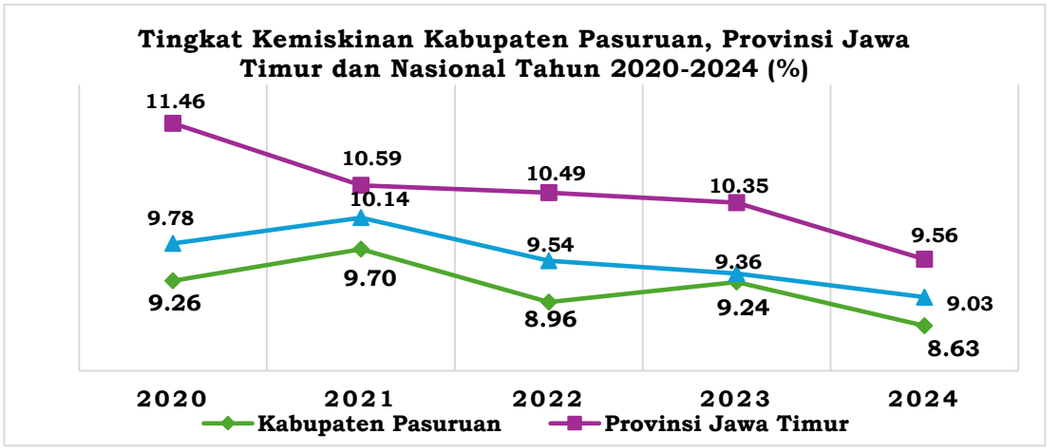
Gambar 2.20 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar 2.20, secara umum indeks gini Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan termasuk dalam kategori moderat/sedang (berada pada interval 0,3 – 0,5). Paruh periode pertama mengalami kenaikan, namun paruh periode berikutnya menunjukkan penurunan atau kondisi yang lebih baik. Dalam konteks kewilayahan, indeks gini Kabupaten Pasuruan berada di bawah atau lebih baik dari pada angka Jawa Timur dan Nasional.

C. Angka Kemiskinan

Upaya pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, penghapusan kemiskinan (*no poverty*) merupakan Tujan/Goals I dalam SDG's "Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu agenda utama demi mengakhiri segala bentuk jenis kemiskinan." Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.



Gambar 2.21 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat Kemiskinan direpresentasikan oleh capaian Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan beserta perbandingannya dengan angka Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Secara umum kondisi kemiskinan di Kabupaten Pasuruan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Penurunan indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan, bersamaan dengan penurunan persentase kemiskinan, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik. Namun, peningkatan garis kemiskinan dapat mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan, standar hidup yang lebih tinggi juga diperlukan untuk mengatasi tantangan kemiskinan yang tersisa.

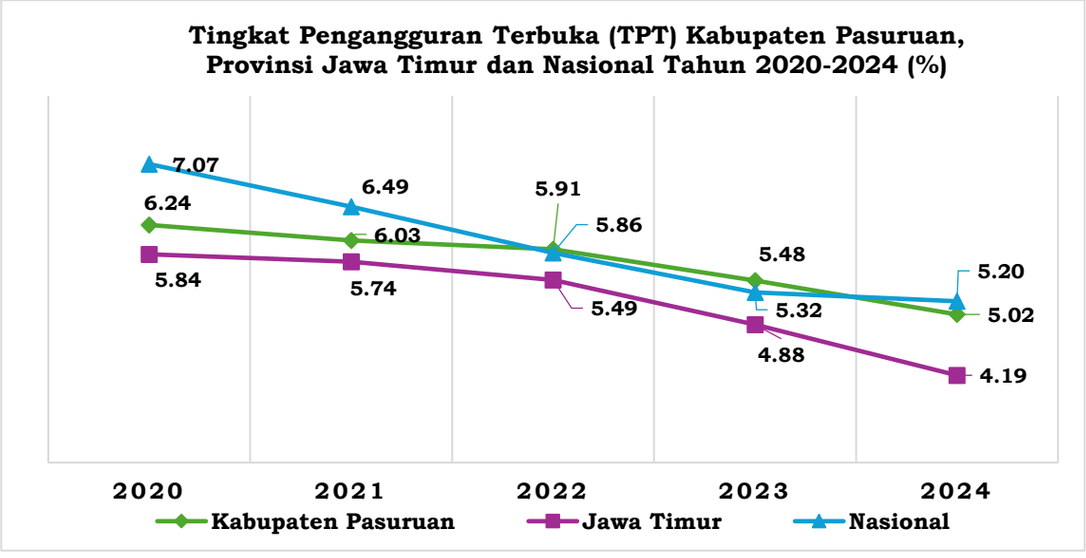
Tabel 2.22
Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	151,43	159,78	148,62	154,09	144,84
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	355.299	368.686	394.016	429.624	450.088
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,15	1,17	1,29	1,22	1,09
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,24	0,29	0,26	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. TPT Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 beserta perbandingannya dengan angka Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.22.



Gambar 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

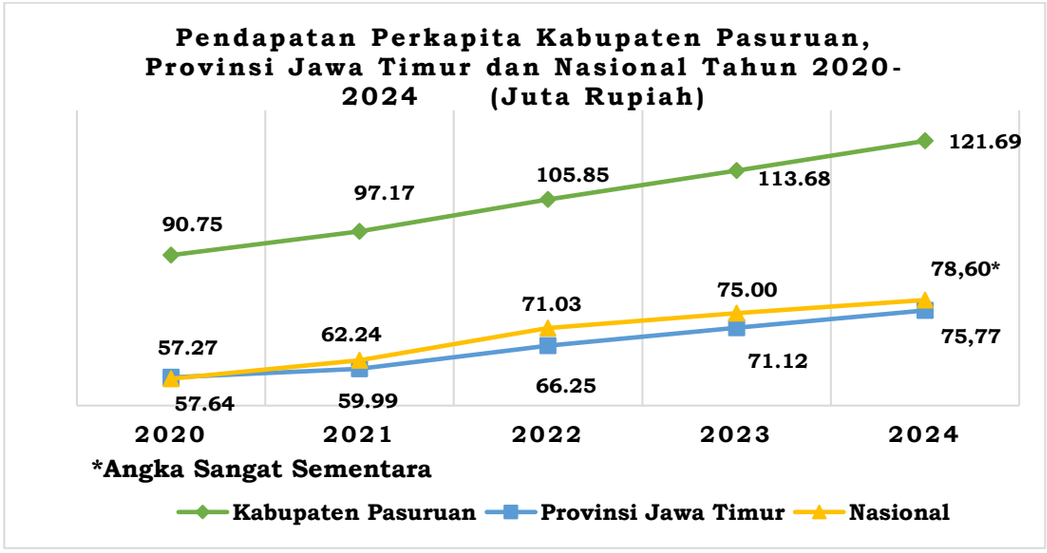
Penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya perbaikan dalam pasar kerja, meskipun masih ada tantangan karena tingkat pengangguran di Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Daerah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mengatasi masalah ini. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi penurunan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

E. PDRB Perkapita

PDRB perkapita atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita, adalah ukuran ekonomi yang digunakan untuk mengukur pendapatan rata-rata yang dihasilkan oleh penduduk suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu. PDRB adalah nilai

total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau negara, sedangkan perkapita berarti per orang, Oleh karena itu, PDRB perkapita mengukur seberapa banyak pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap individu dalam suatu wilayah atau negara.

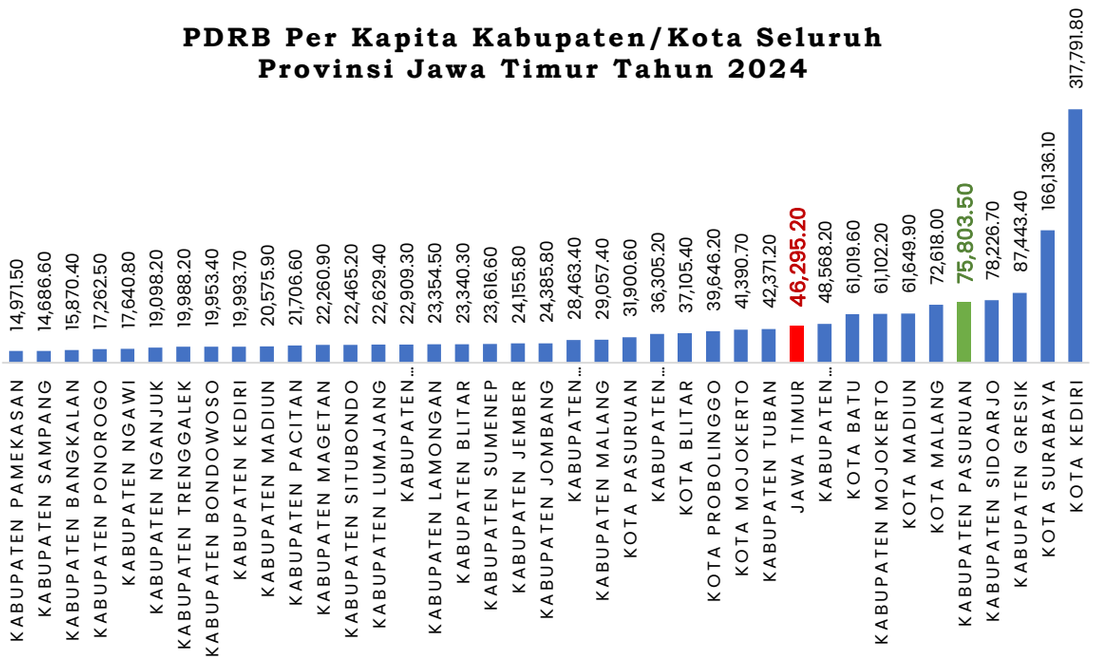
PDRB perkapita adalah indikator yang penting dalam analisis ekonomi karena dapat memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran atau kesejahteraan rata-rata penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB perkapita, semakin besar pendapatan rata-rata penduduknya, yang dapat mengindikasikan tingkat hidup yang lebih baik. Namun, PDRB perkapita hanya memberikan gambaran umum tentang distribusi pendapatan dan tidak mencerminkan kesenjangan yang mungkin ada dalam distribusi pendapatan di dalam wilayah tersebut, berikut merupakan gambaran PDRB Perkapita Kabupaten Pasuruan.



Gambar 2.23 PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Perkapita
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar 2.23 menunjukkan PDRB Perkapita mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Selain itu capaian PDRB Perkapita Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Terlebih Kabupaten Pasuruan kontribusi PDRB-nya 60% atau mayoritas adalah industri pengolahan dengan tipologi industri padat modal. Dengan demikian perputaran angka PDRB tersebut tidak secara langsung merata dimasyarakat Kabupaten Pasuruan.

Posisi PDRB Per Kapita Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 berada pada peringkat ke 5 dengan PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Timur berada di bawah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. PDRB Perkapita Kabupaten Pasuruan berada diatas rata-rata kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur. Hal ini artinya rata-rata pendapatan per orang di Kabupaten Pasuruan secara umum lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Beberapa hal yang perlu dipahami adalah PDRB Perkapita tidak serta merta betul-betul merepresentasikan bahwa pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pasuruan diangka tersebut. PDRB perkapita adalah rata-rata dan bisa jadi ada perbedaan pendapatan antar wilayah atau kelompok masyarakat di dalam Kabupaten Pasuruan sendiri, r*ata-rata* tidak selalu mencerminkan keadaan semua orang, bisa saja hanya sebagian kecil wilayah atau kelompok kaya yang sangat tinggi pendapatannya, sehingga menarik naik rata-rata keseluruhan, sementara wilayah lain masih tertinggal**.** Walaupun angka PDRB per kapita terlihat bagus, pemerintah tetap perlu fokus pada pemerataan pembangunan, supaya seluruh wilayah dan semua kelompok masyarakat bisa menikmati pertumbuhan ekonomi, bukan hanya segelintir saja.



Gambar 2.24 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Timur
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besaran IPM Kabupaten Pasuruan didukung atas pencapaian komponen IPM di dalamnya, yaitu harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Kondisi capaian masing-masing komponen IPM Kabupaten Pasuruan menggunakan Metode SP2010 Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23
Perkembangan IPM dan Komponen IPM
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	66,69	67,41	68,29	68,60	70,54
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,17	70,17	70,23	70,25
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,05	12,30	12,31	12,41	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,82	6,38	7,11	7,40	7,41
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	-	-	10.381,00	10.164,00	10.297

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

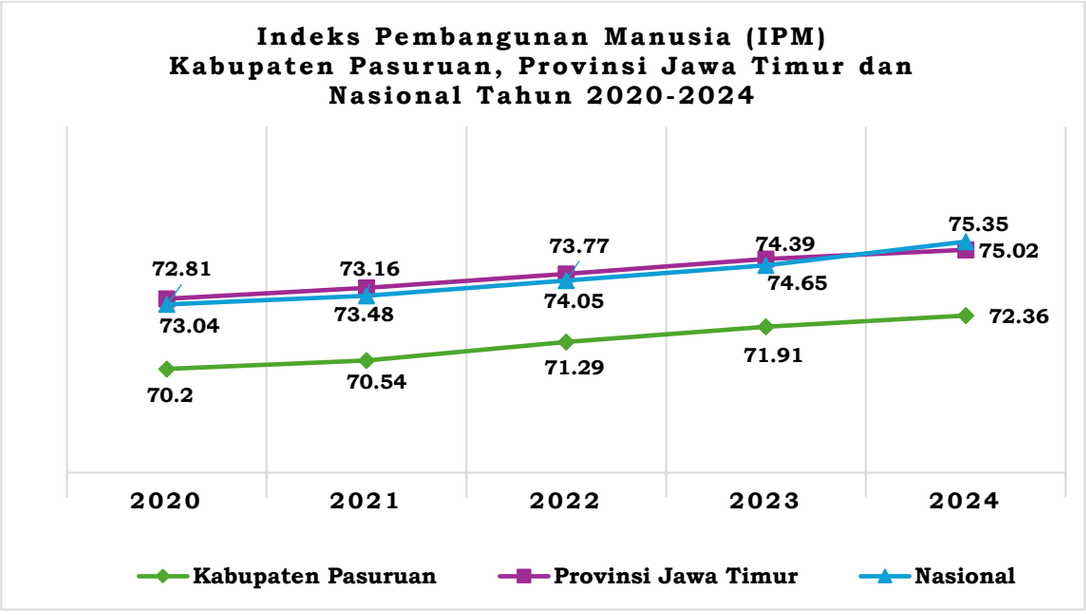
Dengan dilaksanakannya Survei Penduduk pada tahun 2020, perhitungan IPM pada tahun 2022-2024 menggunakan metode baru berbasis perhitungan Hasil Long Form SP2020, dimana menghasilkan perhitungan Angka Harapan Hidup yang cenderung meningkat sebagaimana tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24
Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
IPM	71,29	71,91	72,36
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,15	74,41	74,61
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,76	12,77	12,78
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,42	7,44	7,46
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rup iah)	10.726	11.239	11.617

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

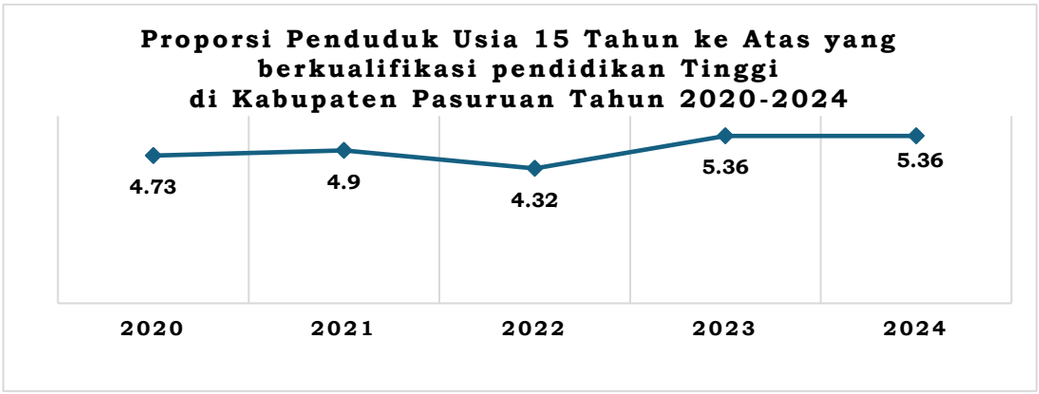
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2017-2021 maupun 2022-2024 mengalami kenaikan meskipun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Nilai IPM Kabupaten Pasuruan p ada tahun 2024 sudah masuk dalam kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80). Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 dengan menggunakan Metode Hasil Long Form SP2020 sebagaimana pada gambar 2.25.



Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

G. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan, S3. Adapun data proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

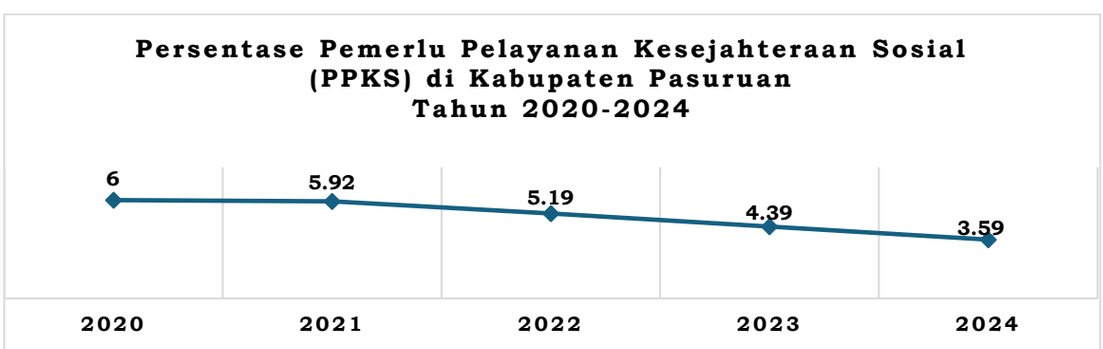


Gambar 2.25-a. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar 2.25-a angka proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi mengalami peningkatan pada tahun periode 2020-2024 meskipun masih tergolong rendah. Hal ini menjadi atensi untuk meningkatkan angka proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan yang dapat ditamatkan oleh seseorang bisa mencerminkan tingkat intelektualitas orang tersebut dan juga dapat meningkatkan status sosial dimasyarakat. Oleh karenanya makin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka kemampuan, wawasan, cara berfikir akan lebih luas dan maju.

H. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Persentase PPKS dalam periode tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan yang menunjukkan semakin berkurangnya jumlah Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Pasuruan sebagaimana pada gambar 2.25-b..



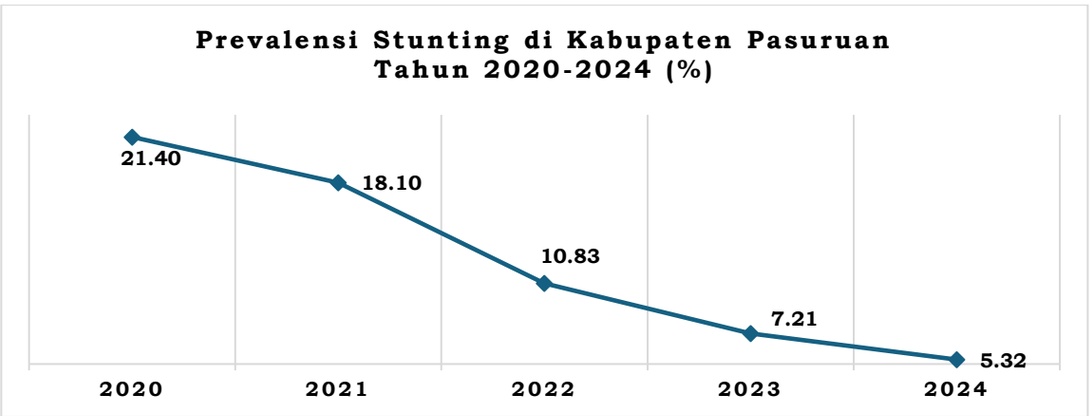
Gambar 2.25-b. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2025

Guna meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), telah dibentuk Tim Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang dikhususkan untuk penanganan PPKS/PMKS pada kategori anak. Kedepannya untuk PKSAI, Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan kewenangan dan layanan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi penurunan PPKS. Adanya stimulan berupa sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) diharapkan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada PPKS.

2) Kesehatan untuk Semua

A. Prevalensi Stunting pada Balita (Pendek dan Sangat Pendek)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya.



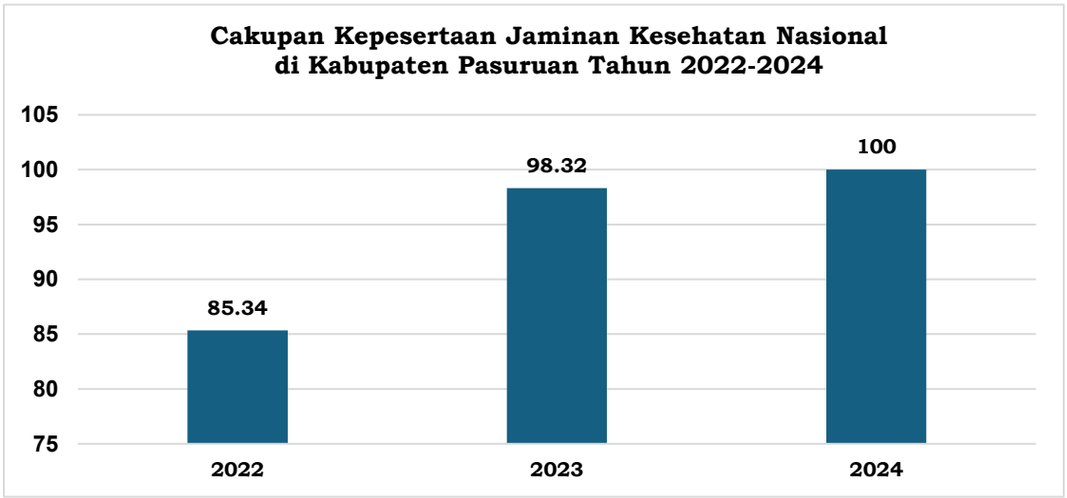
Gambar 2.26 Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2024. Adanya komitmen stakeholder terkait penurunan prevalensi stunting setiap tahunnya didukung dengan program, kegiatan, sub kegiatan serta anggaran baik dalam bentuk intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Posyandu Tematik Stunting (POSTING) mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai komitmen dan intervensi spesifik dalam percepatan penurunan stunting melalui inovasi Kasih Bersanding Mesra “Keluarga Bersih Bersama Sadari Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera” untuk

mencapai target Nasional yaitu menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada Tahun 2024.

B. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu wujud pemenuhan hak konstitusi negara kepada rakyat Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai hak terhadap jaminan sosial. Program ini dikelola selama enam tahun oleh dua Lembaga baru non pemerintahan yakni BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).



Gambar 2.27 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar 2.27 dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Pasuruan selama 3 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan ini mengartikan bahwa pelaksanaan jaminan kesehatan di Kabupaten Pasuruan baik Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan

menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).

C. Persentase Balita Gizi Buruk

Cakupan balita dengan gizi buruk merupakan gambaran kasus gizi buruk pada balita di waktu tertentu, dihitung berdasarkan tanda-tanda fisik dan klinis yang mengarah pada diagnosa gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan. Cakupan persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi dan menurun di tahun 2024. Akan tetapi jumlah balita yang menderita gizi buruk, terus mengalami penurunan selama 5 (lima) periode terakhir dan disertai juga dengan penurunan jumlah balita pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.24
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita Gizi Buruk (Orang)	34	31	30	28	27
Jumlah Balita (Orang)	117.832	118.395	117.907	75.653	86.439
Persentase Balita Gizi Buruk (%)	**0,028**	**0,026**	**0,034**	**0,037**	**0,031**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Persentase Balita Gizi Kurang

Gizi kurang pada balita adalah kondisi ketika seorang anak berusia dibawah lima tahun (balita) mengalami kekurangan asupan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Berikut dapat disajikan persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2020 -2024 :

Tabel 2.24
Persentase Balita Gizi Kurang di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase balita Gizi kurang	9,60%	14,8%	10,90%	10,80%	14,90%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Data balita gizi kurang periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan persentase terbesar pada 2023–2024. Kondisi ini menandakan adanya tantangan serius dalam ketahanan pangan, akses layanan kesehatan, dan perilaku konsumsi bergizi masyarakat dengan risiko jangka panjang berupa peningkatan stunting. Sehingga perlu diatasi secara cepat dan terintegrasi, serta Upaya penanganan harus bersifat komprehensif, mencakup intervensi gizi spesifik, penguatan ketahanan pangan lokal, edukasi masyarakat, serta regulasi yang mendukung keberlanjutan program.

E. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa Siaga Aktif merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan di tingkat desa. Melalui kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, desa siaga aktif menjadi ujung tombak dalam upaya promotif dan preventif layanan kesehatan. Hingga saat ini, telah terbentuk 365 Desa Siaga Aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, 158 desa telah mencapai kategori Siaga Aktif Puri, yang menunjukkan kesiapan desa dalam aspek kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Sementara itu, 6 desa telah memenuhi standar Siaga Aktif Pratama, dengan indikator utama berupa tersedianya minimal 6 posyandu aktif. Posyandu berperan penting dalam layanan dasar kesehatan, terutama bagi ibu dan anak. Selain itu, tercatat ada 201 posyandu aktif dengan kualifikasi Madya, yang berarti posyandu tersebut telah menjalankan lima meja pelayanan secara rutin dan memiliki cakupan sasaran yang cukup luas di masyarakat. Berikut dapat di sajikan Persentase Desa Siaga Aktif Tahun 2019-2024 di Kabupaten Pasuruan :

Persentase Desa Siaga Aktif di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019 – 2024

Tahun	Desa siaga aktif	Jumlah Desa	Persentase
2019	365	365	100
2021	365	365	100
2022	365	365	100
2023	365	365	100
2024	365	365	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

F. Posyandu

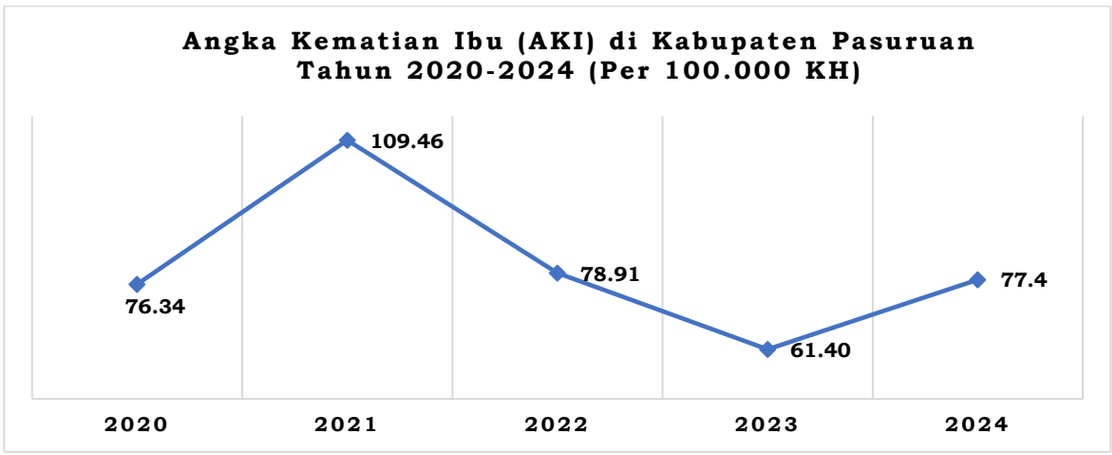
Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah layanan kesehatan berbasis masyarakat yang memberikan pelayanan dasar kepada ibu dan anak, seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan kesehatan. Posyandu menjadi ujung tombak dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Jumlah Posyandu di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 mengalami peningkatan jumlah posyandu yang terbentuk. Pada Tahun 2022 terdapat 1.921 unit, Tahun 2023 terdapat 1.925 unit, Tahun 2024 terdapat 1.934 unit. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu bahwa posyandu memiliki tugas membantu Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Standart Pelayanan Minimal dalam beberapa bidang diantaranya :

(1) Bidang Pendidikan, pada bidang pendidikan relevan dengan indikator SPM Pendidikan terkait Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
(2) Bidang Kesehatan, pada bidang kesehatan relevan dengan indikator SPM Kesehatan terkait sasaran untuk Ibu, Bayi, Balita, usia remaja dan usia lanjut yang mendapatkan pelayanan dan penyuluhan kesehatan melalui posyandu;
(3) Bidang Pekerjaan Umum, pada Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat relevan dengan indikator SPM Pekerjaan Umum terkait pemenuhan kebutuhan air bersih dan pengolahan limbah domenstik/rumah tangga;
(4) Bidang Perumahan Rakyat, pada Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat relevan dengan indikator SPM Perumahan Rakyat terkait Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni;
(5) Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, pada bidang tersebut yang relevan dengan indikator SPM Ketentraman Ketertiban Umum terkait rehabilitasi warga yang terdampak bencana;
(6) Sosial, pada Bidang tersebut relevan dengan indikator SPM Bidang Sosial terkait Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar dan Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka peran seluruh Perangkat Daerah terkait bersinergi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan peran posyandu di Kabupaten Pasuruan.

G. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Angka pengukuran resiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Target Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan SDGs (*Suistenable Development Goals*) harus di bawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030.



Gambar 2.27-a. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021, AKI mengalami kenaikan yang sangat signifikan karena adanya

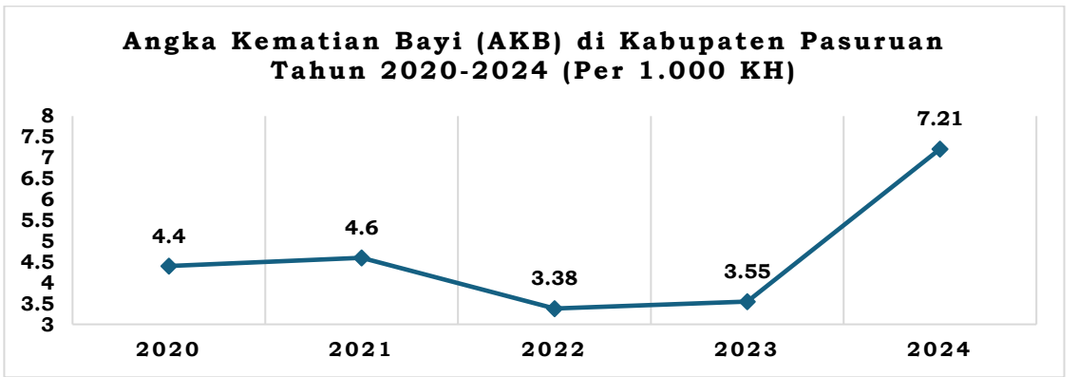
Pandemi *Covid-19,* selanjutnya tahun 2022-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2024 angka kematian ibu kembali meningkat sehingga perlu upaya yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan yakni:

1. Meningkatkan kualitas pemeriksaan kehamilan (ANC/ *Ante Natal Care*) pada ibu hamil secara kontinyu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Bidan);
2. Meningkatkan koordinasi melalui peningkatan sistem jejaring tenaga medis, sehingga pertolongan pada ibu hamil yang resiko tinggi dapat dilakukan sejak awal;
3. Membuat SIP (sistem informasi posyandu);
4. Meningkatkan pola rujukan kasus dan rujukan berjenjang sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim pasien;
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi yakni:
   a) Gerakan Ibu Hamil sadar Posyandu
   b) Pembinaan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) oleh Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
   c) Pertemuan kader KIBBLA
   d) Audit Maternal Perinatal
   e) Pengembangan P4K di desa maslahat
   f) Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat KIA (P-PWS KIA) ibu dan anak
   g) Supervisi fasilitatif
   h) Pelatihan APN
   i) Pelatihan Kelas ibu hamil
   j) Kemitraan Bidan dan dukun bayi – kader (melalui PERDA nomor 2 tahun 2009 tentang KIBBLA)
   k) Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu
   l) Drill emergency kegawatdaruratan Maternal disetiap Puskesmas
   m) Meningkatkankerjasama sistem rujukan kesehatan
   n) Menambah fasilitas RS Rujukan (RSUD Grati) di Wilayah Timur

H. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Target dari Pemerintah yang juga menjadi target SDGs (*Suistanable Development Goals*) harus di bawah 12 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030. Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup digunakan untuk mengukur jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama, sehingga indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan seribu. Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif sebagaimana pada gambar 2.27-b.



Gambar 2.27-b. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Kematian bayi terbanyak karena Infeksi disebabkan Ibu Bersalin banyak yang mengalami KPD (Ketuban Pecah Dini). Asfiksia disebabkan bayi tidak mendapatkan penanganan Asfiksia oleh Bidan dengan baik sesuai dengan kompetensi, dan BBLR disebabkan karena Ibu Hamil KEK dan PEB. Oleh karena itu diperlukan peningkatan

kompetensi pada Bidan dan juga komunikasi secara intens dengan dokter spesialis anak yang keberadaannya pada RSUD Bangil dan RSUD Grati. Tujuan adanya jejaring antara Puskesmas, Polindes dan Bidan Praktek dengan RSUD Bangil dan RSUD Grati agar bayi Infeksi, Asfiksia bisa tertangani dengan baik sebelum dirujuk ke RSUD Bangil atau RSUD Grati. Kasus BBLR bisa terpantau dan ditingkatkan berat badan bayi apabila pemeriksaan kehamilan dilakukan secara rutin dan berkualitas, serta ibu hamil selalu mendapatkan penyuluhan.

Bila dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 100%, maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitas pertolongan persalinan tersebut serta penanganan gawat darurat bayi oleh Bidan dan sistem rujukan yang baik dengan Puskesmas, Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan RSUD. Namun demikian ternyata bayi yang mengalami kematian tersebut telah mengalami proses rujukan ke Rumah Sakit. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah pelaksanaan Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (P-PWS KIA), Audit Maternal Perinatal, Supervisi Fasilitatif, Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu serta penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga medis meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal, Pelatihan Kelas Ibu Hamil, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Sarasehan dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

I. Insidensi Tuberkulosis

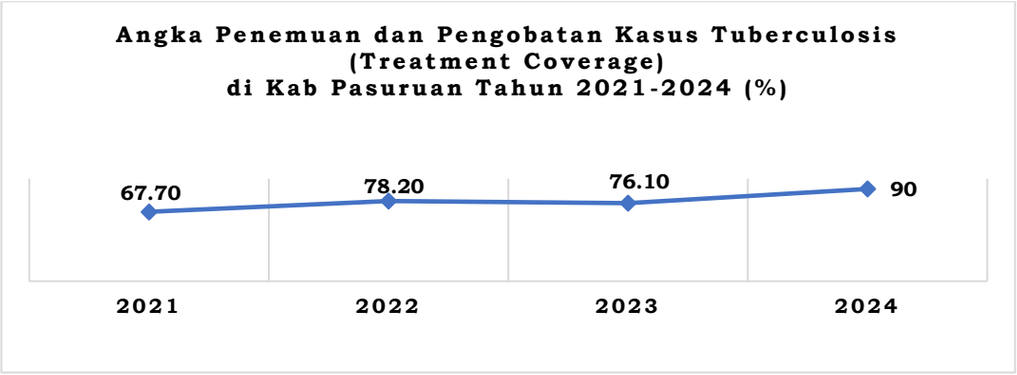
Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan masyarakat dan menjadi tantangan global. TBC merupakan salah satu 10 penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia dan penyebab utama kematian dari agen infeksius. Secara global diperkirakan 10.6 juta (range 9,8-11,3 juta) orang sakit TBC; 1,4 juta (range 1,3-1,5 juta) kematian akibat TBC termasuk HIV-negatif dan 187.000 kematian (range 158.000–218.000) termasuk HIV-positif.

Sumber penularan di masa akan datang selain faktor lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat turut mempengaruhi penularan

TBC. Sehingga diperlukan sinergitas, komitmen dan dukungan lintas sektor mulai tingkat pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota.

a. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)

   Berdasarkan Surat Direktur P2PM No. PM.01.01/C.III/4406/2023 tentang pemberitahuan perubahan definisi indikator cakupan penemuan kasus tuberkulosis, cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) adalah jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan di antara perkiraan kasus tuberkulosis. Sejak tahun 2021 capaian *treatment coverage* telah menggunakan definisi indikator *treatment coverage* terbaru. *Treatment Coverage* menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dapat terjangkau oleh program Pengendalian Tuberkulosis. Adapun data treatment coverage di Kabupaten Pasuruan adalah sebagaimana gambar 2.27-c.



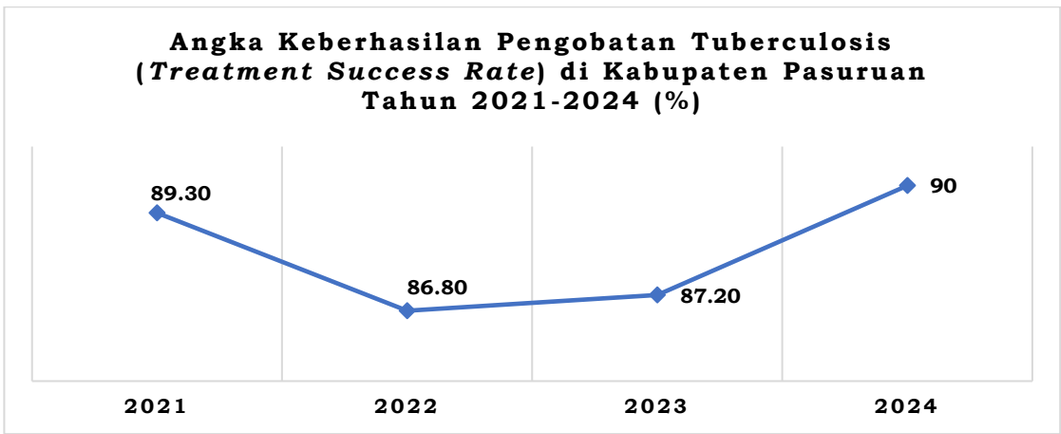
Gambar 2.27-c. Angka Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan pada tahun 2024. Capaian ini telah melampaui target nasional yaitu sebesar >70%. Peningkatan ini perlu didukung dengan perilaku pencegahan dan pengendalian TB. Perilaku pencegahan dan pengendalian TB paru merupakan salah satu perilaku kesehatan (Notoatmodjo, 2018). Perilaku kesehatan merupakan tindakan individu maupun kelompok terkait kesehatan untuk peningkatan kualitas hidup yang didalamnya dipengaruhi oleh keyakinan, nilai, persepsi, sikap, dan lainnya (Pakpahan et al., 2021).

J. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau *Treatment Success Rate* adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan, dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari penjumlahan angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 90%.



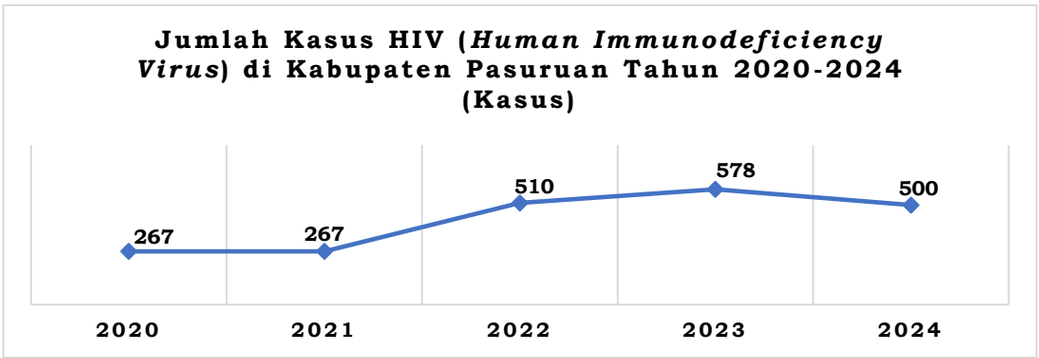
Gambar 2.27-d. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (*Treatment Success Rate*) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (*Treatment Success Rate*) di Kabupaten Pasuruan mengalami penigkatan. Capaian *Treatment Success Rate* mengalami penurunan pada tahun 2022, akan tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mengalami kenaikan, sudaah memenuhi angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal (90%).

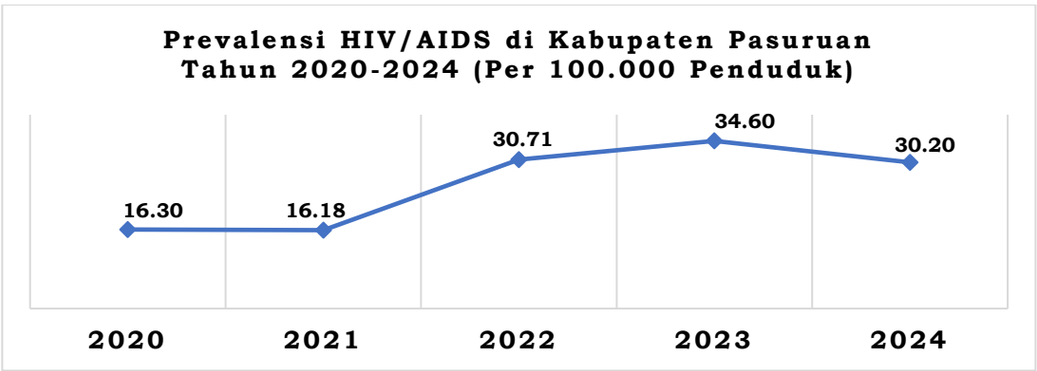
K. HIV

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan patogen yang menyerang sistem imun manusia, terutama semua sel yang memiliki penanda CD 4+ dipermukaannya seperti makrofag dan limfosit-T. HIV merupakan virus yang menyebabkan kondisi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dimana kondisi immunosupresif yang berkaitan erat dengan berbagai infeksi oportunistik, neoplasma

sekunder, serta manifestasi neurologic tertentu akibat infeksi HIV (Kapita Selekta, 2014). HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi seperti didalam darah, Air Mani (Cairan Sperma) atau Cairan Vagina dan Air Susu Ibu. Sebelum HIV berubah menjadi AIDS, penderitanya akan tampak sehat dalam kurun waktu kira-kira 5 sampai 10 tahun. Walaupun tampak sehat, mereka dapat menularkan HIV pada orang lain melalui hubungan seks yang tidak aman, transfusi darah atau pemakaian jarum suntik secara bergantian.



Gambar 2.27-e. Jumlah Kasus HIV di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025



Gambar 2.27-f. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

Dari gambar di atas prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2020-2024 mengalami tren kenaikan. Peningkatan Prevalensi HIV/AIDS menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2022 dan 2023. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Pasuruan mencapai 105,5% artinya telah ada upaya yang optimal dalam meminimalkan jumlah kasus HIV. Berdasarkan kelompok umur penderita HIV paling banyak ditempati kelompok umur 25-49 tahun.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penderita HIV didominasi kelompok usia produktif, tentu hal ini berdampak pada produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan penanganan dan pengendalian HIV/AIDS yang adekuat (memadai). Upaya penanganan tersebut dibuktikan melalui persentase ODHIV baru mendapatkan pengobatan sebesar 48%. Capaian tersebut diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya melalui manajemen pengendalian penyakit yang terstruktur dan kontinyu.

(7) Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Angka Literasi dan Numerasi

Angka literasi dan numerasi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan baca-tulis dan hitung masyarakat di suatu wilayah. Secara definisi angka literasi mengukur persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis dengan pemahaman. Sementara angka numerasi mengukur persentase penduduk yang memiliki kemampuan dasar dalam berhitung dan memahami konsep matematika sederhana.

Kemampuan literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sementara itu kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Adapun cara mengukur kemampuan ini pada dasarnya adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Adapun data kemampuan literasi dan numerasi Kabupaten Pasuruan tingkat SD/MI dan SMP/MTs adalah sebagai berikut :

Tabel 2.25
Angka Literasi dan Numerasi di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan Pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen untuk **literasi membaca**					
SD/MI	%	64,39	71,32	77,35	80
SMP/MTs	%	59,73	66,81	75,31	79,50
Persentase satuan Pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen untuk **numerasi**					
SD/MI	%	45,11	59,27	74,40	77
SMP/MTs	%	42,71	47,77	72,09	78,09

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan tabel 2.25 diatas dapat dilihat bahwa indeks literasi dan indeks numerasai Kabupaten Pasuruan di tingkat SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut mengartikan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks dan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

B. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun di Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2020-2024 sebagaimana tabel di bawah. Indikator ini berbeda dengan rata-rata lama sekolah sebagai pembentuk IPM yang mengukur penduduk usia di atas 25 tahun. Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun mengalami peningkatan dengan capaian tahun 2024 sebesar 7,94 tahun atau sampai dengan kelas 8 SMP.

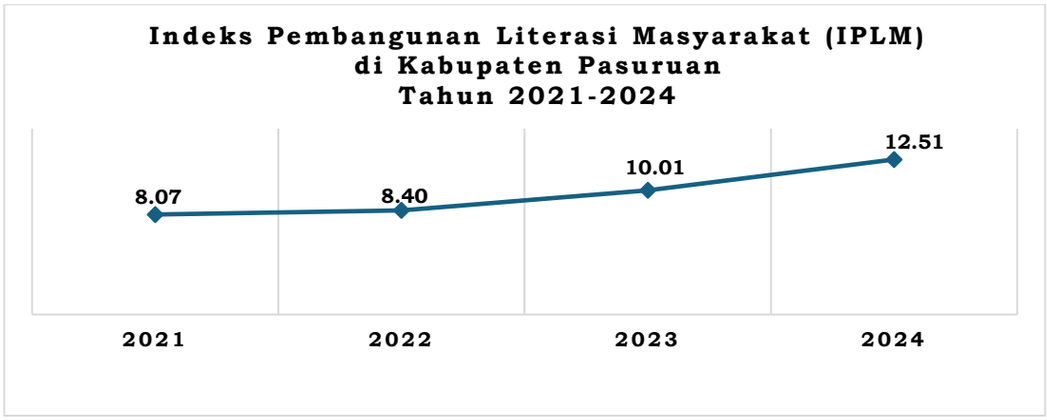
Tabel 2.25
Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas **15 tahun**	Tahun	7,97	7,61	7,53	7,84	7,94

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

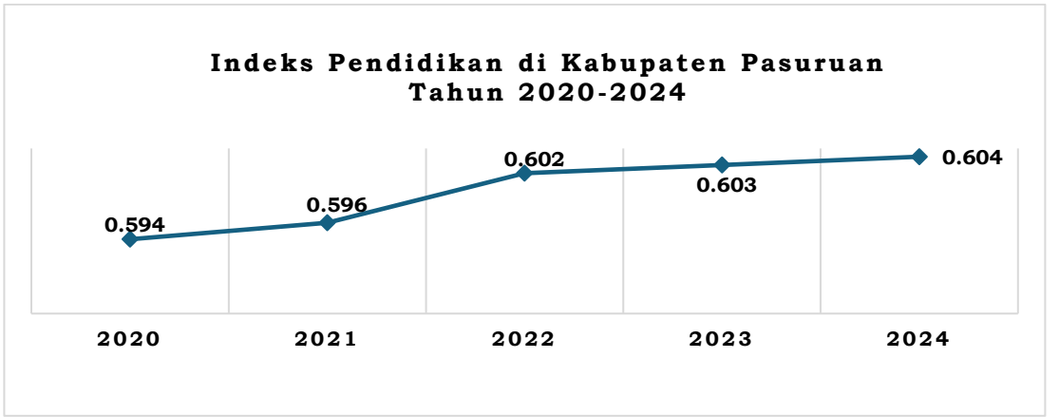
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat literasi masyarakat dan pengembangan literasi secara keseluruhan di wilayah. Indeks ini membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana masyarakat memiliki akses, keterampilan, dan kebiasaaan yang mendukung literasi. Pengukuran IPLM dilakukan dengan menggunakan 7 unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan angka perpustakaan. Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021-2024 selalu mengalami peningkatan sebagaimana pada gambar 2.28.



Gambar 2.28 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun Indeks Pendidikan Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 sebagaimana gambar 2.28-a.



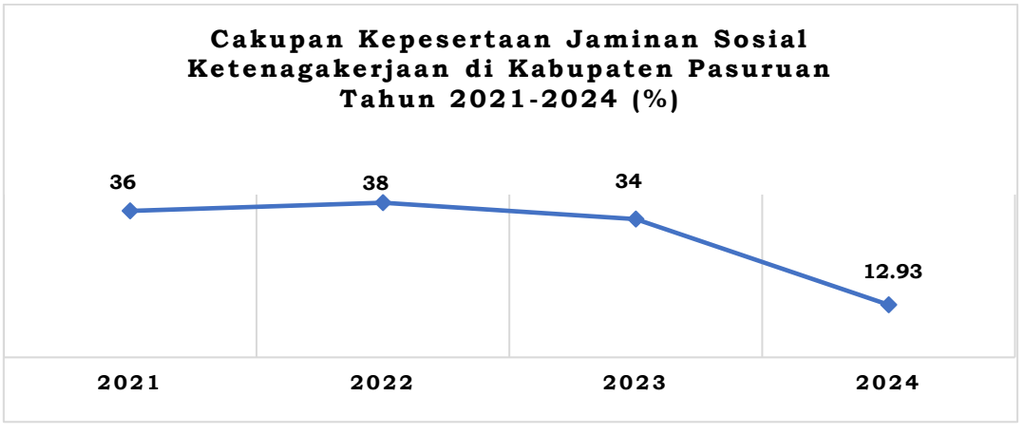
Gambar 2.28-a Indeks Pendidikan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 2.28-a menunjukkan bahwa capaian Indeks Pendidikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 mengalami tren peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan karena semakin tinggi nilai Indeks Pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia.

(8) Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak termasuk kebutuhan akan kesehatan. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 menetapkan Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek (RI, 2011). Dalam beberapa tahun terakhir, negara berusaha untuk mewujudkan jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia (Universal Coverage). Namun, dengan kondisi penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah dalam kondisi disparitas yang sangat tinggi, diperlukan pemetaan komprehensif yang mencakup berbagai aspek untuk menghasilkan pemikiran dan keputusan strategik pada level lokal maupun nasional (Irwandy, 2016). Data dan informasi kepesertaan jaminan sosial berikut memberikan gambaran karakteristik tenaga kerja yang menjadi peserta jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.



Gambar 2.29 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar 2.29 di atas dapat dilihat bahwa cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif. Jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, baik sektor formal maupun informal. Jumlah tenaga kerja sektor informal jauh lebih banyak dari sektor formal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan jaminan sosial tenaga kerja sesuai amanat UU Nomor 3 tahun 1992. Beberapa kendala dihadapi dalam mengimplementasikan program jaminan sosial tenaga kerja. Terbatasnya akses informasi dan rendahnya pengetahuan tenaga kerja terkait program jaminan sosial menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan kepesertaan pada pekerja informal. Mereka belum menyadari pentingnya ikut serta dalam program Jamsostek (Madya & Nurwahyuni, 2019). Selain itu, besarnya iuran yang harus dibayar setiap bulan menjadi pertimbangan bagi pekerja informal untuk ikut program Jamsostek (Adillah & Anik, 2015). Berbeda dengan pekerja formal, besarnya penghasilan pekerja informal tidak menentu tergantung kondisi usaha. Pekerjaan sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak menampung pekerja informal memiliki keterbatasan seperti modal, bahan baku, akses pasar dan sebagainya, yang pada akhirnya berpengaruh pada upah pekerjanya. Dengan demikian diperlukan upaya sinergis dengan melibatkan beberapa sektor untuk meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional agar tenaga kerja mendapatkan perlindungan kesehatan untuk meningkatkan pendapatannya.

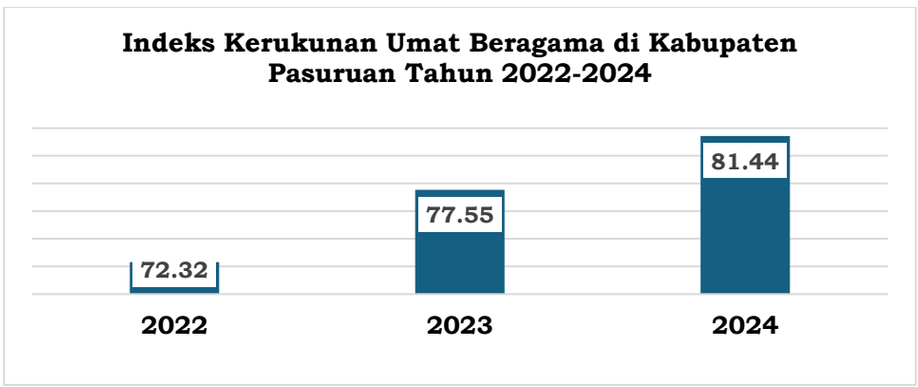
B. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di sektor Formal.

Indikator ini ingin menggambarkan keberpihakan kepada kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dalam memberikan kesempatan berkarya di sektor lapangan pekerjaan formal. Berdasarkan data yang tersedia di tahun 2023, penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal tercatat masih relatif rendah yaitu sebesar 37%.

(9) Beragama, Maslahat, dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesataraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Berdasarkan gambar 2.34 di bawah dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebagaimana pada gambar 2.30.



Gambar 2.30 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024
Sumber: Kantor kementerian Agama Kabupaten pasuruan, 2025

B. Indeks Kebudayaan Daerah

Indeks Kebudayaan Daerah merupakan indikator yang diukur secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagai pengganti/pendekatan terhadap Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) karena hasil penilaian IPK tidak tersedia untuk level kabupaten/kota. Sebagaimana IPK, Indeks Kebudayaan Daerah diukur berdasarkan ketersediaan data yang terbagi dalam dimensi dan indikator sebagaimana tabel 2.26.

Tabel 2.26
Pengukuran Indeks Kebudayaan Daerah

No.	Dimensi / Indikator	Bobot Dimensi	Nilai	
			Max	Min
1	Dimensi Ekonomi Budaya	0,1		
1.1	Persentase penduduk usia 7 tahun ke atas sebagai pelaku/penggiat seni		0	100
2	Dimensi Pendidikan	0,2		
2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas		0	15
2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas		0	18
2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)		0	100
2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian		0	45
2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah		0	100
2.6	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah		0	100
3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	0,2		
3.1	Kerukunan Umat Beragama		0	100
4	Dimensi Warisan Budaya	0,25		
4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran		0	55
4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan		0	55
4.3	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya (museum dan candi)		0	35
5	Dimensi Ekspresi Budaya	0,1		
5.1	Persentase pelaku/penggiat seni yang melakukan pertunjukan seni		0	100
6	Dimensi Budaya Literasi	0,1		
6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir		0	85
6.2	Tingkat Kegemaran Membaca		0	100
7	Dimensi Gender	0,05		

No.	Dimensi / Indikator	Bobot Dimensi	Nilai	
			Max	Min
7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki		0	100
7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat		0	100
7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki		0	100

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024, data diolah

Pengukuran indeks kebudayaan daerah dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu:

1. Interval 0 - 20 = sangat rendah
2. Interval 20,01 - 40 = rendah
3. Interval 40,01 - 60,00 = sedang
4. Interval 60,01 - 80,00 = tinggi
5. Interval 80,01 - 100 = sangat tinggi

Hasil perhitungan indeks kebudayaan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.26
Capaian Indeks Kebudayaan Daerah

Uraian	2023	2024*
Indeks Kebudayaan Daerah	**55,48 (sedang)**	**55,12 (sedang)**
Indeks Dimensi Ekonomi Budaya	0,34	0,43
Indeks Dimensi Pendidikan	100,78	100,81
Indeks Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	77,55	81,44
Indeks Dimensi Warisan Budaya	23,44	6,91
Indeks Dimensi Ekspresi Budaya	42,66	64,11
Indeks Dimensi Budaya Literasi	68,11	73,98
Indeks Dimensi Gender	56,88	61,71

Catatan : tahun 2024, data sementara
Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan perhitungan tersebut indeks kebudayaan daerah mengalami penurunan namun masih tetap dalam kategori ‘Sedang’. Penurunan signifikan terjadi pada dimensi warisan budaya, hal ini disebabkan adanya validasi dan perubahan database yang disesuaikan dengan aplikasi Data Pokok Kebudayaan di Pemerintah Pusat.

(10) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak.

Pembangunan perlindungan terhadap anak diukur dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak oleh terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak di Kabupaten Pasuruan dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.26-a
Capaian Pembangunan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan

Tahun	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindung-an Khusus	IPA	IPHA	IPKA
2021	41,41	79,02	78	27,71	73,88	60,93	-	-
2022	47,79	71,13	81,39	30,88	80,61	63,15	58,16	79,97
2023	46,74	78,42	79,73	34,71	74,75	63,64	60,43	77,50

Sumber: KemenPPPA, 2024

Berdasarkan data tabel di atas, capaian IPA dan IPHA menunjukkan peningkatan pada tahun 2023, sedangkan IPKA mengalami penurunan. Nilai klaster penyusun yang mengalami peningkatan yaitu klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, sementara yang mengalami penurunan pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan serta klaster Perlindungan Khusus.

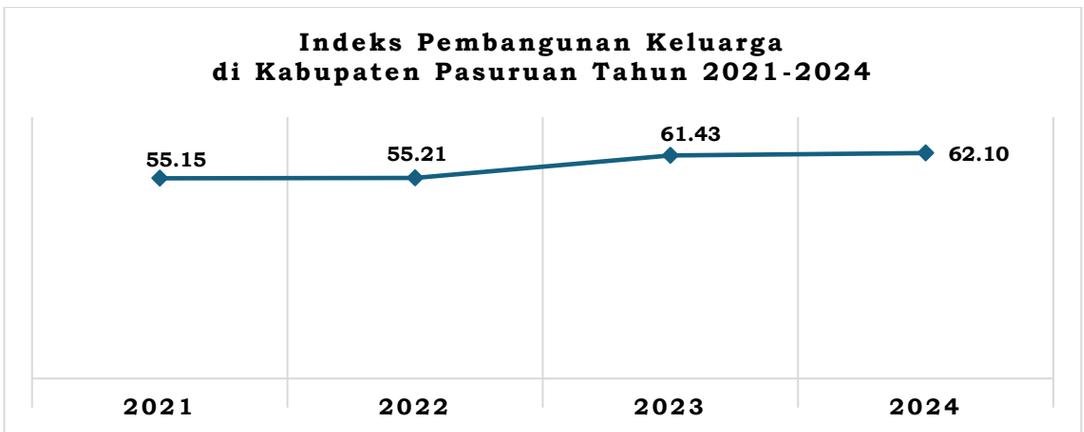
Capaian IPA Kabupaten Pasuruan tahun 2023 (63,64) berada di atas wilayah sekitar antara lain Kabupaten Probolinggo (59,26) dan Kabupaten Malang (68,51). Capaian IPHA Kabupaten Pasuruan tahun 2023 (60,43) di atas Kabupaten Probolinggo (59,26) dan di bawah Kabupaten Malang (68,51). Capaian IPKA Kabupaten Pasuruan tahun 2023 (77,50) di atas Kabupaten Probolinggo (75,86) dan di bawah Kabupaten Malang (86,24).

B. Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Dengan demikian, indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Keluarga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
2. Indeks Pembangunan Keluarga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70;
3. Indeks Pembangunan Keluarga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Indeks Pembanggunan Keluarga (iBangga) baru diperkenalkan oleh BKKBN tahun 2020, sehingga perhitungan baru dimulai tahun 2021. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2024 memiliki tren capaian yang terus meningkat. Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pasuruan mempunyai kategori yang cukup baik atau berkembang.

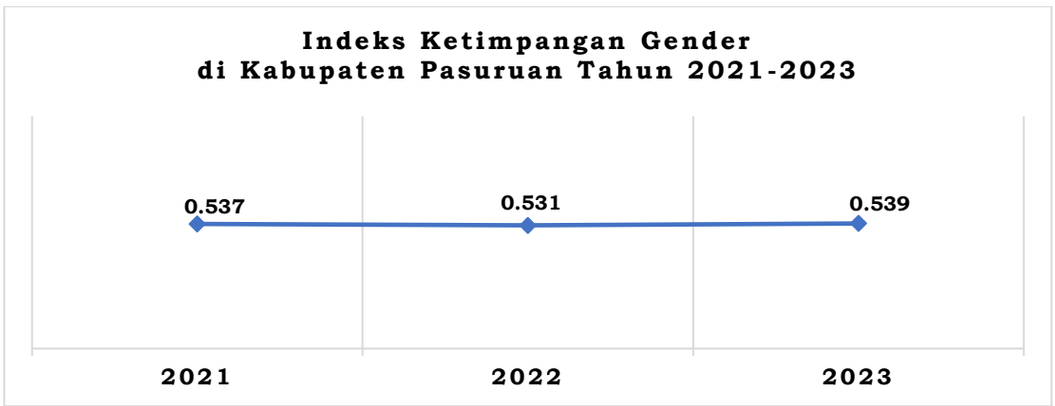


Gambar 2.30 Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2025

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. IKG menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja.



Gambar 2.31 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2023

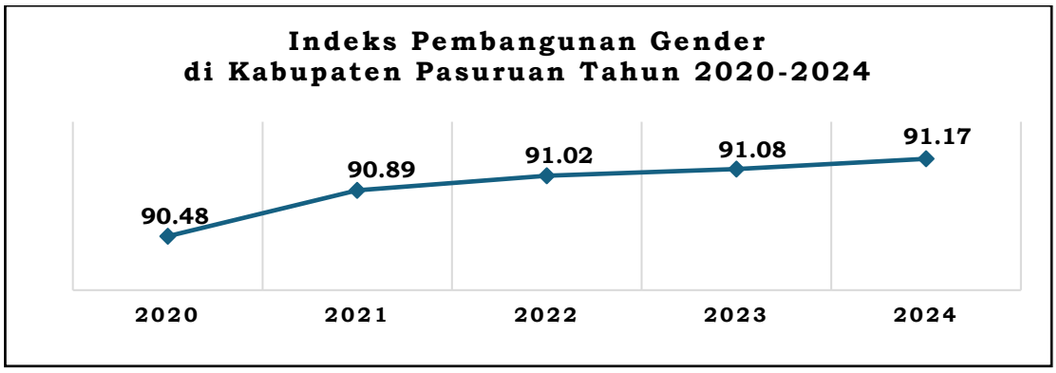
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2023 (data tahun 2024 belum tersedia) memiliki capaian yang fluktuatif. Fluktuasi dalam indeks ketimpangan gender mencerminkan dinamika kompleks dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kesetaraan gender dalam masyarakat.

D. Indeks Pembangunan Gender

Tingkat keberhasilan pembangunan yang telah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender. Indikator tersebut diartikan sebagai ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit khususnya berkaitan dengan gender atau

perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dan IPM Laki-laki. Dari hal tersebut dapat menjelaskan berbagai program pembangunan yang mengakomodasi dari kesetaraan dan keadilan gender.



Gambar 2.32 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

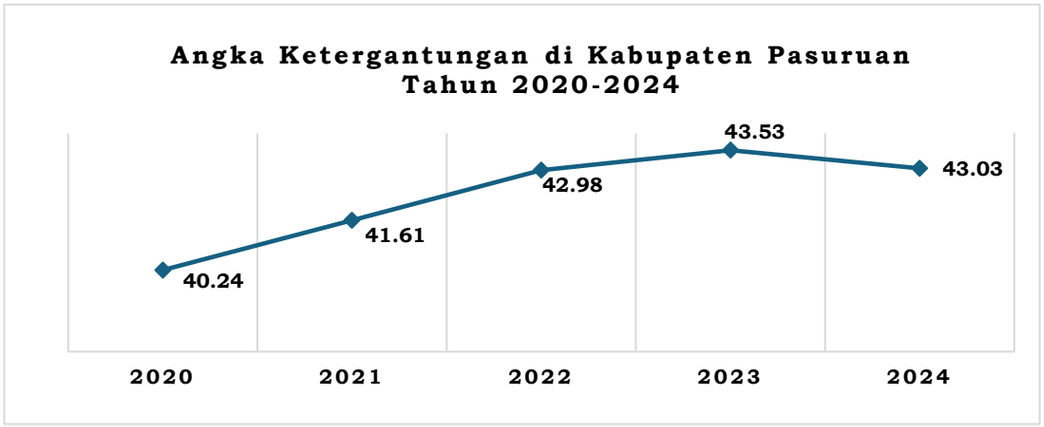
Gambar 2.32 menunjukkan bahwa capaian dari Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pasuruan mengalami tren peningkatan pada periode tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan manusia khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan menggambarkan seberapa besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih fokus meningkatkan kualitas/kompetensi penduduk usia produktif untuk menekan jumlah pengangguran, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya, melalui lapangan kerja formal dan informal.



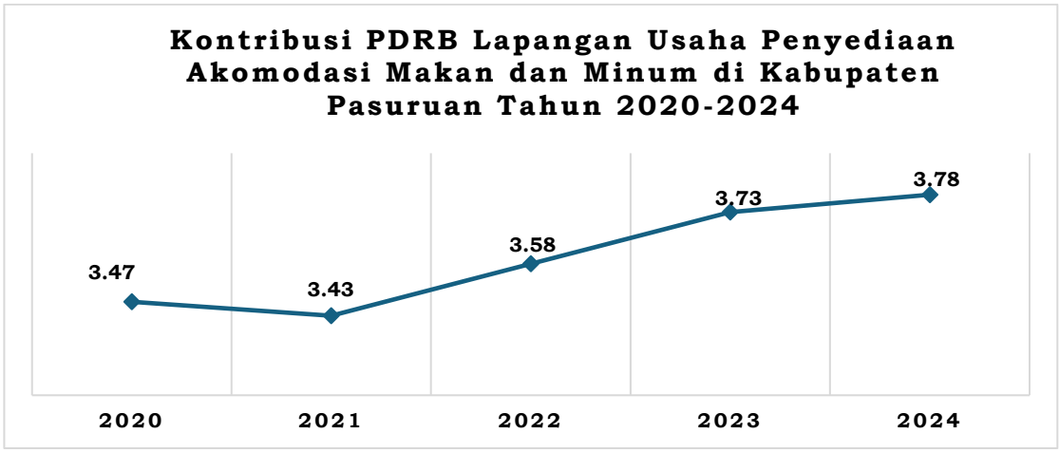
Gambar 2.33 Angka Ketergantungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 2.33 menunjukan rasio ketergantungan tahun 2024 sebesar 43,03 menjelaskan bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 43-44 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua). Rasio ketergantungan pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, yang artinya semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan penduduk usia produktif dengan menekan jumlah pengangguran sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui lapangan kerja formal dan nonformal.

3. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pasuruan cenderung naik selama empat tahun terakhir. Pada Tahun 2024 sektor ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Data Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2.34 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Faktor pendorong meningkatnya Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Pasuruan :

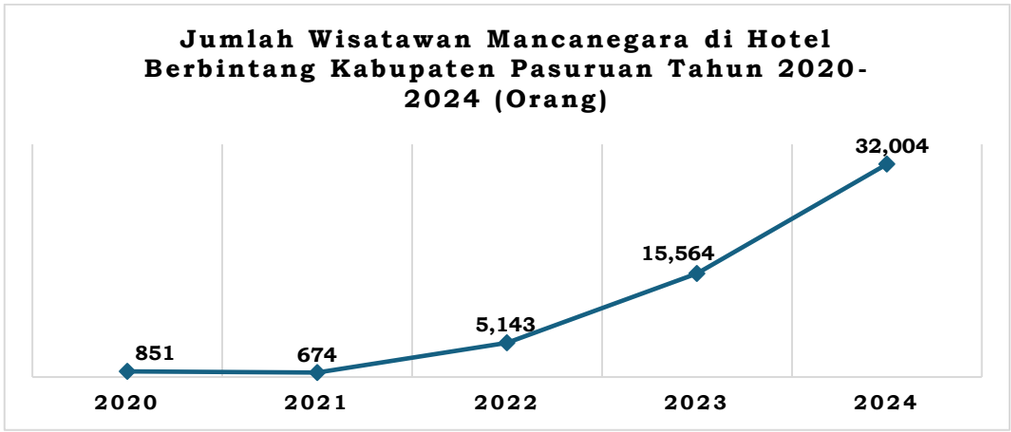
1) Pertumbuhan pariwisata : meningkatnya jumlah wisatawan domestic dan mancanegara mendorong konsumsi di restoran, kafe dan usaha kuliner local;
2) Perkembangan Gaya Hidup Konsumen : Tren makan di luar, food delivery, dan minat terhadap kuliner lokal/internasional meningkatkan permintaan;
3) Digitalisasi dan Platform Online : Pemanfaatan aplikasi pemesanan makanan (GoFood, GrabFood, ShopeeFood) memperluas pasar dan meningkatkan volume transaksi;
4) Investasi dan Inovasi Usaha Kuliner : Banyaknya usaha baru di sektor makanan dan minuman serta inovasi menu, layanan, dan konsep restoran meningkatkan nilai tambah.

Sedangkan faktor penghambat menurunnya Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Pasuruan :

(1) Ketergantungan pada sektor pariwisata : jika terjadi penurunan kunjungan wisatawan (seperti saat pandemi), maka sektor ini sangat terdampak;
(2) Persaingan ketat : banyaknya pelaku usaha menyebabkan margin keuntungan kecil dan usaha tidak bertahan lama jika tidak inovatif;

(3) Kenaikan harga bahan baku : fluktuasi harga pangan (beras, minyak goreng, daging, sayur dan lain-lain) dan meningkatkan biaya operasional;
(4) Ketidakpastian ekonomi dan daya beli : jika daya beli masyarakat turun, konsumen akan mengurangi konsumsi makanan di luar rumah;
(5) Kurang promosi dan pemasaran yang efektif berbasis digital untuk menarik wisatawan dan pelanggan agar berkunjung ke Kabupaten Pasuruan;
(6) Kurang optimalnya dalam penerapan higinitas dan keamanan pangan.

Peningkatan Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dapat didorong dengan mengembangkan sektor Pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata secara terpadu merupakan peluang strategis yang dapat menguntungkan daerah melalui penciptaan angkatan kerja berkualitas serta peningkatan produktivitas industri sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penunjang PAD yang signifikan. Beberapa sektor yang dapat padukan yaitu sektor pariwisata, budaya dan kesenian yang berkontribusi sangat besar terhadap sektor perdagangan dan perhotelan yang nantinya di harapkan dapat berimbas pada meningkatnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD, jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap peningkatan pajak hotel, jumlah wisatawan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap PAD melalui pajak hotel sebagai variabel intervening. Berikut data jumlah wisatawan mancanegara di hotel berbintang.

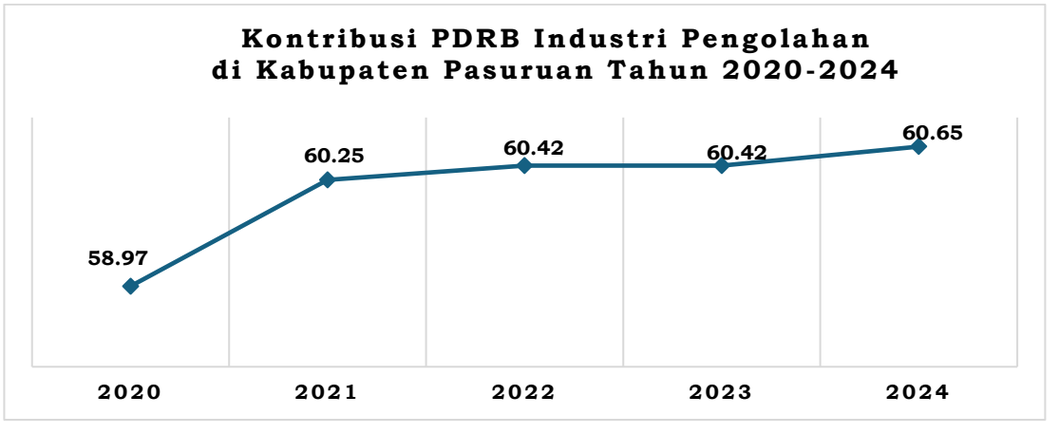


Gambar 2.34-a. Jumlah Wisatawan di Hotel Berbintang Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 2025

B. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

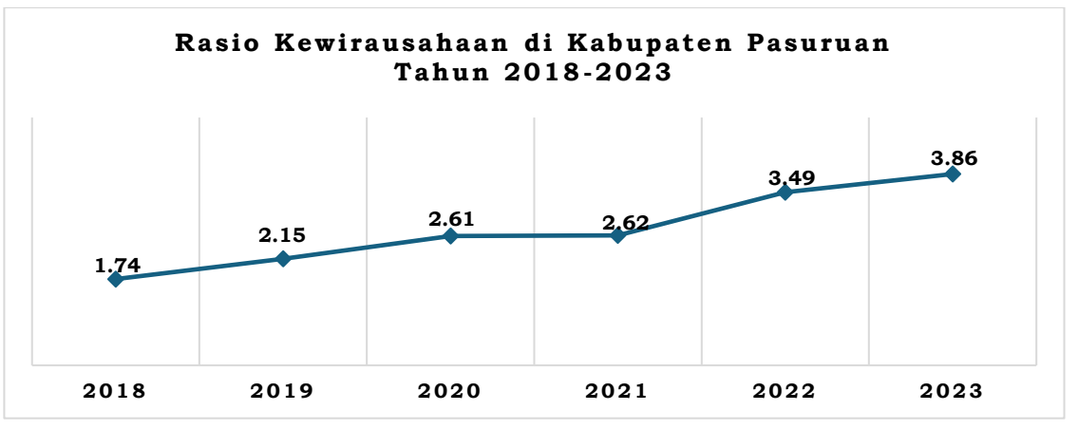
Di Kabupaten Pasuruan salah satu sektor penggerak perekonomian atau pendapatan daerah adalah sektor industri. Perkembangan industri di Kabupaten Pasuruan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adakah sektor industri pengolahan. Berdasarkan data Konstribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Sektor industri pengolahan memberikan konstribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan. Sektor ini secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Pasuruan, dengan angka di atas 60% dari total PDRB sejak 2021 dan menunjukkan tren peningkatan yang stabil, yang menunjukkan betapa pentingnya sektor industri pengolahan sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang perlu terus didukung dan dikembangkan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan peran strategis ini, pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur industri, mendorong investasi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, mempercepat hilirisasi produk, memberdayakan UMKM berbasis industri, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat daya saing sektor industri pengolahan.



Gambar 2.35 Konstribusi Industri Pengolahan
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

C. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Selanjutnya terkait penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Indikator ini penting untuk dihitung dalam 20 (duapuluh) tahun ke depan sejak tahun awal perencanaan yaitu tahun 2025, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

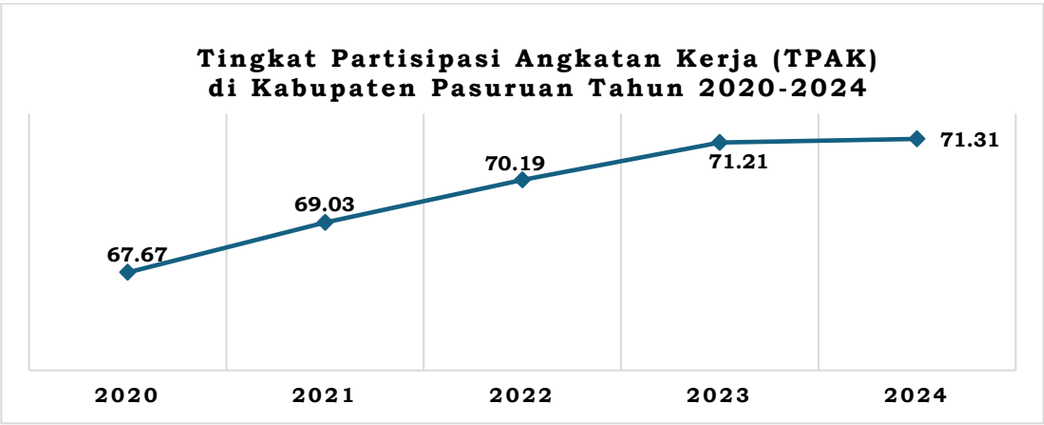


Gambar 2.36 Rasio Kewirausahaan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Rasio kewirausahaan menjadi penting sebagai salah satu indikator kinerja daya saing ekonomi Kabupaten Pasuruan dikarenakan peningkatan nilainya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan penciptaan peluang bisnis baru, yang berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Pasuruan terus meningkat setiap tahunnya. Tingginya tingkat kewirausahaan juga meningkatkan daya saing ekonomi suatu daerah, mendorong diversifikasi ekonomi, dan meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi pasar. Selain itu, kewirausahaan dapat memperbaiki kualitas hidup dengan menyediakan barang dan jasa baru, meningkatkan akses terhadap teknologi, dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan infrastruktur lokal. Dengan demikian, peningkatan rasio kewirausahaan adalah langkah strategis untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

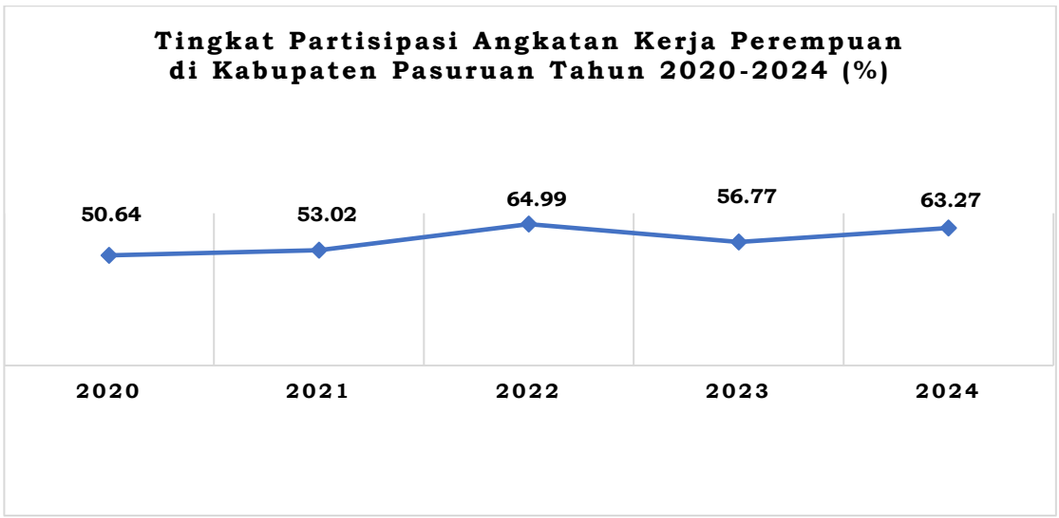
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ekonomi yang mengukur persentase populasi usia keerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan, TPAK memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan dapat memberikan wawasan penting tentang kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Adapun capaian TPAK Kabupaten Pasuruan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui gambar 2.37.



Gambar 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Gambar 2.37 menunjukkan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 memiliki capaian yang selalu meningkat. Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini mengindikasikan bahwa ada lebih banyak orang usia produktif yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan TPAK menunjukkan beberapa hal positif terkait kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Pasuruan. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak orang yang bekerja akan membuat tingkat produksi barang dan jasa cenderung meningkat juga.

Selanjutnya untuk mengetahui peluang perempuan berpartisipasi dalam dunia kerja diukur dengan indikator **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.



Gambar 2.37-a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian TPAK Perempuan Kabupaten Pasuruan mengalami fluktiatif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Capaian tersebut menginterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan

kerja perempuan sebesar 50% artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja.

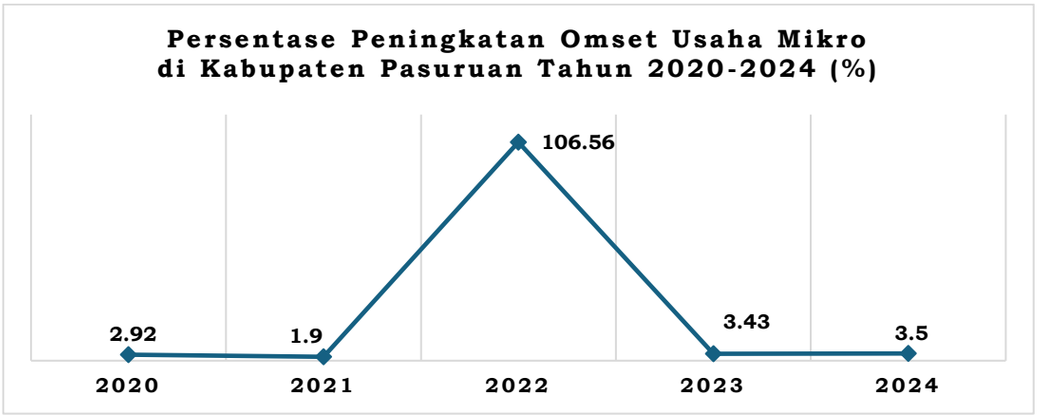
E. Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro

Sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), definisi dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah adalah sebagai berikut : Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki jumlah aset maksimal Rp.50.000.000 dan jumlah omset maksimal Rp.300.000.000.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bikan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki aset maksimal > Rp.50.000.000 sampai Rp.500.000.000 dan jumlah omset maksimal > Rp.300.000.000 sampai Rp.2.500.000.000.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang yang bukan merupakan anak perusahaan atau bikan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dan memiliki aset maksimal > Rp.500.000.000 sampai Rp.10.000.000.000 dan jumlah omset maksimal > Rp.2.500.000.000 sampai Rp.50.000.000.000.

Faktor yang paling dominan dalam peningkatan usaha UMKM adalah pengembangan dibidang sumber daya manusia, kualitas produk, inovasi dan teknologi, serta keadaan ekonomi yang tidak stabil. Data peningkatan omset usaha mikro Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

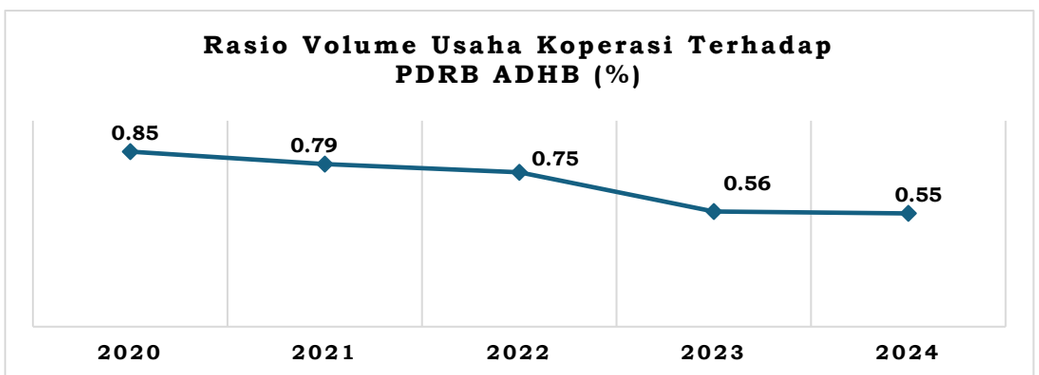


Gambar 2.37-b. Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan gambar di atas menunjukan adanya peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2022. Jumlah omset usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 mencapai 1.022,10 Miliar Rupiah mengalami kenaikan dari tahun 2021 yang mencapai 494,83 Miliar Rupiah.

F. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap ADHB

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB mengalami penurunan secara berturut-turut dibandingkan dengan tahun 2019.



Gambar 2.37-c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan, 2025

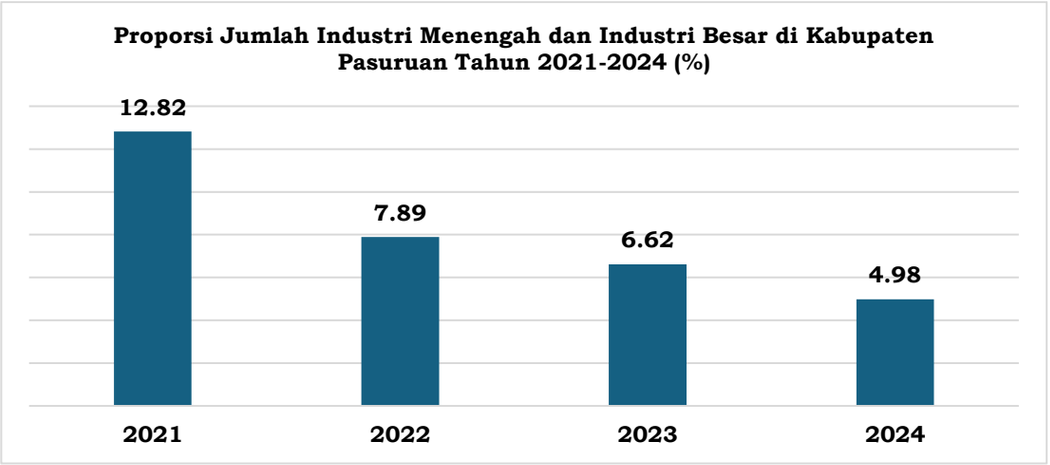
G. Proporsi Jumlah Industri Menengah dan Industri Besar

Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Sedangkan industri besar adalah modal sangat besar > Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil (jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih), pemasarannya berskala nasional atau internasional. Sesuai dengan dokumen RTRW, Kabupaten Pasuruan mempunyai kawasan Industri PIER di kecamatan Rembang, Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Nguling dan memiliki Industri Kecil, Menengah dan Besar tersebar di beberapa kecamatan. Jumlah Industri Kecil, industri menengah dan industri besar pada tahun 2024 adalah sebanyak 10.710 unit.

Proporsi industri menengah dan besar di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dari 12,82% di 2021 menjadi 6,62% di 2023, yang mengindikasikan dominasi industri kecil dalam struktur industri daerah, yang dapat berdampak pada dinamika pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penurunan proporsi industri menengah dan besar menunjukkan adanya perubahan struktur industri yang perlu diwaspadai. Melihat kondisi ini, perlu melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab penurunan proporsi industri menengah dan besar, yang diimbangi dengan strategi penguatan industri skala menengah dan besar untuk menjaga pertumbuhan investasi, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja formal ke depan. Untuk mengatasi potensi dampak negatif ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu:

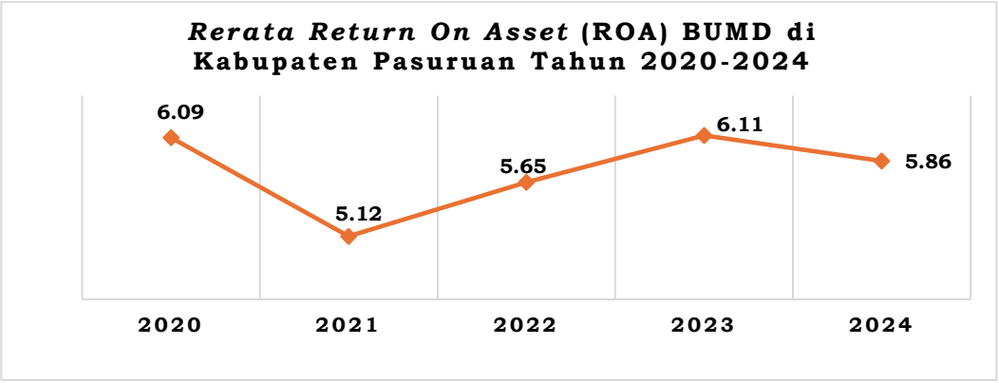
- **Merumuskan kebijakan pro-investasi** untuk industri menengah dan besar,
- **Mengembangkan kawasan industri baru** atau memperkuat kawasan industri yang ada,
- **Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampil** melalui program pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri,
- **Menyediakan insentif fiskal** dan kemudahan perizinan bagi pengembangan industri skala menengah dan besar,

- **Mendorong kolaborasi** antara industri kecil dan industri besar dalam rantai pasok (supply chain) untuk memperkuat ekosistem industri lokal.



Gambar 2.37-d. Proporsi Jumlah Industri Menengah dan Industri Besar di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2025

H. Return On Asset (ROA) BUMD



Gambar 2.37-e. *Return On Asset* BUMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2025

ROA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pada gambar di atas capaian *Return On Asset (ROA)* BUMD di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal itu dikarenakan kenaikan laba bersih pada 2 (dua) BUMD (PDAM dan BPR Mina Mandiri) tahun 2024 yang mencapai Rp.5.559.153.379 tidak seimbang atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan total asetnya yang mencapai Rp.70.562.757.241.

I. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah mengevaluasi kinerja inovasi daerah. Indeks ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mendorong dan mempertahankan kegiatan inovatif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan pembangunan secara keseluruhan. Komponen-komponen utama termasuk sumber daya manusia dan penelitian, struktur ekonomi dan daya saing, hasil inovasi, infrastruktur dan konektivitas, keuangan dan investasi, dan kecanggihan pasar.

Tabel 2.27
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

Indeks Inovasi Daerah			
2021	**2022**	**2023**	**2024**
10,72 Kurang Inovatif	55,73 Inovatif	64,47 Sangat Inovatif	67,70 sangat inovatif

Sumber : KEMENDAGRI/BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Inovasi daerah sangat penting untuk tolok ukur dan perbandingan, sehingga memungkinkan daerah untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Indeks inovasi daerah membantu dalam merancang intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan inovasi dengan meningkatkan pendidikan, mendorong penelitian dan pengembangan (litbang), dan meningkatkan infrastruktur. Selain itu, Indeks inovasi daerah juga menginformasikan keputusan investasi dengan menyoroti potensi inovatif suatu wilayah, sehingga menarik bisnis dan investor.Hasil pengukuran indeks inovasi daerah di Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan dan mencapai kategori “sangat inovatif.”

J. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Perhitungan IDSD dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setiap tahunnya. Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental *(basic requirement factors),* faktor penguat efisiensi *(efficiency enhancers),* dan faktor inovasi dan kecanggihan *(innovation and shopistication factors)* yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Nilai IDSD Kabupaten Pasuruan tahun 2022-2023 disajikan dalam tabel 2.28.

Tabel 2.28
Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2022-2023

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	4,3	2,96	2,92	4,04	3,85	3	1,42	1,85	1,74	5	5	2,04	3,18
2023	4,37	2,97	4,01	3,32	3,88	3,58	1,43	2,07	1,96	5	2,67	2,43	3,14
2024	4,81	4,26	4,20	3,80	3,82	3,49	1,68	2,15	0,83	5	3,74	2,57	3,36

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Pada periode 2024, skor daya saing Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasuruan memiliki potensi besar untuk terus bersaing di tingkat regional maupun nasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 untuk pilar 2 (infrastruktur) ada kenaikan yang signifikan yang menggambarkan bahwa peningkatan ketersediaan infrastruktur serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi di Kabupaten Pasuruan.

Untuk dapat meningkatkan daya saing daerah perlu memperbaiki kinerja pada pilar-pilar yang lemah, Kabupaten Pasuruan akan mampu mengakselerasi perbaikan skor daya saing,

menyamai bahkan melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional, serta memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang yang lebih inklusif dan berdaya tahan tinggi.

4. Penerapan Ekonomi Hijau

A. Indeks Ekonomi Berkelanjutan

Indeks Ekonomi Berkelanjutan merupakan gagasan mandiri Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagai pengganti/pendekatan indeks ekonomi hijau, dikarenakan belum tersedia publikasi indeks ekonomi hijau pada level kabupaten/kota. Indeks ekonomi berkelanjutan berpedoman pada indeks ekonomi hijau dengan mempertimbangkan ketersediaan data indikator/variabel dan relevansi indikator/variabel pengganti. Indeks ekonomi berkelanjutan diukur dengan konstruksi sebagai berikut (table 2.29).

Tabel 2.29
Pengukuran Indeks Ekonomi Berkelanjutan

NO	PILAR/INDIKATOR	BOBOT PILAR	NILAI	
			MAX	MIN
I	PILAR LINGKUNGAN	0,5		
1	Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (%)		93,17	0,50
2	Konsentrasi BOD (mg/liter)		2,00	6,00
3	Konsentrasi NO2 (µg/m3)		0,19	40,00
II	PILAR EKONOMI	0,3		
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Juta Rp)		131,00	21,00
2	Produktivitas pertanian (rata-rata) (ton/hektar/tahun) untuk komoditi padi dan budidaya ikan			
	Padi		72,00	48,00
	Budidaya Ikan		19,00	3,00
3	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (IDR juta/orang)		200,00	200,00
4	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa (IDR juta/orang		200,00	200,00
III	PILAR SOSIAL	0,2		
1	Rata-rata Lama Sekolah usia 25 th ke atas (tahun)		12,00	2,00
2	Angka Harapan Hidup (tahun)		75,50	55,00
3	Tingkat Kemiskinan (%)		-	13,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		3,00	15,00

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

Berikut tabel 2.30 hasil perhitungan indeks ekonomi berkelanjutan:

Tabel 2.30
Indeks Ekonomi Keberlanjutan Tahun 2023-2024

No	Uraian	2023	2024
I	PILAR LINGKUNGAN	52,72	69,52
II	PILAR EKONOMI	80,02	81,59
III	PILAR SOSIAL	64,33	66,76
	INDEKS EKONOMI BERKELANJUTAN	63,23 (baik tier 2)	72,59 (baik tier 2)

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

5. Transformasi Digital

A. Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indeks TIK merupakan indaktor gagasan mandiri Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai pengganti/pendekatan Indeks Pembangunan TIK, dikarenakan tidak tersedianya publikasi indeks TIK pada level kabupaten/kota. Indeks TIK diukur dengan konstruksi terlihat pada tabel 2.31.

Indeks TIK diukur dalam skala 10 dengan pembagian 4 kategori : (1) tinggi (7,51–10,00) ; (2) sedang (5,01–7,50); (3) rendah (2,51–5,00); dan (4) sangat rendah (0–2,50). Hasil perhitungan Indeks TIK tahun 2023-2024 sebagaimana Tabel 2.32, yang menunjukkan adanya sedikit peningkatan dan masih berada dalam kategori ‘rendah’. Komponen terendah terjadi pada subindeks ‘penerapan teknologi informasi dan komunikasi’ meskipun mengalami peningkatan. Sementara itu subindeks ‘keahlian TIK’ mengalami sedikit penurunan karena terdapat penurunan pada indikator angka partisipasi sekolah SMP. Kendala dalam perhitungan Indeks TIK tahun 2024 adalah beberapa data indikator yang bersumber dari BPS belum tersedia data terbaru.

Tabel 2.31
Perhitungan Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
di Kabupaten Pasuruan

INDEKS/ SUBINDEKS / INDIKATOR	SUMBER DATA	PENIMBANG
AKSES DAN INFRASTRUKTUR TIK		0,4
Persentase desa tersedia jaringan GSM (bukan blankspot)	DISKOMINFO	0,33
Persentase ruta dengan computer	Stat Kesra Jatim	0,33
Persentase ruta dengan akses internet	Stat Kesra Jatim	0,33
PENGGUNAAN TIK		0,4
Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan internet	Stat Kesra Jatim	0,5
Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan telepon seluler	Stat Kesra Jatim	0,5
KEAHLIAN TIK		0,2
Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 25 th		0,33
Rata-rata APK SMP-SMA		0,33
APK SMP	BPS	
APK SMA	BPS	
APK Perguruan Tinggi		0,33
Jumlah mahasiswa	BPS JATIM	
Jumlah penduduk 19-24 th	Stat Kesra Jatim	

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.32
Hasil Perhitungan Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2024

INDEKS / SUBINDEKS / INDIKATOR	2023	2024*
INDEKS TIK	3,97	4,14
Akses dan Infrastruktur TIK	5,41	5,48
Penggunaan TIK	2,67	3,02
Keahlian TIK	3,71	3,69

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025
Keterangan : * data sementara

6. Integrasi Ekonomi Lokal dan Regional

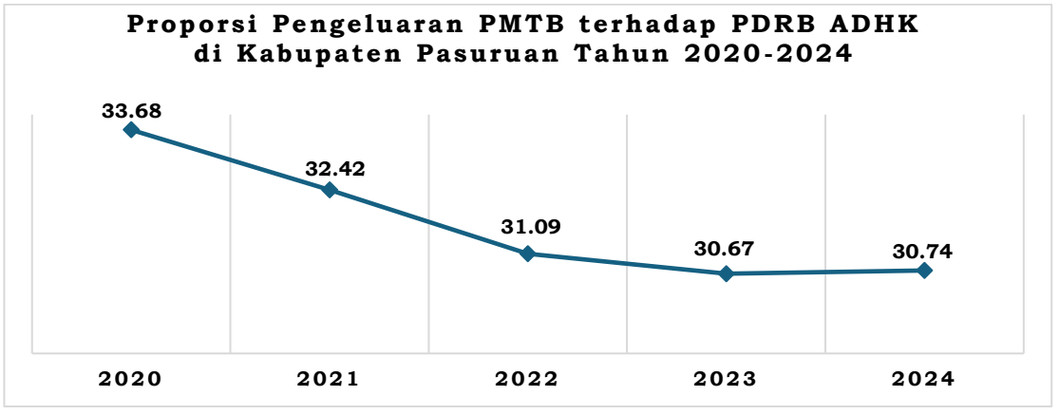
A. Proporsi Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap PDRB ADHK

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB ADHK didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli

(*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Cakupan PMTB terdiri dari : (1) Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya; (2) Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan; (3) Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan investasi fisik salah satu instrumen penggerak perekonomian. Investasi telah menjadi tumpuan ekonomi wilayah disamping konsumsi rumah tangga. Dengan tersedianya data PMTB akan membantu pemerintah mengambil kebijakan dalam meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor untuk berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.

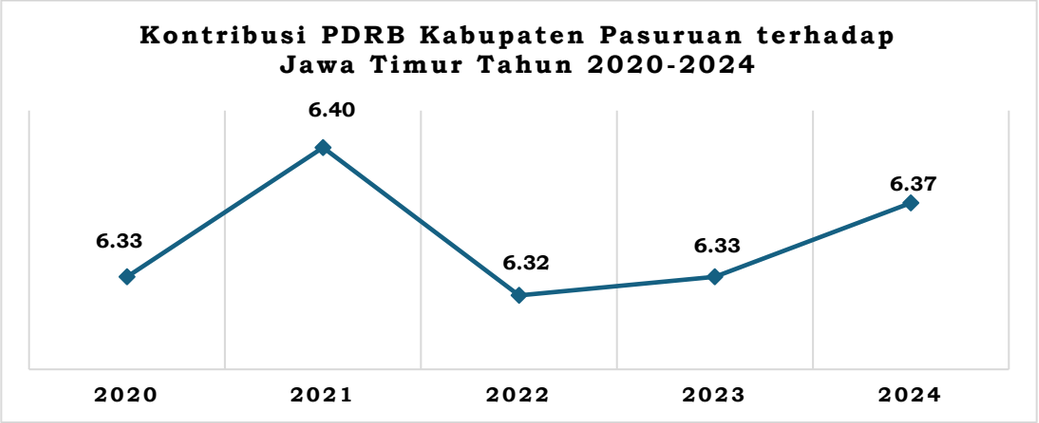


Gambar 2.38 Proporsi Pengeluaran PMTB terhadap PDRB ADHK di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Jika dilihat dari gambar di atas, terjadi penurunan proporsi PMTB terhadap PDRB ADHK Kabupaten Pasuruan selama periode 2020–2024, meskipun sempat menunjukkan sedikit peningkatan di tahun 2024, mengindikasikan adanya potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera mengidentifikasi hambatan investasi dan merumuskan kebijakan yang lebih menarik serta kondusif untuk meningkatkan PMTB, guna memastikan keberlanjutan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Adapun kebijakan yang dapat dilakukan guna meningkatkan PMBT antara lain: mempermudah perizinan, memberikan insentif fiscal dan meningkatkan infrastruktur industri.

B. Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan Terhadap Jawa Timur

Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap total ekonomi Jawa Timur cenderung stabil di kisaran 6%, dengan sedikit peningkatan di tahun 2024 menjadi 6,37 persen setelah sempat menurun, dan ini menunjukkan peran penting Pasuruan dalam perekonomian provinsi, terutama didukung oleh sektor industrinya yang kuat. Hal ini menjadi pendukung Kabupaten Pasuruan sebagai kabupaten/kota dengan nilai PDRB tiga terbesar kategori industri pengolahan di Jawa Timur seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

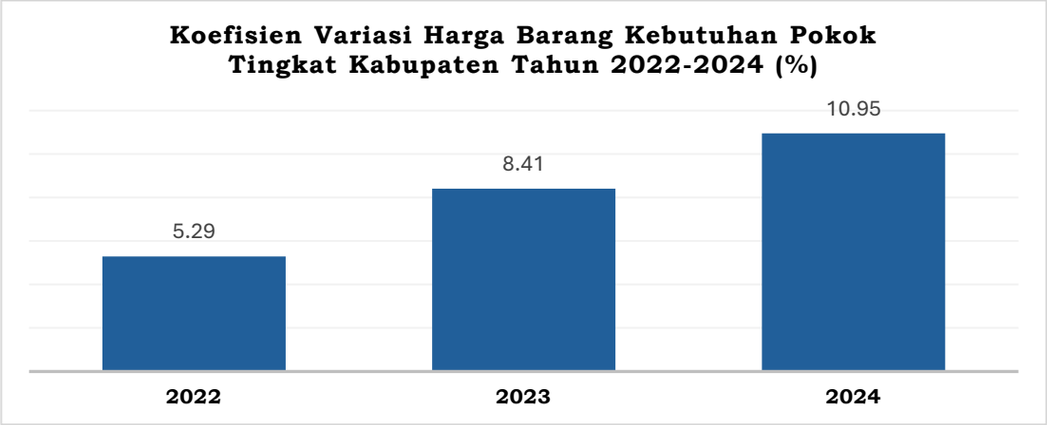


Gambar 2.39 Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap Jawa Timur Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

C. Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Tingkat Kabupaten

Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi.

Terjadi peningkatan variasi harga kebutuhan pokok dari 5,29% di 2022 menjadi 10,95% di 2024, yang mengindikasikan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Pasuruan menjadi kurang stabil atau lebih beragam di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Variasi harga yang melebar dapat menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen, berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, serta menimbulkan tekanan tambahan terhadap kelompok berpendapatan rendah.Oleh karena itu, peningkatan variasi harga ini dapat dikategorikan sebagai kondisi yang kurang baik bagi stabilitas ekonomi daerah, khususnya dalam aspek kesejahteraan masyarakat dan pengendalian inflasi. Peningkatan variasi harga kebutuhan pokok merupakan indikator yang perlu diwaspadai. Pemerintah daerah perlu mengambil tindakan cepat dan terkoordinasi untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan barang secara berkelanjutan.



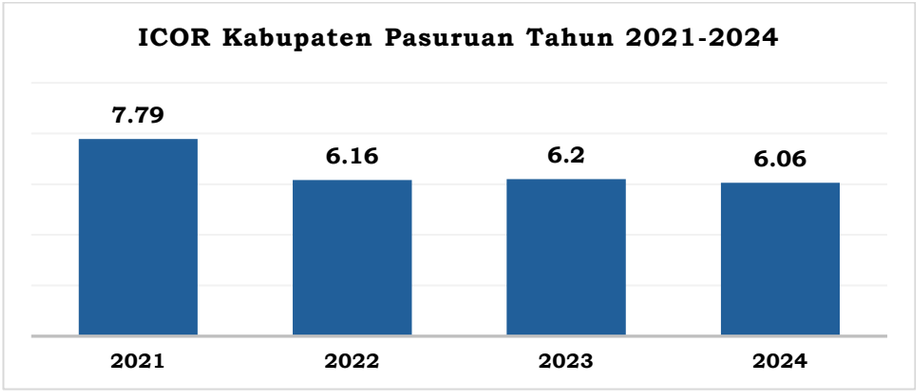
Gambar 2.40 Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Tingkat Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2025

D. ICOR (*Incremental Capital Out Ratio)*

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). ICOR ini perlu dikendalikan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dimana ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output. Setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Jika suatu daerah mempunyai angka (koefisien) ICOR, maka daerah tidak akan menemui kesulitan dalam menentukan berapa besarnya investasi yang diperlukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Semakin kecil nilai koefisien ICOR, semakin efisien perekonomian suatu daerah pada periode waktu tertentu.

ICOR Pasuruan tahun 2024 sebesar 6,06 artinya butuh investasi 6,06 kali lipat untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi sehingga Pemerintah daerah perlu upaya agar investasi lebih efisien yang ditunjukkan dengan penurunan ICOR. Semakin kecil angka ICOR**,** semakin efisien penggunaan investasi, artinya dengan investasi sedikit saja sudah bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar. Upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi investasi, antara lain melalui perbaikan iklim investasi, penguatan

infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif.



Gambar 2.40-a ICOR (*Incremental Capital Out Ratio*) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

7. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur memiliki peran strategis membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya. Indeks infrastruktur wilayah untuk menilai kualitas dan ketersediaan infrastruktur di suatu wilayah, yang dihitung dari rerata indeks aksesibilitas, indeks infrastruktur SDA-cipta karya, indeks infrastruktur perhubungan dan indeks kinerja pengelolaan sampah.

Indeks infrastruktur wilayah merupakan rata-rata dari 5 (lima) indikator, yaitu Indeks Aksesibilitas, Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air-Cipta Karya, Indeks Infrastruktur Perhubungan, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Indeks Aksesibilitas dihitung dari panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dibagi luas wilayah Kabupaten. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air-Cipta Karya dihitung dari rata-rata Infrastruktur Sumber Daya Air dan Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air = volume ketersediaan dibagi volume kebutuhan, Indeks Infrastruktur Keciptakaryaan = rata-rata dari persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak, persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan, persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi atau air limbah domestik (layak dan aman), persentase pembangunan gedung yang

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap. Indeks Infrastruktur Perhubungan dihitung dari rata-rata capaian jaringan trayek angkutan umum yang tersedia, capaian prasarana perhubungan yang tersedia, capaian penurunan angka kecelakaan lalu lintas.

Dari beberapa indeks komposit pembentuk indeks infrastruktur wilayah ini, beberapa bisa dilihat perhitungannya sebagai berikut :

Indeks Komposit	2022	2023	2024
Indeks Aksesibilitas	1,26	1,26	1,181
Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air-Cipta Karya	77,98	66,47	72,83
Indeks Infrastruktur Perhubungan	0	47,5	153
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45	45,5	47,9

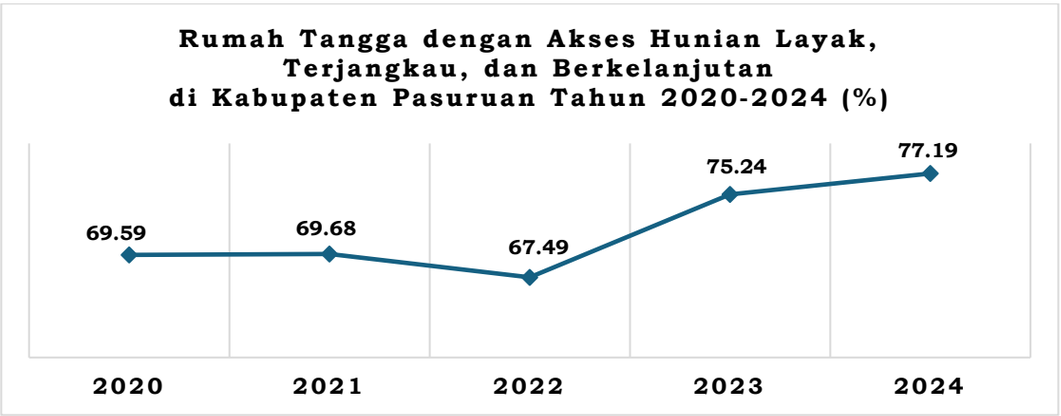
Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Indeks infrastruktur memiliki manfaat dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif. Indikator ini merupakan indikator baru dalam perhitungan infrastruktur Kabupaten Pasuruan untuk 20 tahun kedepan yang dimulai dari 2022. Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan terus meningkat dimulai dari tahun 2022 dengan nilai 31,06, pada tahun 2023 mencapaian 40,18 dan tahun 2024 sebesar 68,73. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur wilayah semakin merata dan layak**,** mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat. Kabupaten Pasuruan mulai keluar dari kondisi ketimpangan infrastruktur antarwilayah.

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Capaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kecenderungan meningkat. Artinya masyarakat semakin mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Peningkatan akses ini

mencerminkan adanya kebijakan pemerintah yang lebih baik dalam menyediakan perumahan, seperti program subsidi, pengembangan perumahan terjangkau, dan regulasi yang mendukung pembangunan hunian berkelanjutan.



Gambar 2.41 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan, 2025

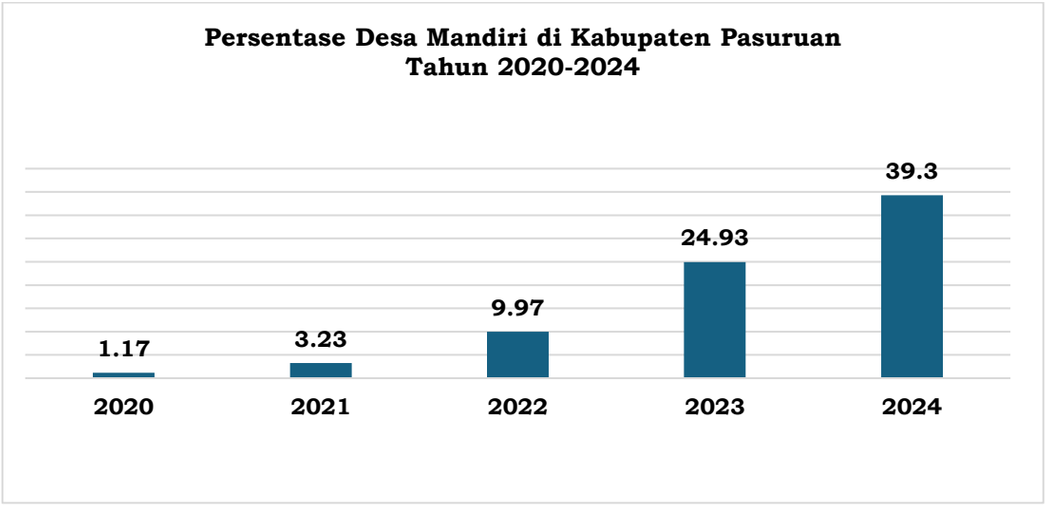
Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan komponen meliputi aspek fisik bangunan, legalitas dan ketersediaaan prasarana lingkungan.

1) Kelayakan fisik bangunan
    a) Memiliki atap rumah
    b) Memiliki jendela, pintu, tembok yang sudah diplamir
    c) Lantai yang sudah dirabat
    d) Memiliki kamar mandi, WC dan septictank
    e) Memiliki sirkulasi udara yang baik
2) Legalitas tanah (sertifikat tanah sebagai hak milik)
3) Akses terhadap layanan dasar

C. Persentase Desa Mandiri

Capaian indikator Persentase Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebagaimana pada gambar 2.42. Perhitungan status desa mandiri tahun 2020-2024 masih menggunakan indeks desa membangun,

selanjutnya untuk perhitungan capaian dan target tahun 2025 dan seterusnya menggunakan indeks desa.



Gambar 2.42 Persentase Desa Mandiri Kab.Pasuruan
Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Indeks Aksesibiltas Wilayah

Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang dan beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya. Formula perhitungan Indeks Aksesibilitas Wilayah adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi luas wilayah Kabupaten Pasuruan. Aksesibilitas wilayah adalah kemampuan atau keadaan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau tidak langsung. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan dan drainase) beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya. Formula perhitungan Indeks Aksesibilitas Wilayah adalah persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi Panjang jalan Kabupaten Pasuruan sesuai SK Gubernur 2024 ditambah persentase cakupan draenase dalam kondisi baik dibagi 2. Capaian kondisi jalan tahun 2024 sudah disesuaikan dengan SK Gubernur tahun 2024.

Tabel 2.32-a
Kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No.	Kondisi Jalan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Baik	Km	1.276,650	1.308,240	1.252,111	1.279,880	292,882
2	Sedang	Km	604,480	653,950	597,821	570,280	1448,327

No.	Kondisi Jalan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Rusak	Km	235,780	204,780	260,909	208,150	110,2
4	Rusak Berat	Km	198,980	148,920	205,049	257,570	299,484

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2023

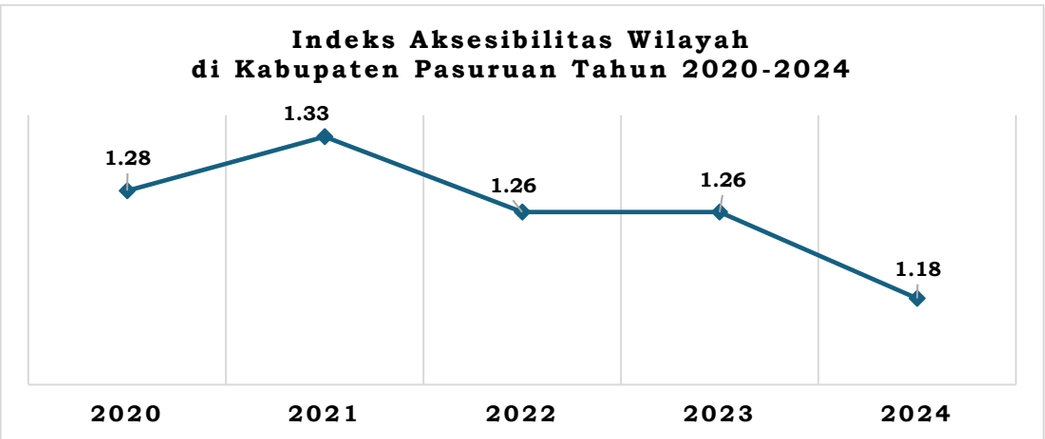
Nilai Indeks Aksesbilitas Wilayah Kabupaten Pasuruan tergolong rendah karena kepadatan penduduknya tergolong tinggi (diatas 1.000 jiwa/km^2), sehingga minimal Indeks Aksesibilitas Wilayah minimal sebesar 1,5 sebagaimana pada tabel 2.32-b.

Tabel 2.32-b.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Jalan di Indonesia

No.	Kepadatan Penduduk/Jiwa	Indeks Aksesibilitas	Keterangan
1	Sangat Tinggi > 5.000	>5	Panjang jalan/luas (km/km^2)
2	Tinggi > 1.000	>1,5	
3	Sedang > 500	>0,5	
4	Rendah > 100	>0,5	

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2025

Capaian indikator indeks aksesbilitas wilayah dan indikator persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap Kabupaten Pasuruan tidak mencapai target dikarenakan bertambahnya volume kerusakan jaringan jalan yang diakibatkan kendaraan berat yang melebihi tonase kelas jalan, cuaca ekstrem dan umur rencana jalan.



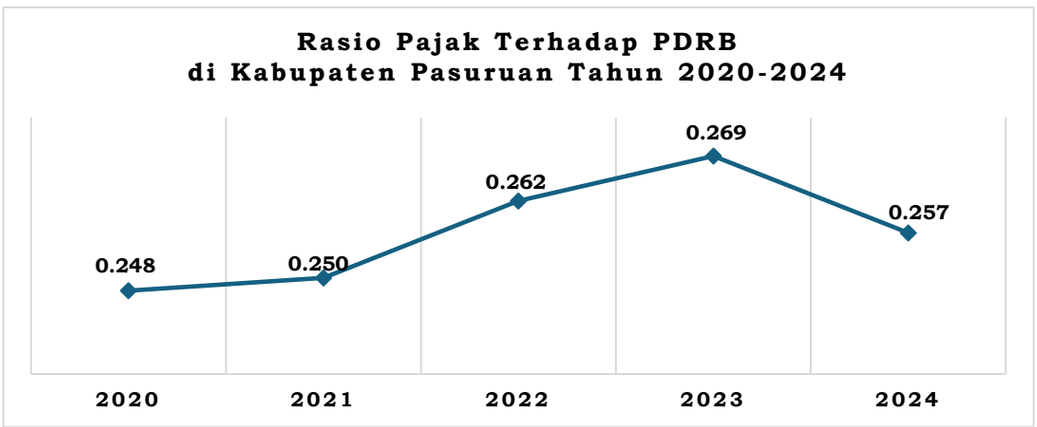
Gambar 2.42-a. Indeks Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2025

7) Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah dalam PDRB

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang paling potensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang penting dalam proses untuk menghasilkan penerimaan dan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan di wilayah tersebut kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengumpulkan pajak seharusnya menjadi modal utama dalam upaya meningkatkan PAD untuk membiayai kegiatan pembangunan.

Definisi sederhana rasio pajak adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimasa yang sama. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu daerah, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Semakin tinggi rasio pajak suatu daerah, maka mengindikasikan baiknya kondisi perekonomian seiring besarnya penghasilan masyarakat yang masuk ke penerimaan pajak.



Gambar 2.43 Rasio Pajak terhadap PDRB di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2025 (Diolah)

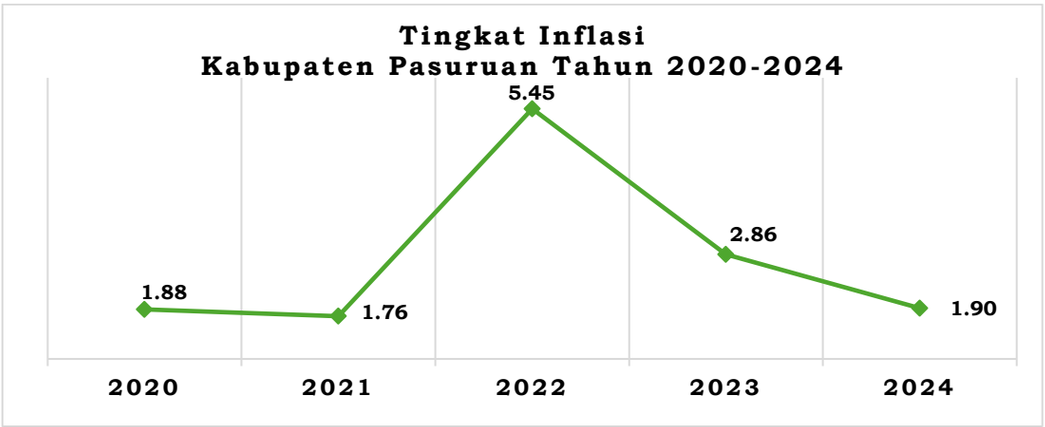
Pada gambar di atas rasio pajak terhadap PDRB di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal itu dikarenakan kenaikan penerimaan pajak daerah tahun 2024 yang mencapai 518.527 juta rupiah tidak

seimbang atau lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan PDRB ADHB sebesar 201.665.140 juta rupiah.

B. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Laju Inflasi perlu dilakukan pengendalian karena berdampak pada tingkat daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Survey BPS di Jawa Timur hanya dilakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu: (1) Kabupaten Jember ; (2) Kabupaten Banyuwangi; (3) Kabupaten Sumenep; (4) Kota Kediri ; (5) Kota Malang ; (6) Kota Probolinggo ; (7) Kota Madiun ; dan Kota (8) Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam menggambarkan **inflasi di Kabupaten Pasuruan mengacu pada daerah yang memiliki kemiripan pola konsumsi masyarakat, yaitu Kota Probolinggo.**

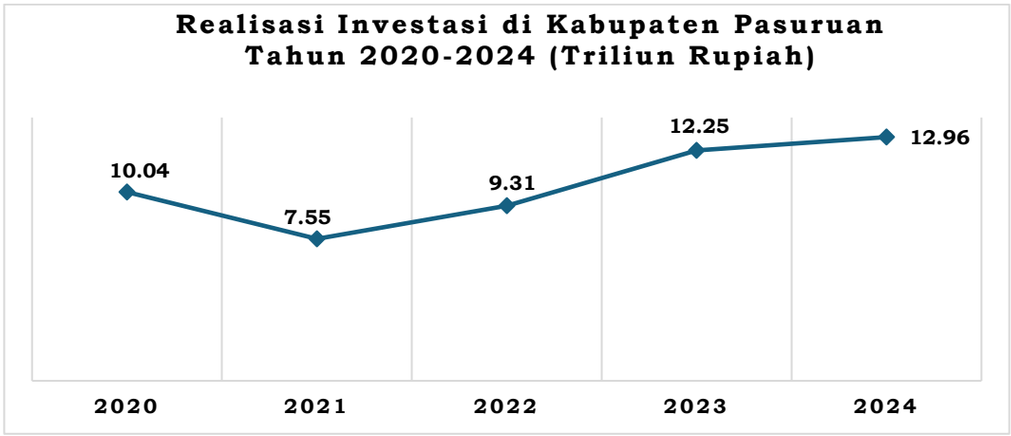
Perkembangan inflasi di Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada inflasi di Kota Probolinggo tahun 2020-2024 secara umum inflasi dapat dikendalikan dan menunjukan adanya penurunan namun terjadi lompatan yang tinggi secara menyeluruh terjadi di tahun 2022. Kondisi tersebut dipengaruhi situasi ekonomi global khususnya dampak perang Rusia-Ukraina. Dalam rangka menjaga kestabilan inflasi, menjaga harga tetap stabil menjadi sangat penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan pemantauan harga secara rutin serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, guna memastikan inflasi tetap dalam batas yang aman dan perekonomian daerah tetap tumbuh dengan baik.



Gambar 2.44 Tingkat Inflasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

C. Realisasi Investasi

Realisasi investasi merupakan indikator penting dari keberhasilan ekonomi suatu wilayah atau negara, karena mencerminkan kemampuan wilayah tersebut untuk menarik, menampung, dan mengelola investasi dengan efektif. Gambar di bawah menunjukkan realisasi investasi di Kabupaten Pasuruan mengalami perkembangan fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Kendala di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan berdampak hingga masa pemulihan di tahun 2021. Fase *rebound* capaian realisasi investasi di Kabupaten Pasuruan didorong oleh banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan agar investor tertarik berbisnis di Kabupaten Pasuruan, mulai dari kajian *Investment Project Ready to Offer*, pelayanan perijinan yang optimal melalui OSS dan Aplikasi Siap Maslahat, hingga berbagai kegiatan promosi seperti pameran tunggal, *investment gathering, one on one meeting*, promosi publikasi melalui media nasional dan yang lainnya. Keberhasilan target realisasi investasi menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan mampu menarik dan mempertahankan investasi serta memberikan sinyal positif kepada investor potensial bahwa wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki kondisi yang mendukung bisnis, seperti infrastruktur yang baik, kebijakan yang stabil, dan lingkungan bisnis yang kondusif.



Gambar 2.44-a. Realisasi Investasi (Triliun Rupiah) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pasuruan, 2025

Nilai realisasi investasi didapatkan dari komposit Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dapat dilihat, Nilai PMDN lebih banyak berkontribusi dalam realiasi investasi di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, hingga tahun 2023 terdapat jumlah perusahaan dari dalam negeri (PMDN) sebanyak 55.160 perusahaan dan PMA mencapai 456 perusahaan.

Tabel 2.32-c.
Nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

Jenis Investasi	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)	5.370.738.859.347	4.297.931.600.062	3.545.171.761.421	5.503.245.000.000	7.537.090.500.000
Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	4.664.503.542.322	3.255.137.950.845	5.767.363.600.000	6.743.933.649.713	5.427.657.625.701

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, 2025

Meski jumlah perusahaan PMDN jauh lebih banyak, nilai investasi PMDN sedikit unggul dari PMA selama 2020- 2024 namun selisih nilai investasi tidaklah terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PMDN di Kabupaten Pasuran mencakup banyak usaha kecil dan menengah, sementara PMA terdiri dari perusahaan dengan investasi besar per perusahaan. PMDN berkontribusi pada diversifikasi dan ketahanan ekonomi lokal, sedangkan PMA membawa investasi besar dan potensi global. Kombinasi keduanya memberikan keseimbangan dalam strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Keduanya harus terus didukung untuk pertumbuhan

ekonomi daerah yang kuat, modern, dan inklusif.

D. PDRB

Berdasarkan data PDRB yang ada, lapangan usaha yang menjadi basis pembentuk struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan, secara konsisten memberikan kontribusi tertinggi terhadap volume PDRB ADHK 5 (lima) terbesar yaitu: (1) Industri Pengolahan; (2) Konstruksi; (3) Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Namun demikian, kelima lapangan usaha tersebut tidak secara konsisten pula memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.33
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2022-2024

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan			Kontribusi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,41%	1,46%	0,72%	5,12%	4,94%	4,72%
2	Pertambangan dan Penggalian	4,19%	3,99%	3,19%	0,44%	0,44%	0,43%
3	Industri Pengolahan	5,41%	4,98%	5,47%	60,59%	60,47%	60,54%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,26%	28,81%	9,35%	0,74%	0,90%	0,94%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,05%	5,15%	6,72%	0,04%	0,04%	0,04%
6	Konstruksi	4,89%	4,57%	5,15%	11,04%	10,97%	10,95%
7	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,98%	5,76%	4,51%	10,02%	10,07%	9,99%
8	Transportasi dan Pergudangan	14,19%	10,41%	10,12%	0,68%	0,72%	0,75%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,40%	8,73%	6,99%	3,30%	3,41%	3,46%
10	Informasi dan Komunikasi	4,34%	6,97%	7,87%	3,81%	3,87%	3,96%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,17%	3,49%	4,5%	0,71%	0,70%	0,69%
12	Real Estate	4,18%	3,23%	3,26%	0,73%	0,72%	0,70%
13	Jasa Perusahaan	2,61%	6,46%	6,15%	0,09%	0,09%	0,09%

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan			Kontribusi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,83%	0,85%	7,53%	0,93%	0,89%	0,91%
15	Jasa Pendidikan	-0,96%	3,10%	5,37%	0,64%	0,63%	0,63%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,45%	4,00%	5,45%	0,18%	0,18%	0,18%
17	Jasa Lainnya	11,78%	8,94%	9,75%	0,94%	0,98%	1,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terus mengalami penurunan persentase kontribusi seiring nilai pertumbuhan setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya program-program pemerintah yang berfokus di subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, misalnya perbaikan dalam sistem agribisnis, perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta pembatasan dalam pengalihan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Salah satu karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Pasuruan umumnya bekerja di sektor pertanian dan nelayan hal ini dibuktikan dengan data penduduk miskin lebih banyak di daerah pesisir. Pertumbuhan pada sektor ini di tahun 2024 akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan untuk itu upaya khusus untuk memajukannya sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang terintegrasi ke dalam sektor tersebut.

Pada kategori kontruksi yang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif sehingga menyebabkan persentase kontribusi terhadap PDRB semakin menurun. Hal berkebalikan terjadi pada kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang semakin menurun, akan tetapi kontribusi terhadap struktur PDRB ADHK semakin bertambah yang berarti meskipun pertumbuhan melambat, ukuran sektor ini relatif besar dibanding sektor lainnya. Hal ini menunjukkan dominasi sektor tersebut akibat pertumbuhan sektor lain yang relatif lebih lambat. Untuk menjaga keseimbangan struktur ekonomi, pemerintah perlu mendorong inovasi di sektor perdagangan sekaligus mempercepat pertumbuhan sektor-sektor potensial lainnya melalui

diversifikasi ekonomi, penguatan produktivitas, dan peningkatan daya beli masyarakat.

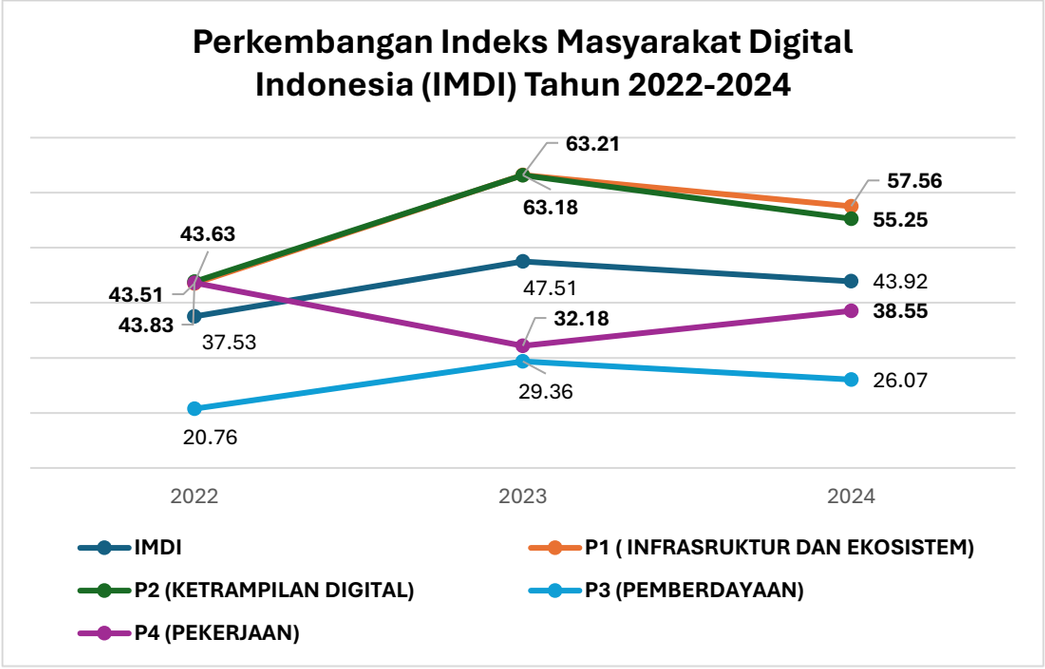
E. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dibangun sebagai proksi indikator inklusi keuangan pada level Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran dan permintaan untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. IKAD berfungsi sebagai alat pemantauan untuk menganalisis capaian program inklusi keuangan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) serta sebagai masukan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif.

Berdasarkan surat Bappenas Nomor: 07727/D.03/PP.02.01/ 05/2025 tanggal 20 Mei 2025 Hal: Penyampaian Informasi Mengenai Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2025-2030, disebutkan nilai IKAD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebesar 2,90 atau dengan kategori **'berkembang'**. Terdapat 5 kategori IKAD, yaitu dasar, mulai berkembang, berkembang, hampir unggul, dan unggul. Dengan demikian kondisi 2024 menunjukkan adanya *gap* yang cukup besar, sehingga diperlukan upaya percepatan bagi TPAKD untuk menjadi unggul.

F. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Pengukuran IMDI ini dilaksanakan mulai Tahun 2022. Masyarakat digital merupakan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan teknologi digital, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas menjadi hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua lini kehidupannya mulai dari produksi, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya.



Gambar 2.44-b. Perkembangan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2024
Sumber: website imdi.sdmdigital.id

Pengukuran IMDI merupakan salah satu konsep penting untuk melihat kondisi masyarakat digital di Indonesia secara menyeluruh dari skala nasional hingga tingkat kabupaten/kota, sehingga perlu disusun suatu metode pengukuran yang mampu mencakup berbagai aspek terkait keterampilan digital dan pemanfaatannya. IMDI terdiri dari tiga komponen, yaitu pilar, subpilar, dan indikator. Adapun komponen pilar terbagi menjadi empat bagian, yaitu: 1) Infrastruktur dan ekosistem; 2) Keterampilan Digital; 3) Pemberdayaan; dan 4) Pekerjaan. Pilar-pilar tersebut bersama-sama mewujudkan pengukuran keterampilan digital yang komprehensif, objektif, dan terstandarisasi. Masing-masing pilar dijabarkan menjadi sepuluh subpilar spesifik, yang kemudian diukur melalui indikator-indikator yang berasal dari data primer dan sekunder.

G. Indeks Zakat Nasional

Penguatan ekonomi syariah dalam RPJMN 2025-2029 dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJMN 2025-2029 diatas diukur capaiannya oleh berbagai sasaran dan indikator

pembangunan, diantaranya: 1) Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Jumlah), 2) Aset Keuangan Syariah/PDB (Persen), 3) Rasio ZIS DSKL/PDB (Persen).

Untuk mendukung pencapaian sasaran dan arah kebijakan ekonomi syariah nasional tersebut, diperlukan sinkronisasi dan penyelarasan arah kebijakan dan indikator diatas dengan arah kebijakan dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 setiap provinsi/kabupaten/kota. Adapun tiga indikator outcome terkait ekonomi syariah yang direkomendasikan untuk dimasukkan dalam RPJMD masing-masing adalah sebagai berikut: (1)Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (pada RPJMD Provinsi); (2) Aset Perbankan Syariah/PDRB (pada RPJMD Provinsi); dan (3) Indeks Zakat Nasional (pada RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Semakin tinggi angka poin indeks, menunjukkan semakin baiknya kondisi pengelolaan zakat.

Perhitungan IZN diukur dengan 2 (dua) dimensi yaitu dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat dengan bobot 0,30 dan dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat) dengan bobot 0,70. IZN dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori yaitu: (1) Pemula (0,00 – 0,20); (2) Berkembang (0,21 – 0,40); (3) Stabil (0,41 – 0,60); (4) Bertumbuh (0,61 – 0,80); dan (5) Berkelanjutan (0,81 – 1,00).

Baseline realisasi IZN tahun 2024 Kabupaten Pasuruan dan Nasional disajikan sebagai berikut:

Baseline realisasi IZN tahun 2024 Kabupaten Pasuruan dan Nasional disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.33
PIndeks Zakat Nasional Tahun 2024

Uraian	Satuan	2024		
		Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan
Indeks Zakat Nasional	Poin Indeks	0,52 (stabil)	0,48 (stabil)	0,50 (stabil)

Sumber : Baznas, 2025

Kinerja pengelolaan zakat di Kabupaten Pasuruan tahun 2024 masuk dalam kategori stabil, sama dengan Nasional dan Provinsi Jawa TImur. Sedangkan secara perangkaan, realisasi IZN Kabupaten Pasuruan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian Nasional dan sedikit lebih besar dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur.

8) Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah (PUD)

Kondisi ekosistem riset dan inovasi PUD berdasarkan dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan 6 elemen beserta subelemennya, teridentifikasi dan terangkum sebagai berikut:

Tabel 2.34
Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Produk Unggulan Daerah (PUD)

Elemen/Subelemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Produk Unggulan Daerah Saat Ini	
	Usaha Pertanian Padi	Usaha Peternakan Daging
Elemen 1 : Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah		
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	- Peraturan Daerah (Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro - Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah - Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, - Belum memiliki SiDA (sistem inovasi daerah)	- Peraturan Daerah (Nomor 4 Tahun 2016 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro - Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah - Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Inovasi Daerah, - Belum memiliki SiDA (sistem inovasi daerah)

Elemen/Subelemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Produk Unggulan Daerah Saat Ini	
	Usaha Pertanian Padi	**Usaha Peternakan Daging**
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, nominasi tersebut antara lain Pertanian Padi.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan nominasi Produk Unggulan Daerah, nominasi tersebut antara lain Usaha Peternakan Daging.
Pengelolaan Kebun Raya Daerah	Tidak tersedia kebun raya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.	Subelemen pengelolaan kebun raya tidak memiliki keterkaitan dengan usaha peternakan daging
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Belum tersedia PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) bagi koperasi dan UMKM	Belum tersedia PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) bagi koperasi dan UMKM
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	-	-
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kegiatan layanan (Hak Kekayaan Intelektual) HaKI maupun Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah tersedia sejak tahun 2017 namun masih minim partisipasi dari UMKM. Dari 14000 - 17000 UMKM baru sekitar 40 UMKM yang mendaftarkan HaKI di tahun 2017.	-
Elemen 2 : Kapasistas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi		
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Pada tahun 2023 telah terjalin kerjasama dengan PT. Riset Perkebunan Nusantara. selain itu juga bekerjasama dengan Balai Besar Perbenihan dan proyeksi tanaman perkebunan (BBPPTP) Surabaya serta kerjasama dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.	Pada tahun 2025 telah dilakukan perjanjian kerja sama antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan dengan dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Belum ada kegiatan atau *website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi	Belum ada kegiatan atau *website* sebagai sarana melakukan kolaborasi riset dan inovasi
Elemen 3 : Kemitraan Riset dan Inovasi		
Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Bermitra dengan PTPN dan BBPPTP Surabaya. Kemitraan sudah dijalin namun belum spesifik pada pengembangan PUD terkait Pertanian Padi.	- Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pasuruan membuat Kesepakatan Bersama (MoU) antara Koperasi/Pengepul dengan Industri Pengolahan Susu (PT. Nestle Kejayan Factory Indonesia, PT. Indolakto

Elemen/Subelemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Produk Unggulan Daerah Saat Ini	
	Usaha Pertanian Padi	**Usaha Peternakan Daging**
		dan PT. Cisarua Mountain Dairy-CIMORY), yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan peternak. - KPSP Setia Kawan Nongkojajar membuat konsorsium dengan Kedutaan Denmark bekerjasama dengan Indonesia, Koperasi Arla Denmark, dan Industri Pengelolaan Susu untuk menghasilkan dan mengelola susu organik.
Peningkatan difusi inovasi	- Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi. - Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.	- Belum ada model dan strategi transfer teknologi ke pelaku usaha Usaha Peternakan Daging - Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima transfer teknologi tersebut.
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	- Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Pertanian Padi - Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut.	- Belum ada sosialisasi praktik baik yang dideseminasikan ke pelaku usaha Usaha Peternakan Daging. - Belum ada rencana target pelaku usaha yang akan menerima sosialisasi tersebut.
Elemen 4 : Budaya Riset dan Inovasi		
Promosi dan kampanye inovasi	- Mengadakan beberapa kegiatan pameran. Salah satu nya adalah Pasuruan Always Fresh pada 2023 di Rest Area Tosari yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing. - Pernah ada kegiatan YUK NONGGO yang merupakan akronim dari gerakan "Ayo Belonjo Nang Tonggo", SATRYA EMAS atau "Pusat Strategi Ekonomi Maslahat", PERWIRA "Perempuan Wira Usaha". - Peresmian Gedung Sentra Produk Unggulan Kabupaten Pasuruan sebagai ruang pamer penjualan produk.	Mengikut *event* promosi dalam acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo atau APKASI AOE 2022, antara lain mempromosikan aneka makanan olahan seperti abon ayam dan sapi, s*tick* susu kambing dan sapi, serta *chrispy chicken food*.

Elemen/Subelemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Produk Unggulan Daerah Saat Ini	
	Usaha Pertanian Padi	**Usaha Peternakan Daging**
	- Pameran produk di luar daerah seperti AEO2022 dan PIATTEX V. - Partisipasi industri kecil menengah unggulan mewakili Kabupaten Pasuruan pada pameran Inacraft 2023 di Jakarta.	
Apresiasi prestasi inovasi	- Telah tersedia perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, yaitu INOPAMAS (Inovasi Pasuruan Maju-Adil-Sejahtera) bagi perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten Pasuruan. - Mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian tahun 2024 sebagai penerima Tanda Daftar Varietas Lokal Terbanyak se-Indonesia.	Terlah tersedia perlombaan untuk meningkatkan kompetisi yang bermanfaat, yaitu INOPAMAS (Inovasi Pasuruan Maju-Adil-Sejahtera) bagi perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Pengukuhan DPD Tani Merdeka di tahun 2025	Belum ada
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal yang telah berlaku turun-temurun. pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.	Belum ada inventarisasi teknologi masyarakat/kearifan lokal secara turun-temurun. Pencatatan kemungkinan masih tersebar secara acak belum disatukan ke dalam bentuk data yang mudah diakses.
Elemen 5 : Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah		
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Belum ada.	Belum ada
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Belum ada.	Belum ada
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Belum ada.	Belum ada
Elemen 6 : Penyelarasan Dengan Perkembangan Global		

Elemen/Subelemen Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah	Kondisi Produk Unggulan Daerah Saat Ini	
	Usaha Pertanian Padi	Usaha Peternakan Daging
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Nota Kesepahaman dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian pada tahun 2023 sehingga potensi keunggulan pertanian Kabupaten Pasuruan mampu memenuhi standart kualitas yang disyaratkan oleh pasar global.	belum ada
Penguatan kerjasama internasional	Belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Pertanian Padi antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.	Belum terdapat dokumen kerjasama internasional bidang Usaha Peternakan Daging antara Pemkab Pasuruan dengan lembaga atau mitra internasional.

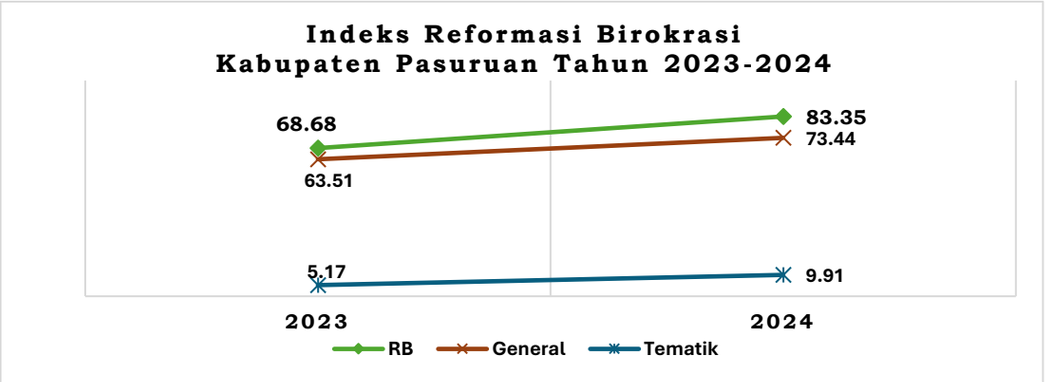
Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1) Tata Kelola Berintegritas dan Adapatif

A. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan

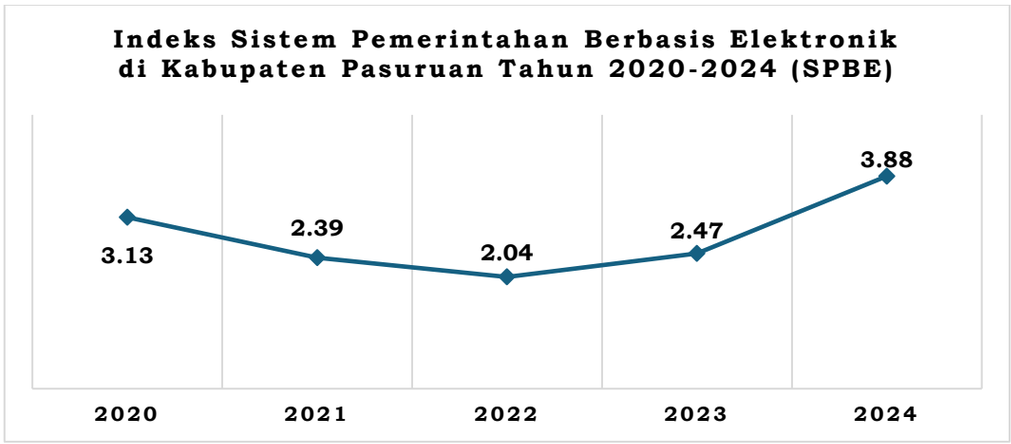
Kabupaten Pasuruan indeks reformasi birokrasi tahun 2024 mengalami peningkatan. Indeks Reformasi Birokrasi terdiri dari RB general (bobot 100) dan RB tematik (bobot 20). Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan oleh KemenPAN-RB berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan KepmenPAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Penilaian tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak dapat diperbandingkan.



Gambar 2.45 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2024
Sumber: KemenPAN-RB, 2025

B. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.



Gambar 2.46 Indeks SPBE di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan gambar 2.46 capaian Indeks SPBE di Kabupaten Pasuruan fluktuatif. Indeks SPBE mengalami kenaikan di tahun 2024 setelah setelah mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena sinergi antara perangkat daerah dan masyarakat sekitar dalam memanfaatkan internet sebagai sarana berinteraksi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, kurangnya kolaborasi antara beberapa pemangku kepentingan, termasuk antar instansi pemerintahan, menyebabkan target tidak tercapai pada tahun tersebut.

C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Layanan Publik mengevaluasi kualitas, aksesibilitas, dan efisiensi layanan publik yang disediakan oleh kota atau kabupaten. Indeks ini menilai berbagai layanan yang sangat penting bagi

kesejahteraan penduduk, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, keselamatan publik, dan layanan sosial. Indeks ini mengukur faktor-faktor seperti cakupan layanan, daya tanggap, kualitas infrastruktur, dan kepuasan pengguna untuk menentukan seberapa baik layanan publik memenuhi kebutuhan penduduk.

Indeks Layanan Publik penting untuk tolok ukur dan perbandingan, membantu kota dan kabupaten mengidentifikasi area yang memiliki kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Para pembuat kebijakan menggunakan indeks ini untuk merancang intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanan, memastikan akses yang adil, dan meningkatkan infrastruktur. Indeks ini juga menginformasikan keputusan alokasi sumber daya dan investasi dalam layanan publik, mendorong penyediaan layanan yang lebih efektif dan efisien. Hasil pengukuran indeks pelayanan publik yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB dalam periode tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan dengan rincian sebagai dapat dilihat pada tabel 2.34. Peningkatan IPP mencerminkan bahwa masyarakat merasakan perbaikan dalam kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mempertahankan dan meningkatkan IPP, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan pelatihan aparatur, melibatkan masyarakat dalam evaluasi layanan, dan menerapkan standar pelayanan yang jelas.

Tabel 2.34
Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2024

Indeks Pelayanan Publik	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	3,81	3,87	4,23	4,21	4,25	4,52
Kategori	B	B	A-	A-	A-	A

Sumber: KemenPAN-RB/Bagian Organisasi, 2025

D. Indeks Integritas

Penghitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga dimensi utama: internal, eksternal, dan ahli. Penilaian internal didasarkan pada penilaian pegawai di setiap lokasi survei terkait integritas organisasi. Penilaian eksternal berasal dari penilaian pengguna layanan publik di lokasi survei. Penilaian ahli didasarkan pada penilaian dari beberapa narasumber

atau ahli yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam mengenai integritas dan korupsi pada instansi tertentu.

Penghitungan ini juga mencakup faktor koreksi yang berfungsi sebagai penyeimbang indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan ahli sesuai dengan kondisi riil integritas instansi tersebut. Faktor koreksi digunakan sebagai pengurang indeks dengan data sekunder seperti laporan pengaduan masyarakat yang diverifikasi oleh KPK, jumlah kasus dan tersangka korupsi dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online dari seluruh penegak hukum, kejadian pengarahan sebelum survei, dan hasil observasi survei. Bobot untuk setiap perspektif, dimensi, dan variabel dalam survei dihitung menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) yang ditetapkan pada 2021, setelah dibandingkan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Tabel 2.35
Indeks Integritas Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

Indeks Integritas Kabupaten Pasuruan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Nilai	77,68	73,62	77,15	69,34
Kategori	Waspada	waspada	Waspada	Rentan

Sumber: KPK/Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2025

Hasil penilaian indeks integritas di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2020-2024 berdasarkan hasil survey yang dilakukan KPK mengalami penurunan yang cukup signifikan khususnya pada tahun 2024 (table 2.35).

E. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik, yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan. Faktor yang diukur dalam survei kepuasan masyarakat antara lain kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, kemampuan petugas, kesopanan dan keramahan, serta ketepatan waktu. IKM terhadap pelayanan publik tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.36
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2024

Uraian	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	90,29	91,74	93,41

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

IKM dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang mengindikasikan kualitas pelayanan publik semakin baik. IKM dalam periode tahun 2022-2024 berada dalam interval 88,31 – 100,00 atau kategori “sangat baik.”

F. Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Kabupaten Pasuruan mulai menerapkan IKK sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Penerapan IKK di Kabupaten Pasuruan sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hasil pengukuran IKK oleh LAN-RI untuk Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebesar 56,55 (kategori cukup).

2) Stabilitas dan Trantibum-Linmas

A. Persentase Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum yang Diselesaikan

Iklim investasi diantaranya dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum di suatu wilayah. Kondisi tersebut dapat diketahui dengan gambaran tentang penanganan perda dan gangguan trantibum. Perkembangannya disajikan pada tabel 2.36.

Tabel 2.36
Perkembangan Penanganan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan (%)	93,17	97,62	100	100	100
Jumlah kasus pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan (Kasus)	859	1.641	546	610	202
Pelanggaran Perda (Kasus)	738	544	420	397	20
Gangguan trantibum (Kasus)	121	1097	126	213	182

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang terjadi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 dan 2023 telah berhasil diselesaikan. Meskipun terjadi penurunan, akan tetapi jumlah kasus pelanggaran perda dan gangguan trantibum masih cukup tinggi setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran dari masyarakat atas ketenteraman dan ketertiban yang dibuktikan dengan berkurangnya kegiatan siskampling (sistim keamanan lingkungan) di Kabupaten Pasuruan.

B. Capaian Hak Asasi Manusia

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupatenlkota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Dalam mendukung Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dapat kami sampaikan laporan capaian AKSI HAM di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

Tabel 2.37
Capaian Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021-2024

No.	Aksi	Uraian	Satuan	B04	B08	B12	Nilai Capaian Tahun 2024
1.	AKSI 1	Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.	%	100	100	100	100
	AKSI 2	Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum.	%	85	100	100	95
	AKSI 3	Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai peraturan pemerintah No 13 tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta didik Penyandang Disabilitas	%	100	100	100	100
	AKSI 4	Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.	%	100	100	100	100
	AKSI 5	Implementasi Pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya	%	100	100	100	100
	AKSI 6	Membangun sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai permenhub 98/ 2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup kewenangan daerah.	%	100	100	100	100
	Nilai Rata-rata Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten/Kota Tahun 2024		%	%	**100**	**100**	**99.2**

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa seluruh indikator dari aksi 1, 3, 4, 5 dan 6 untuk penyampaian B04, B08 dan B12 tercapai sebesar 100%, tetapi untuk aksi 2 belum mencapai 100% dikarenakan dikarenakan pada scan DPA yang dilampirkan hanya diperuntukan bagi perempuan dan anak, belum ada peruntukan DPA berbunyi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dicentang pada format pelaporan. Sehingga untuk nilai capain B04 untuk aksi 2 belum tercapai 100%

3) Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan indikator kinerja kunci (IKK-outcome) yang diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Realisasi IKK-outcome dalam periode tahun 2020-2024 disajikan berdasarkan bidang urusan pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 2.36-a.
Realisasi IKK Outcome Tahun 2020-2024

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
A	**Pendidikan**						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	106,85	52,37	114,79	77,16	81,83
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	85,52	73,17	97,60	95,41	98,75
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	65,52	47,50	92,26	88,98	97,39
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	2,30	1,41	3,85	53,44	35,47
B	**Kesehatan**						
5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,0669	0,07	0,07	0,07	0,0773
6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	93,54	100	100,30	100	86,66

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	98,60	100	100,23	100	94,11
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,25	100	103,15	100	97,49
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	86,46	97,81	100,50	100	100
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	90,67	99,54	99,99	100	100
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	73,69	87,26	100,07	100	98,24
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	99,90	100	94,24	100	97,96
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	68,77	77,79	90,16	100	100
15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	92,81	107,23	109,12	100	100
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	101,17	98,18	103,56	100	100
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	92,10	62,05	103	100	100
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	94,52	108,77	101	100	100
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
19	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	72,10	72,85	73,43	74,20	100
20	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	97,21	97,36	96,90	97,63	98,62
21	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	80,03	82,92	83,40	86,70	86,36

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
22	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	100	30,93	30,06	68,85
23	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	81,23	84,73	79,88	79,89	75,19
24	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	n/a	n/a	35	33,59	34,88
25	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100
D	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**						
26	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
27	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	7,67	13,70	14,75	17,64	18,39
28	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	6,50	6,08	5,55	5,40	2,57
29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	Persen	0	0	0	0	0
30	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	29,73
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**						
31	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	122,62	100
32	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	73,01	68,75
33	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	n/a	n/a	3.160	4.160	65.732
34	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	n/a	n/a	942	1.656	2.365
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	n/a	111.417	67.200	115.364	103.100
36	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	97,22
37	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	9,15
F	**Sosial**						

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
38	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	67,80	100	77,84
39	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen	100	100	100	100	77,69
G	**Ketenagakerjaan**						
43	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	41,38	68,75	70,55	70,59	77
44	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	75	80	93,36	93,46	23,34
45	Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Tahun	126.856.300	126.627.800	128.152.480	128.152.480	137.856.913
46	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	80	100	100	9,23	9,70
47	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	43,44	41,06	40,47	40,67	44,27
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
48	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	18,31	18,60	23,05	23,05	23,18
49	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	96,30	100	100	100	100
50	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	Rasio	6,83	3,24	9,75	9,50	6,02
I	**Pangan**						
51	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Persen	258	268	270	100,27	49,30
J	**Pertanahan**						
52	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	0	0	100	86,12	100
53	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100	0	100	100	100

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
54	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Ha	0	0	0	0	48,79
55	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	0	100	0	0
56	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	0	0	0	0	0
57	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	0	0	0	0	100
K	**Lingkungan Hidup**						
58	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	62,55	63,13	59,78	65,47	65,06
59	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	n/a	73,06	22,74	22,08	17,36
60	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	n/a	53,33	50	55,56	20
L	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
61	Perekaman KTP elektronik	Persen	84,94	99,14	98,65	98,39	100
62	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	8,53	21,64	24,19	31,83	45,63
63	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	87,02	95,48	80,63	88,64	91,72
64	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	0	3,57	7,27	7,14	6,45
M	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
65	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	0	0	0	0	100
66	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	1,61	5,16	22,37	4,82	1,72
N	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
67	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,84	1,95	2,04	1,92	1,88
68	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	75,14	74,91	73,99	79,95	76,72
69	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,16	10,58	11,71	4,24	3,38
O	**Perhubungan**						
70	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	46,15	57,58	39	39	48,48
71	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio	0,32	0,37	0,36	0,37	0,37

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
P	**Komunikasi dan Informatika**						
72	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	55,22	56,92	58,2	100	100
73	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	12,66	26,92	38,51	93,94	11,36
74	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	55,22	56,92	58	17,13	250,16
Q	**Kopertasi. Usaha Kecil dan Menengah**						
75	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	25,74	16,99	21,05	25,48	100
76	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	2,98	2,93	3,59	0,12	66,27
R	**Urusan Penanaman Modal**						
77	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	Persen	-42,82	-19,51	51,81	31,51	5,30
S	**Urusan Pemuda dan Olahraga**						
78	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	9,05	0,03	0	0,0096	0,66
79	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	9,05	8,31	8,83	8,826	23,14
80	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	0	15	15	94	96
T	**Urusan Statistik**						
81	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	60	59,70	100	100
82	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	60	61,54	100	100
U	**Urusan Persandian**						
83	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	40,08	40,08	48,37	49,92	49,92
V	**Urusan Kebudayaan**						
84	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	2,18	100
W	**Urusan Perpustakaan**						
85	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	n/a	n/a	57,70	62,50	74,33

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
86	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	n/a	8,07	8	10,01	59,56
X	**Urusan Kearsipan**						
87	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	89,56	75	75	75	100
88	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	30,92	0	0,17	16,67	45,53
Y	**Urusan Perikanan dan Kelautan**						
89	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	42.216, 06	43.998, 27	44.041,87	47.431, 23	47.666, 34
Z	**Urusan Pariwisata**						
90	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-65,93	25,62	17	16,08	69,09
91	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	-53,61	8,98	17	-2,11	13,01
92	Tingkat hunian akomodasi	Persen	n/a	n/a	n/a	2,73	0,64
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	n/a	n/a	n/a	16,62	16,61
94	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	n/a	n/a	n/a	3,61	1,80
AA	**Urusan Pertanian**						
95	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	n/a	625,03	626,02	621,74	621,65
96	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	4,67	33,04	49,24	-94,23	-8,50
BB	**Perdagangan**						
97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	n/a	1,56	0,82	0,60	0,43
98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	n/a	48,67	41,89	64,60	64,73
99	Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Persen	75,31	101,01	128,14	87,57	100

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	bertanda tera sah yang berlaku						
CC	**Perindustrian**						
100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	10,74	2,06	9,88	22,05	95,83
101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	Persen	n/a	30	30	30	100
102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100
103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100
104	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100
DD	**Pengadaan**						
105	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0
106	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	7,65	6,01	13,44	189,94	98,23
107	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	83,72	11,5	43,18	60	22,54
108	Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	0	12,63	567,38	12	-10,40
EE	**Kepegawaian**						
109	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (Persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)						

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	a. Pendidikan Tinggi	Persen	98,46	182,27	66,35	54,98	56,06
	b. Menengah	Persen	-	-	29,37	39,70	39,26
	c. Dasar	Persen	-	-	4,28	5,32	4,72
110	Rasio pegawai Fungsional (Persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	6,69	6,35	13,11	13,95	14,87
111	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (Persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	100	43,69	50,14	58,16
FF	**Manajemen Keuangan**						
112	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	84,32	6,26	-5,35	-4,58	-7,17
113	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	95,75	5,43	9,75	21,26	17,25
114	Manajemen Aset :	Nilai	4	4	3	4	4
(1)	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
(2)	Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
(3)	Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
(4)	Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
115	Rasio angaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	8,18	8,18	9,87	5,30	5,36
GG	**Perencanaan dan Keuangan**						
116	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	n/a	Level 3 (3,110)	Level 3 (3,102)	Level 3 (3,147)	Level 3 (3,244)
117	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	n/a	n/a	Level 2 (2,61)	Level 3 (3,00)	Level 3 (3,00)
118	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	7,02	36,94	8,36	6,06	6,64
119	Rasio PAD	Persen	0,48	0,48	22,41	22,56	23,84
120	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	58,68	81,51	86,82	77,30	67,92
121	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
HH	**Transparansi dan Partisipasi Publik**						
122	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100	104,85	100	100	65,12
123	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	n/a	100	100	100	100
HH	**Tambahan**						

No	IKK outcome	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
124	Persentase realisasi belanja urusan pelayanan dasar	Persen	91,20	93,73	92,42	93,88	92,70
125	Persentase penurunan SILPA	Persen	-7,04	32,40	-26,24	-27,17	25,29
126	Pertambahan nilai asset tetap	Persen	7,68	6,59	11,55	3,98	4,80

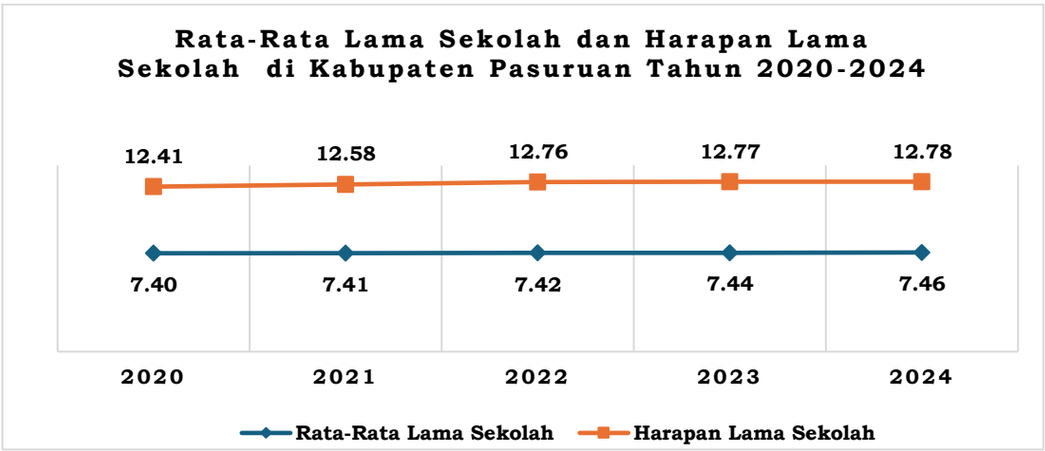
Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2025

Adapun uraian dari masing-masing urusan pemerintahan sebagai berikut:

A. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun suatu daerah. Melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Pendidikan juga memiliki peran kunci dalam menciptakan warga negara yang lebih kompeten dan berdaya saing. Dengan penyelenggaraan pendidikan yang baik, suatu daerah dapat memastikan generasi mendatangnya memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan masa depan dan berperan dalam memajukan masyarakat dan bangsa.

Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dalam lima tahun terakhir hanya mengalami peningkatan 0,06 tahun sedangkan harapan lama sekolah mengalami peningkatan 0,37 tahun. Rata-rata lama sekolah yang menggambarkan jumlah tahun yang telah ditempuh untuk pendidikan oleh masyarakat pada usia 25 tahun ke atas, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan perkiraan tahun yang akan ditempuh masyarakat pada usia 7 tahun untuk pendidikan.



Gambar 2.47 Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain : (1) Pemulihan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil; (2) Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih rendah terutama pada penduduk usai 18 tahun ke atas yang tidak bersedia memulai atau melanjutkan pendidikan lewat jalur kesetaraan, (3) Data kependudukan yang belum update turut memberikan bagian dari rendahnya data pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan,

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam menggurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan bagi masyarakat miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Lincolin, 1999). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

Tabel 2.45
Capaian Indikator SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023-2024

No	Indikator	2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	60	66,2	100	81,83
2	Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	SD=100 SMP=100	SD=95,75 SMP=97,77	100	82,49
3	Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (%)	50	49,55	100	35,47
4	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	58,77	71,32	80	77,35
5	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	45,41	59,27	77	71,31
6	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	67,60	66,81	75	44,53
7	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66,96	47,77	75	43,52
8	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	74,62	74,59	75,94	53,21
9	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D-IV (%)	70,84	76,5	77,63	80,58
10	Iklim keamanan SD (%)	74,82	71,28	73,71	73,31
11	Iklim keamanan SMP (%)	72,03	67,15	68,06	68,68
12	Iklim kebinekaan SD (%)	66,18	69,76	79,79	73,51
13	Iklim kebinekaan SMP (%)	64	67,09	73,2	72,04
14	Iklim inklusivitas SD (%)	66,18	69,76	61,56	55,75
15	Iklim inklusivitas SMP (%)	64	67,09	60,63	55,28

Sumber : Dirjen Bangda Kemendagri, 2025

Capaian SPM Pendidikan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2023. Peningkatan pencapaian SPM bidang pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan kualitas guru, peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta peningkatan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Selain itu, penerapan kebijakan seperti Merdeka Belajar,

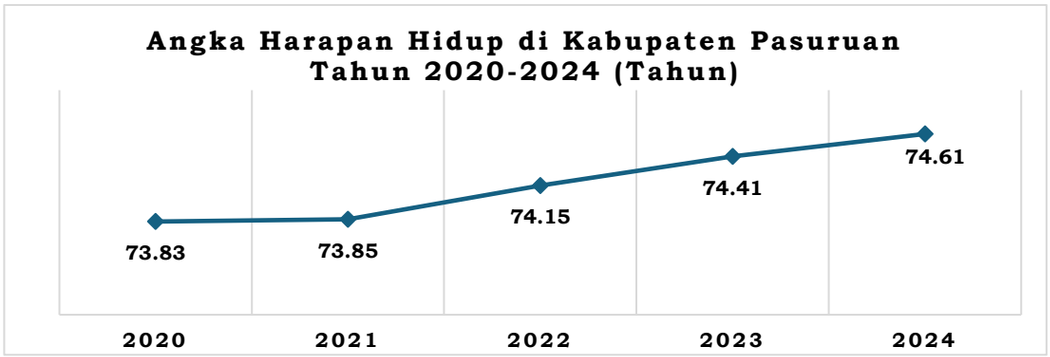
program sekolah penggerak, dan asesmen nasional juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

B. Kesehatan

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

Salah satu ukuran tingkat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2020-2024 berdasarkan Hasil Long Form SP2020 mengalami peningkatan.



Gambar 2.48 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2025

Meningkatnya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,26% per tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup

dapat diartikan jumlah penduduk lanjut usia cenderung meningkat sebagai dampak peningkatan kualitas hidup dengan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.46
Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023-2024

No	Indikator	2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	100	86,66
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin (%)	100	100	100	94,11
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100	100	97,49
4	Pelayanan kesehatan balita (%)	100	100	100	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan (%)	100	100	100	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (%)	100	100	100	98,24
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	100	100	100	97,96
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (%)	100	100	100	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (%)	100	100	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (%)	100	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (%)	100	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risikon terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) (%)	100	100	100	100

Sumber : Dirjen Bangda Kemendagri

Pencapaian SPM bidang kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal meliputi ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (tenaga kesehatan), ketersediaan sarana dan prasarana (alat kesehatan, obat-obatan, fasilitas), serta efektivitas manajemen dan kepemimpinan. Faktor eksternal mencakup kebijakan pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasuruan merupakan sektor dalam pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur publik serta pengaturan tata ruang wilayah. Bidang ini

mencakup perencanaan umum dan detail mengenai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk memastikan fungsinya tetap optimal. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga bertanggung jawab atas penataan ruang, yang meliputi penyusunan rencana tata ruang wilayah, pengaturan penggunaan lahan, dan pengendalian.

Tabel 2.47
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2023-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60/liter/hari (4 galon)	n/a	n/a	23.220 Rumah Tangga	10.016 Rumah Tangga	11.784 Rumah Tangga
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	n/a	n/a	5.805 Rumah Tangga	2.504 Rumah Tangga	2.946 Rumah Tangga
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani dalam satu tahun	180 unit rumah	183 unit rumah	418 unit rumah	179 unit rumah	323 unit rumah
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada satu tahun	180 unit rumah	183 unit rumah	418 unit rumah	179 unit rumah	323 unit rumah
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	0%	0%	0%	0%	0%
Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima	0%	0%	0%	0%	0%

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
penyediaan rumah layak huni					
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2025

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan, yang memenuhi kriteria:

a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat;
b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

a. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat,
b. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2
c. Memiliki akses air minum layak
d. Memiliki akses sanitasi layak

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Penanganan kawasan kumuh oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dimulai sejak tahun 2019 hingga saat ini. Penetapan lokasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan SK Kumuh Nomor 663/844/HK/424.013/2021, daerah yang memiliki luasan Kawasan kumuh tertinggi di Kabupaten Pasuruan adalah Kraton. Selama 6 (enam) tahun ini penanganan kawasan kumuh sudah mencapai 99,98 dari total 543,75 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan, dengan rincian penanganan sebagai berikut :

Tabel 2.48
Luasan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luasan Total (Ha)	Luasan Kumuh (Ha)	Persentase
1	Rembang	5.717,62	34,48	0,60%
2	Lekok	4.802,69	34,69	0,72%
3	Nguling	4.547,36	14,77	0,32%
4	Kraton	5.597,96	87,06	1,56%
5	Pohjentrek	1.258,78	19,70	1,57%
6	Bangil	4.355,33	121,76	2,80%
7	Purwosari	7.879,98	62,40	0,79%
8	Beji	3.899,63	68,91	1,77%
	Total	**38.059,35**	**443,73**	**10,13%**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2025

Tabel 3.49
Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Penanganan Kumuh (Ha)	Akumulasi Capaian
1	2019	19,77	3,64%
2	2020	21,92	7,67%
3	2021	32,82	13,70%
4	2022	5,70	14,75%
5	2023	15,70	17,64%
6	2024	4,07	18,39%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2025

Pada tahun 2020 – 2023 tidak ada rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, yang menunjukkan belum adanya intervensi SPM pada periode tersebut, dan di tahun 2024, terdapat rehabilitasi

rumah korban bencana sebanyak 5 unit rumah. Dalam pelaksanaan tahun 2020 – 2023, penanganan penanggulangan bencana yaitu dengan pemberian dana stimulan melalui penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Tabel 2.50
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2025-2029

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani dalam satu tahun	180 rumah	183 rumah	418 rumah	179 rumah	323 rumah
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani dalam satu tahun	180 rumah	183 rumah	418 rumah	179 rumah	323 rumah
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2025

Capaian indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota tahun 2020-2024 tercapai 100%. Realisasi indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun 2020 – 2023, penanganan rumah layak huni bagi korban bencana dilakukan melalui pemberian dana stimulan melalui penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pada tahun 2024 terdapat rehabilitasi rumah korban bencana sebanyak 5 unit rumah yang

dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 318 rumah dengan pemberian dana stimulan melalui penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pelaksanaan SPM Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota belum optimal dikarenakan proses perencanaan belum disusun secara maksimal. Ketersediaan data dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana perlu menjadi perhatian agar target SPM yang menjamin akses hunian layak bagi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Capaian indikator Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercapai 0%. Hal ini dikarenalan tidak ada program pemerintah daerah untuk relokasi sehingga tidak ada kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis.

Pada indikator Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota fluktuatif. Capaian tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2023. Capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sudah mencapai 100%. Sedangkan pada sub kebencanaan dan waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran telah berhasil mencapai 100% pada tahun 2024. Pada indikator waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran dihitung mulai dari terima laporan jika terjadi kebakaran kemudian berangkat sampai ke tempat tujuan kebakaran. Standar *response time* yang digunakan adalah

minimal 15 menit untuk 7,5 Km jarak tempuh dari Kantor Pemadam sampai lokasi kejadian, sedangkan maksimal 30 menit untuk 15 Km Jarak tempuh dari Kantor Pemadam sampai lokasi kejadian.

Tabel 2.51
Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025-2029

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dan BPBD Kabupaten Pasuruan, 2025

F. Sosial

Urusan sosial merupakan bagian dari urusan wajib dasar yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang sosial.

Berdasarkan tabel 2.36-a menunjukan bahwa masih ada indikator urusan sosial yang belum mencapai 100%. Pada tahun 2024, ada dua indikator yang menunjukkan tren penurunan, yaitu Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti serta Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Penurunan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya sarana dan prasarana shelter, yang di antaranya harus mencakup kamar mandi di dalam kamar shelter, minimal dua ruang kamar untuk pemisahan gender, ruangan dengan teralis untuk keamanan, SDM khusus 24 jam (1 hari 3 shift) penjaga dan perawat klien, ruang assesment klien yang terpisah, serta kamar mandi khusus disabilitas.

Tabel 2.52
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2025-2029

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	n/a	99,03%	99,03%	94,55 %	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	n/a	97,97%	97,97%	98%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	n/a	100%	100%	93,18%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	n/a	100%	100%	98%	100%
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	100%	100%	82,93%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2025

G. Tenaga Kerja

Berdasarkan tabel 2.36-a, dapat dilihat masing-masing capaian indikator yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi mengalami tren peningkatan yang relatif signifikan pada tahun 2024. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Perhitungan indikator ini menggunakan pendekatan pencari kerja yang mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi.

b. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), mengalami peningkatan pada tahun 2024.

c. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota, menunjukkan tren peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan kurangnya tingkat daya saing pencari kerja sehingga belum dapat memenuhi kualifikasi lowongan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan antara lain adalah:

a. Adanya isu Pelemahan Ekonomi Global sehingga meskipun tidak sebanyak saat terjadi Covid 19, masih terdapat perusahaan yang melakukan penyesuain jumlah tenaga kerja;
b. Faktor kualitas pencari kerja yang masih belum sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan Perusahaan.

Meskipun terdapat beberapa kendala tersebut namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut diantaranya:

a. Optimalisasi penyebarluasan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dan bursa kerja dan pelindungan pekerja migran Indonesia;
b. Melaksanakan program pemerintah yang berbasis masyarakat seperti Program Peningkatan Kerja (peyebarluasakan informasi pasar kerja) kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja dan kegiatan Pelatihan dan Produktivitas yang bertujuan untuk peningkatan skill, kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (link and match) serta sertifikasi pencari kerja.

H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu,

pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada didaerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan. Sedangkan perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak.

Berdasarkan pada tabel 2.36-a, pada tahun 2020 hingga pada tahun 2024, Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota mencapai 100%. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak telah berhasil. Adapun jenis layanan yang diberikan kepada korban kekerasan tersebut terbanyak adalah layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, pemulangan, pendampingan tokoh agama, dan reintegrasi sosial.

Kekerasan terhadap perempuan, juga dikenal sebagai kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual dan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang para korban utamanya adalah perempuan dan anak perempuan. Kekerasan semacam itu sering dianggap sebagai bentuk kejahatan kebencian, terutama karena kebanyakan korbannya adalah perempuan, dan tindakan ini memiliki bentuk yang beragam. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, menunjukkan angka berfluktuasi hingga tahun 2022 mencapai sekitar 9 kejadian per 100.000 perempuan.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pasuruan antara lain adalah:

1. Rendahnya anggaran yang Responsif Gender (Dokumen PPRG);
2. Kurangnya tenaga terlatih Pengarusutamaan Gender (PUG);
3. Kurangnya komitmen anggota Pokja tentang sarana prasarana responsif gender;

4. Pembangunan Jembatan untuk UPTD. PPA Kabupaten Pasuruan tidak terealisasikan dikarenakan pembangunan jembatan masuk dalam wilayah kerja Provinsi dan masih belum mengurus ijin dari Dinas SDA Provinsi Jatim dengan panduan GDPK yang baru.

Faktor lain yang juga bisa mempengaruhi adalah perlunya membangun masyarakat yang ramah gender yang bebas dari semua sisa diskriminasi dan ketidaksetaraan sehingga dapat memanfaatkan potensi penuh dari semua kelompok sosial dan mempromosikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental adalah tujuan dari Tujuan Pembangunan Milenium tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Kemudian faktor keterwakilan perempuan di parlemen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Indeks Pemberdayaan Gender sehingga akan menghasilkan kebijakan yang baik juga bagi perempuan.

Meskipun terdapat beberapa kendala tersebut namun Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut yaitu antara lain:

1. Berupaya memberikan KIE dan Advokasi kepada Pemangku Jabatan yang ada di Lingkungan Pendidikan baik Pendidikan Formal dan Non-Formal untuk meningkatkan kualitas bagi peserta didik dalam hal ini perlu adanya kegiatan dalam bentuk Bimtek bagi para guru yang membidangi untuk menyamakan persepsi dalam Rencana Penyusunan pembelajaran;
2. Menyelenggarakan pelatihan PUG (yang menyelenggarakan pelatihan PUG adalah semua anggota Pokja PUG yang juga menyelenggarakan pelatihan PUG untuk pegawai dilingkungannya masing-masing).

I. Pangan

Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)) dalam periode tahun 2020-2024 selalu berada di atas 100% yang berarti dalam kondisi surplus.

J. Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan harus diselenggarakan oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap tahunnya persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum mencapai 100%.

K. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, namun sangat penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Pasuruan. Pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek seperti pengendalian pencemaran udara, air, dan lahan, serta pengendalian emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Dalam periode 2020-2024 pengelolaan sampah dan ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan masih kurang dan perlu upaya peningkatan yang lebih signifikan.

L. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah bertanggungjawab atas pendataan dan pemeliharaan data kependudukan suatu daerah. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian kinerja urusan administrasi yang telah mencapai 100% pada indicator perekaman KTP elektronik, meskipun demikian indicator lainnya menunjukkan tren peningkatan. Khusus kepemilikan kartu identitas anak perlu ditingkatkan karena masih di bawah 50%.

M. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan. Urusan pemberdayaan masyarakat desa

berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Pasuruan serta memperkuat kelembagaan desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kesadaran serta akses terhadap hak-hak mereka, sehingga menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Upaya untuk mewujudkan desa mandiri selalu ditingkat sehingga sampai tahun 2024 sudah tidak ada desa tertinggal. Jumlah desa mandiripun terus bertambah dengan pertumbuhan rata-rata 6% dalam 5 tahun terakhir.

N. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) adalah program yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga.

TFR di Kabupaten Pasuruan mulai dihitung sejak tahun 2019 menunjukan tren yang cenderung meningkat dengan capaian tertinggi pada tahun 2022, artinya bahwa setiap artinya, setiap satu orang perempuan rata-rata melahirkan dua anak sepanjang masa reproduksinya. Sedangkan apabila dilihat dari Indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) menunjukan tren yang fluktuatif dengan capaian terbarunya pada tahun 2024. Meskipun angka ini sudah menurun dari tahun sebelumnya, namun capaian *Unmet Need* di Kabupaten Pasuruan ini masih tergolong tinggi.

Adapun beberapa kondisi yang menjadi penghambat penurunan *Unmet Need* di Kabupaten Pasuruan salah satu yang utama kebanyakan orang yang tidak ingin ber-KB adalah karena masyarakat memiliki ketakutan terkait dengan efek samping dari digunakannya kontrasepsi. Takut terhadap efek samping kontrasepsi adalah masalah yang sering dihadapi dalam program perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Beberapa kontrasepsi dapat memiliki efek samping, dan kekhawatiran ini bisa memengaruhi keputusan individu atau pasangan untuk menggunakan kontrasepsi. Selain itu juga hambatan juga muncul dari budaya masyarakat, dimana beberapa individu dan kelompok masyarakat mungkin memiliki pandangan

bahwa penggunaan kontrasepsi bertentangan dengan nilai-nilai religi masyarakat.

Faktor tersebut dipengaruhi juga dengan rendahnya peran aktif dari masyarakat di Kampung KB dalam meningkatkan akses dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga di tingkat desa atau kampung sehingga pendidikan tentang perencanaan keluarga kepada masyarakat setempat termasuk juga mengenai informasi yang akurat dan jelas tentang jenis kontrasepsi yang tersedia, cara kerjanya, serta potensi efek sampingnya belum tersampaikan dengan optimal. Pemberian edukasi yang baik dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih baik.

Permasalahan lain urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah masih tingginya jumlah pernikahan dini di Kabupaten Pasuruan. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Akan tetapi di Kabupaten Pasuruan masih banyak penduduk yang sudah menikah meskipun usia mereka belum 19 tahun sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.53
Jumlah Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Usia	Jenis Kelamin		Jumlah	Penyebab
	Laki-Laki	Perempuan		
<16 Tahun	0	20	20	Sudah Bertunangan
16 Tahun	0	224	224	Sudah Hamil
17 Tahun	1	470	471	Sudah Bertunangan
		Total	**715**	

Sumber Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, 2023

O. Perhubungan

Rasio konektivitas mengukur tingkat keterhubungan antar wilayah dalam suatu daerah melalui jaringan transportasi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana infrastruktur transportasi, seperti jalan dan angkutan umum, menghubungkan berbagai titik dalam wilayah tersebut, memfasilitasi mobilitas penduduk dan distribusi barang. Perhitungan rasio konektivitas diperoleh dari perbandingan antara jumlah kebutuhan trayek angkutan umum dengan jumlah

tarayek angkutan umum eksisting. Rasio konektivitas menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 dengan capaian 48,48% atau rencana kebutuhan trayek belum terealisasi 51,52%. Hal ini menunjukkan trayek angkutan masih sangat minim menjangkau wilayah Kabupaten Pasuruan.

$$Rasio\ Konektivitas = \frac{\text{Jumlah kebutuhan trayek}}{\text{Jumlah trayek eksisting}} x100$$

Indikator yang menggambarkan kondisi yang hampir sama adalah persentase wilayah yang terkoneksi sarana angkutan umum yang menunjukkan proporsi wilayah yang memiliki akses terhadap sarana angkutan umum. Perhitungan persentasi wilayah terkoneksi anguktan diperoleh dari jumlah wilaya (desa) yang telah terlayani oleh angkutan umum dengan total wilayah yang seharusnya terhubung. Indikator ini penting untuk menilai ketersediaan dan pemerataan layanan transportasi publik di suatu daerah, yang berdampak pada mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi lokal. Wilayah Kabupaten Pasuruan yang terkoneksi sarana angkutam umum menunjukkan tren sedikit kenaikan dengan capaian yang masih rendah. Hal tersebut dikarenakan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum akibat imbas maraknya pelayanan transportasi online yang memberikan kemudahan dan efisiensi dengan berbagai inovasi jenis pelayanan.

Kinerja lalu lintas diukur berdasarkan perbandingan volume dengan kapasitas lalu lintas. Apabila nilai ratio tersebut telah mencapai nilai 0,8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Capaian kinerja lalu lintas Kabupaten Pasuruan tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, yang berarti arus lalu lintas masih jauh dari kapasitas.

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Pasuruan adalah terkait saran dan prasarana tingginya resiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kewenangan kabupaten yang tidak didukung fasilitas keselamatan yang memadai, selain itu masih banyaknya lampu penerangan jalan umum yang mati dan membutuhkan penanganan secara berkala. Pada

tahun 2024 terdapat 24 JPL yang telah terbangun sedangkan masih ada 36 JPL belum terbangun. Berikut jenis perlengkapan dan prasarana jalan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan yang berperan dalam peluang terjadinya resiko kecelakaan perlintasan sebidang.

Tabel 2.54
Data Pengadaan Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024

No	Jens Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan	2022	2023	2024	Satuan
1	Rambu Standar	40	143	0	unit
2	Rambu Papan Petunjuk	18	3	11	unit
3	Pagar Pengaman Jalan	29	69	6	m2
4	PJU Konvensional	743	671	208	unit
5	PJU TS	0	0	14	unit
6	Cermin Tikungan	15	24	0	unit
7	Deliniator	150	214	0	unit
8	Rambu Elektronik	0	18	0	unit
9	Warning Light	5	0	0	unit
10	Paku Jalan	415	0	0	unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2025

Formulasi capaian persentase pemenuhan fasilitas keselamatan jalan adalah jumlah total perlengkapan jalan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan.

Tabel 2.55
Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perlengkapan Jalan	211	404	1.819	2.961	3.200
Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan	772	772	3.578	3.578	3.578
Capaian Perlengkapan Jalan	**27,33%**	**52,33%**	**50,84%**	**82,76%**	**89,44%**

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2025

P. Komunikasi dan Informatika

Sistem informasi telah menjadi elemen integral dalam kehidupan sehari-hari kita, TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK mengacu pada penggunaan teknologi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mentransmisikan informasi serta komunikasi antara orang dan perangkat, Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak, seperti komputer, jaringan, Internet, dan aplikasi digital. Sementara itu,

teknologi komunikasi mencakup perangkat dan layanan seperti telepon, fax, e-mail, pesan instan, dan jejaring sosial.

Penggunaan TIK dalam kehidupan sehari-hari telah banyak berdampak pada cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja. TIK telah memungkinkan akses lebih mudah dan cepat ke informasi dan mempercepat proses bisnis dan produksi. Selain itu, TIK juga telah menciptakan banyak pekerjaan baru dalam bidang teknologi dan memberikan kemudahan untuk bekerja jarak jauh atau bekerja dari rumah.

Sampai dengan tahun 2024 semua Perangkat Daerah sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Sementara layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi masih 11,36%.

Q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan usaha mikro di daerah merupakan mata rantai penggerak ekonomi masyarakat lokal khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah di Kabupaten Pasuruan. Namun demikinan koperasi yang berkualitas sampai dengan tahun 2024 masih cukup rendah yaitu 24,46%, demikain juga usaha mikro yang menjadi wirausaha masih perlu dioptimalkan untuk ditingkatkan.

Koperasi yang berkualitas (berdasarkan RAT, volume usaha dan asset), menunjukkan angka yang fluktuatif dan ada kecenderungan menurun, hal ini antara lain dipengaruhi jumlah koperasi melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan), jumlah seluruh koperasi yang bersifat dinamis, baik ada penambahan koperasi baru atau koperasi yang sudah tidak aktif lagi.

R. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Realisasi investasi pada tahun 2022-2024 tetap terjaga dengan pertumbuhan positif meskipun ada kecenderrungan perlambatan. Nilai realisasi investasi didapatkan dari komposit Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dapat dilihat, Nilai PMDN lebih banyak berkontribusi dalam realiasi investasi di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, hingga tahun 2023 terdapat jumlah perusahaan dari dalam negeri (PMDN) sebanyak 55.160 perusahaan dan PMA mencapai 456 perusahaan.

Tabel 2.56
Nilai PMA dan PMDN di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

Jenis Investasi	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)	5.370.738.859.347	4.297.931.600.062	3.545.171.761.421	5.503.245.000.000	7.537.090.500.000
Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	4.664.503.542.322	3.255.137.950.845	5.767.363.600.000	6.743.933.649.713	5.427.657.625.701

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, 2025

Meski jumlah perusahaan PMDN jauh lebih banyak, nilai investasi PMDN sedikit unggul dari PMA selama 2020- 2024 namun selisih nilai investasi tidaklah terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PMDN di Kabupaten Pasuran mencakup banyak usaha kecil dan menengah, sementara PMA terdiri dari perusahaan dengan investasi besar per perusahaan. PMDN berkontribusi pada diversifikasi dan ketahanan ekonomi lokal, sedangkan PMA membawa investasi besar dan potensi global. Kombinasi keduanya memberikan keseimbangan dalam strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Keduanya harus terus didukung untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, modern, dan inklusif.

S. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja pelayanan urusan kepemudaan dan olah raga diukur dengan IKK outcome, yaitu Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi

kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, dan Peningkatan prestasi olahraga. Sesuai dengan regulasi pemuda adalah penduduk usia 16-30 tahun.

Tren tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami fluktuatif dalam rentang tahun 2020-2024. Penurunan terjadi karena dipengaruhi oleh semakin bertambahnya jumlah pemuda di Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya sebagai variabel pembanding, tanpa diikuti kenaikan jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri. Selain itu juga belum optimalnya program tindak lanjut pemuda terampil sehingga diperlukan upaya peningkatan jiwa wirausaha di kalangan pemuda. Tren penurunan juga terjadi pada tingkat artisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Berbanding terbalik dengan capaian prestasi olahraga yang diraih pemuda di Kabupaten Pasuruan meningkat pesat di tahun 2023 yang dipengaruhi oleh semakin meningkatnya frekuensi upaya peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana olahraga yang ada dan event perlombaan yang diikuti.

Pada Tahun 2021-2024 prestasi olahraga selalu mengalami peningkatan. Sementara itu partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri masih sangat rendah (tahun 2024 0,66%).

T. Statistik

Urusan statistik berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, interpretasi dan penyajian data statistik. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 dan 2022 masih ada Perangkat Daerah yang tidak menggunakan data statistik. Namun tahun 2024 sudah mencapai 100%. Tantangan kedepan data statistik menjadi basis data yang akurat. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis mahadata ke depan akan menjadi kunci bagi upaya mengatasi masalah yang timbul sehari sehari.

U. Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian berfungsi dalam lingkup perlindungan informasi penting dan mendukung keamanan serta kepercayaan dalam operasi pemerintah daerah. Kinerja urusan persandian di Kabupaten Pasuruan direpresentasikan oleh capaian indikator tingkat pengamanan informasi. Sampai dengan tahun 2024 masih di bawah 50%.

Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib menyediakan Sistem Pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi. Tingkat keamanan informasi pemerintah, dihitung dari jumlah nilai per area keamanan informasi dibandingkan dengan area penilaian. Capaian tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana gambar di atas. Meskipun secara tren terjadi peningkatan, penyelenggaran urusan Persandian di Kabupaten Pasuruan masih belum optimal baik dari segi penerapan pengamanan sistem sandi dan keamanan informasi daerah.

V. Kebudayaan

Kinerja pelayanan urusan kebudayaan diukur dengan IKK outcome yaitu terlestarikannya cagar budaya. Selain itu juga diukur dengan Nilai Pembangunan Kebudayaan dan jumlah kelompok kesenian tradisional. Capaian terlestarinya cagar budaya tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Pada tahun 2024 indikator terlestarikannya cagar budaya di Kabupaten Pasuruan menunjukkan capaian sebesar 100%. Artinya, seluruh cagar budaya yang telah terdaftar dan ditetapkan telah mendapat perlindungan, perawatan, serta pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun capaian indikator sudah maksimal, upaya berkelanjutan tetap sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelestarian tersebut. Tanpa tindakan lanjut, risiko kerusakan, perubahan fungsi yang tidak sesuai, atau pengabaian terhadap nilai historis tetap bisa terjadi.

Nilai Pemajuan Kebudayaan mengalami peningkatan selama tahun 2020-2024. Namun keberhasilan tersebut masih menyisakan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masih terdapat banyak Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya yang masih membutuhkan pengelolaan secara maksimal termasuk perawatan dan pelestarian serta belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan dalam upaya pelestarian, pengembangan dan perlindungan objek pemajuan kebudayaan yang disebabkan keterbatasan anggaran dan kebijakan pimpinan.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan tersebut, beberapa Langkah yang telah ditempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan adalah dengan melakukan evaluasi alokasi anggaran tahun 2023 untuk pemenuhan kebutuhan SDM dan pemeliharaan cagar budaya sehingga pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Pasuruan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, tetap menjalin kerjasama dengan Balapai Pelestarian Kebdayaan Wilayah (BPKW) juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Selain itu keberpihakan kebijakan ditingkat pimpinan terhadap peningkatan tata kelola Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang cukup dan berimbang.

Pada tahun 2024 jumlah kelompok seni budaya di Kabupaten Pasuruan terdapat 209 kelompok dengan rincian tertera pada tabel 2.52. Dominasi musik Hip Hop, Dangdut, Orkes, dan Elektronik mencerminkan keberagaman identitas budaya dan dinamika sosial dalam masyarakat, yang menunjukkan musik berfungsi sebagai media ekspresi dan koneksi. Pemerintah harus mendukung bermacam seni budaya yang melalui pendanaan, program budaya, dan kebijakan yang mendorong pengembangan seni dan melestarikan warisan budaya.

Tabel 2.57
Jumlah Kelompok Seni Budaya di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

No.	Kelompok Seni Budaya	Jumlah Kelompok
1	Pencak Silat	15
2	Bantengan	34
3	Jaranan	19
4	Kuda Lumping	3

No.	Kelompok Seni Budaya	Jumlah Kelompok
5	Ludruk	5
6	Wayang Kulit	6
7	Pedalangan Wayang Kulit	2
8	Wayang Purwo	1
9	Karawitan	4
10	Seni Lukis	2
11	Seni Rupa	1
12	Seni Tari	13
13	Seni Reog	2
14	Seni Teater	1
15	Seni Sendra Tari	1
16	Seni Menganyam	1
17	Seni Dagelan	1
18	Campursari	5
19	Ketipung Slompret	1
20	Musik Tradisional	5
21	Musik Islam	27
22	Terbang Jibor	1
23	Musik Modern	59
TOTAL		**209**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2024

W. Perpustakaan

Kinerja pelaksanaan urusan perpustakaan salah satunya diukur dengan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dihasilkan dari survey yang menggambarkan perilaku membaca masyarakat. Kegemaran membaca merupakan outcome dari pembangunan literasi masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2024, Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat Kabupaten Pasuruan semakin membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan di Kabupaten Pasuruan yaitu antara lain:

1. Belum optimalnya kegiatan Layanan Perpustakaan yang disebabkan oleh kurangnya petugas layanan perpustakaan dan

bahan pustaka

2. Minimnya Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Pasuruan yang berstandar Nasional Perpustakaan (Ber NSP)

Meskipun demikian, beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpusatakaan dan Arsip selaku pemangku urusan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan layanan perpustakaan baik Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling, mengembangkan desa literasi untuk kesejahteraan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
2. Melakukan Pembinaan Perpustakaan Baik di pendidikan Formal Maupun Non formal

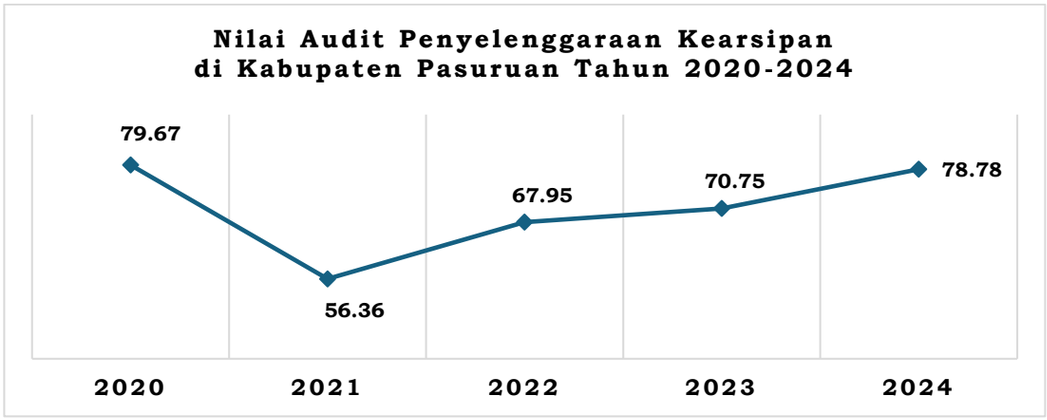
Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 berjumlah 1.218 unit dengan rincian sebagai berikut :

1. Perpustakaan yang mempunyai NPP sebanyak 468 unit
2. Perpustakaan Sekolah sebanyak 564 unit
3. Perpustakaan Umum sebanyak 8 unit
4. Perpustakaan Desa sebanyak 78 unit
5. Perpustakaan Pondok Pesantren sebanyak 100 unit

Sedangkan persentase ketercukupan koleksi perpustakaan sebesar 2,61% dan jumlah pustakawan sebanyak 4 orang.

X. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan dilakukan evaluasi atau audit oleh ANRI. Perkembangan hasil audit tersebut disajikan pada gambar dibawah. Capaian kinerja Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan mengalami fluktuasi. Capaian tertinggi di tahun 2020 dan menurun di tahun 2021 namun kembali mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 78,78.



Gambar 2.49 Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2025

Di antara faktor yang mempengaruhi capaian penyelenggaraan urusan kearsiapan di Kabupaten Pasuruan adalah:

1. Tempat penyimpanan dan pengelolaan arsip tidak sesuai dengan standar ketetapan Depo Arsipyang telah di tetapkan oleh ANRI (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan belum memiliki Depo Arsip)
2. Kurangnya sumber daya tenaga Ahli Fungsional terampil baik dari bidang perpustakaan maupun kearsipan, dan tenaga administrasi perkatoran

Namun demikian beberapa alternatif solusi yang dapat ditempuh guna mengatasi faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Pembangunan Desspo Arsip yang sesuai Perka ANRI No. 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip
2. Melakukan Rekrtutmen Fungsional terampil baik dari bidang perpustakaan maupun kearsipan, dan tenaga administrasi perkatoran.

Y. Kelautan dan Perikanan

Sebagaimana Undang-undang 23 tahun 2014 kewenangan Kabupaten hanya untuk urusan Perikanan, sedangkan untuk urusan kelautan merupakan wewenang dari Provinsi dan Pusat. Kinerja pelayanan urusan kelautan dan perikanan diukur dengan indikator kinerja kunci (IKK) outcome yaitu: Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota. Capaian lima tahun terakhir dijelaskan sebagai berikut.

a. Capaian perkembangan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan meningakt dalam dua tahun terakhir 2023-2024). Faktor hambatan yang banyak ditemukan pada Menurunnya daya dukungan sumberdaya perikanan tangkap dan masih tingginya penggunaan alat tangkap yang dilarang ditambah pengawasan sumberdaya perikanan yang berbasis masyarakat belum maksimal. Dari segi SDM, masih rendahnya kualitas dan pengetahuan SDM nelayan berpengaruh terhadap produktivitas tangkapan. Belum optimalnya pemanfaatan TPI juga menjadi permasalahan klasik yang ada sehingga kesejahteraan nelayan masih rendah.
b. Capaian perkembangan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 dan 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan ini diakibatkan dari tingginya harga pakan, kurangnya ketrampilan pelaku usaha perikanan, dan lemahnya akses permodalan. Selain itu, belum adanya SOP budidaya yang baik, efisien dan efektif juga berpengaruh terhadap penurunan tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelengagraan urusan Kelautan dan Perikanan tidak hanya berfokus pada aktivtitas produksi perikanan, akan tetapi harus menyentuk tahapan pengolahan hasil perikanan. Faktor yang masih menjadi hambatan adalah terbatasnya informasi dan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang juga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi produk olahan perikanan sehingga diversifikasi produk olahan hasil perikanan belum beragam.

Z. Pariwisata

Secara umum capaian indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan atau kondisi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya daya tarik destinasi wisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara maupun Nusantara yang datang ke Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024. Penurunan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh adanya daya tarik wisata dan akomodasi wisata yang mengalami kondisi penurunan sehingga mengakibatkan tutup untuk sementara waktu. Pemerintah kabupaten Pasuruan harus lebih sering melaksanakan kegiatan pengembangan pariwisata, penetapan daya tarik wisata, promosi dan peningkatan atau sertifikasi SDM pariwisata supaya dapat menarik banyak wisatawan ke Kabupaten Pasuruan. Perkembangan jumlah kunjungan wisatwan sebagai berikut:

Tabel 2.58
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	1.246.376	1.358.385	2.600.643	2.335.601	2.578.119

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 2025

AA. Pertanian

Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan merupakan indikator negatif yang arrtinya capaian dengan nilai negatif justru menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, sehingga menjadi indikator keberhasilan pengendalian penyakit. Sebaliknya, apabila nilai indikator menunjukkan angka positif, hal tersebut menandakan terjadi peningkatan jumlah kasus, yang mencerminkan tren yang kurang baik. Berdasarkan data, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022 yang diakibatkan oleh kasus penyakit mulut dan kuku (PMK), namun terjadi penurunan kasus penyakit pada periode 2022–2024, yang menunjukkan bahwa jumlah kasus PMHS mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024 dengan tetap meningkatan perhatian serta penanganan lebih intensif terhadap kasus PMHS di Kabupaten Pasuruan. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten pasuruan telah menempuh berbagai strategi yaitu dengan Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 524.35/944/424.092/2022 tentang Kewaspadaan Dini PMK dan Surat Edaran Bupati Nomor 524.35/993/424.092/2022 tentang

Pengendalian dan Penanggulangan PMK pada Ternak. Dalam pelaksanaannya juga mencakup penguatan sistem deteksi dini, peningkatan cakupan vaksinasi, penegakan protokol biosekuriti di tingkat peternakan, serta edukasi intensif kepada peternak. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan langkah-langkah pemulihan pasca wabah juga menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan sektor peternakan dan mendukung ketahanan pangan lokal.

Sedangkan Produktivitas pertanian per hektar per tahun terus mengalami penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir. Hal itu dikarenakan kinerja penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sampai dengan 2024 dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Alih fungsi lahan pertanian;
2. Peningkatan persentase produktivitas tanaman sayur belum memenuhi target dikarenakan adanya peningkatan luas panen yang tidak diimbangi oleh peningkatan produksi;
3. Kurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian dan peternakan;
4. Masih adanya ancaman penyakit hewan menular;
5. Belum optimalnya hasil IB dan pembibitan ternak di pedesaan;
6. Tingginya harga pakan ternak (konsentrat) dan sulitnya mendapatkan pakan ternak hijauan pada musim kemarau;
7. Kurangnya SDM aparatur khususnya juru sembelih halal (Juleha);
8. Belum adanya Rumah Potong Unggas (RPU) yang dikelola pemerintah, pemeliharaan RPH dan Puskeswan;
9. Masih terbatasnya kelompok ternak mandiri;
10. Akses petani terhadap informasi, teknologi, pasar dan permodalan masih lemah.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengidentifikasi beberapa alternatif strategi yang dapat ditempuh dalam mengatasi faktor penghambat capaian penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Pasuruan. Strategi yang dapat dilakukan tersebut antara lain:

1. Sudah adanya Keputusan Bupati no 521.4/1149/HK/424.013/2022 tentang Luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di 24 Kecamatan

untuk ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi serta mengusahakan penyusunan Perda LP2B agar memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat;

2. Melakukan pelaksanaan sosialisasi dengan petani terkait dengan perkiraan cuaca selama satu tahun sebagai acuan musim tanam;
3. Pengembangan generasi muda dan regenerasi petani untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian sehingga muncul petani milenial melalui program Youth Enterpreneurship and Employment Support Services (YESS)
4. Melakukan bimtek dan pelatihan dengan sasaran ormas pemuda, ponpes dan melakukan pendampingan ke asosiasi peternak untuk bisa eksis
5. Melakukan Survailance secara rutin, Vaksinasi dan melaksanakan pelayanan kesehatan terpadu pada hewan ternak di daerah yang beresiko berjangkit penyakit
6. Melakukan Pelatihan dan koordinasi secara rutin terhadap petugas, dan sosialisasi IB pada kelompok-kelompok tani ternak
7. Memberikan Bimtek dan peralatan pembuatan olahan bahan pakan hijauan ternak dan konsentrat
8. Pelatihan Juleha untuk masyarakat dan pedagang ternak
9. Melakukan Bimtek mulai budidaya hingga pemasaran dengan sasaran kelompok ternak yang belum mandiri
10. Melakukan bimtek dan pendampingan ke perbankan dan juga memfasilitasi pameran

Upaya pemerintah untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan menjaga kesedian pangan salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya program perlindungan lahan pertanian pangan berkelajutan (PLP2B). Program tersebut berdasarkan amanat dari UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Tabel 2.59
Luasan dan Sebaran LP2B di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
		LP2B
1	Bangil	328,74
2	Beji	359,48
3	Gempol	967,24
4	Gondangwetan	1.458,03
5	Grati	920,41
6	Kejayan	3.099,30
7	Kraton	1.313,89
8	Lekok	460,41
9	Lumbang	3.914,78
10	Nguling	1.169,49
11	Pandaan	1.567,13
12	Pasrepan	902,23
13	Pohjentrek	634,03
14	Prigen	902,23
15	Purwodadi	1.065,20
16	Purwosari	1.857,67
17	Puspo	52,17
18	Rejoso	1.736,36
19	Rembang	2.324,20
20	Sukorejo	2.998,89
21	Tutur	947,28
22	Tutur	282,63
23	Winongan	1.573,28
24	Wonorejo	2.523,90
	Total	**34.117,71**

Sumber: Keputusan Bupati Pasuruan No. 521.4/1149.HK/424.013/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

BB. Perdagangan

Kinerja urusan perdagangan diukur dengan indikator Persentase alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai 100%.

CC. Perindustrian

Industri kecil dan menengah dalam periode 2020-2024 mengalami pertumbuhan positif meskipun berfluktuatif. Peningkatan tertinggi di tahun 2024 sebesar 95,83%. Sementara pencapaian

sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri hiingga tahun 2024 telah mencapai 100%.

DD. Transmigrasi

Dalam rentang 2019-2023 terjadi penurunan jumlah calon transmigran yang diberikan penyuluhan. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggunakan indikator baru yaitu Persentase Kawasan Transmigrasi yang Termonitor yang telah mencapai 100% dari target yang ditentukan pada 5 (lima) kawasan. Selain itu, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketenagakerjaan telah berhasil melaksanakan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) Kepala Keluarga.

EE. Unsur Pendukung (Sekretariat Daerah)

Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menunjukkan peningkatan sangat signifikan pada tahun 2022 dan mengalami penurunan yang sangat signifikan juga pada tahun 2023. Beberapa faktor utama yang menyebabkan naik turunnya penggunaan PDN dan produk UMKM/Koperasi antara lain: ketersediaan dan kapaistas Produksi Lokal, Kualitas dan Standarisasi Produk, Peraturan dan Kebijakan Terkait Prioritas PDN (Produk Dalam Negeri), Ketersediaan E-Katalog Lokal, Preferensi dan Kebiasaan Pelaku Pengadaan dan Dukungan dan Pendampingan kepada UMKM/Koperasi

FF. Unsur Penunjang (Sekretariat DPRD)

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang dan memfasilitasi kinerja wakil rakyat, mulai dari perencanaan, proses administrasi pengaturan persiapan, sampai pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah (eksekutif). Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung

atau subsistem dalam menentukan sistem kinerja Sekretariat Dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Tabel 2.60
Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
IKM/SKM layanan sekretariat DPRD	73	86	87	89,86	n/a
Persentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi (Persen)	100	100	100	100	n/a
Indeks Kepuasan Anggota DPRD*	-	-	-	-	87,35
Persentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi* (Persen)	-	-	-	-	109

Keterangan: *Indikator baru digunakan tahun 2024
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, 2025

Tabel di atas menunjukkan IKM/SKM Layanan Sekretariat DPRD mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023. Sedangkan Persentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi telah mencapai hasil yang diharapkan yaitu konsisten mencapai 100%. Hambatan yang ditemukan dalam penyelenggaraan unsur pendukung Sekretariat Dewan banyak terkait dengan tugas dan fungsi dan sumber daya sarana dan prasarana.

GG. Unsur Penunjang (Perencanaan)

Salah satu ukuran melihat kualitas perencanaan adalah nilai Sakip pada komponen perencanaan. Hasil evaluasi sakip tahun 2024, nilai pada komponen perencanaan mengalami penurunan dari 24,18 menjadi 24,04. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain berkaitan dengan pohon kinerja, penentuan indikator yang kurang SMART, dan penetapan target yang kurang menantang.

HH. Unsur Penunjang (Keuangan)

Opini BPK atas LKPD sampai dengan tahun 2024 mencapai penilaian yang maksimal yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini berarti LKPD yang telah disusun memenuhi kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan *(adequate disclosures),* kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Jumlah

peningkatan PAD setiap tahunnya juga menunjukkan tren yang positif. Dalam penyelenggaran urusan keuangan dan pengelolaan asset daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu untuk memperhatikan permasalahan yang menjadi penghambat optimalnya penyelenggaraan urusan ini. Sertifikasi hasil pengamanan BMD yang tidak sesuai target adalah salah satu di antara faktor yang menghambat penyelenggaraan urusan keuangan dan manajemen asset Kabupaten Pasuruan.

Rasio PAD dalam periode tahun 2020-2024 secara perlahan mengalami peningkatan menjadi 23,84% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal masih rendah.

II. Kepegawaian

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator *output* yang bersifat independen. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pasuruan selama tahun 2023-2024 masih berada pada kategori "Sedang" dikarenakan masih sedikitnya kompetensi melalui diklat, bimtek dan lain-lain yang merupakan poin pendongkrak Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.



Gambar 2.50 Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2025

Pada penilaian tahun 2024 rata-rata Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan dalam kategori "Sedang" dengan rincian sebagaimana berikut :

Tabel 2.61
Dimensi Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai IP ASN
22,84	24,56	24,93	5	77,32

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2025

Berdasarkan penilaian sementara Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan rata-rata 77,32 yang tergolong “Sedang.” Hal ini dikarenakan pada 3 (tiga) dimensi Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja kondisi di Kabupaten Pasuruan masih belum maksimal (25,00) dikarenakan masih banyak kualifikasi pendidikan ASN Kabupaten Pasuruan yang belum sesuai Standar Kompetensi Jabatannya. Disamping itu belum meratanya pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pendidikan pelatihan (diklat) teknis jabatan yang diikuti oleh ASN menjadi salah satu penyebab Dimensi Kompetensi belum tercapai secara maksimal. Pada Dimensi Kinerja, capaiannya sebesar 24,93 yang menggambarkan bahwa sebagian besar ASN Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 kinerjanya berpredikat “Baik.”

Beberapa faktor yang memiliki pengaruh dalam pencapaian kinerja unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabuaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Masih ada Aparatur Sipil Negara yang belum memahami peraturan kepegawaian seperti pengajuan cuti luar negeri, akreditasi lembaga pendidikan untuk penyesuaian ijasah, displin, kode etik pegawai dan lain lain berkenaan dengan kepegawaian.
2. Masih ada dokumen yang belum terpenuhi dalam pemenuhan evaluasi NSPK manajemen ASN karena ada beberapa point evaluasi yang belum dipahami terkait dokumen yang diperlukan.

Sedangakan beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor tersebut adalah sebagai beriktut:

1. Telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan administrasi kepegawaian bagi pejabat yang menangani kepegawaian agar materi yang disampaikan berkenaan tentang peraturan

kepegawaian bisa disosialisasikan dan diterapkan pada perangkat daerahnya masing-masing.

2. Telah dilakukan sharing session dalam pemenuhan dokumen evaluasi NSPK dari pemaparan materi olehh Direktur II WASDAL BKN dan asistensi oleh audiwan BKN sehingga dokumen yang diperlukan bisa dipenuhi.

Indeks BerAKHLAK

Indeks ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi penerapan nilai-nilai berAKHLAK (Berorientasi pada Hasil, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam lingkungan ASN (Aparatur Sipil Negara). Indeks berAKHLAK di Kabupaten Pasuruan tahun 2022-2024 berturut adalah 63,5 (cukup sehat), 63,3 (cukup sehat), dan 73,4 (cukup sehat). Nilai indeks BerAKHLAK tahun 2024, nilai terendah dari komponen-komponennya terdapat pada unsur "berorientasi pelayanan."

JJ. Unsur Pengawasan

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara umum meningkat meskipun masih dalam tingkatan atau level 3. Demikian juga kapabilitas APIP juga telah mencapai level 3 sampai dengan tahun 2024.

KK. Unsur Kewilayahan

Kinerja pelayanan unsur kewilayahan, dalam hal ini Kecamatan, diukur dengan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase hasil penyelanggaraan kecamatan. IKM diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat berdasarkan ketentuan Kementerian PAN-RB, PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sedangkan indikator persentase hasil penyelanggaraan kecamatan diukur berdasarkan rata-rata capaian indikator program kewilayahan.

Kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik menjadi sangat strategis untuk meningkatkan pelayanannya, antara lain melalui penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan). Capaian IKM Kecamatan tahun 2020-2024 disajikan di bawah ini.

Tabel 2.62
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	IKM					Rata-Rata
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tosari	87,89	87,89	87,89	87,89	84,88	87,29
2	Tutur	88,68	88,68	88,68	88,68	92,65	89,47
3	Puspo	92,04	92,04	92,04	92,04	93,94	92,42
4	Pasrepan	90,34	90,34	90,34	90,34	91,06	90,48
5	Lumbang	92,66	92,66	92,66	92,66	96,91	93,51
6	Winongan	96,36	96,36	96,36	96,36	94,67	96,02
7	Gondangwetan	91,54	91,54	91,54	91,54	94,85	92,20
8	Grati	95,05	95,05	95,05	95,05	99,23	95,89
9	Nguling	96,77	96,77	96,77	96,77	99,90	97,40
10	Rejoso	93,18	93,18	93,18	93,18	91,98	92,94
11	Purwodadi	94,44	94,44	94,44	94,44	89,57	93,47
12	Purwosari	96,70	96,70	96,70	96,70	98,39	97,04
13	Sukorejo	88,52	88,52	88,52	88,52	95,35	89,89
14	Wonorejo	92,71	92,71	92,71	92,71	91,86	92,54
15	Kejayan	93,63	93,63	93,63	93,63	93,94	93,69
16	Pohjentrek	69,77	69,77	69,77	69,77	94,35	74,69
17	Prigen	91,17	91,17	91,17	91,17	90,71	91,08
18	Pandaan	97,07	97,07	97,07	97,07	99,84	97,62
19	Lekok	89,84	89,84	89,84	89,84	91,55	90,18
20	Gempol	94,21	94,21	94,21	94,21	99,41	95,25
21	Bangil	96,26	96,26	96,26	96,26	95,27	96,06
22	Beji	92,28	92,28	92,28	92,28	94,68	92,76
23	Rembang	88,25	88,25	88,25	88,25	91,43	88,89
24	Kraton	89,98	89,98	89,98	89,98	91,86	90,36
	RATA-RATA	**91,64**	**91,64**	**91,64**	**91,64**	**94,10**	**92,13**

Sumber : 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, 2025

Rata-rata capaian IKM Kecamatan secara umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Rata-rata capaian IKM Kecamatan tahun 2024 berada pada interval 85 – 97 masuk dalam kategori sangat baik (berada di interval 81,26 - 100).

LL. Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja pelayanan unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) diukur dengan indikator kinerja terlihat pada

tabel di bawah yang menggambarkan realisasi kinerja tahun 2020-2024.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kejadian konflik Ipoleksusbud yang ditindaklanjuti (%)	100	100	90,91	89,47	100
	Jumlah Kejadian Konflik Ipoleksosbud (Konflik)	1	9	22	19	17
	Jumlah Kejadian Konflik Ipoleksosbud ditindaklanjuti (Konflik)	1	9	20	17	17
2	Persentase Penurunan Kejadian Ipoleksosbud* (%)	-	-	-	-	58,44

Keterangan: *Indikator baru Renstra Tahun 2024-2026 dan mulai dihitung tahun 2024
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, 2025

Tabel di atas menunjukkan persentase kejadian konflik Ipoleksusbud yang ditindaklanjuti tahun 2020-2024 mencapai 100% karena seluruh kejadian konflik Ipoleksosbud telah ditindaklanjuti. Akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 tidak mencapai 100%. Pada Tahun 2022 terdapat 2 permasalahan atau kasus yang belum terselesaikan dengan baik dari total 22 permasalaha atau kasus yang ada di Kabupaten Pasuruan, hal ini dikarenakan masih adanya kelompok masyarakat yang masih mengutamakan kepentingan kelompok maupun organisasinya seperti:

a. Permasalahan Pengolahan Limbah Avalan yang bernilai ekonomis di PT. KINGJIM INDONESIA dan PT.CREASTEK PIER Rembang;
b. Pelarangan Pemasangan Penerangan Jalan di Desa Pandean Kec. Rembang tanpa ijin karena berada di tanah yang berstatus Hak Milik TNI-AU.

Sedangkan pada tahun 2023 juga terdapat 2 permasalahan atau kasus yang belum terselesaikan dengan baik dari total 19 permasalahan atau kasus yang ada di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan masih adanya kelompok masyarakat yang masih mengutamakan kepentingan kelompok maupun organisasinya seperti

a. Permasalahan Limbah yang bernilai Ekonomis di PT. CRESTEC dengan masyarakat Mojoparon;
b. Permasalahan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Tahun 2024 sebesar 15% tidak menggunakan seperti yang tercantum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

2.1.5 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Komitmen dunia internasional, tidak terkecuali Indonesia dan seluruh daerah otonomnya, untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan antar generasi telah menetapkan *sustainable development goals (SDGs)* atau Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang harus dicapai dalam pembangunannya. Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 melaporkan evaluasi terhadap ketercapaian indikator TPB di Kabupaten Pasuruan. Jumlah indikator yang sesuai dengan tingkat Kabupaten adalah berjumlah 220 indikator. Sedangkan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 7 (Akses Ke Energi Yang Terjangkau) dan 14 (Ekosistem laut) tidak dilakukan analisis dikarenakan sebagian besar indikator berada dalam lingkup kewenangan provinsi. Sehingga secara keseluruhan, total indikator TPB yang digunakan oleh Kabupaten Pasuruan berjumlah 197 indikator.

Hasil identifikasi indikator capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan bahwa, total indikator TPB yang digunakan oleh Kabupaten Pasuruan berjumlah 197 indikator. Dari keseluruhan indikator, sejumlah 106 indikator merupakan kategori SS, sebanyak 60 indikator merupakan kategori SB, sebanyak 4 indikator merupakan kategori BB, dan sebanyak 27 indikator (14 %) merupakan kategori NA.

Tabel 2.64
Ketercapaian TPB Kabupaten Pasuruan

KLASIFIKASI KETERCAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR	Persen
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS)	106	53,8
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB)	60	30,5
Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA)	27	13,7
Indikator TPB yang belum dilaksanakan tetapi belum mencapai target (BB)	4	2,0
Total	**197**	**100,0**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Indikator TPB Kabupaten Pasuruan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target sebesar 106 indikator (53,8%). Tujuan yang paling besar memiliki indikator sudah mencapai target yaitu Tujuan 3 “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia” sebesar 21 indikator. Sedangkan capaian terendah terdapat pada Tujuan 15 “Melindungi, memulihkan dan mendorong pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati” yaitu sebesar 1 indikator.

Indikator TPB Kabupaten Pasuruan yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target sebesar 60 indikator (30%). Tujuan yang paling banyak belum mencapai target yaitu Tujuan 1 “Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun” sebesar 9 indikator. Tidak terdapat indikator wewenang Kabupaten Pasuruan pada Tujuan 7 dan Tujuan 14, sehingga tidak terdapat indikator yang termasuk dalam kategori belum mencapai target. Berikut merupakan rincian capaian indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target pada setiap tujuan TPB. Indikator yang termasuk dalam klasifikasi indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target menjadi indikator prioritas yang harus segera diselesaikan, hal ini berarti sebanyak 58 indikator menjadi indikator prioritas.

Indikator TPB Kabupaten Pasuruan yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebesar 4 indikator (2,03%). Tujuan belum dilaksanakan yaitu Tujuan 3, Tujuan 10, Tujuan 11 dan Tujuan 16. Indikator TPB Kabupaten Pasuruan yang belum atau tidak ada data sebesar 26 indikator (13,20%). Tujuan yang paling banyak tidak ada

data yaitu Tujuan 3, tujuan 11, dan tujuan 16 masing- masing sebesar 3 indikator. Ada beberapa faktor yang menyebabkan data tidak ada, selain di PD tidak tersedia juga data berada atau dimiliki oleh rovinsi sehingga secara tidak langsung tidak tersedia data tersebut Berikut merupakan rincian capaian indikator belum atau tidak ada data pada setiap tujuan TPB

Kabupaten Pasuruan, sebagai salah satu daerah di Jawa Timur, berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan SDGs dengan memprioritaskan program-program yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi kreatif, dan pelestarian lingkungan. Program pendukung SDGs di Kabupaten Pasuruan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Brikut dapat disajikan capaian SDG's di Kabupaten Pasuruan sebagi berikut :

1. Capaian indikator berikut menggambarkan sejauh mana kemajuan telah diraih dalam mencapai Tujuan 1 yaitu **Tanpa Kemiskinan**

Tabel 2.65
Capaian Indikator SDG's kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2024

Nama Tujuan SDGs (1) : 1. TANPA KEMISKINAN (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun)									
Nama Target SDGs (2) : 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.	BPS	Persen	N/A	N/A	1,30	1,56	0,46	0,32
Nama Tujuan SDGs (1) : 1. TANPA KEMISKINAN (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun)									
Nama Target SDGs (2) : 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis	BPS	Persen	8,68	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63

	kelamin dan kelompok umur.								
Nama Tujuan SDGs (1) : 1. TANPA KEMISKINAN (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun)									
Nama Target SDGs (2) : 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, penganggguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	71,3	72,6	71,8	61,72	96,07	100
Indikator 1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Sosial	Persen	85,58	93,32	86,94	83,61	84,27	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 1. TANPA KEMISKINAN (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun)									
Nama Target SDGs (2) : 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
Indikator 1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	24,00
Indikator 1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25,00	25,00
Nama Tujuan SDGs (1) : 1. TANPA KEMISKINAN (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun)									
Nama Target SDGs (2) : 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.									

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BPKPD	Persen	N/A	0,0181	0,015	0,0073	0,01	N/A
Indikator 1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BPKPD	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. Capaian indikator berikut menggambarkan sejauh mana kemajuan telah diraih dalam mencapai Tujuan 2 yaitu **Tanpa Kelaparan**

Nama Tujuan SDGs (1) : 2. TANPA KELAPARAN (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan)
Nama Target SDGs (2) : 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	DKPP	Persen	6,74	8,56	10,28	11,57	9,05	10,37

Indikator 2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DKPP	Persen	N/A	N/A	10,41	10,41	10,41	9,05

Nama Tujuan SDGs (1) : 2. TANPA KELAPARAN (Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan)

Nama Target SDGs (2) : 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	Persen	22,5	21,4	18,1	10,82	7,21	5,32
Indikator 2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	DKPP		N/A	N/A	N/A	N/A	93,5	89,4

3. Berikut ini disajikan data capaian indikator untuk Tujuan 3 yaitu **Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Nama Tujuan SDGs (1) : 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)

Nama Target SDGs (2) : 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	per 100.000 orang	95	70,2	109,46	78,91	61,4	77,4

Indikator 3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nama Tujuan SDGs (1) : 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)

Nama Target SDGs (2) : 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000 KH	5,33	4,4	4,6	3,38	3,55	7,7
Indikator 3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	per 1000 kelahiran hidup	4,8	4	N/A	3,2	2,73	0,73

Nama Tujuan SDGs (1) : 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)

Nama Target SDGs (2) : 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	per 100.000 orang	199,8	109,3	N/A	206,9	200,47	N/A

Indikator 3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	per 1000 orang	0	0	0	13	9,88	N/A
Indikator 3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinas Kesehatan	Persen	220	141	N/A	86	73,7	N/A

Nama Tujuan SDGs (1) : 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)

Nama Target SDGs (2) : 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,6
Indikator 3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Persen	N/A	30,58	N/A	32,34	31,45	36,2
Indikator 3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20,9

Nama Tujuan SDGs (1) : 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)

Nama Target SDGs (2) : 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Dinas Kesehatan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,22

Nama Tujuan SDGs (1) : 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)

Nama Target SDGs (2) : 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Kesehatan	Persen	1,84	1,95	1,95	2,04	1,92	1,88
Nama Tujuan SDGs (1) : 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)									
Nama Target SDGs (2) : 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persen	15,07	13,98	9,89	12,91	12,26	N/A
Indikator 3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Persen	76,78	65,45	31,82	16,00	17,15	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)									
Nama Target SDGs (2) : 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024

Indikator 3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	28,95	27,33	28,66	29,3	29,3	20,99

Nama Tujuan SDGs (1) : 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA (Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia)
Nama Target SDGs (2) :3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	per 1000 tenaga kerja	1,71	1,93	3,74	3,63	4,15	N/A

4. Tabel berikut menunjukkan capaian indikator SDGs tujaun ke 4 terkait sektor pendidikan yaitu **Pendidikan Berkualitas**

Nama Tujuan SDGs (1) : 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua)
Nama Target SDGs (2) : 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan lakilaki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		N/A	N/A	N/A	N/A	12,98	11,35

Nama Tujuan SDGs (1) : 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua)
Nama Target SDGs (2) : 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024

Indikator 4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		N/A	N/A	N/A	N/A	95,8	90,32

Nama Tujuan SDGs (1) : 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua)

Nama Target SDGs (2) : 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		N/A	N/A	N/A	N/A	55,2	57,33

Nama Tujuan SDGs (1) : 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua)

Nama Target SDGs (2) : 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	96,04	N/A	93,54	94,33	92,33	N/A

Nama Tujuan SDGs (1) : 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua)

Nama Target SDGs (2) : 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS (Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua)									
Nama Target SDGs (2) : 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. indikator capaian pada Tujuan 5 yaitu **Kesetaraan Gender** memberikan gambaran peran perempuan dalam pembangunan dan perlindungan haknya

Nama Tujuan SDGs (1) : 5. KESETARAAN GENDER (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan)									
Nama Target SDGs (2) : 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024

Indikator 5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 5. KESETARAAN GENDER (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan)									
Nama Target SDGs (2) : 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	Persen	N/A	0,93	0,52	1,45	1,68	N/A
Indikator 5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	Persen	N/A	0,013	0,012	0,011	0,011	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 5. KESETARAAN GENDER (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan)									

Nama Target SDGs (2) : 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DP3AP2KB	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	20,1	20,9
Nama Tujuan SDGs (1) : 5. KESETARAAN GENDER (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan)									
Nama Target SDGs (2) : 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 5.5.1*	Proporsi kursi yang didudukiperempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DP3AP2KB	Persen	54,47	54,95	56,63	59,5	60,02	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 5. KESETARAAN GENDER (Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan)									
Nama Target SDGs (2) : 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	61,51	63,62	64,12	66,06	67,03	N/A

6. Indikator tujuan ke 6 yaitu **Air Bersih dan Sanitasi Layak** mengilustrasikan perkembangan akses terhadap layanan dasar tersebut

Nama Tujuan SDGs (1) : 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua)									
Nama Target SDGs (2) : 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas Kesehatan	KK	N/A	N/A	N/A	N/A	464669	344521

Nama Tujuan SDGs (1) : 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua)									
Nama Target SDGs (2) : 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Dinas Kesehatan	KK	N/A	N/A	N/A	N/A	111345	378609

Nama Tujuan SDGs (1) : 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua)
Nama Target SDGs (2) : 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan \kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	Dinas Lingkungan Hidup	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	46,67%	80,40 %

7. Indikator pada tujuan ke 8 yaitu : **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** menyajikan data capaian terkait kinerja ekonomi, ketenagakerjaan, dan inklusi keuangan

Nama Tujuan SDGs (1) : 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua)									
Nama Target SDGs (2) : 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.			5,83	-2,03	4,34	5,32	5,21	N/A
Indikator 8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Bappelitbandga	juta rupiah	105.289,18	103.152,80	107.630,27	113.352,08	119.252,55	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua)									
Nama Target SDGs (2) : 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Ketenagakerjaan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Ketenagakerjaan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	5,48	N/A

Nama Tujuan SDGs (1) : 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua)									
Nama Target SDGs (2) : 8.8 Melindungi hakhak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Dinas Ketenagakerjaan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua)									
Nama Target SDGs (2) : 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	27.536	N/A
Indikator 8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	2.281.411	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua)									
Nama Target SDGs (2) : 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Unit	5,00	5,25	5,44	5,63	5,81	N/A
Indikator 8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persen	6,12	6,52	16,31	41,48	42,83	N/A

8. Capaian indikator Tujuan 9 yaitu **Industri, Inovasi dan Infrastruktur** mencerminkan kontribusi sektor industri dan infrastruktur terhadap pembangunan daerah

Nama Tujuan SDGs (1) : 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi)

Nama Target SDGs (2) : 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	57,68	58,97	60,25	60,42	40,42	N/A
Indikator 9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	6,47	-0,32	5,27	5,41	4,98	N/A
Indikator 9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Tenaga Kerja	Persen	N/A	33,15	34,07	33,39	33,22	N/A

Nama Tujuan SDGs (1) : 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi)

Nama Target SDGs (2) : 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	0,173	0,100	0,098	0,135	0,136	N/A
Indikator 9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nama Tujuan SDGs (1) : 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR (Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi)

Nama Target SDGs (2) : 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BPKPD	Persen	0,08	0,07	0,74	0,09	1,02	N/A

9. Indikator pada tujuan ke 10 yaitu **Berkurangnya Kesenjangan** menunjukkan kondisi tingkat ketimpangan, distribusi pendapatan, dan upaya inklusi terhadap kelompok kurang beruntung

Nama Tujuan SDGs (1) : 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara)									
Nama Target SDGs (2) : 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 10.1.1*	Rasio Gini.	Dinas Sosial	koef	0,308	0,346	0,344	0,325	0,367	N/A
Indikator 10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	Persen	8,68	9,26	9,7	8,96	9,24	N/A
Indikator 10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara)									
Nama Target SDGs (2) : 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.									

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Dinas Sosial	Persen	31,23	30,52	29,94	32,97	32,34	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara)									
Nama Target SDGs (2) : 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	kebijakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	hukum HAM Internasional.								

Nama Tujuan SDGs (1) : 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN (Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara)
Nama Target SDGs (2) : 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Sosial	Persen	85,58	93,32	86,94	83,61	87,63	N/A

10. Indikator tujuan 11 yaitu **Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan** menunjukkan kondisi tingkat ketimpangan, distribusi pendapatan, dan upaya inklusi terhadap kelompok kurang beruntung

Nama Tujuan SDGs (1) : 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan)
Nama Target SDGs (2) : 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persen	73,47	80,03	69,68	67,49	68,95	N/A

Nama Tujuan SDGs (1) : 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan)
Nama Target SDGs (2) : 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	per 100.000 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan)									
Nama Target SDGs (2) : 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan)									
Nama Target SDGs (2) : 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persen	24	24		24	24	N/A

11. Indikator pada Tujuan 12 yaitu **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab** mencerminkan efektivitas program pengelolaan limbah dan penguatan regulasi ramah lingkungan

Nama Tujuan SDGs (1) : 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan)									
Nama Target SDGs (2) : 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024

Indikator 12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	1.584.066	1.636.675	1.648.698	1.660.722	1.672.015	N/A

Nama Tujuan SDGs (1) : 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan)
Nama Target SDGs (2) : 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas Lingkungan Hidup	Perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nama Tujuan SDGs (1) : 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB (Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan)
Nama Target SDGs (2) : 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	fasilitas public	51	52	55	55	56,06	N/A

12. Indikator pada Tujuan 13 yaitu **Penanganan Perubahan Iklim** dengan capaian sebagai berikut

Nama Tujuan SDGs (1) : 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya)
Nama Target SDGs (2) : 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGsTahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024

Indikator 13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang			N/A	N/A	N/A	N/A	1,15364	1,031

13. Kabupaten Pasuruan terus mendorong penegakan hukum yang adil, penguatan kelembagaan, serta peningkatan rasa aman masyarakat melalui dukungan tujun ke 16 yaitu **Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Nama Tujuan SDGs (1) : 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan)

Nama Target SDGs (2) : 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Satpol PP		3	4	1	4	3	N/A
Indikator 16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Bakesbangpol	per 100.000 penduduk	0	0	0	0	0	N/A
Indikator 16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Satpol PP	Persen	0,002826	0,003549	0,002043	0,005559	0,00	N/A
Indikator 16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Satpol PP	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nama Tujuan SDGs (1) : 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan)

Nama Target SDGs (2) : 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisikdan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DP3AP2KB	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DP3AP2KB	Persen	N/A	0,022797	0,013399	0,036663	0,0289	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan)									
Nama Target SDGs (2) : 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat	Nilai	N/A	N/A	4	3,53	3,65	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan)									
Nama Target SDGs (2) : 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran	BPKPD	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	yang disetujui.								
Indikator 16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indikator 16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan)									
Nama Target SDGs (2) : 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DP3AP2KB	Persen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	N/A
Indikator 16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	Persen	8,00	4,17	22,58	22,86	23,14	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan)									
Nama Target SDGs (2) : 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									

Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dispendukcapil	Persen	5	8,53	21,64	24,19	25,58	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH (Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan)									
Nama Target SDGs (2) : 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	kebijakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Tujuan 17 yaitu **Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan** difokuskan pada peningkatan koordinasi lintas sektor dan penguatan dukungan teknis untuk mendukung seluruh implementasi SDG's

Nama Tujuan SDGs (1) : 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN (Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan)									
Nama Target SDGs (2) : 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB	BPKPD	Persen	4,46	4,81	4,46	4,26	4,20	N/A

	menurut sumbernya.								
Indikator 17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPKPD	Persen	2,50	2,48	2,50	2,62	2,66	N/A
Indikator 17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPKPD	Persen	10,81	11,22	11,70	13,50	13,70	N/A
Nama Tujuan SDGs (1) : 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN (Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan)									
Nama Target SDGs (2) : 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung peembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
Kode Indikator (3)	Nama Indikator SDGs (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Capaian SDGs Tahun 2019	Capaian SDGs Tahun 2020	Capaian SDGs Tahun 2021	Capaian SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2023	Capaian SDGs Tahun 2024
Indikator 17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Dispendukcapil	tersedia/tidak tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

2.1.6 Kerja Sama Daerah

Kabupaten Pasuruan telah menjalin berbagai kerja sama daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Beberapa di antaranya meliputi:

1. **Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan untuk *Universal Health Coverage* (UHC)**

   Pemerintah Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC) 100% pada tahun 2025. Melalui kerja sama ini, seluruh warga, termasuk yang kurang mampu, dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Hingga Desember 2024, sekitar 384.000 warga telah terdaftar dalam program ini.

2. **Kerja Sama dengan Civitas Akademika se-Pasuruan Raya**

   Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjalin kerja sama dengan universitas dan institusi pendidikan di wilayah Pasuruan Raya. Kerja sama ini fokus pada pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pembangunan daerah.

3. **Kerja Sama dengan Muhammadiyah**

   Pemerintah Kabupaten Pasuruan menandatangani nota kesepahaman dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan untuk program penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Kerja sama ini juga mencakup bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan, dan sosial dakwah.

4. **Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Pasuruan**

   Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Pasuruan dalam bidang pembangunan daerah dan pelayanan publik, termasuk kesehatan, pendidikan, penanganan kebencanaan, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban.

5. **Kerja Sama dalam Pengelolaan Mata Air Umbulan**

   Kabupaten Pasuruan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beberapa daerah lain dalam pengelolaan sumber daya air Umbulan. Kerja sama ini bertujuan untuk pengelolaan dan pemanfaatan mata air Umbulan secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

6. **Kerja Sama di Bidang Lingkungan Hidup**

   Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan menjalin kerja sama dengan rumah sakit untuk pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta dengan organisasi non-pemerintah untuk program edukasi lingkungan dan kegiatan penghijauan.

2.1.7 BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

BUMD di Kabupaten Pasuruan memiliki peran vital dalam mendukung pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan air

bersih, yaitu PDAM Giri Nawa Tirta. PDAM Giri Nawa Tirta bertanggung jawab atas penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Perusahaan ini telah menunjukkan kinerja yang baik, terbukti dengan penghargaan TOP BUMD Awards 2023 kategori Perumda Air Minum dengan label "Bintang 5" . Penghargaan ini mencerminkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan profesionalitas dalam pengelolaan manajemen perusahaan.

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah selama lima tahun terakhir memberikan gambaran kemampuan/kondisi keuangan daerah dalam membiayai pembangunan. Kondisi keuangan daerah disajikan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 5 (lima) tahun ke depan. Secara rinci, gambaran ringkas mengenai kondisi keuangan daerah Kabupaten Pasuruan yang menjadi pembahasan dalam bab ini mencakup Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Neraca Daerah, Proporsi Penggunaan Anggaran, serta Analisis Pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 beserta komponennya terlihat pada Tabel 2.66.

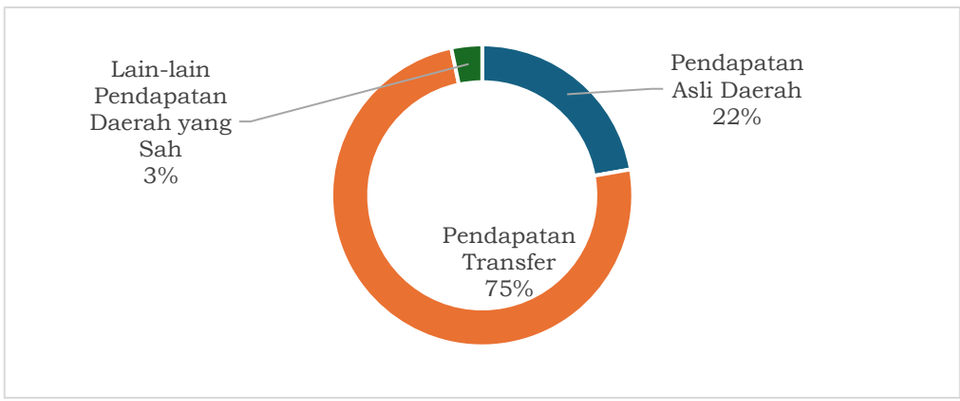
Tabel 2.66
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 – 2024

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.217.071.717.078,40**	**3.364.856.320.688,61**	**3.352.368.857.825,30**	**3.658.922.547.419,46**	**3.796.899.263.556,28**	**4,28**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**700.151.909.602,40**	**701.199.341.703,47**	**736.238.743.114,30**	**825.315.022.145,46**	**905.138.895.757,28**	**6,73**
1.1.1	Pajak Daerah	360.889.758.442,02	393.593.785.426,11	452.520.753.582,18	503.302.286.143,93	518.528.935.676,74	9,57
1.1.2	Retribusi Daerah	34.236.693.406,00	30.094.738.924,33	33.794.826.500,12	39.386.573.646,61	372.584.126.012,22	215,68
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.724.719.096,00	4.777.764.881,00	4.829.702.733,00	4.982.159.407,00	5.137.050.127,00	2,12
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	300.300.738.658,38	272.733.052.472,03	245.093.460.299,00	277.644.002.947,92	8.888.783.941,32	-25,71
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.352.240.387.009,00**	**2.452.634.490.954,14**	**2.567.448.223.132,00**	**2.762.461.968.553,00**	**2.813.236.382.551,00**	**4,60**
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.137.255.579.626,00	2.175.979.517.096,00	2.316.302.794.650,00	2.453.704.926.353,00	2.589.747.556.066,00	4,93
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.772.426.292.426,00	1.810.698.316.726,00	1.945.563.655.850,00	2.103.879.263.853,00	2.232.501.355.066,00	5,96
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	271.830.390.452,00	366.103.289.336,00	369.645.316.762,00	459.885.029.549,00	458.014.472.000,00	14,91
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.103.294.454.000,00	1.096.817.576.000,00	1.091.833.359.509,00	1.159.769.374.954,00	1.276.230.892.127,00	3,81
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	380.529.035.974,00	294.809.731.390,00	484.084.979.579,00	472.580.509.350,00	484.634.482.939,00	10,46
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	16.772.412.000,00	52.967.720.000,00	-	11.644.350.000,00	13.621.508.000,00	33,20
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.5	Dana Desa	364.829.287.200,00	365.281.200.370,00	370.739.138.800,00	349.825.662.500,00	357.246.201.000,00	-0,48
1.2.2	Transfer Antar Daerah	214.984.807.383,00	276.654.973.858,14	251.145.428.482,00	308.757.042.200,00	223.488.826.485,00	3,70
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	171.461.978.633,00	242.754.115.501,00	232.180.879.482,00	288.514.995.500,00	201.905.413.485,00	7,87
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	43.522.828.750,00	33.900.858.357,14	18.964.549.000,00	20.242.046.700,00	21.583.413.000,00	-13,20
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**164.679.420.467,00**	**211.022.488.031,00**	**48.681.891.579,00**	**71.145.556.721,00**	**78.523.985.248,00**	**1,93**
1.3.1	Hibah	164.679.420.467,00	27.286.176.486,00	1.892.000.000,00	-	8.143.557.000,00	-69,12
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	183.736.311.545,00	46.789.891.579,00	71.145.556.721,00	70.380.428.248,00	-5,89

Sumber : BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi sebesar 74,44%. Dengan kata lain bahwa tiga perempat Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan berasal dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Sedangkan sisanya sebesar 22,19% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebesar 3,37% Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rata - rata Proporsi tersebut melalui perhitungan proporsi dari kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2024.



Gambar 2.77 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

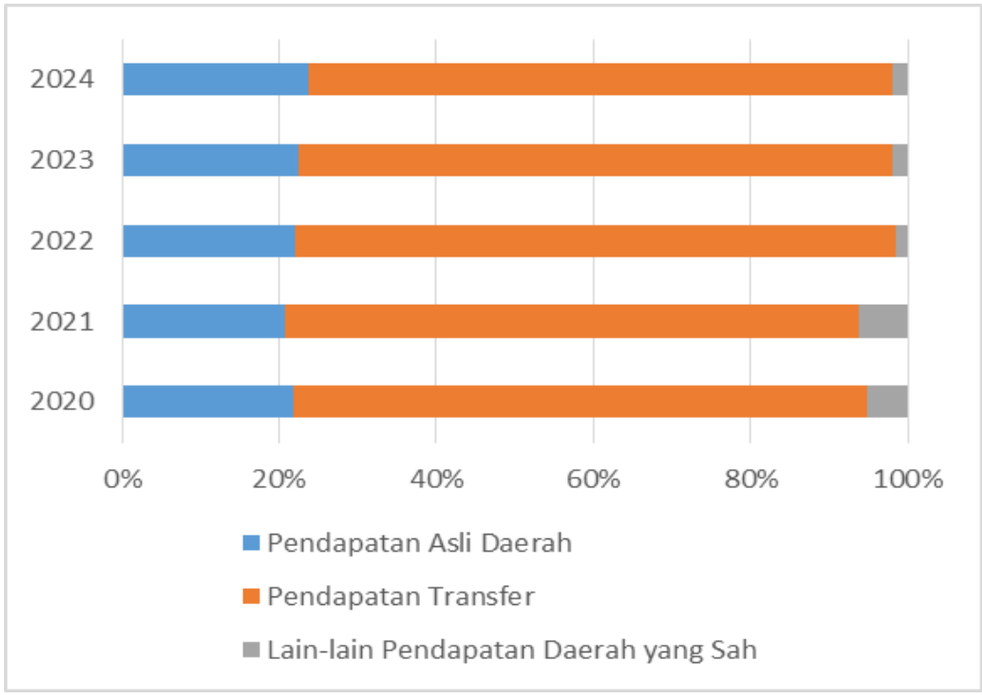
Secara lebih rinci proporsi masing-masing komponen pembentuk PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2020 - 2024 tersaji dalam Tabel 2.67.

Tabel 2.67
Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Proporsi
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	**PENDAPATAN**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.00%**
1.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**21.8%**	**20.8%**	**22.0%**	**22.6%**	**23.8%**	**22.19%**
1.1.1.	Pajak daerah	11.2%	11.7%	13.5%	13.8%	13.7%	12.77%
1.1.2.	Retribusi daerah	1.1%	0.9%	1.0%	1.1%	9.8%	2.77%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.14%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	9.3%	8.1%	7.3%	7.6%	0.2%	6.51%
1.2	**Pendapatan Transfer**	**73.1%**	**72.9%**	**76.6%**	**75.5%**	**74.1%**	**74.44%**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**66.4%**	**64.7%**	**69.1%**	**67.1%**	**68.2%**	**67.09%**
2.1.1	Dana Perimbangan	54.6%	52.2%	58.0%	57.2%		
1.1.1	Dana Bagi Hasil	8.4%	10.9%	11.0%	12.6%		
1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	34.3%	32.6%	32.6%	31.7%		
1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0.1%	8.8%	14.4%	12.9%		
2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.0%	1.6%	0.0%	0.3%		
2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
2.1.4	Dana Keistimewaan	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
2.1.5	Dana Desa	11.3%	10.9%	11.1%	9.6%		
1.2.2	**Transfer Antar-Daerah**	**6.7%**	**8.2%**	**7.5%**	**8.4%**	**5.9%**	**7.34%**
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5.3%	7.2%	6.9%	7.9%		
2.2.2	Bantuan Keuangan	1.4%	1.0%	0.6%	0.6%		
1.3.	**Lain-lain Pendapatan Daerah y**	**5.1%**	**6.3%**	**1.5%**	**1.9%**	**2.1%**	**3.37%**
1.3.1	Hibah	5.1%	0.8%	0.1%	0.0%	0.2%	1.24%
1.3.2	Dana Darurat		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		5.5%	1.4%	1.9%	1.9%	2.66%

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

Melihat secara lebih rinci pada proporsi komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan maka dapat diketahui bahwa Transfer Pemerintah Pusat merupakan komponen dengan proporsi paling tinggi baik terhadap Pendapatan Transfer maupun terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Dalam kurun waktu 5 tahun (2020 - 2024) Transfer Pemerintah Pusat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan sebesar 67,09%. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa Kabupaten Pasuruan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai pendapatan terbesar untuk membiayai pembangunan dan melengkapi kebutuhan daerahnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer. Namun, jika melihat pada proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.



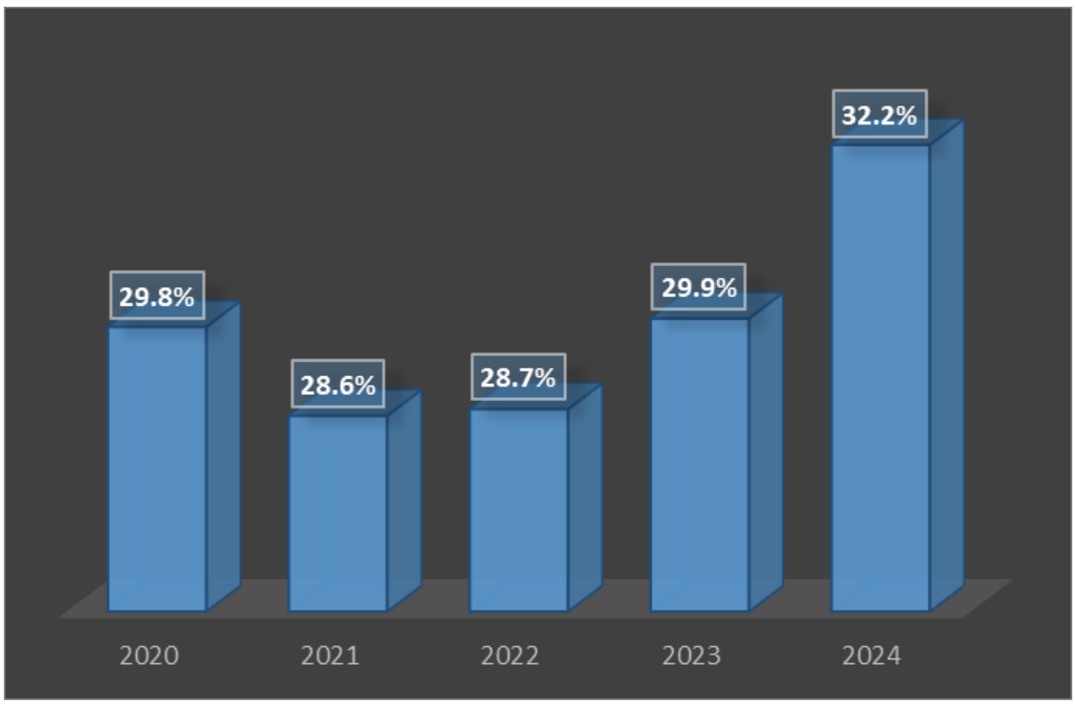
Gambar 2.78 Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 - 2024

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

Analisis kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan melihat beberapa indikator berikut ini:

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian merupakan perbandingan besaran PAD terhadap pendapatan transfer yang merupakan pendapatan dari luar daerah dalam satuan persentase. Semakin tinggi nilai indikator ini, maka tinggi pula kemandirian keuangan daerah. Bahkan terdapat kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah berdasarkan besaran rasio ini. Jika rasio kemandirian ≤10%, maka kemandirian keuangan daerah berkategori Sangat Kurang, bernilai antara 10% dan 20% berkategori Kurang, bernilai antara 20%-30% berkategori Sedang, bernilai antara 30%-40% berkategori Cukup, bernilai antara 40%-50% berkategori Baik, dan di atas 50% berkategori Sangat Baik.

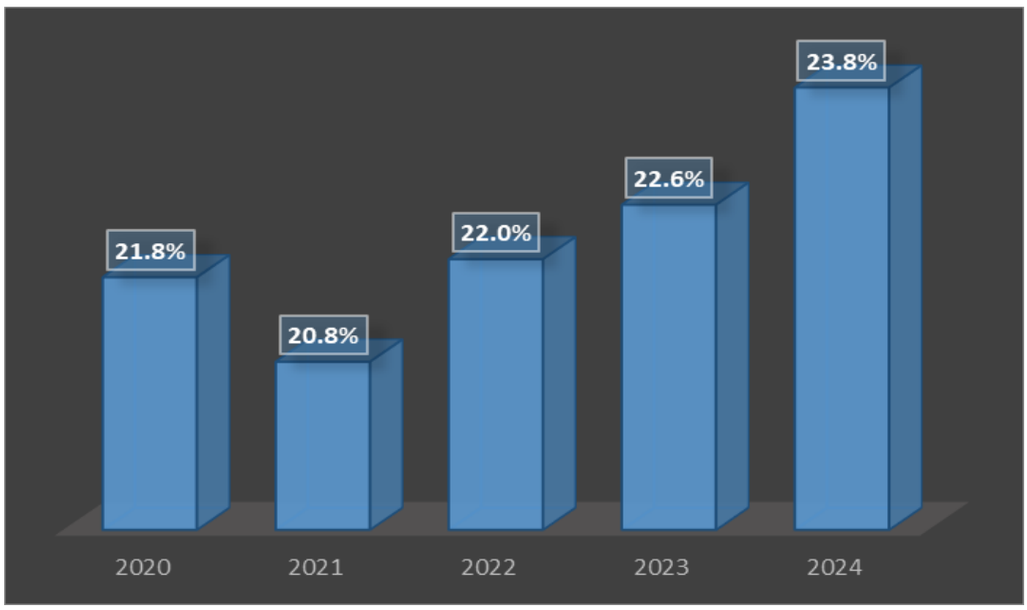


Gambar 2.79 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

Perkembangan rasio kemandirian daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 memperlihatkan bahwa kemandirian keuangan daerah cenderung meningkat, meskipun sempat menurun di tahun 2021 dan 2022. Jika di tahun 2020 hingga tahun 2023 berkategori Sedang, maka di tahun 2024 meningkat dan berubah berkategori Cukup.

B. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan untuk membiayai pembangunan daerah. Indikator ini diukur melalui perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Derah. Semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin mandiri pula keuangan daerah tersebut karena pendapatan daerahnya didominasi oleh PAD dan tidak terlalu tergantung pada pendapatan transfer. Kategori derajat desentralisasi fiskal suatu daerah sama dengan pengategorian rasio kemandirian keuangan daerah.



Gambar 2.80 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 – 2024

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

Gambar 2.80 memperlihatkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pasuruan di tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, meskipun sempat menurun di tahun 2021. Derajat desentralisasi fiskal berkisar pada angka 20.8% hingga 23,3%, sehingga derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pasuruan berada di kategori “Sedang.” Hal ini memperlihatkan bahwa upaya peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan telah cukup baik dan mampu meningkatkan derajat desentralisasi fiskal. Walaupun demikian, dengan kategori yang masih “sedang”, di masa mendatang, upaya peningkatan PAD harus dipercepat dan dioptimalkan sehingga mampu mendorong ke derajat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi.

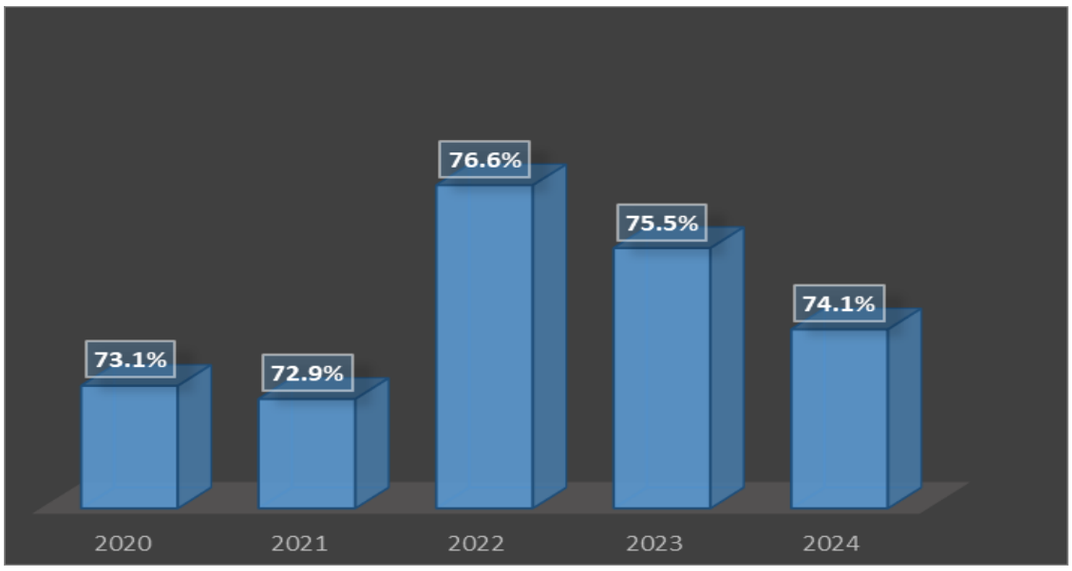
Tabel 2.68
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 - 2024

RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL				
2020	2021	2022	2023	2024
21,8	20,8	22,0	22,6	23,8
SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

C. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Semakin tinggi rasio, maka keuangan daerah semakin tergantung terhadap dana transfer. Nilai rasio ≤ 25% berkategori Rendah Sekali, rasio bernilai antara 25% hingga 50% berkategori "Rendah", rasio bernilai antar 50%-75% bernilai Sedang, dan bernilai >75% bernilai Tinggi.



Gambar 2.81 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 – 2024
Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

Gambar 2.81 memperlihatkan perkembangan rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan di tahun 2020 hingga tahun 2024. Seiring dengan rasio kemandirian keuangan daerah maupun derajat desentraliassi fiskal yang cenderung meningkat, maka rasio atau tingkat ketergantungan keuangan daerah cenderung menurun atau membaik. Meskipun di tahun 2022 dan 2023 rasio ketergantungan keuangan daerah sempat berkategori "Tinggi", namun di tahun lainnya, berkategori "sedang." Walaupun demikian, di masa mendatang tetap diperlukan upaya percepatan dan optimalisasi peningkatan PAD sehingga rasio ketergantungan keuangan daerah semakin lama semakin menurun.

Tabel 2.69
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020 - 2024

RASIO KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH				
2020	2021	2022	2023	2024
73,12	72,89	76,59	75,50	74,09
SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI	SEDANG

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2024 (data diolah)

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu pengeluaran pemerintah daerah yang menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel 2.70 memperlihatkan bahwa realisasi total belanja daerah Kabupaten Pasuruan selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dari Rp. 3,238,383,232,383.24 di tahun 2020 menjadi Rp. 3,746,327,695,687.55 di tahun 2024. Nilai tersebut meningkat 15,69% selama 5 tahun atau rata-rata naik sebesar 3,8% per tahunnya. Adapun tingkat pertumbuhan realisasi untuk masing-masing jenis belanja daerah sangat beragam. Semakin meningkatnya realisasi belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasuruan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta adanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal.

Tabel 2.70 juga memperlihatkan bahwa di antara empat komponen belanja daerah (belanja operasi, modal, tidak terduga dan transfer), belanja operasi merupakan komponen belanja yang tertinggi pertumbuhannya, yaitu sebesar 7,6% per tahun. Sementara itu, komponen belanja lainnya cenderung berfluktuasi. Jika di rata-rata, pertumbuhan belanja modal meningkat sebesar 0,3% per tahun, sementara belanja tak terduka dan belanja transfer justru memiliki rata-rata pertumbuhan minus, khususnya pada belanja tak terduga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi ketidakpastian yang memberikan konsekuensi terhadap pemenuhan anggaran semakin berkurang.

Belanja operasi selama 5 tahun terakhir juga memiliki proporsi tertinggi dalam struktur belanja dibandingkan tiga komponen belanja lainya. Proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah sebesar 69,1%, sementara belanja modal, tidak terduga dan transfer masing-masing sebesar 11,3%, 1,4% dan 18,2%. Proporsi belanja operasi ini cenderung meningkat, dari semula 63,9% di tahun 2020 menjadi 73,9% di tahun 2024. Di antara jenis belanja operasi, proporsi belanja terbesar ada pada belanja pegawai. Terjadinya peningkatan realisasi jumlah maupun proporsi belanja pegawai disebabkan oleh pemenuhan kenaikan gaji dan tunjangan pegawai yang ada maupun peningkatan jumlah pegawai, khususnya yang dihasilkan dari seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.

Belanja pemerintahan yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah umumnya adalah belanja untuk program pembangunan yang menyebar di keempat komponen belanja daerah. Di masa mendatang, proporsi belanja yang memberikan dampak bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan diharapkan lebih dapat ditingkatkan.

Tabel 2.70
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan per tahun (%)
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
2	**BELANJA**	**3,238,383,232,383.24**	**3,273,759,884,343.00**	**3,450,040,247,082.16**	**3,733,513,101,278.00**	**3,746,327,695,687.55**	**3.8%**
2.1	**Belanja Operasi**	**2,070,414,873,308.96**	**2,228,563,488,253.00**	**2,343,945,791,110.45**	**2,674,895,675,790.00**	**2,766,874,460,869.55**	**7.6%**
2.1.1	Belanja Pegawai	1,203,142,213,892.00	1,107,837,622,596.00	1,133,803,924,679.00	1,229,526,411,903.00	1,327,586,999,496.00	2.7%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	706,180,335,963.96	931,053,246,192.00	1,016,509,247,583.00	1,219,035,071,080.00	1,217,142,324,381.55	15.2%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-		
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-		
2.1.5	Belanja Hibah	126,307,448,453.00	156,848,191,841.00	165,372,279,498.45	208,154,192,807.00	212,732,536,992.00	14.4%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	34,784,875,000.00	32,824,427,624.00	28,260,339,350.00	18,180,000,000.00	9,412,600,000.00	-25.9%
2.2	**Belanja Modal**	**352,127,050,135.28**	**376,073,722,205.00**	**476,867,550,144.71**	**437,513,395,687.00**	**331,147,189,110.00**	**0.3%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	28,408,220.00	70,000,000.00	-	-		
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114,363,487,979.20	132,357,240,550.00	185,360,760,023.40	141,502,945,421.00	128,780,587,363.00	5.8%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94,332,201,680.00	124,218,986,593.00	164,196,619,083.72	133,147,504,812.00	61,282,725,362.00	-2.3%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan I	135,206,224,587.00	118,793,505,162.00	126,174,394,637.59	160,878,740,804.00	139,527,507,686.00	2.1%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8,196,727,669.08	633,989,900.00	1,135,776,400.00	1,984,204,650.00	1,243,368,699.00	6.1%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya					313,000,000.00	
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**172,098,662,694.00**	**33,867,748,961.00**	**11,345,474,996.00**	**3,411,447,525.00**	**6,874,196,287.00**	**-28.8%**
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	172,098,662,694.00	33,867,748,961.00	11,345,474,996.00	3,411,447,525.00	6,874,196,287.00	-28.8%
2.4	**Belanja Transfer**	**643,742,646,245.00**	**635,254,924,924.00**	**617,881,430,831.00**	**617,692,582,276.00**	**641,431,849,421.00**	**-0.1%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	43,341,894,789.00	40,361,924,322.00	41,704,880,895.00	47,007,207,368.00	57,651,190,042.00	8.0%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	600,400,751,456.00	594,893,000,602.00	576,176,549,936.00	570,685,374,908.00	583,780,659,379.00	-0.7%

Sumber : BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dalam penganggaran Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Hal tersebut selaras dengan konteks keuangan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Tabel 2.71 memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pembiayaan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung menurun. Bahkan, secara rata-rata penerimaan pembiayaan tumbuh sebesar minus 7,0%. Pembiayaan pembanguan di Kabupaten Pasuruan bersumber dari penerimaan/pendapatan daerah, baik PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun sebelumnya. Sementara itu, tidak ada pengeluaran pembiayaan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.71
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**302,450,746,781.27**	**281,149,231,476.43**	**372,245,667,822.04**	**274,574,278,565.18**	**199,983,724,706.64**	**-7.0%**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Ta	302,450,746,781.27	281,149,231,476.43	372,245,667,822.04	274,574,278,565.18	**199,983,724,706.64**	-7.0%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinj	-	-	-	-	-	-25,00
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0,00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	-	-	-	-	-	**0,00**
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yar	-	-	-	-	-	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0,00

Sumber : BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025

2.2.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menjadi sebuah laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini memiliki signifikansi besar bagi manajemen pemerintah daerah. Neraca Daerah, sebagai gambaran posisi keuangan entitas (pemerintah daerah) pada suatu titik waktu tertentu, mencakup elemen-elemen utama seperti Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset dapat didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, di mana manfaat ekonomi atau sosial di masa mendatang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Aset juga dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban dalam Neraca Daerah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Komponen terakhir yang tercakup dalam Neraca Daerah adalah ekuitas, yang dapat didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah, merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Untuk mengetahui posisi keuangan daerah Kabupaten Pasuruan berikut disajikan data perkembangan dan rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Pasuruan dalam 5 tahun terakhir (2019 - 2023).

Tabel 2.72
Neraca Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**ASET**					
1.1.	**ASET LANCAR**	**534.899.766.002,76**	**645.798.377.597,49**	**528.749.808.464,52**	**457.770.928.625,76**	**519.455.882.604,03**
1.1.1.	Kas	281.153.738.094,43	372.253.088.153,04	274.574.278.565,18	199.983.724.706,64	250.555.292.575,37
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Piutang Pendapatan	278.955.369.743,02	307.949.876.980,04	284.443.209.594,81	315.259.178.070,02	142.166.248.224,51
1.1.4.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Piutang Lainnya	152.786.666,00	182.775.978,00	138.239.500,00	196.217.200,00	159.717.200,00
1.1.6.	Penyisihan Piutang	(121.414.031.442,27)	(133.179.863.397,13)	(146.138.130.514,46)	(184.286.274.682,72)	(208.888.293.340,70)
1.1.7.	Beban Dibayar Dimuka	604.361.449,44	326.601.501,08	1.175.173.663,92	446.795.960,60	660.794.972,59
1.1.8.	Persediaan	95.447.541.492,14	98.265.898.382,46	114.557.037.655,07	126.171.287.371,22	126.073.546.831,56
1.2.	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**100.355.462.455,37**	**100.901.339.323,00**	**293.203.271.638,90**	**284.139.011.776,44**	**104.736.302.078,81**
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	100.355.462.455,37	100.901.339.323,00	293.203.271.638,90	284.139.011.776,44	104.736.302.078,81
1.3.	**ASET TETAP**	**3.736.715.785.927,29**	**3.585.969.524.439,59**	**3.643.328.918.647,88**	**3.695.390.400.384,94**	**3.631.286.446.723,83**
1.3.1.	Tanah	1.032.222.721.482,33	1.085.214.474.182,33	1.199.015.539.319,36	1.171.117.179.932,11	1.137.699.280.959,08
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	1.201.864.635.828,73	1.332.180.138.311,63	1.571.795.231.594,03	1.714.478.340.505,94	1.835.201.840.832,86
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.876.455.512.362,07	1.973.119.909.223,32	1.969.656.388.354,04	2.123.265.348.748,14	2.136.944.709.622,48
1.3.4.	Jalan. Irigasi. dan Jaringan	2.174.110.996.475,18	2.303.954.449.616,18	2.448.566.144.749,32	2.644.036.729.729,98	2.812.488.233.874,98
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	67.585.775.389,18	66.864.164.447,18	67.489.461.402,18	68.478.025.202,18	70.023.671.648,18
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	6.377.434.985,00	5.376.280.541,00	57.470.773.227,00	3.171.517.635,00	2.050.940.468,00
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	(2.621.901.290.595,20)	(3.180.739.891.882,05)	(3.670.664.619.998,05)	(4.029.156.741.368,41)	(4.363.122.230.681,75)
1.4.	**DANA CADANGAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	**ASET LAINNYA**	**1.840.189.882,30**	**17.624.547.963,53**	**53.418.226.639,65**	**28.918.055.519,81**	**6.763.453.931,87**
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	4.283.333,67	7.756.796,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Aset Tak Berwujud	5.012.461.750,50	3.902.827.500,50	4.788.061.285,50	4.788.061.285,50	7.590.284.985,00
1.5.4.	Amortisasi	(4.180.908.250,50)	(3.567.996.300,50)	(3.925.223.857,50)	(4.220.625.598,66)	(4.791.417.088,50)
1.5.5.	Aset Lain,lain	1.004.353.048,63	17.281.959.967,53	15.297.424.662,65	3.301.484.832,97	3.006.932.035,37
1.5.6.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	37.257.964.549,00	25.049.135.000,00	957.654.000,00
	JUMLAH ASET	**4.373.811.204.267,72**	**4.350.293.789.323,61**	**4.518.700.225.390,95**	**4.466.218.396.306,95**	**4.539.758.085.983,36**
2	**KEWAJIBAN**					
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**38.432.657.608,59**	**52.239.408.644,04**	**27.637.603.124,14**	**59.879.750.847,99**	**57.613.209.129,89**
2.1.1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4.506.618,00	7.420.331,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Pendapatan Diterima Dimuka	2.609.872.810,99	2.176.478.612,90	1.378.919.835,14	1.152.822.697,94	3.192.826.906,89
2.1.4.	Utang Beban	33.983.925.398,00	46.712.635.272,00	24.911.945.108,00	57.127.827.769,05	53.213.537.723,00
2.1.5.	Utang Transfer	1.834.352.781,60	3.342.874.428,14	1.346.738.181,00	1.599.100.381,00	1.206.844.500,00
2.1.6.	Utang Lain-lain	,	,	,	,	
2.2.	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	**38.432.657.608,59**	**52.239.408.644,04**	**27.637.603.124,14**	**59.879.750.847,99**	**57.613.209.129,89**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	**EKUITAS**					
3.1.	**EKUITAS**	**4.335.378.546.659,13**	**4.298.054.380.679,57**	**4.491.062.622.266,81**	**4.406.338.645.458,95**	**4.482.144.876.853,47**
3.1.1.	Ekuitas	4.335.378.546.659,13	4.298.054.380.679,57	4.491.062.622.266,81	4.406.338.645.458,95	4.482.144.876.853,47
	JUMLAH EKUITAS	**4.335.378.546.659,13**	**4.298.054.380.679,57**	**4.491.062.622.266,81**	**4.406.338.645.458,95**	**4.482.144.876.853,47**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**4.373.811.204.267,72**	**4.350.293.789.323,61**	**4.518.700.225.390,95**	**4.466.218.396.306,94**	**4.539.758.085.983,36**

Sumber : BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025

Melihat pada data nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tersaji dalam neraca di atas, dapat dilakukan perhitungan dan analisis mengenai rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang secara keseluruhan tersaji dalam tabel 2.73 berikut :

Tabel 2.73
Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Neraca Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No	Rasio Keuangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	**RASIO LIKUIDITAS**					
1	Rasio Lancar	13,3481	13,9178	12,3623	19,1315	7,6448
2	Rasio Quick	12,0439	11,4343	10,4812	14,9866	5,5378
B	**RASIO SOLVABILITAS**					
1	Rasio Total Hutang thd Total Aset	0,0089	0,0088	0,0120	0,0061	0,0134
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0,0090	0,0089	0,0122	0,0062	0,0136
C	**RASIO AKTIVITAS**					
1	Rata-rata Umur Piutang	14,1361	17,6812	18,0418	17,2035	13,4477
2	Rata-rata Umur Persediaan	71,2457	139,6919	94,7303	108,4256	102,6877

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2024 (data diolah)

2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dirangkum dari kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024).

2.2.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah berimplikasi pada perubahan struktur APBD,

khususnya pada pos Belanja Daerah. Jika sebelumnya belanja daerah terbagi ke dalam pos belanja rutin, belanja pembangunan, dan belanja tak terduga, maka pada peraturan terbaru tersebut, pos belanja terbagi dalam pos belanja operasi, modal, tak terduga dan transfer. Pada peraturan sebelumnya, proporsi belanja pembangunan menunjukkan seberapa besar kapasita anggaran untuk membiayai program pembangunan. Semakin besar proporsi belanja pembangunan, maka semakin besar pula belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Sementara itu, belanja rutin diidentikkan dengan belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan (non program pembangunan), di dalamnya termasuk pengeluaran untuk belanja pegawai. Semakin tinggi proporsi belanja rutin umumnya akan mengurangi proporsi belanja pembangunan.

Pada peraturan baru, belanja pembangunan dapat berupa belanja operasi maupun belanja modal. Tabel 2.74 memperlihatkan bahwa proporsi belanja di Kabupaten Pasuruan sebagian besar untuk belanja operasi dengan rata-rata 69,1% dalam lima tahun terakhir. Proporsi belanja operasi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Proporsi terbesar dari belanja ini diperuntukkan bagi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah. Saat belanja hibah dan belanja barang-jasa dipergunakan secara optimal untuk membiayai program pembangunan daerah kabupaten maupun daerah otonom yang lebih kecil serta pihak lain di Kabupaten Pasuruan yang berkontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan yang lebih baik, maka hal ini bisa memberikan indikasi yang baik.

Tabel 2.74
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-rata Proporsi (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**
2.1	**Belanja Operasi**	**63.9%**	**68.1%**	**67.9%**	**71.6%**	**73.9%**	**69.1%**
2.1.1	Belanja Pegawai	37.2%	33.8%	32.9%	32.9%	35.4%	34.4%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.8%	28.4%	29.5%	32.7%	32.5%	29.0%
2.1.3	Belanja Bunga	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2.1.4	Belanja Subsidi	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2.1.5	Belanja Hibah	3.9%	4.8%	4.8%	5.6%	5.7%	4.9%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.1%	1.0%	0.8%	0.5%	0.3%	0.7%
2.2	**Belanja Modal**	**10.9%**	**11.5%**	**13.8%**	**11.7%**	**8.8%**	**11.3%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.5%	4.0%	5.4%	3.8%	3.4%	4.0%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangun	2.9%	3.8%	4.8%	3.6%	1.6%	3.3%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan	4.2%	3.6%	3.7%	4.3%	3.7%	3.9%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**5.3%**	**1.0%**	**0.3%**	**0.1%**	**0.2%**	**1.4%**
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	5.3%	1.0%	0.3%	0.1%	0.2%	1.4%
2.4	**Belanja Transfer**	**19.9%**	**19.4%**	**17.9%**	**16.5%**	**17.1%**	**18.2%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.3%	1.2%	1.2%	1.3%	1.5%	1.3%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	18.5%	18.2%	16.7%	15.3%	15.6%	16.9%

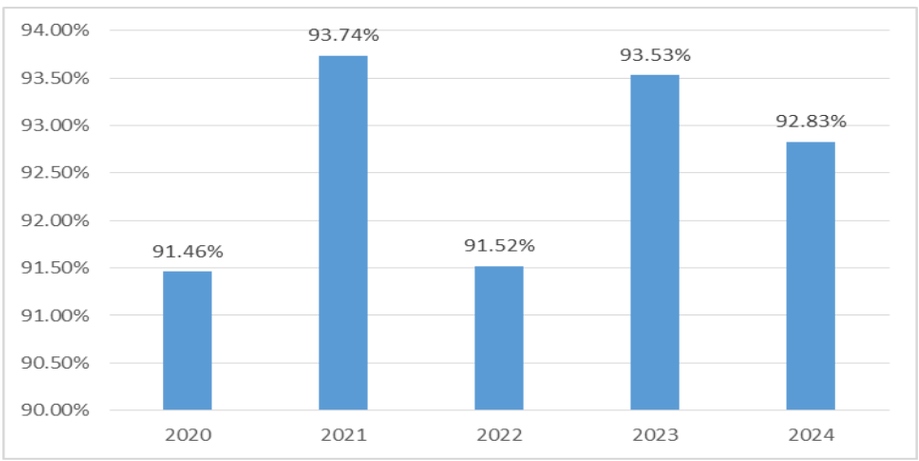
Sumber : BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

Belanja pegawai dengan proporsi yang cenderung menurun/stabil dari tahun ke tahun, setidaknya hingga tahun 2023, memberikan indikasi upaya efisiensi/optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia/aparatur dalam pembangunan. Namun, proporsi belanja pegawai yang meningkat di tahun 2024 memerlukan perhatian khusus untuk menurunkannya kembali di masa mendatang. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja sudah mulai diberlakukan pada tahun 2027. Karenanya, di tahun-tahun mendatang, pemerintah daerah harus berupaya menekan komponen belanja ini agar sesuai dengan ketentuan perundangan.

Proporsi belanja modal serta belanja transfer cenderung berfluktuasi, namun secara rata-rata memiliki proporsi masing-masing 11,3% dan 18,2%. Sementara itu, biaya tak terduga cenderung menurun. Hal ini bisa dipahami karena kondisi tahun 2021 dan 2022

terus membaik pasca pandemi covid-19 di tahun 2019 serta 2020 yang menghabiskan biaya tak terduga cukup besar dalam penanganannya.

Tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah merupakan gambaran secara rill mengenai ketercapaian realisasi belanja daerah berdasarkan/terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Untuk mengetahui hasil perhitungan tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Pasuruan dalam waktu 5 tahun terakhir, yakni di tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada gambar 2.82



Gambar 2.82 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 - 2024
Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

Gambar 2.82 memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2024 tingkat realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah di Kabupaten Pasuruan lebih dari 90%. Kinerja realisasi untuk setiap komponen Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.75.

Tabel 2.75
Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kinerja Realisasi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	**BELANJA**	**91,46**	**93,74**	**98,57**	**98,35**	**92.83%**
2.1	**Belanja Operasi**	**90,78**	**92,83**	**90,44**	**93,28**	**93.68%**
2.1.1	Belanja Pegawai	95,06	94,72	89,77	92,07	96.17%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84,41	89,84	89,93	93,46	91.73%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	90,60	97,13	98,35	99,44	89.98%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	89,14	98,55	93,85	99,02	97.36%
2.2	**Belanja Modal**	**85,09**	**90,73**	**90,01**	**90,02**	**78.86%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	18,10	100,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89,73	91,97	88,87	89,57	**103.36%**
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81,73	90,00	94,07	95,69	**48.77%**
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84,05	90,27	86,72	90,94	**83.50%**
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	82,24	87,72	97,03	72,79	**58.52%**
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya					**76.33%**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**89,87**	**83,38**	**39,83**	**20,32**	**25.46%**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	89,87	83,38	39,83	20,32	25.46%
2.4	**Belanja Transfer**	**98,36**	**99,77**	**99,66**	**99,40**	**100.96%**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	99,85	100,00	100,00	100,00	114.25%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	98,25	99,75	99,64	99,35	99.82%

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

Berdasarkan data kinerja realisasi belanja dapat diketahui bahwa kinerja capaian belanja daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2022 nilai realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Pasuruan mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 98,57%. Nilai realisasi pada tahun 2022 ini merupakan puncak dari peningkatan rasionya selama 5 tahun terakhir, tahun 2020 realisasi anggaran belanja daerah sebesar 91,48%, sedangkan pada tahun 2021 nilai realisasi anggaran mengalami peningkatan menjadi 93,74%, sampai pada akhirnya mengalami peningkatan hingga di tahun 2022 hingga mencapai 98,57%. Tingkat realiasi anggaran kemudian mengalami penurunan di tahun 2023 dan 2024. Walaupun demikian, tingkat realisasi setiap tahun masih di atas 90% atau berkategori sangat tinggi.

Bila melihat pada keempat jenis belanja daerah, maka rata-rata untuk masing-masing jenis belanja dalam setiap tahunnya memiliki tingkat realisasi berada di atas 80%, namun kondisi tersebut berbeda dengan belanja tidak terduga, yaitu tingkat capaian dalam 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) hanya sebesar 39,82% dan 20,32%, mengingat pada tahun tersebut penggunaan belanja tidak terduga sangat banyak dalam rangka penanganan dan pemulihan kodisi akibat Covid-19. Selain itu, karakteristik belanja tidak terduga memang difungsikan sebagai pos belanja untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga dengan demikian tingkat realisasinya sulit untuk dioptimalkan.

Untuk belanja modal, beberapa jenis belanjanya masih berada di bawah 80% untuk tahun-tahun tertentu dan berkategori sedang. Tingkat realisasi anggaran yang terlalu rendah dapat mencerminkan kondisi positif maupun negatif. Jika tingkat realisasi anggaran rendah dan disertai realisasi kinerja kegiatan/program yang juga rendah, maka mencerminkan implementasi kegiatan/program pembangunan yang tidak optimal/kondisi negatif. Sebaliknya, jika tingkat realiasasi anggaran rendah, namun target indikator kinerja kegiatan atau program tercapai, maka hal ini mencerminkan kondisi yang positif, yaitu adanya efisiensi (anggaran) dalam implementasi kegiatan/program pembangunan.

2.2.3.2 Analisis Pembiayaan

Pemerintah daerah, tidak terkecuali Kabupaten Pasuruan memiliki pendapatan yang diterima di setiap tahun anggaran dan belanja atau pengeluaran yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah pun harus memastikan bahwa kondisi keuangan daerah baik dan stabil yaitu seluruh belanja dan pengeluarannya dapat dibiayai dengan pendapatan yang diterimanya, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Walaupun demikian, pada kondisi tertentu, pemerintah dapat membuat kebijakan yaitu belanja dan pengeluaran daerah lebih besar daripada pendapatan (defisit), selama tetap yakin bahwa ada sumber pembiayaan lain yang mampu menutupi defisit

tersebut dan tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.76
Defisit/Surpus Riil Anggaran Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2024 (Rp. juta)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Pendapatan Daerah	3,217,082	3,364,856	3,352,369	3,658,923	3,796,899	3,478,026
Belanja Daerah	3,238,383	3,273,760	3,450,040	3,733,513	3,746,328	3,488,405
Surplus/Defisit	(21,302)	91,096	(97,671)	(74,591)	50,572	(10,379)
Pembiayaan Neto	302,451	281,149	372,246	274,574	199,984	286,081
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	281,149	372,246	274,574	199,984	250,555	275,702

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Adapun beberapa pembahasan dalam analisis pembiayaan, meliputi analisis surplus/defisit anggaran dan sumber penutup defisit riil.

Tabel 2.76 memperlihatkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan cenderung lebih rendah daripada belanja daerahnya, sehingga ada defisit riil anggaran. Secara rata-rata, dalam lima tahun terakhir, APBD Kabupaten Pasuruan adalah defisit. Walaupun demikian, dalam tahun-tahun tersebut, Kabupaten Pasuruan memiliki sumber penerimaan pembaiyaan (lain) selain penerimaan daerah. Tabel 2.75 memperlihatkan bahwa sumber penerimaan pembiayaan yang dimaksud berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dengan kata lain, defisit APBD dapat ditutupi oleh SILPA tahun sebelumnya, sehingga
kondisi keuangan daerah tetap stabil.

Tabel 2.75 juga memperlihatkan bahwa dalam lima tahun terakhir, sumber penerimaan pembiayaan Kabupaten Pasuruan berasal dari dana SILPA tahun sebelumnya. Di sisi pengeluaran, pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan tidak memiliki pengeluaran pembiayaan, sehingga pembiayaan neto (selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan) akan sama dengan penerimaan pembiayaan.

Tabel 2.76
Perbandingan Defisit / Surpus Riil Anggaran dengan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 – 2024 (Rp. Juta)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Surplus/Defisit	(21,302)	91,096	(97,671)	(74,591)	50,572
Penerimaan Pembiayaan	302,451	281,149	372,246	274,574	199,984
Proporsi Defisit Riil yang ditutupi oleh Penerimaan Pembiayaan	7.04%	0	26.24%	27.17%	0

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

Kestabilan kondisi keuangan daerah Kabupaten Pasuruan juga dapat terlihat dari ketersediaan atau adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di setiap tahunnya. SILPA pada suatu tahun akan menjadi sumber penerimaan pembiayaan di tahun berikutnya. Tabel 2.75 juga memperlihatkan bahwa SILPA Kabupaten Pasuruan berfluktuasi setiap tahunnya seiring dengan kondisi defifit atau surplus APBD. Saat APBD defisit, maka SILPA di tahun tersebut akan berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena digunakan untuk menutupi defisit anggaran. Namun, saat APBD surplus, maka besaran surplus tersebut menambah besaran SILPA di tahun berkenaan.

Tabel 2.76 memperlihatkan proporsi dana SILPA yang dipergunakan untuk menutupi defisit riil APBD Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir yang cenderung meningkat. Hal ini cenderung akan menurunkan besarnya SILPA sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di masa mendatang/tahun mendatang. Jika di masa mendatang APBD Kabupaten Pasuruan masih terus defisit dan sumber penerimaan pembiayaan hanya berasal dari SILPA, maka dana ini akan terus berkurang.

Di satu sisi, SILPA dibutuhkan sebagai penerimaan pembiayaan pembangunan di tahun berikutnya, namun di sisi lain menunjukkan pengelolaan keuangan yang kurang baik. Dana SILPA dapat terjadi setidaknya karena tiga hal. Pertama, karena adanya penghematan penggunaan anggaran, yaitu program/kegiatan telah dilakukan dengan baik dan telah mencapai targetnya, namun realisasi belanja berada di bawah yang ditargetkan/dialokasikan. Implikasinya, ada anggaran yang tidak terpakai atau bisa dihemat. Kedua, karena ada pelampauan realisasi penerimaan daerah dari yang ditargetkan.

Ketiga, karena ada program/kegiatan yang tidak bisa direalisasikan secara keseluruhan atau sebagian, sehingga realisasi belanja juga di bawah alokasinya. Saat dana SILPA diperoleh karena penyebab pertama dan kedua, maka hal ini menunjukkan hal yang baik (ada upaya penghematan atau kinerja baik dalam merealisasikan penerimaan daerah). Namun, jika SILPA terjadi karena penyebab ketiga, maka hal ini menunjukkan setidaknya dua kondisi, yaitu (1) adanya perencanaan program/kegiatan atau pun penganggaran yang kurang baik; atau (2) pelaksanaan program/kegiatan yang tidak optimal. Karenanya, di masa mendatang, SILPA diharapkan ada lebih dikarenakan oleh adanya penghematan anggaran setalah program/kegiatan terlaksana secara optimal.

Di masa mendatang, pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu mengatur strategi untuk mendapatkan sumber penerimaan pembiayaan lain selain SILPA untuk menutupi defisit riil. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan sumber penerimaan pembiayaan pembangunan (di luar pendapatan daerah) adalah:

a) Melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

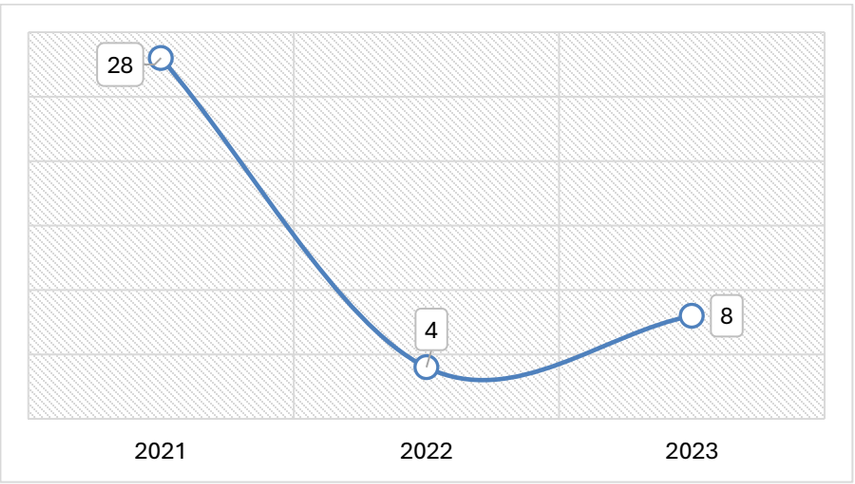
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Kabupaten Pasuruan, khususnya bidang infrastruktur publik. untuk pengelolaan Kekayaan Daerah dan Pembangunan Daerah melalu skema bagi hasil.

b) Pembiayaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility).

Pembiayaan terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan selain dibiayai dari anggaran, baik APBD maupun APBD juga didukung oleh adanya pembiayaan alternatif yang diperoleh dari dana CSR *(Corporate Social Responsibility)*. perusahaan yang berada di Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Bila melihat pada perkembangan perusahaan yang memberikan program CSR *(Corporate Social Responsibility)* di Kabupaten Pasuruan yang tercatat dalam setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana

pada tahun 2021 jumlah perusahaan yang memberikan program CSR tercatat sebanyak 28 perusahaan, sedangkan pada tahun 2023 mulai mengalami peningkatan sehingga menjadi 8 perusahaan. Bila melihat pada jumlah perusahaan yang melaksanakan program CSR dalam setiap tahunnya dapat diketahui bahwa pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Pasuruan masih belum optimal, dimana pada tahun 2023 berdasarkan data BPS di Kabupaten Pasuruan terdapat 7.290 industri formal, artinya perusahaan yang yang melaksanakan program CSR masih sangat kecil, yaitu dibawah 1%. Melihat dari banyaknya perusahaan yang berada di Kabupaten Pasuruan, maka potensi pengembangan pembiayaan alternatif pembangunan melalui program CSR masih sangat besar. Untuk itu optimalisasi pembiayaan pembangunan melalui program CSR perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Berikut disajikan data jumlah perusahaan yang memberikan CSR *(Corporate Social Responsibility)* di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 hingga 2023.



Gambar 2.83 Jumlah Perusahaan yang Memberikan CSR di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 - 2023

Sumber **:** Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2024

2.2.4 Kerangka Pendanaan

Proyeksi keuangan daerah adalah bagian dari kerangka keuangan yang terkait dengan kemampuan membiayai belanja Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Penyusunan kerangka pendanaan ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029. Melalui kerangka pendanaan ini, diharapkan tercipta sinkronisasi dan

keselarasan antara rencana pembangunan daerah yang ingin dilaksanakan dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana yang diperlukan. Dengan adanya kerangka pendanaan yang terstruktur, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat merencanakan pengeluaran dengan lebih cermat dan strategis, sehingga setiap program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami kendala finansial yang berarti.

Analisis kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2026 - 2030. Dalam sub bab ini, akan diuraikan beberapa aspek penting, termasuk proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta penghitungan kerangka pendanaan. Proyeksi pendapatan dan belanja ini akan memberikan gambaran tentang potensi sumber daya keuangan yang dimiliki daerah dan bagaimana alokasi dana tersebut dapat dilakukan secara optimal. Dengan melakukan analisis mendalam, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan memiliki dukungan finansial yang memadai, sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

2.2.4.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kerangka pendanaan pemerintah daerah untuk beberapa tahun ke depan tidak bisa dilepaskan dari data historis, yaitu perkembangan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, analisis terhadap proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk beberapa tahun ke depan memerlukan peninjauan terhadap pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama lima tahun terakhir. Analisis ini sangat penting untuk memberikan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode tersebut serta kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya. Ini juga termasuk dukungan terhadap pencapaian target prioritas nasional dan program prioritas provinsi.

Salah satu metode sederhana yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan anggaran (proyeksi) adalah fungsi

forecast. Metode ini menggunakan regresi linear untuk memperkirakan nilai berdasarkan kumpulan data historis selama lima tahun terakhir, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Selain itu, metode ini juga memperhitungkan kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah dapat menyusun proyeksi yang lebih akurat dan realistis, yang pada akhirnya mendukung perencanaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan informasi penting mengenai pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama periode RPJMD Kabupaten Pasuruan. Proyeksi ini juga mencakup tingkat belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam beberapa tahun mendatang. Secara umum, pendapatan daerah terbagi menjadi tiga jenis: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu, belanja daerah terbagi menjadi empat jenis: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Informasi ini sangat penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan memiliki dukungan finansial yang memadai.

Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -1,41% per tahun. Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah diproyeksikan minus, di mana pendapatan tahun 2030 lebih kecil daripada tahun 2025, karena proyeksi pendapatan transfer sebagai komponen terbesar pendapatan daerah memang mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar -4,10% per tahun. Proyeksi pertumbuhan minus ini sulit dihindari karena berdasarkan pada data terkini, telah terjadi pemotongan pendapatan transfer yang cukup besar di tahun 2025. Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer ini sulit dikendalikan karena merupakan

kebijakan pemerintah pusat dan/atau daerah lain. Walaupun demikian, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah diproyeksikan tumbuh sebesar 4,74% per tahun. Kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga relatif lebih mudah dikendalikan.

Proyeksi total belanja daerah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan pada rentang waktu tersebut diperkirakan memiliki pertumbuhan minus, yaitu rata-rata sebesar -2,98% per tahun. Dengan kecenderungan proyeksi pendapatan daerah yang juga menurun, maka dilakukan penyesuaian pada proyeksi belanja agar kondisi keuangan daerah dapat stabil. Penurunan belanja daerah yang cukup besar ini juga tidak lepas dari penerimaan pembiayaan Kabupaten Pasuruan yang diproyeksikan nol (tidak ada), sehingga seluruh belanja dan pegeluaran pembiayaan daerah, harus tertutupi oleh total pendapatan daerah (menggunakan prinsip Anggaran Seimbang). Penerimaan pembiayaan Kabupaten Pasuruan diproyeksikan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, sehingga dengan prinsip Anggaran Seimbang, maka proyeksi sumber komponen penerimaan pembiayaan ini pun sama dengan nol.

Jika dilihat per komponennya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata 4,76% per tahun selama tahun 2025 hingga 2030. Di tahun 2025, PAD ditargetkan sebesar Rp. 1.075.982.805.145,- dan diproyeksikan terus meningkat menjadi Rp. 1.357.555.288.036,- di tahun 2030. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi pada tahun 2026 antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan dari pemberlakuan Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Semakin meningkatnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026 mengandung harapan tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan semakin baik, hal ini tentunya menjadi konsekuensi seiring dengan meningkatnya belanja daerah dalam setiap tahun, serta sebagai antisipasi adanya kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap dana transfer dari pusat ke daerah.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan akan mencapai pertumbuhan rata-rata sebesar 4,76% per tahun selama kurun waktu 2025 - 2030. Selain itu adanya perkembangan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan mulai memberikan dampak terhadap meningkatnya iklim usaha yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Untuk pendapatan transfer pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan rata-rata memiliki pertumbuhan negatif sebesar -4,10% per tahun, dimana pada Transfer Pemerintah Pusat, banyak dipengaruhi oleh sumber dana perimbangan diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar -4,37%. Rendahnya proyeksi tingkat pertumbuhan komponen pendapatan ini antara lain disebabkan oleh adanya kerentanan terhadap pengaruh perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara.

Pada komponen belanja daerah, proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan mencapai -2,98% per tahun, dimana untuk belanja operasi rata-rata memiliki tingkat pertumbuhan sebesar -2,01% per tahun. Belanja tidak terduga diproyeksikan tumbuh sebesar 10,21% per tahun dan untuk belanja transfer rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 0,44%.

Bila melihat pada jenis belanja operasi, untuk belanja pegawai di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 hingga 2030 diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar -4,54%, dimana kecilnya pertumbuhan belanja tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan pemenuhan proporsi gaji pegawai pada tahun 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang tidak boleh melebihi 30% dari APBD (total anggaran belanja), meskipun disisi lain peningkatan belanja pegawai diperlukan dalam rangka melakukan antisipasi terhadap penerimaan pegawai baru. Untuk belanja barang dan jasa di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 hingga 2030 rata-rata diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 2,87% yang disebabkan oleh adanya pemenuhan kebutuhan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. Proyeksi belanja daerah dilakukan

diantaranya dengan memperhatikan asumsi-asumsi seperti : Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020 hingga 2024 dan analisis logis terhadap kebutuhan peningkatan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasuruan; serta adanya penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Pada proyeksi Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan pada tahun 2025 hingga 2030 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang diperkirakan pada tahun 2025 mengalami penurunan, dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dioptimalkan untuk membiayai belanja. Sedangkan pada tahun 2026 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diperkirakan tidak ada karena menggunakan pronsip Anggaran Seimbang.

Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 hingga 2029 secara lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada tabel 2.77.

Tabel 2.77
Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2026 (Rp.)	TAHUN 2027 (Rp.)	TAHUN 2028 (Rp.)	TAHUN 2029 (Rp.)	TAHUN 2030 (Rp.)
1	2	4	5	6	7	8	9
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.976.990.626.695,00**	**3.499.607.689.203,58**	**3.540.930.158.552,42**	**3.604.728.022.115,01**	**3.666.985.110.447,54**	**3.725.299.443.036,02**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.075.982.805.145,00**	**1.129.742.018.703,58**	**1.187.322.753.552,42**	**1.247.419.667.115,01**	**1.303.526.955.447,54**	**1.357.555.288.036,02**
4.1.01	Pajak Daerah	630.044.228.203,00	653.283.255.372,58	675.184.347.689,74	695.860.532.325,80	716.127.905.102,92	735.954.684.127,76
4.1.02	Retribusi Daerah	336.254.392.311,00	463.060.277.229,00	412.324.915.010,68	448.176.110.670,21	480.000.021.886,62	509.163.953.377,25
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.750.000.000,00	4.934.775.000,00	5.126.737.748,00	5.213.379.616,00	5.516.798.310,00	5.668.510.264,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	104.934.184.631,00	8.463.711.102,00	94.686.753.104,00	98.169.644.503,00	101.882.230.148,00	106.768.140.267,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.901.007.821.550,00**	**2.369.865.670.500,00**	**2.353.607.405.000,00**	**2.357.308.355.000,00**	**2.363.458.155.000,00**	**2.367.744.155.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.741.964.792.000,00	2.212.225.861.000,00	2.213.776.111.000,00	2.216.377.061.000,00	2.221.426.861.000,00	2.224.512.861.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	352.583.801.000,00	352.583.801.000,00	352.583.801.000,00	352.583.801.000,00	352.583.801.000,00	352.583.801.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	546.654.838.000,00	548.452.080.000,00	550.002.330.000,00	552.603.280.000,00	554.653.080.000,00	556.739.080.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.311.189.980.000,00	1.311.189.980.000,00	1.311.189.980.000,00	1.311.189.980.000,00	1.314.189.980.000,00	1.315.189.980.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	531.536.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159.043.029.550,00	157.639.809.500,00	139.831.294.000,00	140.931.294.000,00	142.031.294.000,00	143.231.294.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	134.723.824.850,00	138.731.294.000,00	139.831.294.000,00	140.931.294.000,00	142.031.294.000,00	143.231.294.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	24.319.204.700,00	18.908.515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2026 (Rp.)	TAHUN 2027 (Rp.)	TAHUN 2028 (Rp.)	TAHUN 2029 (Rp.)	TAHUN 2030 (Rp.)
5	**BELANJA DAERAH**	**4.346.062.666.981,00**	**3.948.837.091.813,90**	**3.537.430.158.552,42**	**3.601.228.022.115,01**	**3.663.485.110.447,54**	**3.721.799.443.036,02**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3.272.747.352.671,05**	**2.713.430.329.615,56**	**2.420.018.390.630,44**	**2.508.236.573.575,53**	**2.558.944.878.613,85**	**2.597.911.605.117,54**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.822.952.221.477,63	1.674.430.683.267,51	1.494.854.139.062,00	1.494.854.139.062,00	1.494.854.139.062,00	1.494.854.139.062,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.309.039.242.716,42	946.612.582.972,05	888.272.354.568,44	985.590.537.513,53	1.027.198.842.551,85	1.075.265.569.055,54
5.1.05	Belanja Hibah	138.665.288.477,00	90.467.063.376,00	25.782.120.000,00	16.682.120.000,00	25.782.120.000,00	16.682.120.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.090.600.000,00	1.920.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**385.656.047.224,95**	**478.427.202.058,48**	**410.637.012.500,00**	**412.400.702.500,00**	**413.688.767.500,00**	**414.318.544.000,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	14.945.931.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.527.449.727,81	125.614.832.117,91	194.667.000.000,00	195.621.250.000,00	196.098.375.000,00	196.193.800.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.424.024.134,65	220.772.037.139,00	112.639.625.000,00	113.194.500.000,00	113.749.375.000,00	114.026.812.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	107.828.254.312,49	116.774.801.601,57	101.643.510.000,00	101.892.636.250,00	102.141.762.500,00	102.390.888.750,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.695.319.050,00	119.600.000,00	1.583.377.500,00	1.587.316.250,00	1.591.255.000,00	1.592.042.750,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	181.000.000,00	200.000.000,00	103.500.000,00	105.000.000,00	108.000.000,00	115.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**40.000.000.000,00**	**30.000.000.000,00**	**35.000.000.000,00**	**40.000.000.000,00**	**45.000.000.000,00**	**50.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00	40.000.000.000,00	45.000.000.000,00	50.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**647.659.267.085,00**	**726.979.560.139,86**	**671,774,755,421.97**	**640.590.746.039,48**	**645.851.464.333,69**	**659.569.293.918,48**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	54.674.419.405,00	68.827.488.699,86	71,198,570,801.97	73.551.526.319,48	75.862.224.613,69	77.879.777.698,48
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	592.984.847.680,00	658.152.071.440,00	600,576,184,620.00	567.039.219.720,00	569.989.239.720,00	581.689.516.220,00
	Surplus/(Defisit)	**(369.072.040.286,00)**	**(449.229.402.610,32)**	**3,500,000,000.00**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**						

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2026 (Rp.)	TAHUN 2027 (Rp.)	TAHUN 2028 (Rp.)	TAHUN 2029 (Rp.)	TAHUN 2030 (Rp.)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**370.772.040.286,00**	**452.729.402.610,32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	370.772.040.286,00	452.729.402.610,32	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.700.000.000,00**	**3,500,000,000.00**	**3,500,000,000.00**	**3,500,000,000.00**	**3,500,000,000.00**	**3,500,000,000.00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.700.000.000,00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
	Pembiayaan Netto	**369.072.040.286,00**	**449.229.402.610,32**	**(3,500,000,000.00)**	**(3,500,000,000.00)**	**(3,500,000,000.00)**	**(3,500,000,000.00)**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025

Melihat pada hasil proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagaimana yang telah terdapat pada tabel di atas, maka selanjutnya dapat dikemukakan beberapa kebijakan keuangan daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Adapun kebijakan keuangan daerah dikelompokkan berdasarkan 3 komponen yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan dalam RPJMD berupa kerangka pikir yang bersifat umum yang akan diterjemahkan dalam kebijakan periodik tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalian pendapatan dalam beberapa tahun kedepan. Adapun kebijakan terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan penerimaan PAD melalui intensifikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (melakukan pendataan terhadap obyek dan wajib pajak yang belum terdata, validasi data potensi dan mengoptimalkan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah);
b. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi Sistem Informasi Online, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan
c. Meningkatkan kepatuhan/ ketaatan wajib pajak dan retribusi melalui :
    - Pelaksanaan mekanisme *reward* dan *punishment;*
    - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
    - Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
    - *Law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
d. Melakukan *review* dan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala

khususnya di wilayah-wilayah yang secara siginifikan mengalami pertumbuhan ekonomi;

e. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
f. Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta obyek pendapatan asli daerah lainnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat;
g. Memperkuat sistem pelayanan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi/ Teknologi Informasi (IT);
h. Optimalisasi tata kelola aset daerah dan pemanfaatan Aset Daerah sebagai sumber penerimaan dalam PAD;
i. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif;
j. Penguatan sistem manajemen dan koordinasi sinergis antar Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;
k. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK),

Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya;

1. Optimalisasi penerimaan pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai Surat Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.13/30501/202.2/2025 terkait estimasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025-2029
2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah didasarkan pada pendekatan *Money Follow Program* yang memberikan prioritas pada bobot program/ kegiatan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah

ditetapkan. Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

a. Belanja daerah Kabupaten Pasuruan diprioritaskan untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas dan kebutuhan Daerah;
b. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan berbasis pada peningkatan kinerja;
c. Optimalisasi penyerapan belanja daerah melalui peningkatan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan efektivitas pengelolaan belanja daerah;
d. Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan Analisis Standar Belanja;
e. Belanja pegawai dialokasikan dengan proporsi yang semakin menurun hingga paling tinggi 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027 (di luar tunjangan guru) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
f. Belanja Daerah untuk pengadaan Barang dan Jasa diarahkan untuk meningkatkan penggunaan produk UMKM, produk dalam negeri, atau penggunaan produk yang mempunyai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25%;
g. Untuk menunjang pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan, maka minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) dialokasikan/ digunakan untuk belanja infrastruktur, dimana Dana Transfer Umum (DTU) meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH);
h. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;
i. Penggunaan dana tidak terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
j. Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan dengan memperhatikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa sebagai jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK;

k. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar minimal 10% sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas, rujukan di RSUD Bangil dan RSUD Grati, serta rujukan lanjutan pada RSUD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

l. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan pendidikan paling sedikit sebesar 20% sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat;

m. Pengalokasian anggaran *mandatory* lainnya sesuai dengan ketentuan perudang-udangan yang berlaku;

n. Tambahan penghasilan bagi pegawai diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan komponen keuangan yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran sehingga pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah sebagai berikut :

a. SiLPA yang terpasang pada tahun 2026 - 2030 diperhitungkan lebih rendah dibandingkan SiLPA dalam 4 tahun terakhir, bahkan di tahun 2026 hingga tahun 2030 diproyeksikan sama dengan nol karena menggunakan prinsip Anggaran Seimbang;

b. Meningkatkan kerjasama pembiayaan pembangunan daerah dengan melibatkan pihak swasta/masyarakat/*Non-Governmental Organization* melalui :

   - Optimalisasi pelaksanaan program CSR *(Corporate Social Responsibility)* melalui penguatan pendataan dan melakukan

sinkronisasi dan koordinasi untuk menyelaraskan program CSR dengan prioritas pembangunan daerah;

- Pelaksanaan kerjasama dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), melalui pemetaan potensi yang dapat dilakukan kerjasama dengan skema tersebut, serta menyiapkan kerangka regulasi dan melakukan perencanaan.

c. Menggunakan Skema pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk untuk membiayai pembangunan daerah, dengan syarat memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah dan Pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dengan Pihak Ketiga.

Hal ini perlu dilakukan seiring dengan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, sedangkan pendapatan daerah berpotensi mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya kebutuhan anggaran Pemerintah Pusat dan dalam rangka mengatasi terjadinya defisit anggaran.

2.2.4.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama beberapa tahun ke depan sampai dengan tahun 2030. Untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menghitung seluruh penerimaan daerah, yang meliputi : Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda), dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Selanjutnya dari jumlah penerimaan tersebut dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan data hasil proyeksi yang diperoleh dapat diketahui Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 hingga 2029 secara lebih jelas disajikan pada tabel 2.78 berikut ini.

Tabel 2.78
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pendapatan	**3.976.990.626.695,00**	**3.498.036.297.252,12**	**3.559.838.674.052,42**	**3.623.636.537.615,01**	**3.685.893.625.947,54**	**3.744.207.958.536,02**
Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	370.772.040.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi:						
Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama	1.382.566.971.267,86	1.563.681.627.761,86	1.566.052.709.863,97	1.568.405.665.381,48	1.570.716.363.675,69	1.572.733.916.760,48
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**2.965.195.695.713,14**	**1.934.354.669.490,26**	**1.993.785.964.188,44**	**2.055.230.872.233,53**	**2.115.177.262.271,85**	**2.171.474.041.775,54**
Belanja Langsung Wajid dan mengikat serta pemenuhan penerapan Pelayanan Dasar	2.668.676.126.141,83	1.740.919.202.541,24	1.794.407.367.769,60	1.849.707.785.010,18	1.903.659.536.044,66	1.954.326.637.597,99
Belanja Pemenuhan Visi Misi Kepala Daerah (RPJMD)/ Membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan Lainya	296.519.569.571,31	193.435.466.949,03	199.378.596.418,84	205.523.087.223,35	211.517.726.227,19	217.147.404.177,55

Sumber **:** BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2025 (data diolah)

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah dirumuskan dari kondisi terkini daerah pada aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, data saing daerah maupun pengelolaan keuangan daerah yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Berbagai permasalahan pembangunan daerah dan isu eksternal, baik internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di masa mendatang, selanjutnya akan menjadi isu pembangunan daerah. Isu akan digolongkan sebagai isu strategis pembangunan daerah manakala memiliki nilai prioritas (tinggi) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sedang direncanakan. Bagian bab ini menguraikan berbagai permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan, telaahan isu-isu internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah, hingga rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah sebuah *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang telah dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta yang ingin dicapai di masa datang sesuai dengan peraturan perundangan atau harapan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah terjadi karena adanya kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, peluang yang belum dimanfaatkan, ancaman yang diantisipasi, serta kelemahan yang tidak diatasi.

Permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, permasalahan pembangunan daerah lintas sektoral (cross cutting) sekaligus menjadi isu pembangunan makro daerah. Permasalahan ini mencakup permasalahan di aspek kesejahteraan masyarakat, geografi-demografi, dan daya saing daerah. Kedua, permasalahan pembangunan sektoral yang identik dengan permasalahan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah atau permasalahan di aspek pelayanan umum.

A. Permasalahan Pembangunan Makro Daerah

Berdasarkan data di subbab sebelumnya, khususnya di aspek kesejahteraan masyarakat, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan makro daerah Kabupaten Pasuruan, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir cenderung lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional, namun sangat mudah berubah-ubah karena masalah mendasar seperti infrastruktur yang belum maksimal, ketidakseimbangan antar sektor, kurangnya inovasi dan teknologi, promosi produk unggulan yang minim, serta lemahnya kerjasama dan peran BUMD, sehingga penanganan masalah-masalah ini menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan kuat
2. Ketimpangan pendapatan Kabupaten Pasuruan yang diukur melalui indeks gini cenderung lebih rendah dari indeks gini Provinsi Jawa Timur maupun nasional, namun masih berada di kategori sedang cenderung meningkat. Tahun 2019, indeks gini sebesar 0.308, sementara di tahun 2024 berada di angka 0.331. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ketimpangan pendapatan antar masyarakat yang juga semakin meningkat dan perlu diturunkan/diselesaikan di masa mendatang
3. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pasuruan juga cenderung lebih rendah dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Tingkat kemiskinan cenderung berfluktuasi dan kondisinya cenderung turun, di tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Namun hal ini tentu harus menjadi perhatian dalam pembangunan di masa mendatang agar tingkat kemiskinan dapat ditekan lagi.
4. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pasuruan cenderung berada di atas angka Provinsi Jawa Timur dan di beberapa tahun lebih rendah dari angka nasional. Meskipun terjadi kecenderungan penurunan dalam 2 tahun terakhir, namun penurunannya tidak setinggi Jawa Timur dan Nasional, sehingga tingkat pengangguran Kabupaten Pasuruan pada tahun terakhir justru lebih tinggi. Hal ini menunjukkan belum optimalnya lapangan kerja dan/atau penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Di masa

mendatang, pembangunan daerah harus mampu menekan tingkat pengangguran terbuka ini.

5. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir cenderung cukup jauh berada di bawah IPM Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Ini berarti percepatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik di aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi, menjadi keharusan atau prioritas di masa mendatang.
6. Capaian pembangunan bidang lingkungan hidup yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasuruan cenderung lebih rendah daripada angka Provinsi Jawa TImur maupun nasional. Capaian pada tahun 2024 sebesar 65,06 berada di bawah capaian Jawa Timur sebesar 71,24. Hal ini menunjukkan bahwa secara empiris terdapat permasalahan dalam kualitas lingkungan Kabupaten Pasuruan yang harus diselesaikan di masa mendatang.
7. Pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana wilayan Kabupaten Pasuruan juga harus ditingkatkan di masa mendatang. Pada tahun 2024, Indeks Infrastruktur Wilayah Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan cukup pesat dengan capaian 68,73, dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 11,57. Walaupun demikian, indeks ini masih perlu terus ditingkatkan agar infrastruktur wilayah dapat lebih merata secara optimal mendukung pembangunan aspek lainnya di Kabupaten Pasuruan.
8. Indeks reformasi birokrasi yang mencerminkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Pasuruan memerlihatkan kecenderungan yang meningkat, namun masih relatif rendah, yaitu di angka 68,68 di tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi Jawa TImur yang sebesar 85 di tahun 2023, maka capaian IRB Kabupaten Pasuruan masih relatif jauh lebih rendah.

B. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan data dan informasi di Bab II, khususnya tentang kondisi kinerja pemerintah Kabupaten Pasuruan di seluruh urusan pemerintahan tahun 2020-2024, dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan pembangunan yang harus diberikan solusi di periode

pembangunan mendatang (2025-2029). Permasalahan pembangunan daerah di setiap urusan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Pasuruan disajikan pada tabel 2.79.

Tabel 2.79
Permasalahan di Kabupaten Pasuruan

No	URUSAN	PERMASALAHAN
1.	PENDIDIKAN	Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (7,84 tahun) dan harapan lama sekolah (12,77 tahun)
		Belum semua tenaga pendidik berpendidikan S1
		Angka tidak sekolah masih tinggi (17.888 anak terdiri dari: DO = 2.884 anak; tidak melanjutkan = 7.968 anak; belum pernah bersekolah = 7.076 anak)
		Ketidakmerataan fasilitas dan distribusi tenaga pendidik ditingkat SMP dan SMA
		Capaian SPM Pendidikan 81,15% (peringkat 34 dari 38 kab/kota)
2.	KESEHATAN	Penurunan angka kematian ibu dan bayi melambat yang menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan khususnya bagi bayi dan ibu hamil
		Penurunan prevalensi balita stunting melambat yang juga menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan khususnya bagi bayi dan ibu hamil
		Masih tingginya prevalensi TBC dan HIV/AIDS
		Kurangnya fasilitas kesehatan rujukan di wilayah selatan
		Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (degeneratif, kanker, jantung, gagal ginjal dan sebagainya) dari kelompok usia tua ke usia muda
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Minimnya akses air siap minum perpipaan dan akses sanitasi aman (limbah domestik)
		Penurunan kualitas air baku dan debit sumber air
		Ketidaksesuaian kelas jalan yang dibangun dengan beban kendaraan
		Belum ada sinkronisasi antara perencanaan wilayah dan perencanaan pembangunan baik yang yang menengah maupun tahunan serta pelaksanaannya berupa dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR)
		Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang didukung SDM yang memadai

No	URUSAN	PERMASALAHAN
		Masih adanya penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukan ruang
		Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang memadai
		Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pada pusat pertumbuhan dan kawasan perkotaan pada PKL (pusat kegiatan lokal)
		Belum disusun dan ditetapkannya RDTR Perkotaan sebagai penjabaran dari RTRW Kabupaten
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Masih adanya kawasan permukiman kumuh, termasuk di dalamnya adanya keterbatasan akses ke sanitasi layak dan berkelanjutan
		Belum terpenuhinya rencana mitigasi bencana di daerah pemukiman rawan bencana
		Belum tersedianya lahan relokasi untuk program normalisasi kali Bangil Tak
5.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masih banyaknya kasus pelanggaran Perda dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
		Belum optimalnya penanganan bencana alam dan non alam
		Meningkatnya kejadian bencana alam akibat kerusakan lingkungan
6.	SOSIAL	Belum optimalnya rehabilitasi sosial diluar panti
		Belum optimalnya pengentasan kemiskinan
		Tata kelola data sosial yang tidak valid
7.	KETENAGAKERJAAN	Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kualifikasi kerja yang tersedia sehingga penyerapan tenaga kerja belum optimal
		Keterbatasan kesempatan/lapangan kerja formal
		Masih kurangnya kepatuhan pengusaha dalam menjalankan/ mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan
		Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks ketimpangan gender dan perlindungan anak di bawah rata - rata Jatim
		Belum optimalnya pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak dan Perempuan
		Masih minimnya fasilitas umum ramah anak
9.	PANGAN	Masih adanya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan/kerawanan pangan (9,05%)
		Fungsi tata niaga pangan belum berjalan efektif

No	URUSAN	PERMASALAHAN
		Potensi keanekaragaman produk komoditas pangan dan inovasi teknologi pengolahan pangan belum dimaksimalkan
10	PERTANAHAN	Belum adanya kepastian penyelesaian konflik tanah di kawasan hankam dan kawasan hutan
		Masih adanya potensi konflik agraria di masyarakat
11	LINGKUNGAN HIDUP	Masih tingginya pencemaran lingkungan akibat limbah domestik dan industri yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup
		Degradasi lingkungan (lahan dan air)
		Semakin berkurangnya tutupan lahan dan belum terpenuhinya RTH perkotaan yang juga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Keterbatasan sarana dan prasarana untuk pelayanan administrasi kependudukan
		Masih rendahnya capaian kepemilikan dokumen kependudukan (KIA dan akta kelahiran)
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BUMDes belum berperan optimal dalam pengembangan potensi ekonomi desa
		Masih adanya tanah kas desa yang digunakan sebagai sumber penghasilan Perangkat Desa
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan asset desa
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Masih tingginya angka usia pernikahan dini dan rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
		Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ber KB
15	PERHUBUNGAN	Belum terpenuhinya layanan transportasi antar wilayah
		Belum terpenuhinya keamanan dan keselamatan lalu lintas jalan
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Capaian SPBE meningkat cukup signifikan (2024 =3,88), namun masih perlu ditingkatkan karena relatif di bawah angka Jatim (2024 = 4,43)
		Indeks TIK mencapai 3,97 tergolong dalam kategori rendah (2,51 - 5,00) dan masih ada (11%) desa blankspot (tidak tersedia jaringan GSM)
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penambahan koperasi tidak diiringi peningkatan percepatan koperasi berkualitas
		Rendahnya keberlanjutan usaha mikro (belum optimalnya pemberdayaan Usaha mikro)

No	URUSAN	PERMASALAHAN
		Kurangnya dukungan lembaga keuangan untuk pembiayaan usaha mikro
18	PENANAMAN MODAL	Nilai ICOR tidak berada pada angka ideal (3-4) yang mengindikasikan tidak terjadinya efisiensi dalam penggunaan investasi
		Penawaran peluang investasi masih belum optimal
		Belum ada kebijakan insentif yang mendorong investasi
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kebijakan kepemudaan dan olah raga belum mampu meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
		Kurangnya sarana prasarana olah raga untuk publik di ruang terbuka
20	STATISTIK	Belum terwujudnya Satu Data
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan data pemerintah daerah masih rendah
22	KEBUDAYAAN	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian nilai budaya lokal
		Belum adanya penetapan warisan budaya
		Belum adanya integrasi kurikulum warisan budaya pada dunia pendidikan
23	PERPUSTAKAAN	Belum meratanya jangkauan layanan perpustakaan daerah
		Rendahnya minat baca masyarakat
24	KEARSIPAN	Belum terpenuhinya infrastruktur dan tenaga kearsipan.
		Pengelolaan arsip secara baik belum diterapkan pada semua OPD
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Belum terpenuhinya ketersediaan benih berkualitas
		Belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan ikan yang memadai
		Masih lemahnya daya tawar nelayan dan/atau petani ikan
26	PARIWISATA	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata
27	PERTANIAN	Penurunan luas lahan pertanian dan kualitas lahan pertanian
		Masih adanya produk pertanian yang belum memenuhi syarat ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
		Masih adanya ancaman penyakit hewan menular (penyakit mulut dan kuku, dan lainnya)
		Masih ada desa rawan pangan (Desa Ngantungan Kec Pasrepan dan Desa Karanglo Kecamatan Grati.
28	PERDAGANGAN	Pengelolaan pasar daerah/tradisional masih belum sepenuhnya efektif

No	URUSAN	PERMASALAHAN
29	PERINDUSTRIAN	Hilirisasi industri belum menjadi kekuatan utama
		Kualitas barang industri belum sepenuhnya tinggi
		Pengembangan industri kecil masih belum optimal
		Tidak banyak industri di Kabupaten Pasuruan yang berbasis potensi lokal
30	**Pendukung**	
	Sekretariat Daerah	Reformasi Birokrasi masih belum optimal
		Belum optimalnya pengelolaan BUMD
		Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar daerah
		Masih adanya ketidakpastian batas desa
		Nilai pemanfaatan sistem pengadaan masih belum optimal sebesar 23,40 dari nilai maksimal 30
		Masih adanya tumpang tindih kewenangan di beberapa perangkat daerah
31	**Penunjang**	
	Perencanaan	Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
	Keuangan	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
		Rendahnya kemandirian keuangan daerah
	Kepegawaian	Belum optimalnya implementasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ABK)
		Belum adanya pendampingan dan bantuan hukum bagi ASN
	Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Indeks Profesionalitas ASN belum optimal masih dalam kategori sedang
	Penelitian dan Pengembangan	Indeks daya saing daerah (3,14) masih di bawah nilai Jatim (3,78).
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
	Unsur Pengawasan	
	Inspektorat	Belum optimalnya peran dan kualitas APIP dalam perencanaan, pemantauan hingga evaluasi dan pengendalian
		Integritas dalam pencegahan korupsi masih perlu ditingkatkan (survey KPK menunjukkan pada kategori ‘ waspada’)
	Kewilayahan	
	Kecamatan	Belum optimalnya fungsi peran kecamatan dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan kebijakan daerah
	Pemerintahan Umum	
	Bakesbangpol	Adanya potensi konflik akibat isu SARA

No	URUSAN	PERMASALAHAN
		Adanya potensi konflik di kawasan pertahanan dan keamanan (HANKAM)
		Tingginya penyalahgunaan narkoba

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

2.3.2 Isu Strategis

Perkembangan global (dunia internasional), kebijakan nasional maupun regional (Provinsi Jawa Timur) merupakan isu-isu yang akan mempengaruhi pembangunan Kabupaten Pasuruan. Karenanya, berbagai isu tersebut harus ditelaah dan dijadikan pertimbangan saat perumusan isu strategis maupun penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Pasuruan lima tahun mendatang.

2.3.2.1 Telaah Isu Strategis Global/Internasional

Beberapa isu global yang sedikit banyak akan mempengaruhi pembangunan nasional, regional maupun lokal Kabupaten Pasuruan antara lain:

1. Isu *Sustainable Development Goals*

Kerusakan lingkungan hidup secara global telah berdampak pada perubahan iklim yang menuai berbagai bencana yang mengancam keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang. Pimpinan negara-negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai 8 Millenium Development Goals (hingga tahun 2015) dan dilanjutkan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030. Setidaknya hingga tahun 2030, hal ini masih akan menjadi isu global. Seluruh komponen negara, tidak terkecuali seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus berkontribusi dalam pencapaian SDGs di daerahnya masing-masing.

Terkait isu ini, pembangunan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, harus mengintegarsikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam tujuan pembangunannya, baik jangka panjang, menengah maupun pendek. Secara berkala, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dievaluasi untuk selanjutnya menjadi rekomendasi rencana pembangunan selanjutnya. Dalam penyusunan RPJMD yang didahului dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ini upaya-upaya pencapaian 17 tujuan pembangunan

berkelanjutan, khususnya yang menjadi kewenangan kabupaten, menjadi isu strategis yang harus dijawab melalui berbagai program pembangunan di masa mendatang.

2. Perubahan Iklim Dunia dan Kebutuhan Mengatasinya

Isu tentang pembangunan di dunia yang harus memperhatikan lingkunga sebrnarnya telah ada sejak tahun 1992 melalui **Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa** pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro dan diberlakukan tanggal 21 Maret 1994. Perubahan iklim dan dampak negatifnya yang terus berlanjut menuntut adanya konvensi atau perjanjian internasional antar Negara-negara di dunia untuk bersama-sama melakukan upaya penurunan faktor penyebab pemanasana global, pemicu perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari berbagai aktifitas manusia dianggap sebagai penyebab rusaknya lapisan ozon bumi yang berimplikasi pada pemanasan global. Karenanya, tuntutan untuk melakukan rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif menjadi kebijakan negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Tidak hanya itu, dampak perubahan iklim telah menyebabkan bentuk bencana alam yang bervariasi dengan intensitas yang semakin tinggi dan beragam. Berbagai upaya untuk mitigasi maupun penanganan bencana menjadi tuntutan global pula. Isu perubahan iklim dunia ini pun harus menjadi perhatian khusus di Kabupaten Pasuruan, khususnya bagi penyelenggara urusan lingkungan hidup, urusan penyediaan infrastruktur yang harus ramah lingkungan, hingga penanganan dan mitigasi bencana daerah.

3. Isu Globalisasi Ekonomi dan Ketidakpastian Perekonomian Global

Salah satu isu globalisasi ekonomi terdekat adalah Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan. Dalam hal ini resiko akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam

bersaing dengan produk-produk luar negri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan exploitation risk. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para risk professional diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar

dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan sosial (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di tahun tahun kedepan.

Globalisasi ekonomi, ketidakpastian global, dan penerapan MEA membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Pasuruan yang merupakan bagian dari negara Indonesia yang memiliki basis industri dan ekspor yang kuat.. Bagi Kabupaten Pasuruan, MEA membawa **Peluang berupa** Pasar ekspor lebih luas, potensi investasi asing dari kawasan ASEAN, dengan t**antangan** berupa persaingan produk lokal dan tenaga kerja lokal dengan produk/tenaga kerja negara ASEAN lainnya (seperti Thailand, Vietnam, Filipina). Dengan potensi investasi yang kuat, namun juga tekanan persaingan yang ketat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu terus meningkatkan kualitas produk lokal, membangun tenaga kerja berdaya saing ASEAN, memperkuat infrastruktur ekspor/investasi, serta melindungi sumber daya alam dan industri lokal untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, membawa perubahan-perubahan di setiap lini kehidupan. Digitalisasi sebagai akibat perkembangan TIK telah merubah hampir semua tatanan kehidupan, termasuk tatanan dalam berusaha atau pun beraktifitas sehari-hari. Perubahan tatanan kehidupan yang mendasar inilah yang disebut dengan disrupsi. Dunia, tidak terkecuali Indonesia dan wilayahnya sedang memasuki era disrupsi yang akan mengubah perilaku masyarakat hingga kebutuhan-kebutuhannya.

Di satu sisi, dampak positif sangat dirasakan oleh manusia. Teknologi memudahkan aktivitas sehari-hari sehingga mampu meningkatkan produktifitas. TIK telah mempercepat arus penyampaian informasi (komunikasi) dari satu tempat ke tempat lain. Kondisi milenial saat ini

menuntut masyarakat untuk aktif mengetahui informasi terkini, oleh karena itu teknologi informasi dan komunikasi saat tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat setiap harinya. Hal ini terlihat jelas dari perilaku manusia setiap harinya yang tidak dapat terlepas dari handphone. Adanya perkembangan TIK juga menyebabkan terjadinya efisiensi dalam memperoleh informasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dirasakan dengan adanya penghematan waktu, tenaga, biaya, dan hal-hal lain yang berdampak pada peningkatan hasil produksi. Dunia telah dihadapkan pada revolusi industry generasi keempat (Revolusi Industri 4.0) yang ditandai dengan penggunaan supercomputer, robot pintar, dll. Revolusi industry 4.0 merupakan sistem yang mengintegrasikan antara produksi industry dengan dunia online. Tujuan dari revolusi industri ini adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan menggunakan teknologi digital dan otomatisasi. Akibatnya akan terjadi perubahan komposisi lapangan kerja, karena tenaga kerja pada akhirnya akan digantikan oleh mesin yang lebih efektif dan efisien dalam menghasilkan barang dan jasa.

Di sisi lain, perkembangan TIK akan berdampak negatif. Saat ini sudah banyak pekerjaan yag semula dilakukan tenaga kerja telah beralih ke mesin, aplikasi atau hasil teknologi lainnya. Hal ini dinilai lebih efisien sehingga mengancam hilangnya berbagai jenis pekerjaan sekaligus lowongan pekerjaan. Jika hal ini tidak terantisipasi, maka akan berpengaruh pada tingkat penganggura yang cenderung akan meningkat dengan segala dampaknya. Globalisasi dan arus komunikasi serta informasi yang cepat pun dapat merubah perilaku dan masyarakat. Kecerdasan masyarakat dalam menjaring informasi yang baik/benar sangat dibutuhkan agar dampak positif yang diperoleh dan dampak negatif informasi dapat dieliminasi. Masyarakat pun dituntut untuk melek teknologi dan memanfaatkannya agar tidak “tertinggal.”

Pemerintah daerah pun, tidak terkecuali Kabupaten Pasuruan, harus memanfaatkan dampat positif perkembangan TIK ini untuk peningkatam produktifitas masayarakat maupun pelayanan pemerintahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk: (1) meningkatkan produksi dan produktifitas semua sektor/lapagan usaha perekonomian; (2) meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah,

khususnya pelayanan terhadap masyarakat; (3) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan yang mampu menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan revolusi industri 4.0. Diperlukan strategi khusus agar dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mematahkan semangat pembangunan ekonomi Kabupaten Pasuruan, namun dijadikan sebagai pendorong.

5. Isu Geopolitik dan Geoekonomi

Perang antara Rusia dan Ukraina serta Israil dan Palestina telah berdampak pada konflik dan ketegangan politik antar negara-negara pendukungnya, tidak terkecuali negara adidaya dan berdampak pada sisi kehidupan lainnya di negara-negara di dunia. Perang dan ketegangan poitik telah mengakibatkan tekanan inflasi global yang tinggi serta krisis ekonomi dan pangan sehingga menyebabkan resesi global. Jika tidak di antisipasi maka Indonesia akan terpengaruh, tidak hanya terseret pada ketegangan politik antar negara namun juga terimbas resesi dunia.

Pemerintah Indonesia pun memproyeksikan bahwa resesi ekonomi global tersebut akan berdampak pula pada perekonomia Indonesia, meskipun diharapkan tidak menimbukan resesi ekonomi di Indonesia. Beberapa dampak resesi perekonomian gloabal terhadap perekonomia Indonesia antara lain pada perdagangan luar negeri. Saat ekspor komoditi unggulan Indonesia terkendala oleh turunnya permintaan global akibat resesi ekonomi, maka neraca perdagangan akan defisit. Penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari ekspor-pun menurun sehingga menurunkan pendapatan negara secara keseluruhan. Nilai tukar rupiah yang semakin merosot seiring melemahnya perekonomian negara-negara besar juga berdampak pada nilai impor yang semakin besar dan memberatkan Indonesia, sehingga defisit neraca perdagangan juga semakin besar. Neraca yang defisit akan mengurangi Pendapatan Nasional secara keseluruhan.

Bagi pemerintah daerah, resesi global akan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung. Bagi daerah yang perekonomian daerahnya terkat langsung dengan perdagangan luar negeri, tentu akan terpengaruh langsung, sebagaimana uraian sebelumnya. Sementara itu, dampak tidak langsungnya adalah implikasi dari menurunnya penerimaan negara dan/atau meningkatnya pengeluaran negara untuk

mengurangi dampak resesi dunia terhadap Indonesia. Daerah yang tingkat kemandiriannya rendah, di mana sumber utama penerimaan daerahnya adalah dana transfer, maka sedikit banyak akan terpengaruh. Saat alokasi dana negara untuk transfer ke daerah berkurang karena penerimaan negara berkurang, maka penerimaan daerah bersumber dari dana transfer pun akan menurun. Saat hal ini tidak diimbangi dengan sepadan oleh peningkatan sumber penerimaan daerah yang lain, maka penerimaan total daerah juga akan menurun. Implikasi berikutnya adalah kapasitas fiskal daerah pun dalam membiayai proses pembangunan daerah juga akan menurun.

Selain itu, perekonomi negara-negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang diperkirakan terus meningkat dan akan menguasai sebagian besar perekonomian dunia. Kemampuan setiap negara melalui kebijakan makro ekonominya dalam 'bersaing' dalam perekonomian global akan menjadi peluang untuk mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonominya dari negara maju. Kebijakan perdangan interregional atau internasional yang terbuka dan tepat, iklim usha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumberdaya manusia yang mendukung akan menjadi penentu bagi negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia, untuk maju mengerjar negara-negara maju.

Dampaknya terasa tidak hanya di negara besar, tapi juga di tingkat regional dan lokal, termasuk di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur**,** yang merupakan salah satu kawasan industri dan pertanian penting di Indonesia. Menurut data Bank Dunia dan laporan IMF, ketegangan geopolitik dan sanksi ekonomi menyebabkan:

1) Disrupsi rantai pasok global (*supply chain disruption*).
2) Lonjakan harga energi dan pangan.
3) Fluktuasi nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
4) Penurunan permintaan ekspor dari negara mitra utama akibat resesi.

Adapun yang dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif seperti diversifikasi pasokan, memperkuat pasar lokal, membuka pasar ekspor baru, dan menjaga stabilitas harga pangan, Kabupaten Pasuruan berupaya menjaga daya tahan ekonominya dalam menghadapi ketidakpastian global.

2.3.2.2 Telaah Isu Strategis Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Isu strategis nasional yang dapat mempengaruho pembangunan Kabupaten Pasuruan umumnya berupa kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan hasil evaluasi pembangunan nasional dan analisis kondisi eksternal/isu global dalam lima tahun terakhir sehingga dirumuskan tantangan pembangunan nasional tahun 2025-2029. Tantangan pembangunan nasional tersebut menjadi isu strategis nasional yang harus dijawab melalui RPJMN pada periode tersebut. Isu-isu strategis pembangunan nasional yang dimaksud adalah:

1) Rendahnya produktivitas tenaga kerja di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Kondisi ini di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi,dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tcnaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan ptrtumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial.
2) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan manusia unggul dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Untuk mengatasinya, sangat diperlukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3) Pergeseran struktural kelas masyarakat di mana jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, serta populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko prrgeseran status dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Faktor yang memicu terjadinya

pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat karena gejolak harga. Implikasinya adalah menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya oprrasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

4) Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif. Tingginya kebutuhan hidup masyarakat terjadi karena ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapanganpekerjeen. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalem upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.
5) Krisis lingkungan, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan mengancam masa depan bumi dan manusia. Krisis ini berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, serta tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.
6) Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global, salah satunya adalah eskalasi pcrsaingan antamegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia intemasional. Selain itu, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global, yang juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Tantangan ini membutuhken kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

7) Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang masih diwarnai praktek korupsi membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi ysng sksn menjadi pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Selain itu, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pclanggaran privasi dan ancaman keamanan.

Untuk menjawab tantangan dan isu strategis pembangunan nasional tersebut, maka ditetapkan 8 (asta) cita sekaligus misi pembangunan nasional untuk mencapai visi pembangunan nasional tahun 2025-2029. Visi pembangunan nasional sekaligus visi Presiden Republik Indonesia periode Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Endonesia Emas 2045”. Sementara itu, 8 atau asta cita (misi) pembangunan nasional adalah:

1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6) Membangun daridesa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Ke-17 projram prioritas nasional tersebut adalah:

1) Mencapai Swasembada pangan, energa, dan air
2) Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3) Reformasi Politik, Hukum, dan birokrasi
4) Pencegaha dan pemberantasan korupsi
5) Pemberantasan kemiskinan
6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh Rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8) Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara
10) Kesetaraan Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan
11) Pelestarian Lingkungan Hidup
12) Ketersediaan Pupuk dan Benih bagi Petani
13) Rumah Murah dan Sanitasi bagi Masyarakat
14) Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM
15) Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim
16) Kerukunan Antarumat Beragama dan Kebebasan Beribadah
17) Pelestarian Seni Budaya dan Peningkatan Ekonomi Kreatif

Untuk melaksanakan ke-17 program dalam rangka menyelenggarakan 8 misi pembangunan, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 telah menetapkan 8 program hasil terbaik cepat (PHTC) *Quick Win*, sekaligus program unggulan dalam pembangunan lima tahun ke depan, yaitu:

1) Memberikan Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita.
2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.
3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

RPJMN Tahun 2025-2029 juga menjelaskan arah kebijakan pembangunan kewilayahan, termasuk di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan. Menurut arahan pembangunan kewilayahan RPJMN tahun 2025-2029, Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu lokasi Kawasan Pertumbuhan Wilayah Metropolitan Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan. Kabupaten Pasuruan juga menjadi salah satu lokasi Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi di Tapal Kuda yang mencakup Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi.

Sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka seluruh rencana pembangunan daerah harus mendukung pelaksanaan program

prioritas dan misi pembangunan nasional untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya di tahun 2025-2029. Karenanya, RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 harus selaras, merujuk dan mendukung program prioritas dan asta cita pembangunan nasional di atas.

2.3.2.3 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur

Dokumen Provinsi Jawa Timur yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan adalah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang menjabarkan visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2025-2029. Isu strategis, visi, dan misi RPJMD Kabupaten Pasuruan harus selaras dengan isu strategis, visi dan misi dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Arah kebijakan maupun program prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 pun harus selaras, diacu, dan didukung oleh arah kebijakan maupun program prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur telah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan pada periode 2025-2029, yaitu:

1. Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah
2. Penanggulangan kemiskinan, dengan perluasan kesempatan kerja; Perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; Perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; Perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; Pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas, melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana, dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan
6. Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Untuk menjawab isu-isu strategis di atas, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur memiliki Visi “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang disebut **Nawa Bhakti Satya** dan sekaligus menjadi program prioritas Jawa Timur, yaitu:

1. **Jatim Sejahtera**, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan.
2. **Jatim Kerja,** Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.
3. **Jatim Akses,** Memperkuat Infrastuktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan.
4. **Jatim Agro,** Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan.
5. **Jatim Cerdas,** Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan.
6. **Jatim Sehat,** Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
7. **Jatim Berkah-Amanah**, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
8. **Jatim Harmoni**, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.
9. **Jatim Lestari,** Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Sementara itu, arah kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 yang melibatkan Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu lokasinya adalah sebagai berikut:

1. Pada rencana pengembangan lokasi prioritas wilayah metropolitan Surabaya dan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan, artinya daerah ini akan mengalami peningkatan investasi industri, membutuhkan kesiapan lahan, tenaga kerja dan infrastruktur yang mendukung maka salah satu intervensi yang harus dilakukan adalah inisiasi Pengembangan TPST Regional Pasuruan-Probolinggo sebagai bentuk penguatan sistem pengelolaan lingkungan serta mereformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari

hulu ke hilir dengan melakukan perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan dari pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan residu.

2. Pengembangan Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger-Semeru, salah satunya di Geopark Pasuruan maka harus meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi, peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan darurat bencana serta meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap bencana.
3. Melaksanakan indikasi intervensi pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Tapal Kuda, khususnya di Kabupaten Pasuruan dengan mendorong pengembangan SPAM Regional Probolinggo-Lumajang dan peningkatan kapasitas SPAM Umbulan, pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk /pestisida pakan organik.

2.3.2.4 Telaah Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 pada Tahap Pertama (2025-2029)

RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 tahap I (periode 2025-2029) berfokus pada penguatan transformasi ekonomi melalui riset dan inovasi, penguatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas lingkungan hidup, serta peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi. Kontribusi sektor terbesar pada konstruksi ekonomi Kabupaten Pasuruan adalah industri pengolahan. Karena itu, pada periode ini pembangunan difokuskan terhadap dorongan riset dan inovasi yang kedepannya industri konvensional akan ditransformasikan menjadi industri berbasis teknologi dengan transisi energi ke arah energi ramah terbarukan.

1) Penguatan Layanan pendidikan dan kesehatan

Keterjangkauan akses masyarakat Kabupaten Pasuruan terhadap layanan pendidikan berkualitas masih terpusat pada wilayah perkotaan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan keterjangkauan akses pendidikan dan

pemerataan pendidikan berkualitas. Selain itu penguatan *mindset* terhadap pentingnya menempuh pendidikan kepada masyarakat.

Keterjangkauan layanan kesehatan utamanya fasilitas kesehatan rujukan belum merata, meningkatnya pervalensi penyakit tidak menular dari kelompok usia tua ke kelompok usia muda dan masih tingginya prevalensi penyakit menular.

2) Pembangunan ekonomi berwawasan Lingkungan

Bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan keberlanjutannya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan memproduksi barang-barang yang ramah lingkungan serta menggunakan energi non fosil atau terbarukan.

3) Peningkatan Layanan Publik

Salah satu upaya dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan publik melalui teknologi informasi. Elemen kunci dalam peningkatan layanan publik meliputi

a) *Evaluasi dan Perbaikan Struktur Organisasi***,** peninjauan kembali dan peningkatan struktur organisasi ,perubahan dalam hirarki, alur kerja, dan tanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan berbagai pihak.
b) *Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia,* perhatian khusus pada pengembangan keterampilan, peningkatan kapasitas, dan pelatihan sumber daya manusia mencakup pegawai pemerintah, tenaga kerja di sektor terkait, dan masyarakat.
c) *Pengembangan Kebijakan yang Berkelanjutan,* merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan terkait kebijakan ekonomi, lingkungan, sosial, dan aspek-aspek lain yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.
d) *Peningkatan Infrastruktur Dasar,* mengidentifikasi, mengembangkan, dan meningkatkan infrastruktur dasar yang mendukung pembangunan, seperti jaringan transportasi, sumber daya air, energi, dan teknologi informasi.
e) *Pengelolaan Risiko dan Bencana,* meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan risiko dan penanggulangan bencana, termasuk

penyusunan rencana darurat dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam.

f) *Pemberdayaan Masyarakat,* melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan akses terhadap informasi, dan meningkatkan kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan lokal.

g) *Penggunaan Teknologi dan Inovasi***,** untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan dampak positif pembangunan termasuk penerapan solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta inovasi di berbagai sektor.

2.3.2.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Kebijakan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Pasuruan, meliputi pengembangan kawasan strategis sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung fungsi ekonomi wilayah, sosial budaya dan lingkungan hidup. Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung fungsi ekonomi wilayah dan lingkungan hidup meliputi: mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan peluang investasi dan kegiatan perekonomian melalui keterpaduan dan penyediaan infrastruktur dan menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan penetapan kawasan dan peningkatan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi: (i) pusat industri di kawasan industri Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek dan Kecamatan Rembang, serta Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Nguling dan Kecamatan Lekok; dan (ii) kawasan pusat pertumbuhan kawasan di sekitar pintu tol meliputi Kecamatan Bangil, Beji, Gempol, Grati, Lekok, Nguling, Pandaan dan Sukorejo; (iii) Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Pandaan, Rembang dan Sukorejo; (iv) Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Bangil, Rejoso, Lekok dan Kraton; (v) kawasan koridor pariwisata, meliputi Kecamatan Pasrepan, Purwodadi, Purwosari, Puspo dan Tutur. Arah pengembangan

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

a) arahan pengembangan pusat industri kabupaten adalah pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan industri;
b) arahan pengembangan pusat pertumbuhan kawasan di sekitar pintu tol adalah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata dan Kawasan Peruntukan Industri;
c) arahan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah pengembangan agroindustri, perkebunan, hortikultura dan pariwisata;
d) arahan pengembangan Kawasan Minapolitan adalah pengembangan perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa; dan
e) arahan pengembangan kawasan koridor pariwisata adalah pengembangan pariwisata, perkebunan, hortikultura, peternakan, perdagangan dan jasa, permukiman.

Sementara itu, Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: (i) kawasan sekitar Danau Ranu Grati di Kecamatan Grati; (ii) kawasan sekitar mata air Umbulan di Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Winongan; (iii) kawasan sekitar Banyu Biru di Kecamatan Winongan; (iv) kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kecamatan Lumbang, Pasrepan, Puspo, Tosari dan Tutur; serta (v) kawasan sekitar Arjuna – Welirang di Kecamatan Prigen, Purwodadi, Purwosari, dan Sukorejo. Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu:

a) pelestarian Kawasan Konservasi dan terbatas pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan
b) pelestarian Badan Air dan terbatas pengembangan perikanan

RTRW Kabupaten Pasuruan juga telah mengarahkan rencana struktur wilayah kabupaten yang mencakup sistem pusat pemukiman maupun sistem jaringan prasarana. Pusat permukiman mencakup pusat kegiatan lokal dan pusat pelayanan kawasan. Sementara itu, sistem jaringan prasarana mencakup sistem jaringan transportasi, energy, telekomunikasi, sumberdaya air, dan prasarana lainnya. RTRW telah menetapkan lokasi-lokasi di mana sistem pusat permukiman maupun sustem jaringan prasarana akan diletakkan/dibangun.

RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043 mengarahkan pula rencana pola ruang wilayah, yaitu bahwa akan ada kawasan lindung dan

kawasan budidaya. Kawasan lindung mencakup badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, serta kawasan konservasi. Sementara itu, kawasan budidaya mencakup Badan Jalan, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian;, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan. RTRW Kabupaten Pasuruan pun telah menetapkan lokasi-lokasi di mana kawasan-kawasan tersebuut di atas berada.

Amanah RTRW untuk pengembangan wilayah di atas dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan pengembangan kewilayahan dengan pendekatan tematik, integratif, holistik, dan spasial (THIS) pada periode tahun 2025-2029 di Kabupaten Pasuruan. Satu atau lebih kawasan yang telah ditetapkan dalam RTRW dipilih untuk diprioritaskan pengembangannya pada periode 2025-2029. Adapun tabel sandingan antara RPJMD dengan RTRW adalah sebagai berikut.

Tabel 2.80
Persandingan Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RTRW Tahun 2023-2045

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
				1.1. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan	
	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 4. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 5. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 6. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 7. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 8. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	• Pengurangan dampak serta luasan genangan dan banjir di kawasan Perkotaan Bangil; • Pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Selatan • penataan angkutan umum 1. Penaatan Lalu Lintas, Transportasi, dan Angkutan umum perkotaan bangil 2. Penyediaan dan penataan kawasan layanan publik - Kawasan perkantoran pemerintah daerah Raci - Kawasan Pelayanan Publik - Koridor kawasan perkantoran pemerintah (PeKawasan Perkantoran Raci-DPRD-RSUD Bangi-POLRES	Perkotaan Bangil	a) Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 1) Pengembangan Perkantoran Pemerintah Kabupaten 2) Pengembangan Pusat Permukiman Skala Regional 3) Pengembangan Fasilitas Umum dan sosial skala Regional dan Kabupaten 4) Penyusunan RDTR	Perkotaan Bangil

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
		BANGIL Perkantoran Eks RS Bangil) - Kawasan CBD (Central Building Development: Kawasan pertokoan/ perdagangan-jasa, Alun-alun Bangil, MasjidJamik, Kantor Pos - Kawasan pengembangan Co-Working Space, Pusat Edukasi dan Layanan Informasi Koperasi, UMKM dan Ekraf Kabupaten Pasuruan; - Kawasan Perdagangan: pasar daerah Bangil • Kawasan Pendidikan Kalirejo • Penataan RTH			
	1. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 5. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penataan RTH Kecamatan Pembangunan RS Penataan Masjid ChengHo Pengembangan Perumahan	Semua kecamatan; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Pandaan; Semua kecamatan.	b) Pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL) 1) Pengembangan Pusat Permukiman skala Kabupaten 2) Pengembangan fasilitas umum dan sosial skala Kabupaten 3) Penyusunan RDTR	Perkotaan Pandaan; Perkotaan Purwosari; Perkotaan Gondangwetan; Perkotaan Grati.
	• PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN • PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) • PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN • PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah maupun lingkungan permukiman melalui perluasan akses rumah layak huni, sanitasi aman-layal-berkelanjutan, air minum perpipaan, dan pengelolaan persampahan dan limbah domestik. Percepatan penetapan Rencana Tata Ruang	Semua kecamatan	c) Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK) 1) Pengembangan Pusat Permukiman skala Kecamatan 2) Pengembangan fasilitas umum dan sosial skala Kecamatan 3) Penyusunan RDTR	Perkotaan Beji; Perkotaan Gempol; Perkotaan Kejayan; Perkotaan Kraton; Perkotaan Lekok; Perkotaan Lumbang; Perkotaan Nguling; Perkotaan Pohjentrek; Perkotaan Purwodadi; Perkotaan Pasrepan; Perkotaan Prigen; Perkotaan Puspo;

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM • PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	(penyusunan 3 RDTR Bantek pada WP Rejoso, Tutur, Kejayan) yang terintegrasi dengan OSS, serta melaksanakan peninjauan kembali Permen RTRW 11 Tahun 2024. Menjadi peluang pintu investasi di Kabupaten Pasuruan	WP Rejoso, Tutur, Kejayan.		Perkotaan Rejoso; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sukorejo; Perkotaan Tutur; Perkotaan Tosari; Perkotaan Winongan; dan Perkotaan Wonorejo.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Pembangunan Jalan Baru sesuai fungsi jalan serta pendukung dan perlengkapan jalan Peningkatan Jalan Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Jalan	Semua Kecamatan	1) Pengembangan jalan arteri primer (JAP) 3. Gempol – Bts. Kota Bangil; 4. Jln. A. Yani (Bangil); 5. Jln. Untung Suropati (Bangil); 6. Jln. Jaksa Agung Suprapto (Bangil); 7. Jln. Dr. Sutomo (Bangil); 8. Jln. Kartini (Bangil); 9. Jln. Gajah Mada (Bangil); 10. Jln. Diponegoro (Bangil); 11. Bts. Kota Bangil – Bts. Kota Pasuruan 12. Bts. Kota Pasuruan – Bts. Kab. Probolinggo; 13. Gempol – Pandaan; 14. Bts. Kota Sidoarjo-Gempol; 15. Jalan Arteri Siring-Porong; 16. Jln. Gempol Bypass; 17. Jln. Soekarno-Hatta (Pasuruan); 18. Bts. Kab. Pasuruan-Karanglo; 19. Jln. Lingkar Pandaan Bypass; 20. Pandaan – Purwosari;	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Grati; Kecamatan Kraton; Kecamatan Lekok; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; Purwodadi; Kecamatan Purwosari. Kecamatan Rejoso; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo;

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
				21. Purwosari – Purwodadi; dan 22. Purwodadi – Bts. Kab. Malang.	
•				2) Jalan kolektor primer satu (JKP-1) • Bts. Kab. Mojokerto – Gempol • Mojosari - Bts. Kab. Pasuruan	Kecamatan Gempol
•				3) Pemeliharaan Jalan Kolektor Dua (JKP-2) • Pandaan - Tretes; • Bts. Kota Pasuruan-Kejayan; • Kejayan-Tosari; • Kejayan - Purwosari; dan • Purwodadi – Nongkojajar.	Kecamatan Gempol; Kecamatan Gondangwetan; Kecamatan Kejayan; Kecamatan Kraton; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Prigen; Kecamatan Pohjentrek; Kecamatan Puspo; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Tosari; Kecamatan Tutur; Kecamatan Wonorejo.
				4) Pemeliharaan dan pengembangan Jalan Kolektor Empat (JKP-4)	Seluruh Kecamatan
				5) Pengembangan jalan lokal primer	Seluruh Kecamatan
				6) Pengembangan jalan lingkungan primer	Seluruh Kecamatan
				7) Pengembangan jalan khusus kawasan PIER kawasan Taman Safari; kawasan Taman Dayu; kawasan Kebun Raya Purwodadi; kawasan PUSLATPUR TNI-AL.	Kecamatan Bangil; Kecamatan Grati; Kecamatan Kraton; Kecamatan Lekok; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Pengembangan terminal	Semua kecamatan	9) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A berupa	Kecamatan Pandaan

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
				Terminal Pasuruan	
		Pengembangan terminal type C	Semua kecamatan	10) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C Terminal Tosari Terminal Pasrepan Terminal Nguling Terminal Bangil dan Terminal Bangil Terpadu Terminal Gempol	Kecamatan Tosari; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Nguling; Kecamatan Bangil; Kecamatan Gempol.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Semua kecamatan	12) Pemeliharaan dan pembangunan Jembatan	12) Pemeliharaan dan pembangunan Jembatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kajian Pengembangan tempat parkir khusus	Kecamatan Gempol, Kecamatan Nguling, Kecamatan Pandaan	13) Pembangunan tempat khusus parkir	Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Wonorejo.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kajian Pengembangan terminal khusus Grati dan Nguling	Grati, Nguling	2) Pengembangan Terminal Khusus : Terminal Khusus Grati dan Terminal Khusus Nguling	Kecamatan Grati; Kecamatan Nguling.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		Semua kecamatan	14) Pembangunan Fasilitas Prasarana dan pendukung pelayanan angkutan	Kecamatan Bangil; Kecamatan Gempol; Kecamatan Kraton; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Puspo; Kecamatan Pohjentrek; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Tosari; Kecamatan Tutur.
				15) Pembangunan Terminal Wisata	Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Nguling.
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Penyediaan perlintasan sebidang (palang pintu)	Seluruh kecamatan	b. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api 1) Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum	

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
		Kajian pengembangan pelabuhan pengumpan local lekok	Lekok	c. Rencana Jaringan Transpotasi Laut 1) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal Lekok Pengembangan Pelabuhan Perikanan berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Lekok	Kecamatan Lekok
				b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan 1. Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya	
		Pembangunan PLTS	Kecamatan Pasrepan, Kejayan	6) Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kabupaten Pasuruan
				2.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air	
				1. Sistem Jaringan Irigasi	
	1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Semua Kecamatan	1. Pengembangan jaringan irigasi primer	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Gondangwetan; Kecamatan Grati; Kecamatan Kejayan; Kecamatan Kraton; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Prigen; Kecamatan Pohjentrek; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Winongan;

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
	2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Semua Kecamatan	7) Pengembangan jaringan irigasi sekunder	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Gondangwetan; Kecamatan Grati; Kecamatan Kejayan; Kecamatan Kraton; Kecamatan Lekok; Kecamatan Lumbang; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Prigen; Kecamatan Pohjentrek; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Rembang;
	3. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Semua Kecamatan	3) Pengembangan jaringan irigasi tersier	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Gondangwetan; Kecamatan Grati; Kecamatan Kejayan; Kecamatan Kraton; Kecamatan Lumbang; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Pohjentrek; Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Tutur; Kecamatan Winongan; dan Kecamatan Wonorejo.
	4. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan stasiun Pompa Banjir Normalisasi DAS Penguatan Tebing DAS	Semua DAS	2. Sistem Pengendalian Banjir a. Pengembangan jaringan pengendalian	Kecamatan Bangil Kecamatan Beji; Kecamataan Pandaan.

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
				banjir berupa Long Storage Kali Bangil Tak	
		Kajian pembangunan Check Dam Pembangunan Check Dam	Kab. Pasuruan	b. Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	Kecamatan Beji: Kecamatan Kejayan; Kecamatan Lumbang; Kecamatan Nguling; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Rembang; dan Kecamatan Sukorejo
				3) Pengendalian Banjir Kali Kedunglarangan	Kecamatan Bangil Kecamatan Beji Kecamataan Pandaan Kecamatan Prigen
				4) Pembuatan sudetan, normalisasi Kali Welang 5) Pengembangan long storage berjenjang di hulu sungai Welang	Kecamatan Kejayan Kecamatan Pohjentrek Kecamatan Kraton
				3. Bangunan Sumber Daya Air Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Gondangwetan; Kecamatan Grati; Kecamatan Kejayan; Kecamatan Kraton; Kecamatan Lumbang; Kecamatan Nguling Kecamatan Pandaan; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Winongan; dan Kecamatan Wonorejo.
				2.5 Sistem Prasarana Wilayah Lainnya a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	• Pembangunan dan peningkatan penyediaan SPAM perpipaan non PDAM • Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana SPAM PDAM (dibangun PDAM dg anggaran BUMD, dana pusat)	Semua kecamatan Purwodadi, Wonorejo dan Grati	1. Pengembangan unit air baku : Mata Air Banyubiru, Mata Air Umbulan dan sumber air lainnya	Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Tutur; dan Kecamatan Winongan.
				6) Pengembangan unit produksi	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Grati; Kecamatan Kraton; Kecamatan Kejayan; Kecamatan Lumbang; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Puspo; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Tosari; Kecamatan Tutur; Kecamatan Wonorejo; Kecamatan Winongan.
				3) Pengembangan jaringan produksi : SPAM Regional Malang Raya dan SPAM Regional Umbulan	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Gondangwetan; Kecamatan Grati; Kecamatan Kraton; Kecamatan Lekok; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Pohjentrek; Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Tutur; dan Kecamatan Winongan.

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pembangunan dan peningkatan penyediaan SPAM perpipaan non PDAM	Semua kecamatan	4) Pengembangan unit distribusi	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Grati; Kecamatan Lekok; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Tutur; dan Kecamatan Wonorejo.
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			6) Pengembangan bangunan penangkap mata air	Kecamatan Bangil; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Purwosari.
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			7) Pengembangan terminal air	Kecamatan Lumbang; Kecamatan Lekok; Kecamatan Winongan; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Gempol.
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan IPLT	Kecamatan Bangil	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) 1) Pengembangan SPAL Domestik berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Gondangwetan; Kecamatan Grati; Kecamatan Kejayan; Kecamatan Kraton; Kecamatan Lekok; Kecamatan Lumbang; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Pohjentrek; Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Puspo; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Rembang;

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
					Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Tosari; Kecamatan Tutur; Kecamatan Winongan; Kecamatan Wonorejo;
				2) Kajian Pengembangan SPAL	Kabupaten Pasuruan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan sampah Pengurangan sampah	Semua kecamatan	c. sistem jaringan persampahan wilayah 1) Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	Seluruh Kecamatan
				2) Pengembangan TPS (Tempat Penampungan Sementara	Seluruh Kecamatan
				3) Pengembangan TPA (Tempat Pemrosessan Akhir) TPA Ambal-Ambil TPA Rebalas TPA Wonokerto TPA Sumbersuko TPA Kenep	Kecamatan Kejayan Kecamatan Grati Kecamatan Rembang Kecamatan Gempol Kecamatan Beji
				4) Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Lekok; Kecamatan Nguling; Kecamatan Puspo; Kecamatan Tosari; Kecamatan Tutur; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Purwodadi.
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pra Bencana Tanggap Bencana Pasca Bencana	Semua Kecamatan	d. Sistem jaringan evakuasi bencana 1) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi memanfaatkan jalan arteri, kolektor dan jalan lokal	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Kraton; Kecamatan Pohjentrek; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Winongan
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Semua Kecamatan	2) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi memanfaatkan jalan arteri, kolektor dan jalan lokal	Kecamatan Lumbang; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Puspo; Kecamatan Tosari; Kecamatan Tutur; Kecamatan Winongan
				3) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa tingkat tinggi memanfaatkan	Kecamatan Bangil

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
				jalan arteri, kolektor dan jalan lokal	
				4) Penyediaan tempat evakuasi bencana banjir tingkat tinggi memanfaatkan fasilitas umum dan RTH	Kecamatan Bangil; Kecamatan Kraton; Kecamatan Pohjentrek; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Winongan.
				5) Penyediaan tempat evakuasi bencana longsor tingkat tinggi memanfaatkan fasilitas umum dan RTH	Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Tutur; Kecamatan Winongan.
				6) Penyediaan tempat evakuasi bencana gempa tingkat tinggi memanfaatkan fasilitas umum dan RTH	Kecamatan Bangil
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pembangunan dan pemeliharaan drainase	Semua Kecamatan	e. Sistem jaringan drainase a) Pengembangan jaringan drainase primer	Ibukota Bangl
				b) Pengembangan jaringan drainase sekunder	Seluruh Kecamatan
				c) Kajian pengembangan jaringan drainase tersier	Seluruh Kecamatan
	• PROGRAM PENANGANAN KEWAWANAN PANGAN • PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN • PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING • PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengembangan Kawasan Sentra Pangan di wilayah timur Pengembangan Kawasan Pangan Stabilisasi harga pangan Penyediaan dan Pengendalian pupuk	Kecamatan Rejoso, Lekok, Nguling, Grati, Winongan, Lumbang Kecamatan Purwosari, Sukorejo, Kejayan, Kraton, Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan.	2.2 Kawasan pertanian a. Pengembangan kawasan tanaman pangan	Seluruh kecamatan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengembangan Kawasan Hortikultura dan perkebunan	Semua Kecamatan	2. Pengembangan kawasan hortikultura	Kecamatan Grati; Kecamatan Lumbang; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Puspo; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Tosari; Kecamatan Tutur.

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengembangan Kawasan Peternakan	Semua Kecamatan	b. Pengembangan kawasan peternakan	Kecamatan Gempol; Kecamatan Grati; Kecamatan Kejayan; Kecamatan Kraton; Kecamatan Lumbang; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Puspo; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Tutur; Kecamatan Winongan; Kecamatan Wonorejo.
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Obyek Wisata	Semua Kecamatan	Penataan dan pengembangan wisata edukasi peternakan dan kawasan peternakan terintegrasi (Arjuna Agrotechnopark)	Kecamatan Purwosari
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Identifikasi dan Pengamanan LP2B – KP2B	Semua Kecamatan	Penetapan KP2B dan LP2B	Kabupaten Pasuruan
	• PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP • PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya	Semua Kecamatan	2.3 Kawasan Perikanan Pengembangan kawasan perikanan budi daya	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gondangwetan; Kecamatan Kraton; Kecamatan Lekok; Kecamatan Nguling; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Winongan.
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pengembangan Kawasan industry Pengembangan kreatif center	Semua Kecamatan	2.5 Kawasan Peruntukan Industri Pengembangan kawasan peruntukkan industri	Seluruh kecamatan
				Pengembangan sentra IKM	Seluruh kecamatan
	• PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA • PROGRAM	Pengembangan Obyek dan Pengelolaan Wisata Promosi Obyek Wisata Pengembangan Ekonomi Kreatif Peningkatan Pelaku Wisata	Semua Kecamatan	2.5 Kawasan Pariwisata Pengembangan kawasan pariwisata	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Gondangwetan; Kecamatan Grati; Kecamatan Lekok;

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
	• PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL • PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Puspo; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Tosari; Kecamatan Tutur; dan Kecamatan Winongan
				Pengembangan penunjang kawasan pariwisata Kajian pengembangan jalur dan aktivitas wisata	Seluruh kecamatan
	• PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN • PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) • PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kabupaten Pasuruan	2.6 Kawasan permukiman Pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Seluruh kecamatan
				Pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Gondangwetan; Kecamatan Grati; Kecamatan Kejayan; Kecamatan Kraton; Kecamatan Lekok; Kecamatan Lumbang; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Pohjentrek; Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan Puspo;

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
					Kecamatan Rejoso; Kecamatan Rembang; Kecamatan Sukorejo; Kecamatan Tosari; Kecamatan Tutur; Kecamatan Winongan; dan Kecamatan Wonorejo.
				Penyediaan sarana prasarana penunjang permukiman	Seluruh Kecamatan
				Program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Seluruh Kecamatan
	• PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL • PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Kabupaten Pasuruan	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 1.1. Perwujudan Strategis Kawasan Strategis Ekonomi a. Pengembangan pusat industri kabupaten	Kecamatan Lekok; Kecamatan Kraton; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pohjentrek; dan Kecamatan Rembang.
	• PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL • PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko Penyediaan dan pengelolahan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kabupaten Pasuruan	b) Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan kawasan di sekitar pintu tol	Kecamatan Bangil; Kecamatan Beji; Kecamatan Gempol; Kecamatan Grati; Kecamatan Lekok; Kecamatan Nguling; Kecamatan Pandaan; dan Kecamatan Sukorejo.
	• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Tanaman Holtikultura Pengembangan Tanaman Perkebunan	Semua Kecamatan	c) Pengembangan Kawasan agropolitan;	Kecamatan Pandaan; Kecamatan Rembang;

RPJMD 2025 – 2029				RTRW (PERMEN ATR 11/2024)	
No	**PROGRAM PRIORITAS**	**KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKASI PROGRAM**	**LOKASI**
	• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN • PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengembangan Peternakan			Kecamatan Sukorejo.
	• PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP • PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya	Semua Kecamatan	b. Pengembangan Kawasan Minapolitan	Kecamatan Bangil; Kecamatan Rejoso; Kecamatan Lekok; dan Kecamatan Kraton
	• PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL • PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Obyek dan Pengelolaan Wisata Promosi Obyek Wisata Pengembangan Ekonomi Kreatif Peningkatan Pelaku Wisata	Semua Kecamatan	e. Pengembangan Koridor Pariwisata	Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; Kecamatan; Puspo; dan Kecamatan Tutur

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

2.3.2.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 merumuskan isu strategis pembangunan berkelanjutan prioritas berdasarkan hasil integrasi dari isu strategis menurut *Stakeholder* dan kebijakan terkait, isu lingkungan hidup dan isu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) prioritas. Rumusan isu strategis menurut dokumen tersebut adalah:

(1) Belum optimalnya peningkatan kualitas peserta didik pada sektor pendidikan dasar hingga menengah

(2) Belum optimalnya lapangan kerja dalam penyerapan tenaga kerja

(3) Belum optimalnya pelayanan di bidang kesehatan khususnya anak dan ibu hamil

(4) Belum optimalnya upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan IKM dan UMKM

(5) Kerawanan Pangan
(6) Keterbatasan akses sanitasi layak dan berkelanjutan serta belum optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah domestic.
(7) Pengoptimalan Tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan system pemerintahan yang cerdas (smart governance)
(8) Penurunan kualitas lingkungan
(9) Perlunya peningkatan upaya mitigasi bencana dalam mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim

Isu-isu strategis di atas harus diperhatikan dalam merumuskan isu strategis RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, sehingga upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terakomodasi dalam upaya pembangunan kabupaten dalam lima tahun mendatang. Selain itu, KLHS RPJMD Pasuruan Tahun 2025-2029 juga merekomendasikan beberapa hal untuk dilakukan dalam pembangunan tahun 2025-2029, khususnya oleh perangkat daerah terkait dalam upaya mencapai target indikator tujuan pembanguan berkelanjutan yang belum tercapai dana atau mempertahankan yang sudah tercapai. Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Pasuruan, perangkat daerah terkait juga harus merujuk/memperhatikan temuan serta rekomendasi dokumen ini.

2.3.2.7 Telaah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Daerah (RIPJPID) merupakan salah satu wujud dokumen strategis yang dirancang secara sistematis, menyeluruh, dan melibatkan partisipasi berbagai pihak. Dokumen ini memuat peran vital IPTEK, riset, dan inovasi dalam menghadapi tantangan prioritas pembangunan di tingkat regional. Hal ini merujuk pada Pasal 26 Ayat (1) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

Untuk memperkuat ekosistem penelitian dan inovasi di Kabupaten Pasuruan, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Prioritas pertama adalah pengembangan infrastruktur penelitian yang representatif, meliputi pembangunan PLUT untuk menunjang pengembangan kemudian sebagai laboratorium pengujian produk olahan

pertanian dan perikanan, serta pusat inovasi yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi UMKM. Infrastruktur ini harus didesain untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah secara *end-to-end*, mulai dari riset bahan baku hingga pengemasan akhir.

Aspek kedua adalah program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi berbasis kompetensi, pelatihan teknis bersertifikasi, serta program magang di industri terkait. Kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal dan nasional perlu diperdalam untuk menciptakan talent pool yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, perlu dibentuk suatu sistem manajemen pengetahuan daerah yang mampu mendokumentasikan, mengkurasi, dan mendiseminasikan hasil-hasil penelitian kepada para pelaku usaha dan pembuat kebijakan.

Dari sisi pendanaan, diperlukan komitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran litbang secara progresif, dengan mekanisme pendanaan yang fleksibel namun akuntabel. Skema pendanaan hibah kompetitif dapat diterapkan untuk mendorong partisipasi aktif dari akademisi dan pelaku usaha. Terakhir, penting untuk membangun jaringan kolaborasi yang melibatkan pemerintah pusat, investor, dan pasar global guna memperluas dampak ekonomi dari hasil-hasil inovasi lokal. Dengan paket kebijakan yang holistik ini, Kabupaten Pasuruan akan memiliki fondasi yang kuat untuk mentransformasi potensi lokal menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

2.3.2.8 Isu Strategis Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, baik makro maupun per urusan penyelenggaraan daerah, sebagaimana diuraikan subbab sebelumnya serta mempertimbangankan isu strategis internasional/global, nasional dan regional (Provinsi Jawa Timur), maka ditetapkan isu strategis pembangunan yang harus dijawab dalam rencana pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029:

1. **Penguatan stabilitas/ ketahanan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing daerah, pemenuhan infrastruktur pendukung ekonomi, hilirisasi potensi unggulan daerah berbasis riset dan inovasi.** Peningkatan daya saing dilakukan melalui peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi, khususnya sektor

unggulan daerah, sehingga pondasi perekonomian kuat dan mampu menyelesaikan permasalahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang berfluktuasi. Isu ini pun mencakup berbagai upaya pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM), usaha mikro dan kecil, serta peningkatan produktifitas pertanian (dalam arti luas) sehingga diharapkan mampu berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi – sebagaimana direkomendasikan oleh KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029. Rekomendasi dokumen RIPJPID untuk memperkuat ekosistem penelitian dan inovasi daerah dan dimanfaatkan seoptimial mungkin untuk mengembangkan produk unggulan berbasis pertanian (dalam arti luas) yang terintegrasi dengan sentra UKM atau IKM juga terakomodasi dalam isu strategis pertama ini. Isu strategis ini juga selaras dengan isu strategis Provinsi Jawa Timur, yaitu pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Jika disandingkan dengan isu strategis global dan nasional, isu ini selaras dengan tuntunan pencapaian SDGs dan rendahnya produktifitas tenaga kerja di tengah meningkatnya persaingan global.

2. **Penguatan kebijakan ekonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi investasi.** Isu ini mencakup penyelesaian permasalahan cenderung tingginya pengangguran Kabupaten Pasuruan. Saat investasi daerah meningkat, diharapkan tercipta pula kesempatan-kesempatan kerja baru yang mampu menurunkan pengangguran. Dalam rangka peningkatan investasi dibutuhkan kepastian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan, melalui peninjauan kembali RTRW Kabupaten Pasuruan dan penyusunan serta penetapan RDTR. Isu strategis ini juga mendukung isu strategis pertama, khususnya pada peningkatan daya saing daerah, sehingga isi ini selaras dengan isu strategis global, nasional, dan Provinsi Jawa Timur yang sama dengan isu strategis pertama pembangunan Kabupaten Pasuruan di atas.
3. **Penguatan pembangunan desa untuk keseimbangan pengembangan wilayah**. Isu strategis ini utamanya mencakup penyelesaian permasalahan ketimpangan pendapatan kabupaten yang masih terkategori sedang dan cenderung meningkat. Saat pembangunan di desa menguat, baik di bidang ekonomi maupun sosial, maka kapasitas aktifitas serta produktifitas ekonomi

sumberdaya di desa juga meningkat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkecil ketimpangannya dengan pendapatan masyarakat di wilayah perkotaan.

4. **Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah maupun lingkungan permukiman melalui perluasan akses rumah layak huni, sanitasi aman-layal-berkelanjutan, air minum perpipaan, dan pengelolaan persampahan dan limbah domestik.** Untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di atas, penyediaan infrastruktur yang mendukung sangat diperlukan. Ini menjawab permasalahan daerah bahwa pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana wilayan Kabupaten Pasuruan harus ditingkatkan di masa mendatang. Isu ini pun menjawab rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 bahwa keterbatasan akses sanitasi layak dan berkelanjutan serta belum optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah domestik sebagai salah satu isu paling strategis yang harus diselesaikan dalam pembangunan di periode tersebut.
5. **Peningkatan kecukupan konsumsi pangan berkelanjutan.** Isu strategis ini menjawab permasalahan daerah tentang tingkat kemiskinan yang masih perlu ditanggulangi serta rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 untuk meningkatkan produktifitas pertanian (dalam arti luas) sehingga diharapkan mampu berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan penanganan kerawanan pangan.
6. **Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (disabilitas, perempuan, dan anak) dan berpenghasilan rendah.** Isu strategis ini masih terkait dengan permasalahan daerah tentang tingkat kemiskinan yang masih perlu ditanggulangi, khususnya bagi kelompok termarginalkan. Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 untuk menangani kerawanan pangan melalui peningkatan produktiftas sektor pertanian dalam arti luas, juga terakomodasi dalam isu srategis ini.

   Isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan ke-3, 4, 5 6 di atas selaras dengan isu strategis regional (Provinsi Jawa Timur), yaitu penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja serta berbagai akses ke layanan dasar, pasar kerja, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta program-program ekonomi dan

kewirausahaan untuk mengatasi kemiskinan. Keempat isu strategis ini pun selaras dengan isu strategis Provinsi Jawa Timur lainnya, yaitu Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani. Sementara itu, isu strategis nasional dan global yang selaras dengan keempat isu di atas adalah pergeseran struktural kelas menengah, kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif dan tuntunan pencapaian SDGs.

7. **Penguatan modal dasar manusia untuk meningkatkan produktivitas daerah.** Isu strategis ini meliputi penyelesaian permasalahan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Pasuruan yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun nasional, termasuk di dalamnya penciptaan masyarakat yang beriman dan memiliki kesalehan sosial. Pembangunan manusia mencakup optimalisasi: (i) peningkatan kualitas pendidikan semua jenjang yang menjadi kewenangan kabupaten, (ii) pelayanan bidang kesehatan yang merata kepada seluruh golongan/kelompok masyarakat, dan (iii) upaya peningkatan pendapatan masyarakat, baik melalui peningkatan kesempatan kerja (baru) maupun peningkatan produktifitas seluruh aktifitas/sektor ekonomi masyarakat. Isu strategis ini sejalan dengan rekomendasi isu (paling) strategis ke-1, 2, 3 dan 4 yang diajukan dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

   Isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan ke-7 ini selaras dengan isu strategis Provinsi Jawa Timur, yaitu pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas. Isi strategis ini pun selaras dengan isu strategis nasional dan global, yati rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tuntutan untuk mencapai SDGSs.

8. Pengembangan sumber energi baru terbarukan untuk ketahanan energi. Isu stratgeis ini merupakan isu lingkungan pertama yang harus dijawab dalam pembangunan lima tahun ke depan, mengingat kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan relatif rendah dibandingkan rata-rata di Jawa Timur maupun nasional. Seiring dengan percepatan aktivitas ekonomi dan industrialisasi (sektor usaha baru bertambah) di Kabupaten Pasuruan, maka kebutuhan akan sumber energi yang ramah lingkungan (energy baru terbarukan)

menjadi semakin besar yang harus dipenuhi di masa mendatang demi keberlanjutan pembangunan.

9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menjaga keanekaragaman hayati. Isu ini merupakan isu strategis lingkungan kedua yang harus dijawab dalam pembangunan Kabupaten Pasuruan 2025-2029. Kerawanan pangan yang masih relatif tinggi di Kabupaten Pasuruan dan degradasi lingkungan hidup – khususnya alih fungsi lahan petanian, merupakan tantangan terkait lingkungan yang cukup besar untuk mencapai ketahanan pangan daerah.
10. Peningkatan ketahanan daerah dalam mengurangi risiko bencana yang responsif terhadap cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. Ini merupakan isu strategis lingkungan ketiga di Kabupaten Pasuruan yang harus ditangani dalam pembangunan periode 2025-2029. Dampak perubahan iklim merupakan faktor eksternal yang sulit dikendalikan, sehingga upaya mitigasinya sebisa mungkin lebih diutamakan daripada upaya menanganinya agar pembangunan daerah terus berjalan dan meningkat.

    Isu strategis ke-8, 9 dan 10 pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ini selaras dengan isu strategis Provinsi Jawa Timur, nasional, maupun internasional yang menuntut peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam memitigasi dan menangangi dampak perubahan iklim. Isu penurunan kualitas lingkungan serta perlunya peningkatan upaya mitigasi bencana dan mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim juga menjadi rekomendasi isu paling strategis KLHS yang harus dijawab dalam pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029.
11. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif berbasis elektronik. Hal ini menjadi isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan ke depan karena indeks reformasi birokrasi kabupaten yang harus ditingkatkan serta tuntutan yang sama oleh pemerintahan provinsi maupun nasional. Isu serupa, yaitu pengoptimalan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan sistem pemerintahan yang cerdas (*smart governance*), juga menjadi salah satu rekomendasi isu paling strategis yang harus diselesaikan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Dengan demikian, isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 ini telah dirumuskan berdasarkan kondisi terkini pembangunan daerah, baik internal maupun eksternal, serta selaras dengan isu strategis global, nasional, regional (Provinsi Jawa Timur). Secara lebih detail, keselarasan isu strategis tersebut dapat dilihat di Tabel 2.80.

Tabel 2.80
Keselarasan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan dengan Isu Strategis Global, Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Permasalahan Pembangunan Makro Daerah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Sektor ekonomi strategis prioritas (sesuai RTRW): - industri - pariwisata - pertanian	Pertumbuhan ekonomi belum stabil	Belum optimalnya upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan IKM dan UMKM	Globalisasi Ekonomi dan Ketidakpastian Perekonomian Global	Risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global	Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah	Penguatan stabilitas/ ketahanan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing daerah, pemenuhan infrastruktur pendukung ekonomi, hilirisasi potensi unggulan daerah berbasis riset dan inovasi
	Kesenjangan pendapatan masyarakat relatif masih tinggi di Jawa Timur		Geopolitik dan Geoekonomi			Penguatan kebijakan ekonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi investasi
						Penguatan pembangunan desa untuk keseimbangan pengembangan wilayah
	Angka kemiskinan berfluktuatif	Kerawanan Pangan	Sustainable Development Goals	Pergeseran struktural kelas masyarakat di mana jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja	Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (disabilitas, perempuan, dan anak) dan berpenghasilan rendah
					Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kecukupan konsumsi pangan berkelanjutan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	TPT relatif tinggi di Jawa Timur	Belum optimalnya lapangan kerja dalam penyerapan tenaga kerja	Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi	Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif		
				Rendahnya produktivitas tenaga kerja		
	IPM di bawah rata-rata Jawa Timur	Belum optimalnya peningkatan kualitas peserta didik pada sektor pendidikan dasar hingga menengah		Rendahnya kualitas sumberdaya manusia	Pengembangan SDM berkualitas	Penguatan modal dasar manusia untuk meningkatkan produktivitas daerah
		Belum optimalnya pelayanan di bidang kesehatan khususnya anak dan ibu hamil				
	Kualitas lingkungan hidup relatif di bawah Jawa Timur	Penurunan kualitas lingkungan	Perubahan Iklim Dunia	Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam	Peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk menjaga keanekaragaman hayati
		Perlunya peningkatan upaya mitigasi bencana dalam mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim				Peningkatan ketahanan daerah dalam mengurangi risiko bencana yang responsif terhadap cuaca ekstrem akibat perubahan iklim
	Kualitas infrastrukstur wilayah cukup rendah	Keterbatasan akses sanitasi layak dan berkelanjutan serta belum optimalnya				Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah maupun lingkungan permukiman

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
		pengelolaan persampahan dan limbah domestik				melalui perluasan akses rumah layak huni, sanitasi aman-layak-berkelanjutan, air minum perpipaan, dan pengelolaan persampahan dan limbah domestik
						Pengembangan sumber energi baru terbarukan untuk ketahanan energi
	Tata kelola pemerintahan yang belum efektif dan efisien	Pengoptimalan Tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan system pemerintahan yang cerdas (smart governance)		Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang masih diwarnai praktek korupsi	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif berbasis elektronik

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi pada dokumen RPJMD ini dirumuskan berdasarkan pada Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **H.M. Rusdi Sutejo** dan **H.M.Shobih Asrori** yang telah dilantik secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. Secara substansi, Visi, Misi dan Program Prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan komitmen yang harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) agar dapat diwujudkan secara konsisten selama 5 (lima) tahun.

Selanjutnya, Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan dengan memperhatikan Permasalahan Pembangunan Daerah serta Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan. Proses elaborasi antara gagasan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kondisi empiris permasalahan pembangunan dan Isu Strategis Daerah sangat penting untuk memastikan bahwa strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan 2025-2029 merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasuruan.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 yang diemban Kabupaten Pasuruan dalam jangka waktu 20 tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan adalah : "***Kabupaten Pasuruan Cemerlang 2045 : Maju, Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan*".**

Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Kabupaten Pasuruan yang sangat dinamis dan dapat mengalami

pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor. Oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, dalam hal ini periode 2025-2029, didasarkan pada Visi Jangka Panjang dan tetap mencerminkan kondisi daerah dan masyarakat saat ini.

Mengacu pada hasil telaah pada Visi RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 serta permasalahan pembangunan, isu strategis pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Cita-cita (visi) tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang berakhlak, maju, adil, makmur dan sejahtera, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari perumusan misi, penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah :

“Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”

Visi tersebut mengandung tiga pokok visi yang merupakan gambaran atas kondisi Kabupaten Pasuruan yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu ***“Maju”***, ***“Sejahtera”***, dan ***“Berkeadilan”***. Secara substansi, penjelasan dari ketiga pokok visi antara lain sebagai berikut:

1. Pokok visi **“Maju”,** mengandung makna dan sekaligus spirit bahwa Kabupaten Pasuruan ke depan harus mengalami ***“Kemajuan di Segala Bidang”***. Kemajuan tersebut dicerminkan dengan semakin tinggi dan mudahnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, kesempatan kerja yang merata dan layanan publik lainnya yang berkualitas. Berbagai kemajuan tersebut didukung dengan layanan infrastruktur dan pondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pembangunan (*Good Governance*). Kondisi ini juga didukung dengan terjalinnya kemitraan ***Hexahelix***, yaitu konsep kolaborasi yang melibatkan enam pihak, yang terdiri atas *pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, lingkungan*

hidup, dan *media massa*. Konsep ini akan menjadi stimulus berbagai sektor, seperti inovasi pelayanan publik, pengembangan pariwisata, dan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Implementasi konsep ini juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna mengoptimalkan kolaborasi dalam membangun daerah. Pelayanan publik pun telah berbasis teknologi informasi (Digital) yang didukung oleh aparatur pemerintahan yang lebih adaptif, professional dan humanis dalam menghadapi kondisi/kebutuhan masyarakat dan daerah yang berubah cepat (*Volatility), ketidakpastian (Uncertainty), komoleksitas atau kerumitan (Complexcity)*, dan ketidakjelasan (*Ambigue)*. Pada sisi lain, pokok visi ***"maju"*** juga bermakna bahwa pondasi cara berpikir dan berperilaku sumberdaya manusia Kabupaten Pasuruan yang maju, yaitu sumberdaya manusia yang beriman dan berbudaya serta masyarakat yang saleh yang tercermin dari kondisi masyarakat yang tertib, tentram dan harmonis.

2. Pokok visi ***"Sejahtera"*** menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari perekonomian daerah yang kuat dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat terus meningkat, Indeks Pembangunan Manusia meningkat serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Pokok Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (*equality*). Hal ini tercermin dari peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pembangunan yang merata dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Perekonomian daerah Kabupaten Pasuruan pun mulai kuat dengan produk asli Pasuruan yang kompetitif dan situasi yang kondusif untuk berusaha maupun berinvestasi. Dukungan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan pendukung pembangunan ekonomi dan sosial pun telah cukup tinggi.

3. Pokok visi ***"Berkeadilan"*** bermakna kondisi Kabupaten Pasuruan dengan ketimpangan sosial, ekonomi dan wilayah yang semakin mengecil. Pembangunan yang berpihak kepada kelompok masyarakat atau wilayah marginal terlihat jelas, sehingga kesetaraan gender dan perekonomoian yang inklusif juga meningkat signifikan. Keadilan pembangunan antar generasi pun terlihat dengan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan. Pokok visi ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan tanpa terkecuali (*No One Left Behind*).

Sesuai amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, visi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten harus selaras dengan visi pembangunan jangka menengah nasional maupun provinsi, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur. Gambar 3.1 memperlihatkan persandingan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasuruan dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur dan nasional.



Gambar 3.1. Persandingan Visi Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan Jangka Panjang dan Menengah

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029

dengan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045

RPJMD 2025-2029	Arah Pembangunan RPJPD	Agenda/Transformasi RPJPD
Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat	Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Stabilitas Daerah, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	
	Stabilitas, Demokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	
Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tranformasi Pembangunan yang Inklusi
	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Pemerataan pembangunan Yang Berkelanjutan serta Berkesinambungan
	Penerapan Ekonomi Hijau	
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	
	Lingkungan Hidup Berkualitas	
	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	
Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif	Layanan dan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Masyarakat	Sumberdaya Manusia Unggul dan Berdaya Saing
	Pendidikan Berkualitas Yang Merata	
	Transformasi Digital	
	Daya Saing Investasi	
	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	
Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	Birokrasi Yang Melayani

RPJMD 2025-2029	Arah Pembangunan RPJPD	Agenda/Transformasi RPJPD
Pilar Membangun Daerah		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang Lebih Profesional dan Humanis		

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

3.1.2 Misi Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

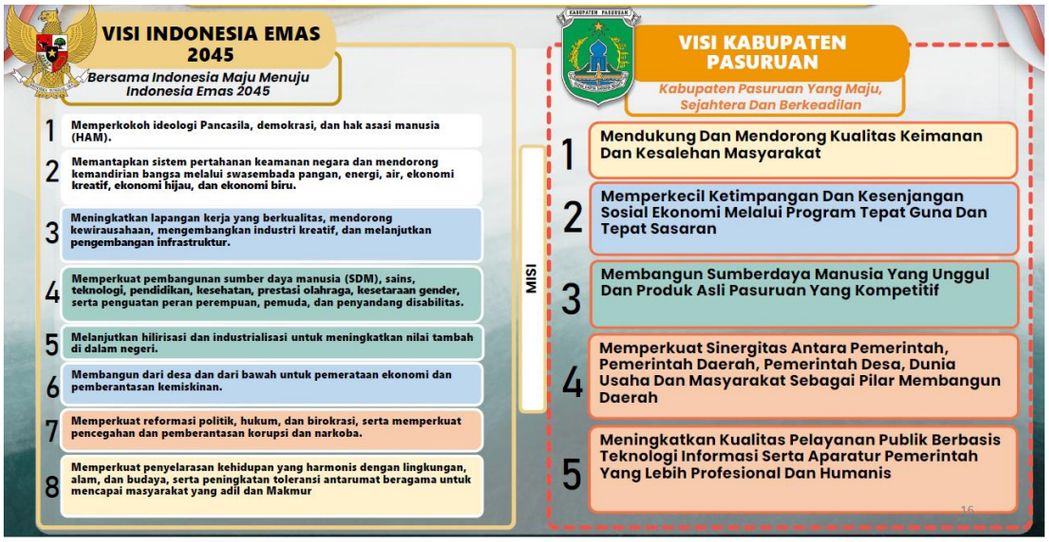
1. ***Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat***. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "**maju**" dan "**berkeadilan**". Pembangunan ketahanan sosial, khususnya pada penciptaan masyarakat yang rukun, tertib, tenteram dan terlindungi menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini. Pembangunan budaya dan kesetaraan gender juga merupakan fokus lainnya dari misi ini.
2. ***Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran***. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi ***"berkeadilan"*** dan ***"sejahtera"***. Penyelenggaraannya dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta berpihak pada kelompok masyarakat dan wilayah yang marginal sehingga mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dan daerah. Untuk mendukungnya, pembangunan infrastrutur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan, serta penciptaan suasana yang kondusif untuk berusaha dan berinvestasi juga menjadi fokus pada penyelenggaran misi kedua ini.
3. ***Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif.*** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "**sejahtera**" dan "**maju**". Fokus dari

penyelenggaraan misi ini adalah pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun produktifitas (kegiatan ekonomi) individu, keluarga, dan masyarakat. Produktifitas kegiatan/sektor ekonomi yang dimaksud khususnya difokuskan pada sektor atau produk asli daerah atau produk unggulan daerah yang potensial. Dengan penyelenggaraan misi ini diharapkan kualitas sumberdaya manusia maupun produk asli Kabupaten Pasuruan meningkat dan mampu bersaing/kompetitif (unggul). Dalam penyelenggaraan misi ini, optimalisasi peningkatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi (termasuk TIK) serta inovasi daerah menjadi keharusan.

4. ***Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah.*** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "**maju**" dan dilakukan melalui peningkatan kolaborasi dan partisipasi seluruh *stakeholders* dalam proses pembangunan, baik dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan, maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini sehingga kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* lainnya pun meningkat serta mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam pembangunan di seluruh sektor.
5. ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang Lebih Profesional dan Humanis.*** Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "**maju**". Fokus penyelenggaraan dari misi adalah pada perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi atau optimaliasi pemanfaatan TIK di dalamnya. Penciptaan aparatur yang professional, melayani dan *agile*, khususnya dalam pemberian pelayanan publik juga menjadi fokus dalam penyelenggaraan misi ini.

Misi pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 ini juga harus selaras dengan misi pembangunan pemerintaha level atasnya. Gambar 3.2 memperlihatkan persandingan misi

pembangunan Kabupaten Pasuruan dengan misi pembangunan nasional (Asta Cita).



Gambar 3.2. Persandingan Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029
Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 2 tahun 2025, Tujuan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi sekaligus kinerja yang ingin dicapai selama periode perencanaan yang selaras dengan tahap pertama RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sementara itu, Sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Dengan demikian, ketercapaian visi tahun 2029 akan terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang dimaksud disajikan di bawah ini.

Tujuan Satu : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan

Keberhasilan tujuan pembangunan ini diukur melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan ini dirumuskan dua sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal, dengan ukuran keberhasilan meningkatnya Indeks Kebudayaan Daerah.
2. Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat, dengan ukuran Indeks Ketimpangan Gender yang semakin mengecil.

Tujuan pertama dengan dua sasaran ini diharapkan tercapai utamanya melalui penyelenggaraan misi pertama pembangungunan, yaitu ***Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat.***

Tujuan, Sasaran dan Indikator
TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN MENJUNJUNG NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN
Indeks Kerukunan Umat Beragama
1.1. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Toleran Berlandaskan Budaya Dan Kearifan Lokal
Indeks Kebudayaan Daerah
1.2. Meningkatnya Kesetaraan Dalam Masyarakat
Indeks Ketimpangan Gender

Tujuan Dua : Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Indikator kinerja tujuan kedua ini adalah (1) Pertumbuhan Ekonomi semakin meningkat dan/atau stabil, dan (2) Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan yang semakin menurun. Untuk mencapai tujuan ini, dirumuskan lima sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis yang diukur melalui kontribusi atau rasio sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan.
2. Meningkatnya daya saing investasi daerah yang diukur melalui (1)ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) dan (2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).
3. Meningkatnya kualitas lingkungan yang diukur melalui (1)peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif.
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah, diukur dengan indeks infrastruktur wilayah yang semakin meningkat.

5. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang diukur melalui (1)Pendapatan per kapita masyarakat yang semakin meningkat dan (2)Tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun.

Tujuan kedua dengan lima sasaran ini diharapkan tercapai utamanya melalui penyelenggaraan misi kedua pembangunan, yaitu ***Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran.***

Tujuan, Sasaran dan Indikator
TERWUJUDNYA PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
Pertumbuhan Ekonomi
Rasio Gini
Tingkat Kemiskinan
2.1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Ekonomi Strategis
Rasio PDRB Industri Pengolahan
2.2 Meningkatnya Daya Saing Investasi
Incremental Capital Output Rasio (ICOR)
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
2.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Penurunan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) Kumulatif
2.4 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah
Indeks Infrastruktur Wilayah
2.5 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
PDRB Perkapita
Tingkat Pengangguran Terbuka

Tujuan Tiga : Meningkatnya Daya Saing Daerah

Tujuan pembangunan ketiga ini tercapai manakala indikator kinerjanya, yaitu Indeks Daya Saing Daerah meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mencapai tujuan ini, dirumuskan dua sasaran yaitu:
(1) Meningkatnya sumberdaya manusia (SDM) yang unggul, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat.

(2) Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi yang diukur dengan meningkatnya Indeks Masyarakat Digital Indonesia.

Tujuan ketiga dengan dua sasarannya ini diharapkan tercapai utamanya melalui penyelenggaraan misi ketiga pembangungunan, yaitu ***Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif.***

Tujuan, Sasaran dan Indikator
MENINGKATNYA DAYA SAING DAERAH
Indeks Daya Saing Daerah
3.1 Meningkatnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang unggul
Indeks Pembangunan Manusia
3.2 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi
Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Tujuan Empat : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Ketercapaian tujuan pembangunan keempat ini diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai tujuan ini, dirumuskan tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa yang diukur melalui peningkatan (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan (2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya partisipasi *stakeholders* dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang diukur melalui indikator Indeks Kualitas Kebijakan, yang meningkat dari tahun ke tahun.
3. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang humanis, diukur melalui indikator (1) Indeks Pelayanan Publik dan (2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Indeks Pemerintahan Digital yang diupayakan terus ditingkatkan.

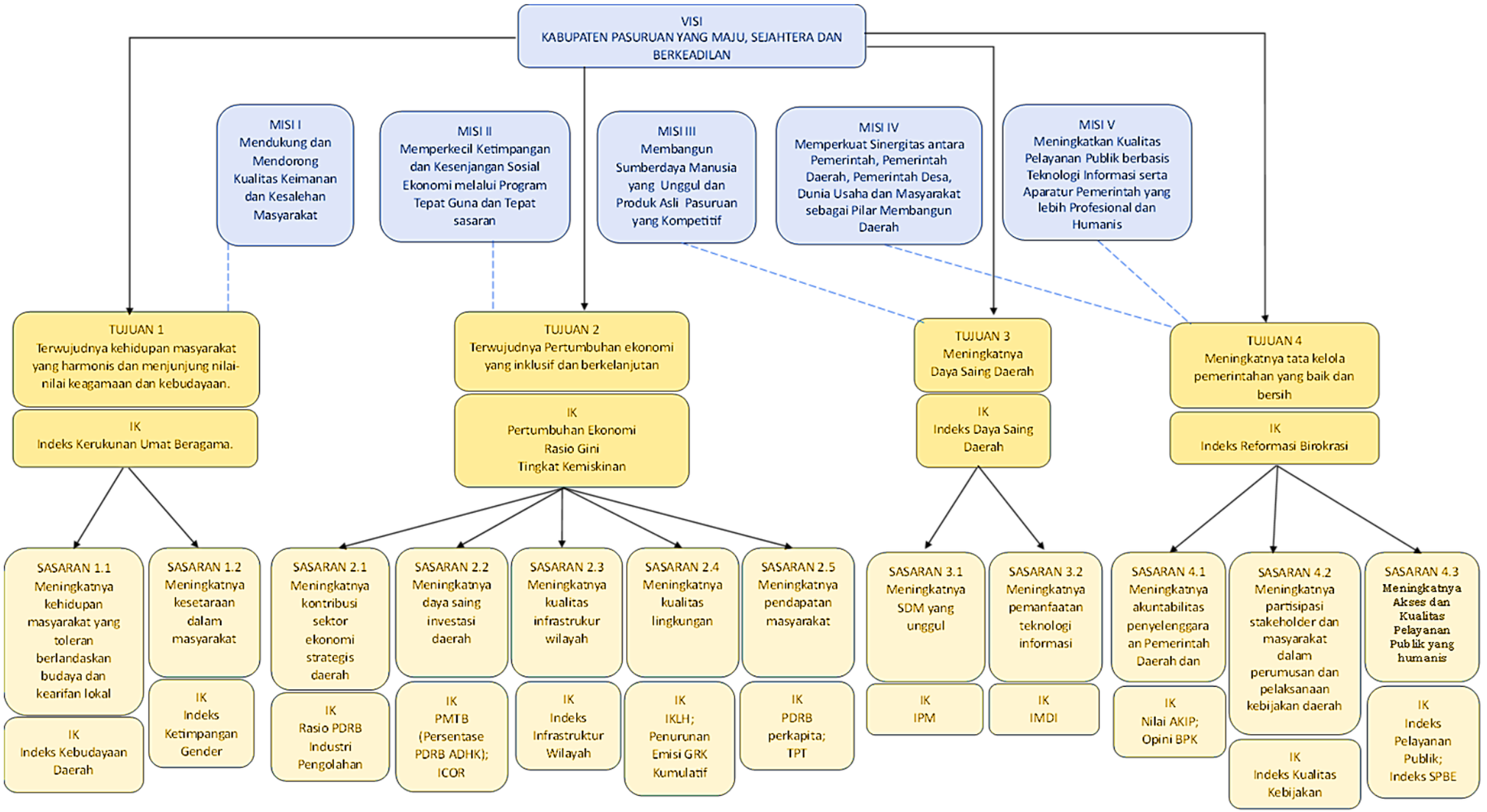
Tujuan keempat dengan tiga sasarannya ini diharapkan tercapai melalui penyelenggaraan misi keempat dan kelima pembangunan, yaitu ***Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah*** dan ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan***

Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang Lebih Profesional dan Humanis.

Tujuan, Sasaran dan Indikator
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
Indeks Reformasi Birokrasi
4.1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Opini BPK
4.2 Meningkatnya partisipasi *stakeholders* dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah
Indeks Kualitas Kebijakan
4.3 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang humanis
Indeks Pelayanan Publik
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Indeks Pemerintahan Digital

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan misi pendukung pencapaiannya terlihat pada Gambar 3.3. Sementara itu, ringkasan Rumusan Tujuan dan Sasaran, indikator kinerja dan target capaiannya selama periode perencanaan disajikan pada Tabel 3.1.

Gambar 3.3. Keterekaitan Visi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Misi Pendukung



Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Pasuruan serta Target Indikator Tahun 2025 – 2030

VISI / MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI : "KABUPATEN PASURUAN YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN" **Misi 1: Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat** **Misi 2 : Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial ekonomi melalui Program Tepat**	1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan.			**1**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	**81,82**	**82,19**	**82,94**	**83,69**	**84,44**	**85,19**	
			1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal.	1	Indeks Kebudayaan Daerah	59,61	61,07	62,54	64,00	65,47	66,93	
			2	Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat.	1	Indeks Ketimpangan Gender	0,335	0,324	0,313	0,308	0,291	0,280	
	2	Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			**1**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**4,15-5,40**	**4,23-5,45**	**4,26-5,70**	**4,42-5,93**	**4,49-6,38**	**4,54-6,51**	
					2	**Rasio Gini**	**0,318-0,358**	**0,317-0,357**	**0,316-0,356**	**0,315-0,355**	**0,313-0,353**	**0,312-0,352**	
					3	**Tingkat Kemiskinan**	**7,14-8,39**	**7,1-8,12**	**6,96-7,77**	**6,81-7,5**	**4,73-7,05**	**4,46-6,16**	
			1	Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis daerah	1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	60,66	60,68	60,69	60,70	60,72	60,73	
			2	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)	27,62-30,15	27,80-30,16	27,86-30,17	27,90-30,18	27,93-30,20	27,95-30,21	

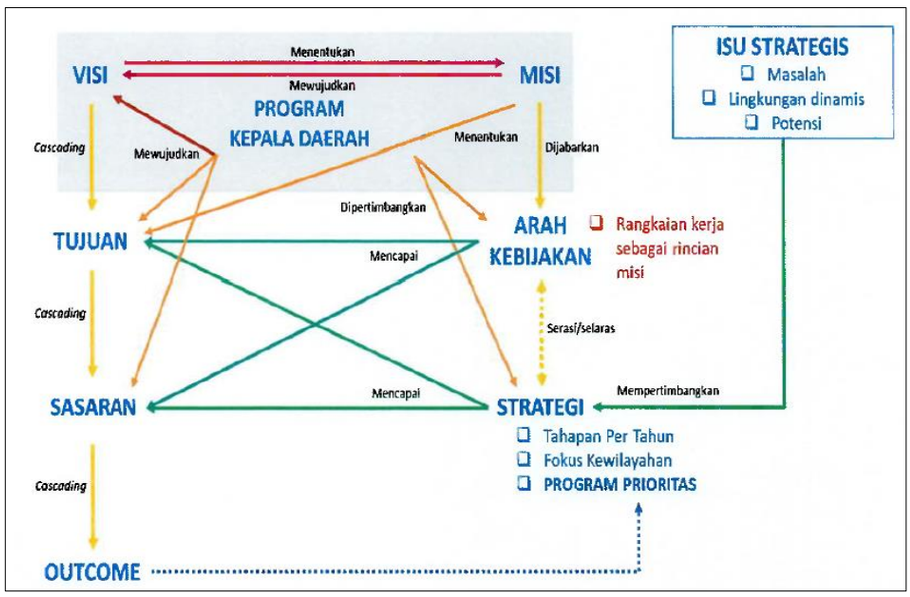
VISI / MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Guna dan Tepat sasaran **Misi 3 : Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif** **Misi 4 : Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah**					2	Incremental Capital Output Ratio	6,03	6,01	5,96	5,91	5,87	5,82	
			3	Meningkatnya kualitas infrastrukur wilayah	1	Indeks Infrastruktur Wilayah	68,76	68,79	68,82	68,85	68,88	68,90	
			4	Meningkatnya kualitas lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,68	71,76	71,84	71,92	72,00	72,08	
					2	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2 eq)	4.143,26	4.226,12	4.310,65	4.396,86	4.484,8	4.575,49	
			5	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1	PDRB Perkapita (Juta Rp)	121,89 - 128,16	122,23 - 130,33	122,83 - 138,11	123,21 - 144,07	123,91 - 151,98	124,19 - 158,94	
					2	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,38-4,67	5,37-4,43	5,36-4,19	5,25-4,01	5,19-3,91	5,13-3,83	
	3	Meningkatnya Daya Saing Daerah			**1**	**Indeks Daya Saing Daerah**	3,42	3,48	3,54	3,60	3,66	3,72	
			1	Meningkatnya SDM yang unggul	1	Indeks Pembangunan Manusia	72.21-72,56	72,28-72,88	72,54-73,44	72,81-74,01	73,07-75,27	73,44-76,00	
			2	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	1	Indeks Masyarakat	44,00	44,60	45,20	45,80	46,40	47,00	

VISI / MISI	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang lebih Profesional dan Humanis						Digital Indonesia							
	4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			1	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**84,80**	**86,20**	**87,70**	**89,10**	**90,50**	**92,00**	
			1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa	1	Nilai AKIP	77,66	78,67	80,07	80,77	81,26	81,89	
					2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			2	Meningkatnya partisipasi stakeholder dan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	1	Indeks Kualitas Kebijakan	58,79	61,03	63,28	65,52	67,76	70	
			3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang humanis	1	Indeks Pelayanan Publik	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56	4,57	
					2	Indeks SPBE/ Indeks Pemerintahan Digital *)	4,18	1,6 - 1,92	1,7 - 2,07	1,8 - 2,21	1,9 - 2,36	2,0 - 2,5	

Sumber: Bappelitbangda, 2025
Ket : *) mulai tahun 2026 indeks SPBE diganti indeks pemerintahan digital sehingga target disesuaikan.
Target kinerja di tahun 2030 merupakan tanggungjawab / kinerja dari kepala daerah selanjutnya.

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya/kerja yang diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang. Konsep perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan disajikan pada gambar 3.2.1.



Gambar 3.2.1.Konsep Perumusan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan RPJMD
Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

3.2.1. Strategi Pembangunan Kabupaten Pasuruan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa **optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas** dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

3.2.1.1. Strategi Optimalisasi Sumber Daya

Strategi berupa optimalisasi sumber daya daerah untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD lima tahun mendatang dirumuskan sebagai berikut:

SASARAN	STRATEGI (ST)
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Toleran Berlandaskan Budaya dan Kearifan Lokal	**(ST-01)** Menciptakan Situasi yang Aman, Kondusif dan Demokratis melalui Optimalisasi Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, Peningkatan Kerukunan Hidup

SASARAN	STRATEGI (ST)
	Beragama dan Kehidupan Demokratis, serta Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal.
Meningkatnya Kesetaraan dalam Masyarakat	**(ST-02)** Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Ketahanan Keluarga
Meningkatnya Kontribusi Sektor Ekonomi Strategis	**(ST-03)** Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri, Pariwisata, dan Pertanian (dalam Arti Luas) dan Produk Unggulan Daerah
Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	**(ST-04)** Menciptakan Situasi Kondusif untuk Investasi Daerah
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	**(ST-05)** Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan	**(ST-06)** Mengoptimalkan Upaya Pengendalian/ Mitigasi Kerusakan Lingkungan dan Rehabilitasinya
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	**(ST-07)** Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Usaha Mikro serta Masyarakat Miskin
Meningkatnya SDM yang unggul	**(ST-08)** Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Peningkatan Pelayanan dan Akses Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas Merata dan Berkeadilan
Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi	**(ST-09)** Peningkatan Kualitas Riset dan Inovasi, Optimalisasi Pemanfaatan Inovasi, Teknologi Tepat Guna serta Teknologi Informasi dan Komunikasi
Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dan Masyarakat Dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah	**(ST-10)** Meningkatkan Kerjasama dan Mengoptimalkan Peran Stakeholders (Pengusaha, Lembaga / Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah Lain, Individu Masyarakat, Akademisi) dalam Pembangunan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa	**(ST-11)** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Penyederhanaan Regulasi, Penataan Kelembagaan yang Tepat Fungsi, Managemen ASN Berbasis Sistem Merit
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang Humanis	

3.2.1.2. Penahapan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2026-2030.

Penahapan pembangunan merupakan *Milestone* pembangunan secara berkelanjutan. Tahapan pembangunan mempertimbangkan sasaran pokok dan penahapan pembangunan daerah pada Tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 serta penahapan pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029. Secara detil, penahapan pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1
Penahapan Pembangunan Pembangunan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2026-2030

TAHAP I (Tahun 2026)	TAHAP II (Tahun 2027)	TAHAP III (Tahun 2028)	TAHAP IV (Tahun 2029)	TAHAP V (Tahun 2030)
Hilirisasi dan peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui integrasi dan kolaborasi lintas sektoral.	**Penguatan Daya Saing Daerah melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya daerah.**	**Penguatan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan dukungan kolaborasi vertikal dan horizontal**	**Penguatan Daya Saing Daerah Level Regional Berkelanjutan melalui Peningkatan kesejateraan masyarakat dan penguatan pembangunan berkelanjutan berbasis riset dan inovasi.**	**Peningkatan Level Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui konsolidasi capaian RPJMD menuju akselerasi transformasi Kabupaten Pasuruan**

Sumber: Bappelitbangda, 2025

Tabel 3.2.1 memperlihatkan bahwa pembangunan Kabupaten Pasurusan di tahun 2026 dan 2027 lebih difokuskan atau bertema pembangunan ekonomi daerah yang harus didukug oleh pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukungnya. Jika pada tahun 2026 lebih menekankan pada berbagai upaya hilirisasi dan peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi, maka pada tahun 2027 lebih ditekankan pada pembangunan infrastruktur wilayah (berwawasan lingkungan) yang mendukung pembangunan ekonomi. Jika dikaitkan dengan misi pembangunan, maka fokus pembangunan di dua tahun pertama ini adalah pada penyelenggaraan misi kedua.

Pada dua tahun berikutnya (tahun 2028 dan 2029), pembangunan lebih difokuskan atau bertemakan pembangunan kapasitas sumberdaya daerah, mencakup pengembangan sumberdaya manusia dan sosial lainnya, pembangunan infrastruktur pendukungnya, termasuk optimalisasi pemanfaatan Iptek dan inovasi daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah. Jika dikaitkan dengan misi

pembangunan, maka fokus pembangunan di dua tahun kedua ini adalah pada penyelenggaraan misi pertama dan ketiga.

Sementara itu, di tahun 2030, saat transisi kepemimpinan kepala daerah sekaligus memasuki pembangunan jangka panjang tahap II, tema pembangunan diletakkan pada konsolidasi capaian RPJMD menuju akselerasi transformasi Kabupaten Pasuruan.

3.2.1.3. Strategi : Lokus Pembangunan Wilayah

Perumusan strategi pembangunan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi daerah, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Strategi/kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah dan mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

3.2.1.3.1. Strategi/Kebijakan Kewilayahan Regional pada RPJMN Tahun 2025 -2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Provinsi Jawa Timur menjadi *center of gravity* ekonomi kawasan timur Indonesia, tumbuh menjadi kawasan strategis berskala nasional karena memiliki kekuatan pasar (*market strength*). Kekuatan pasar tersebut didukung oleh modal industri yang bertumbuh pesat seperti industri manufaktur dan *consumer goods*, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metalurgi. Berbagai modal industri tersebut kedepannya wilayah Provinsi Jawa Timur akan berkembang menjadi megapolitan, metropolitan dan pusat aglomerasi. Pertumbuhan yang pesat tersebut perlu didukung dengan berbagai kebijakan sehingga mampu menciptakan keterpaduan pembangunan antar sektor.

Secara umum, strategi/kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur yatu:

1) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan.

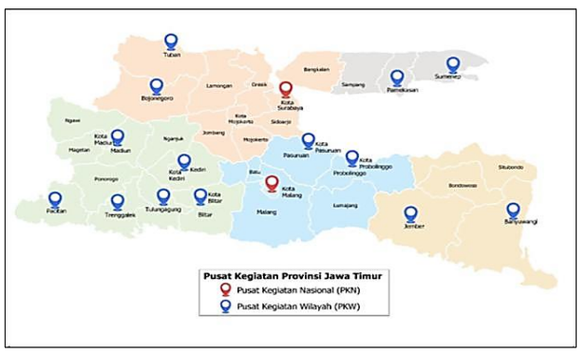
2) Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, serta kehutanan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3) Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan transportasi dalam rangka mendukung mobilitas orang dan barang, peningkatan layanan dasar permukiman, peningkatan layanan infrastruktur sumber daya air, dan peningkatan jaringan prasarana lainnya.
4) Peningkatan jaringan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan sistem permukiman serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif.
5) Penguatan peran kawasan metropolitan terintegrasi dengan kawasan agropolitan, kawasan industri dan gugusan kawasan pegunungan.
6) Percepatan keseimbangan pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.
7) Peningkatan preservasi dan konservasi pada kawasan lindung dengan prinsip pelestarian *geodiversity*, *biodiversity*, *culture diversity* dan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap penanggulangan bencana.
8) Optimalisasi peran kawasan budidaya yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi serta daya dukung daya tampung lingkungannya.
9) Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
10) Pemaduserasian antara koridor pertumbuhan wilayah ruang darat, ruang laut, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, sebagai bentuk nilai tambah sinergitas, disertai Kawasan pertahanan keamanan melalui pengaturan kelembagaan, pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan memperhatikan kerawanan terhadap bencana serta adaptasi perubahan iklim.
11) Perwujudan kawasan strategis provinsi yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap

kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

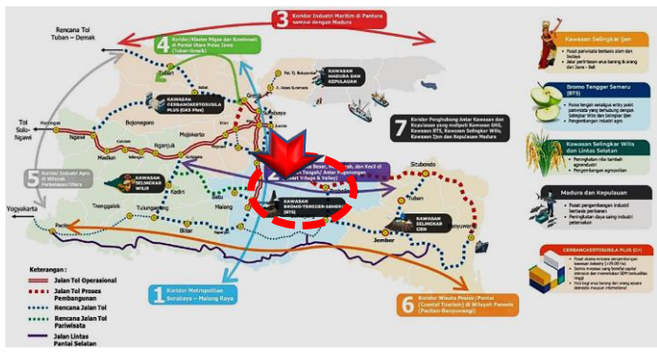
12) Harmonisasi dan penyelarasan pengembangan wilayah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan Bali melalui kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan penyediaan sarana prasarana.

13) Pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dengan sentra pertumbuhan kelautan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antarwilayah dan mengurangi disparitas wilayah melalui integrasi konektivitas pada tujuh koridor pengembangan wilayah, yaitu:

    a) Koridor Metropolitan Surabaya – Malang Raya;
    b) Koridor kota besar, menengah dan kecil di wilayah tengah/antar pegunungan (*Smart Village Valley*);
    c) Koridor industri maritim di Pantura sampai dengan Madura;
    d) Koridor/klaster migas dan kondensat di pantai utara pulau jawa (Tuban – Gresik);
    e) Koridor industri agro di wilayah perbatasan/utara;
    f) Koridor wisata pesisir/pantai (coastal tourism) di Wilayah Pansela (Pacitan – Banyuwangi);
    g) **Koridor penghubung antar kawasan dan kepulauan yang meliputi Kawasan Gerbangkertasusila (GKS), Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), Kawasan Selingkar Wilis, Kawasan Ijen dan Kepulauan Madura.**



Gambar 3.2.2.
Koridor Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Timur



Gambar 3.2.3.
Peta Persebaran Pusat Kegiatan Provinsi Jawa Timur

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

Pusat Pertumbuhan Wilayah (PKN & PKW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 terdapat kawasan perkotaan yang berfungsi menjadi Pusat Kegiatan. Adapun pusat kegiatan tersebut meliputi Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah.

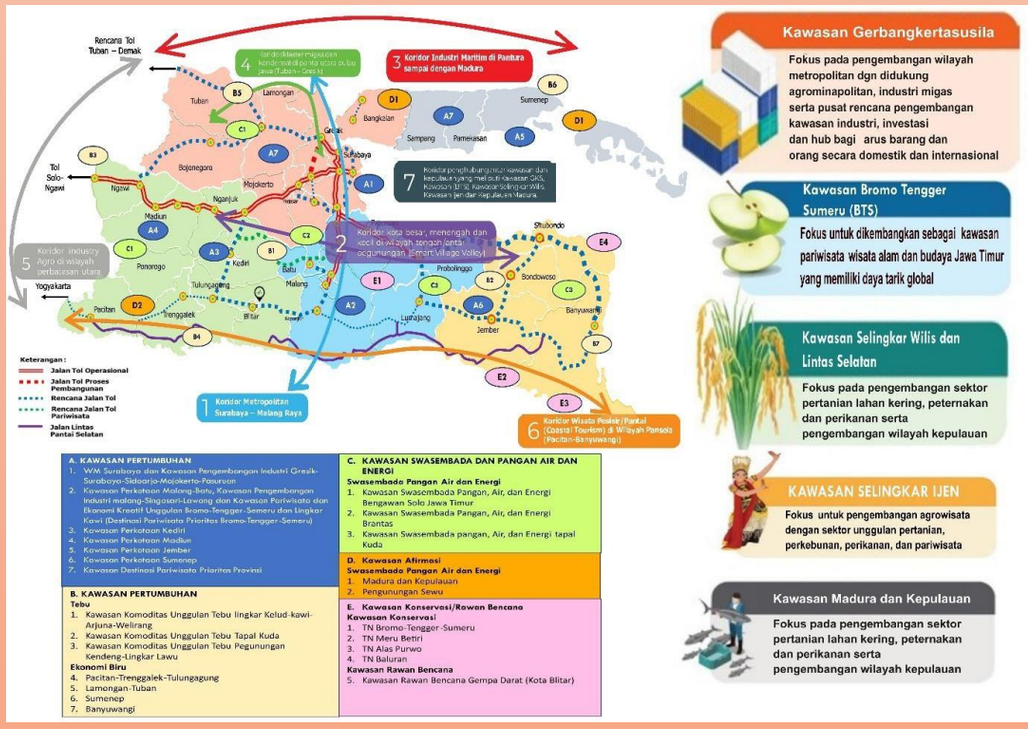
1. **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**

   PKN merupakan kawasan permukiman yang diklasifikasikan sebagai pusat kegiatan dengan fungsi melayani kegiatan skala internasional, lingkup nasional, atau melayani beberapa provinsi. PKN di Provinsi Jawa Timur berada di Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Kawasan Perkotaan Malang.

2. **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**

   PKW merupakan kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani lingkup kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota disekitarnya. PKW di Provinsi Jawa Timur berada di:

   1) Kabupaten Banyuwangi di Perkotaan Banyuwangi;
   2) Kabupaten Bojonegoro di Perkotaan Bojonegoro;
   3) Kabupaten Jember di Perkotaan Jember;
   4) Kabupaten Pacitan di Perkotaan Pacitan;
   5) Kabupaten Pamekasan di Perkotaan Pamekasan;
   6) Kabupaten Sumenep di Perkotaan Sumenep;
   7) Kabupaten Trenggalek di Perkotaan Trenggalek;
   8) Kabupaten Tuban di Perkotaan Tuban;
   9) Kabupaten Tulungagung di Perkotaan Tulungagung;
   10) Kota Blitar;
   11) Kota Kediri;
   12) Kota Madiun;
   13) Kota Pasuruan; dan
   14) Kota Probolinggo.



Gambar 3.2.4. Peta Kebijakan Kewilayahan Jawa Timur 2025-2029

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 memberikan gambaran tentang lokasi prioritas penanganan kewilayahan. **Untuk mengakomodir lokus arah pembangunan Kewilayahan RPJMN tahun 2025-2029, maka dilakukan pemetaan lokus tersebut dengan arah pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur** yaitu Koridor penghubung antar kawasan dan kepulauan yang meliputi Kawasan Gerbangkertasusila (GKS), Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), Kawasan Selingkar Wilis, Kawasan Ijen dan Kepulauan Madura. Matriks pemetaan Koridor Penghubung antar Kawasan dan Sistem Pusat Permukiman Jawa Timur dengan Kawasan Fungsional RPJMN dapat dilihat pada tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2.
Matriks Koridor Penghubung antar Kawasan dan Sistem Pusat Permukiman Jawa Timur dengan Kawasan Fungsional RPJMN dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, terkait Wilayah Kabupaten Pasuruan

No	Koridor Penghubung antar Kawasan dan Sistem Pusat Permukiman	Kawasan Pertumbuhan (A)	Kawasan swasembada Pangan Air, dan energi (C)	Kaw. Afirmasi (D)	Kawasan Komoditas Unggulan (B)	Kawasan Konservasi/ Rawan Bencanan (E)	Kawasan Geopark (Taman Bumi)
2	**Kawasan Bromo Tengger Sumeru :** Kota Malang (PKN) Kabupaten Malang (PKN) Kota Batu (PKL) Kota Probolinggo (PKW) Kabupaten Probolinggo (PKL) Kota Lumajang (PKL) Kabupaten Lumajang (PKL) ota Pasuruan (PKW) **Kabupaten Pasuruan (PKL)**	**Kawasan Perkotaan Malang-Batu, Kawasan Pengembangan Industri malang-Singasari-Lawang dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo-Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi (Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo Tengger-Semeru):** Kota Malang Kabupaten Malang Kota Batu Kab Probolinggo Kab Lumajang **Kab Pasuruan** **<u>Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan:</u>** **Kab Pasuruan** **<u>Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi:</u>** **DPP Malang Raya - Bromo dan sekitarnya**	**Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas:** Kab. Malang **<u>Kawasan Swasembada pangan, Air, dan Energi tapal Kuda:</u>** **#Kab. Pasuruan** #Kab. Probolinggo #Kab. Lumajang		**Kawasan Komoditas Unggulan Tebu lingkar Kelud-kawi Arjuna-Welirang:** Kab. Malang **Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Tapal Kuda:** Kab. Lumajang	**Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger-Semeru:** **#Kab. Pasuruan** #Kab. Probolinggo #Kab. Malang # Kab. Lumajang	**Geopark Malang:** Kabupaten Malang **Geopark Lumajang:** Kabupaten Lumajang **Geopark Probolinggo:** Kabupaten Probolinggo **<u>Geopark Pasuruan:</u>** **Kabupaten Pasuruan**

Sumber: Bappeda Provinsi Jatim, 2025, disesuaikan.

Kawasan Bromo Tengger Semeru

Kawasan Bromo Tengger Semeru dikenal sebagai ikon wisata alam dan budaya Jawa Timur yang memiliki daya tarik global. Dikelilingi lanskap pegunungan yang menakjubkan serta nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Tengger. Sebagai kawasan konservasi sekaligus destinasi wisata utama, **Bromo Tengger Semeru memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi model pariwisata berkelanjutan** yang menggabungkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Konsep ini menjadikan pelestarian alam sebagai fondasi, dengan memperkuat kesejahteraan masyarakat lokal melalui partisipasi aktif mereka dalam sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif.

Salah satu pendekatan strategis yang sangat relevan untuk pengembangan kawasan ini adalah **penguatan agrowisata dan agroindustri** dengan sektor unggulan yang ditonjolkan seperti pariwisata, pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa dapat dikolaborasikan untuk menciptakan pengalaman wisata yang autentik sekaligus edukatif. Di sisi lain, **agroindustri** menjadi pilar penting dalam mengangkat potensi ekonomi kawasan secara lebih luas. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan darat, industri lokal, serta perdagangan dan jasa harus dikembangkan secara terpadu. Selain itu, Perlu didukung pula dengan pengembangan infrastruktur wisata yang inklusif dan ramah lingkungan juga menjadi kunci dalam mendukung kawasan ini. Aksesibilitas menuju kawasan, fasilitas publik yang memadai, pusat informasi, edukasi wisata perlu terus diperkuat serta integrasi antara sektor ekonomi kreatif seperti seni pertunjukan, kerajinan lokal, dan kuliner khas perlu dikembangkan agar menjadi daya tarik tersendiri yang memperkaya identitas kawasan.

Tabel 3.2.3.
Highligt Indikasi Intervensi Kawasan Pengembangan di Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Kawasan Pengembangan Kab. Pasuruan	Highlight Indikasi Intervensi PEMPROV JATIM
Pengembangan Kawasan perkotaan Kawasan Bromo Tengger Sumeru	# PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN : • Kota Malang (PKN) • Kabupaten Malang (PKN) • Kota Batu(PKL) • Kota Probolinggo (PKW)

Kawasan Pengembangan Kab. Pasuruan	Highlight Indikasi Intervensi PEMPROV JATIM
	• Kabupaten Probolinggo (PKL) • Kota Lumajang (PKL) • Kabupaten Lumajang (PKL) • Kota Pasuruan (PKW) • Kabupaten Pasuruan (PKL) # Kawasan Perkotaan Malang-Batu, Kawasan Pengembangan Industri Malang-Singasari-Lawang dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bromo-Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi (Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo Tengger-Semeru) (Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang): • Pengembangan TPST Regional Pasuruan – Probolinggo • Peningkatan 6A Pariwisata Malang-Bromo-Tengger-Semeru • Pembinaan melalui pelatihan kapaasitas SDM Pariwisata berbasis pariwisata berkelanjutan
Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi	Kawasan Tapal Kuda (Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang) 1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada antara lain pada D.I. Bondoyudo, D.I. Jatiroto dan D.I. Pekalen 2. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah 3. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) 4. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) 5. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura 6. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura 7. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada DAS Bondoyudo dan DAS Tempuran-Kedungbajul 8. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Bondoyudo dan DAS Tempuran-Kedungbajul 9. Pengembangan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi 10. Pengembangan SPAM Regional Probolinggo-Lumajang dan peningkatan Kapasitas SPAM Umbulan 11. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan Konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk /pestisida) pakan organik 12. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui. penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen

Kawasan Pengembangan Kab. Pasuruan	Highlight Indikasi Intervensi PEMPROV JATIM
	13. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama 14. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian 15. Percepatan pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Timur
Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger Semeru	Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger Semeru (Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Lumajang) 1. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi 2. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung ekonomi 3. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik 4. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri 5. Penguatan pengelolaan hutan lestari dan peningkatan fungsi sosial kawasan hutan 6. Perlindungan dan pengamanan hutan 7. Penguatan pengelolaan hutan lestari 8. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi 9. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana 10. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
Pengembangan Kawasan Geopark	Geopark Malang (Kab. Malang), Geopark Probolinggo (Kab. Probolinggo), Geopark Lumajang (Kab. Lumajang), Geopark Pasuruan (Kab. Pasuruan) 1. Perlindungan, pemulihan, pengelolaan warisan geologi bernilai tinggi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem 2. Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi 3. Peningkatan pendidikan, penelitian, dan sosialisasi situs-situs geopark untuk mendukung konservasi alam 4. Pengembangan promosi situs-situs geopark yang sesuai dikembangkan untuk wisata (geowisata) 5. Pengembangan sarana penunjang pengembangan geopark 6. Pengembangan prasarana penunjang dan penunjang ketercapaian menuju situs geopark 7. Penguatan kemitraan dalam pengelolaan bersama potensi situs geopark di kawasan hutan, kawasan BBKSDA, kawasan Taman Nasional, dan aset pribadi/company

Kawasan Pengembangan Kab. Pasuruan	Highlight Indikasi Intervensi PEMPROV JATIM
	8. Pengembangan dan pemasaran geoproduk geopark (geo homestay, geo tour/geowisata), geo souvenir, geo kuliner 9. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi 10. Penguatan visibility (penanda) untuk memperkuat fungsi edukasi, sosialisasi, dan perlindungan 11. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana alam geologi dan bencana lainnya
Arahan Umum	1) Pemberian makan bergizi gratis di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 2) Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, antara lain melalui - Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini - Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas - Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran - Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah - Revitalisasi pendidikan nonformal - Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas - Peningkatan kualitas pendidikan melalui Sekolah Rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah 3) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: - Penurunan kematian ibu dan anak - Pencegahan dan penurunan stunting - Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro - Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis - Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan 4) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: - Penuntasan TBC - Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa - Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM 5) Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: - Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan - Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan 6) Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: - Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan - Pengurangan persampahan mulai dari rumah tangga - Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA 7) Peningkatan kerjasama pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 8) Penguatan mitigasi bencana alam yaitu banjir, kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan

Kawasan Pengembangan Kab. Pasuruan	Highlight Indikasi Intervensi PEMPROV JATIM
	9) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dengan pendekatan 5 sektor yaitu sektor limbah, sektor lahan, sektor kawasan pesisir, sektor energi dan sektor pertanian untuk peningkatan penyerapan cadangan karbon dan mitigasi perubahan iklim 10) Optimalisasi potensi sumber daya alam dari sektor agro dan mina serta potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui koperasi merah putih 11) Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: - Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan salah satunya melalui pembangunan PLTS - Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi - Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik - Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time - Perluasan pengunaan kendaraan listrik 12) Percepatan transformasi digital, antara lain melalui: - Perluasan infrastruktur digital - Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital - Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok 13) Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui: - Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital - Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN - Digitalisasi layanan publik prioritas - Pengembangan ekosistem layanan publik digital 14) Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jawa timur, antara lain melalui: - Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) - Penanggulangan judi dan penyelundupan - Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) 15) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Timur, antara lain melalui: - Perlindungan dan pelestarian warisan budaya - Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan - Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Sumber : Bappenas, Bappeda Jatim, 2025, dianalisa

3.2.1.3.2. Strategi Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

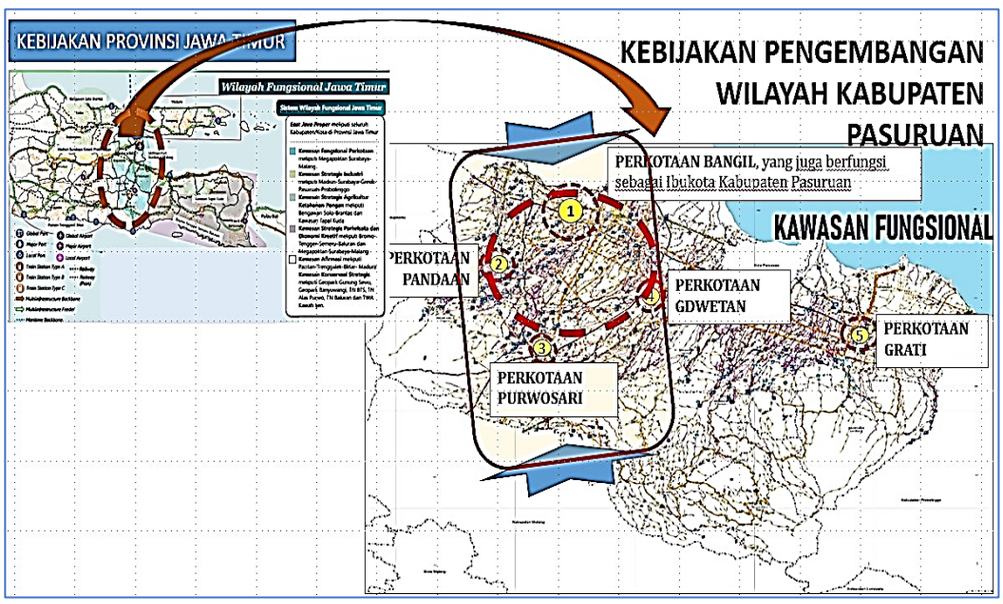
Sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 Sub Bab 2.7.3, arahan Pengembangan dan Pusat

Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045, pertimbangan kondisi wilayah-masyarakat-dan pemerintah Kabupaten Pasuruan (Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Daerah atau Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang pada SubBab sebelumnya pada dokumen ini), serta sinkronisasi dengan arahan pengembangan wilayah regional (Nasional dan provinsi jawa Timur) Tahun 2025-2029, **maka strategi pengembangan kewilayahan untuk Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dapat disampaikan sebagai berikut :**

A. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Pasuruan

Rencana pengembangan kegiatan utama di wilayah Kabupaten Pasuruan, berdasarkan RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043 dan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045, meliputi :

1) **PKL Perkotaan Bangil.** PKL Perkotaan Bangil, berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, industri dan permukiman.
2) **PKL Perkotaan Pandaan**, berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, pariwisata, industri dan permukiman.
3) **PKL Perkotaan Gondangwetan**, berfungsi sebagai pelayanan umum, permukiman dan perdagangan jasa
4) **PKL Perkotaan Grati**, berfungsi sebagai pariwisata, industri, perikanan dan permukiman; dan
5) **PKL Perkotaan Purwosari**. PKL Perkotaan Purwosari, berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, pariwisata, industri dan permukiman

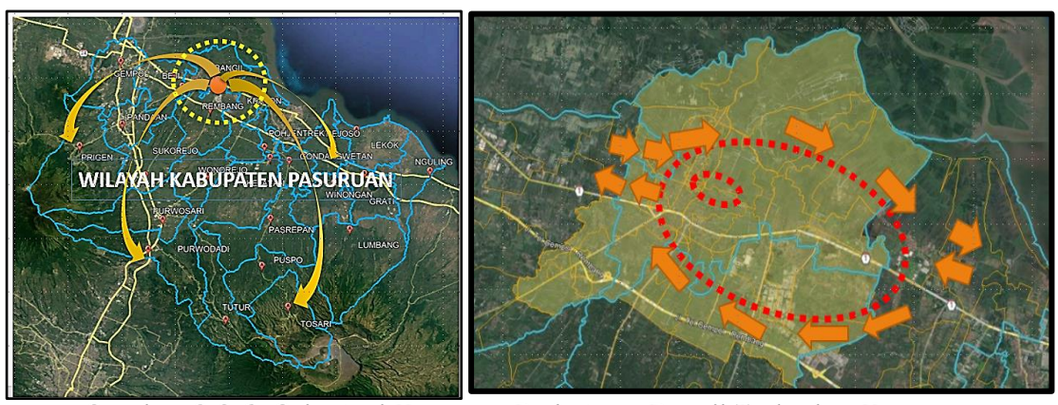


Gambar 3.2.5. Pengembangan Wilayah Kabupaten Pasuruan
Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

PKL Perkotaan Bangil

Pengembangan Kawasan perkotaan Bangil sebagai Ibukota Kabupaten Pasuruan. Untuk mengembangkan PKL Perkotaan Bangil sebagai ibukota Kabupaten Pasuruan, maka ada program strategis yang harus dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1) Pengurangan dampak serta luasan genangan dan banjir di kawasan Perkotaan Bangil;
2) *Penaatan Lalu Lintas, Transportasi, dan Angkutan umum* perkotaan bangil:
   a) pembangunan jalan lingkar perkotaan Bangil
   b) pengaturan lalin perkotaan bangil
   c) penataan angkutan umum



Gambar 3.2.6. Orientasi Kawasan Perkotaan Bangil Terhadap Kawasan Perkotaan Lain Di Kabupaten Pasuruan Serta Orientasi Penataan Transportasi Jalan Dan Lalu Lintas Pada Kawasan Perkotaan

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

3) **Penyediaan dan penataan kawasan layanan publik** yang inklusif (dapat dimanfaatkan semua kalangan masyarakat termasuk kaum rentan/disabilitas), informative (berisi informasi sehingga dimudahkan, dan terjangkau aksessibilitasnya), serta berkelanjutan (baik bentuk, fungsi, material maupun pemanfaatan objek nya harus berkelanjutan), meliputi :
   a) **Kawasan perkantoran** pemerintah daerah Raci
   b) **Koridor kawasan perkantoran pemerintah** (PeKawasan Perkantoran Raci-DPRD-RSUD Bangi-POLRES BANGIL-Perkantoran Eks RS Bangil)
   c) **Kawasan CBD** (Central Building Development: kawasan pertokoan/ perdagangan-jasa, Alun-alun Bangil, Masjid Jamik, Kantor Pos

d) **Kawasan pengembangan Co-Working Space, Pusat Edukasi dan Layanan Informasi Koperasi, UMKM dan E-kraf Kabupaten Pasuruan**;

e) **Kawasan Perdagangan:** pasar daerah Bangil.serta

f) **Kawasan Pendidikan Kalirejo**



Gambar 3.2.7. Kawasan Strategis Perkotaan Bangil
Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

B. Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan di seluruh Wilayah Kabupaten Pasuruan, melalui :

1) **"satu desa-satu kelurahan satu potensi"**. Hal ini perlu diterapkan agar masing-masing desa/lurah lebih berkembang sesuai dengan kapasitas/kemampuannya baik secara potensi wilayah maupun potensi masyarakatnya dengan tidak mengesampingkan unsur-unsur keberlanjutan dan keseimbangan/pemerataan.
2) **Pengembangan Desa dan/atau Kelurahan** berbasis penuntasan permasalahan sosial (kemiskinan ekstrem, penurunan anak tidak sekolah/anak putus sekolah, angka stunting, dan tingkat pengangguran terbuka, tinggi/rawan narkoba dan kenakalan remaja), rawan bencana, rawan dan/atau penurunan kualitas lingkungan hidup (tanah, air, udara, tata guna tanah dan persampahan), dan/atau penurunan kualitas lingkungan

permukiman :

a) Desa/kelurahan termasuk zone merah permasalahan social (kemiskinan ekstrem, penurunan anak tidak sekolah/anak putus sekolah, angka stunting, dan tingkat pengangguran terbuka, dan tinggi/rawan narkoba dan kenakalan remaja). Untuk penanganan 5 lima tahun ke depan, **diprioritaskan desa/kelurahan pada pengurangan 10 wilayah kecamatan yang memiliki jumlah RT dan/atau penduduk dengan masalah social tertinggi sebesar 10%.**

b) rawan bencana khususnya bencana banjir, bencana kekeringan, bencana tanah gerak, dan bencana kebakaran hutan dan permukiman. Untuk penanganan 5 lima tahun ke depan, **diprioritaskan desa/kelurahan pada :**

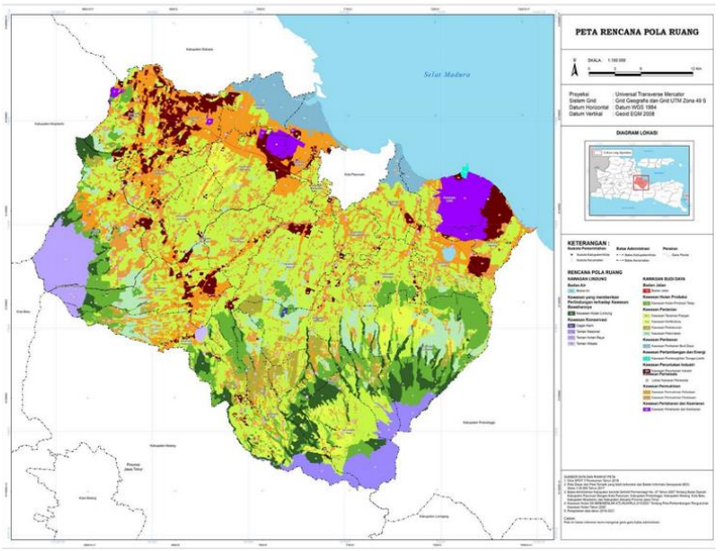
c) **tuntas penanganan bencana banjir: hulu-hilir pada DAS REJOSO dan DAS LAWEYAN, pengurangan frekuensi dan resiko/dampak sebesar 80%.** Mempertimbangkan/ memperhatikan kewenangan dan regulasi yang berlaku. Untuk DAS lainnya di Kabupaten Pasuruan tetap dilakukan penanganan mengingat seluruhnya memiliki potensi kerawanan yang sama terhadap banjir.

- **tuntas penanganan bencana kekeringan: diprioritaskan pada Wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Grati, Kecamatan Winongan dan Kecamatan Pasrepan, terkait pemenuhan sumber air**.
- rawan dan/atau penurunan kualitas lingkungan hidup (tanah, air, udara, tata guna tanah dan persampahan), dan/atau
- rawan dan/atau mengalami penurunan kualitas lingkungan permukiman baik berbentuk kawasan kumuh kompak maupun tidak berbentuk kawasan atau RUTILAHU/RTLH, diprioritaskan untuk MBR/miskin ekstrem/kaum rentan/disabilitas/aksessilitas terbatas, yang ditetapkan dalam SK Kepala daerah.

C. Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

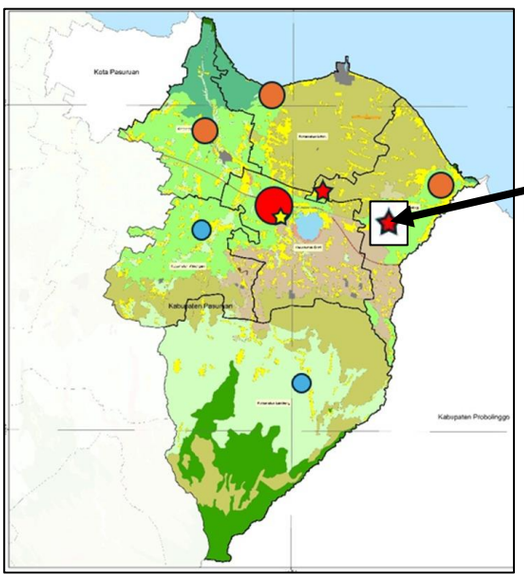
Kawasan Strategis disini adalah Kawasan Fungsional Strategis Pertumbuhan Ekonomi: Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Pusat Pengembangan Industri (KI dan Peruntukan Industri), Kawasan (koridor) Destinasi Pariwisata, Kawasan Pertumbuhan sekitar Interchange, Diprioritaskan pada kawasan yang bernilai strategis merupakan kawasan kolaborasi antara beberapa fungsi kawasan strategis lain yang bernilai strategis ekonomi dengan membentuk satu sentra/pusat pengembangan.

PETA RENCANA POLA RUANG



Sumber : Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2025

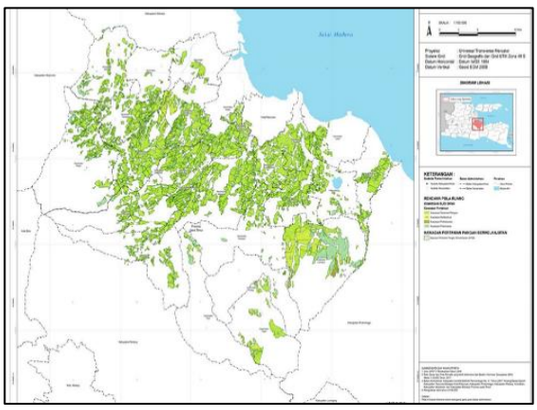
Prioritas yang dikembangkan dalam 5 (lima) tahun ke depan :



Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

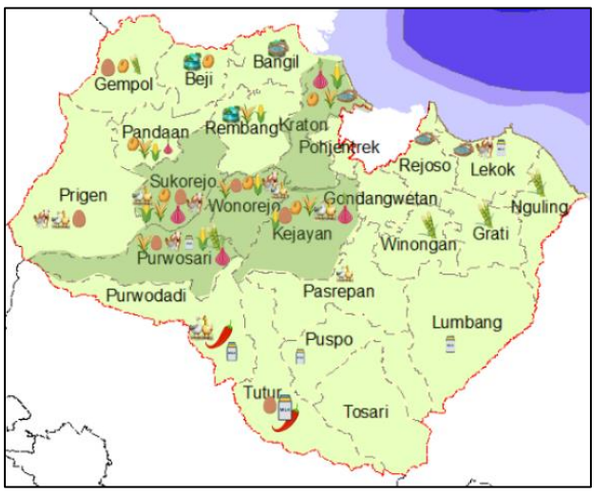
a. Kawasan sentra pangan (agro-Mina) di wilayah timur Kabupaten Pasuruan: Kecamatan Rejoso, lekok, Nguling, Grati, Winongan dan Kecamatan Lumbang

b. Perlindungan lahan dan sumber daya manusia untuk lahan KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) atau LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sebagaimana tertuang pada RTRW Kabupaten Pasuruan.



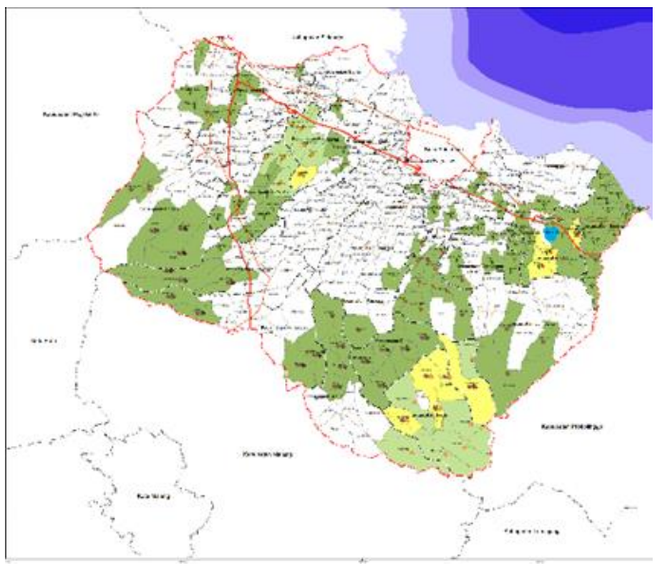
Sumber : Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2025

c. Kawasan Pengembangan Komoditas pangan (lingkup pertanian, peternakan, perikanan budidaya) unggulan pendukung Swasembada pangan. 11 (sebelas) komoditas pangan pokok berdasarkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, unggas, telur, hewan ruminansia, ikan budidaya dan tebu, pengembangan prioritas wilayah untuk kendali produktivitas dan perlindungan terhadap hasil, lahan dan sumberdaya difokuskan di 5 kecamatan yang memiliki produktivitas rata-rata terbanyak untuk komoditas CPP yaitu Kecamatan Purwosari, Sukorejo, Wonorejo, Kejayan, Kraton. Khusus untuk produktivitas padi dan jagung (pangan pokok) yang mendukung dalam swasembada pangan direncanakan peningkatan produktivitas di seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan untuk memenuhi kebutuhan pangan.



Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

d. Kawasan pengembangan pertanian tanaman holtikultura dan Perkebunan. Pengembangan komoditas tanaman holtikultura diprioritaskan pada komoditas mangga dan kentang. Potensi mangga di Kabupaten Pasuruan terdapat 2 jenis yaitu Mangga gadung Klonal 21 dan Mangga Garifta. Mangga gadung Klonal 21 terdapat di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorejo sedangkan untuk mangga Garifta berada di Kecamatan Grati. Untuk potensi komoditas kentang berada di kecamatan Tosari, kecamatan Puspo, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Tutur. Sedangkan pertanian tanaman perkebunan diprioritaskan pada komoditas Kopi, Tebu, Cengkeh dan Tembakau. Komoditas kopi berada di kecamatan Kecamatan Tutur, Kecamatan Purwodadi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Pasrepan, Puspo, Tosari, Lumbang.



Sumber : Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2025

Komoditas Tebu berada di kecamatan kecamatan Nguling, Grati, Winongan, Gondang Wetan. Komoditas Cengkeh berada di Kecamatan Tutur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Prigen, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari, serta Komoditas Tembakau berada di kecamatan Pasrepan, Kejayan, Winongan

e. Komoditas Unggulan dan lahan potensi invetasi yang ditawarkan pada swasta atau investor atau penanam modal berdasarkan peluang pasar yang tersedia.

f. Kawasan pengembangan industri sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043, dalam 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan :

1) pengembangan kawasan rencana peruntukan industri (KPI) yang berada dalam kawasan yaitu KI (Kawasan Industri);
2) diluar KI, baik berada didalam kawasan permukiman untuk industry mikro dan kecil sesuai peraturan perundangan,

maupun industri menengah dan besar yang berada di rencana peruntukan industry; serta

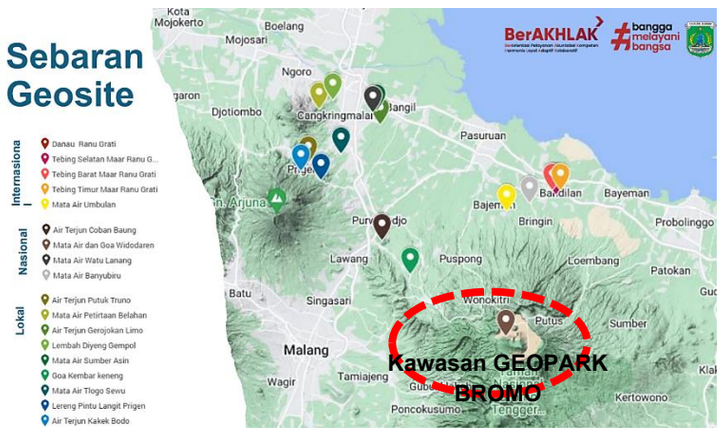
3) Jika dimungkinkan berdasarkan hasil feasibily study untuk jenis industry tertentu, dikembangkan sentra IKM (Industri Kecil Menegah) pada rencana peruntukan industri.

g. Kawasan pengembangan koridor dan destinasi pariwisata pendukung **KSPN-TNBTS** :

1) Kecamatan destinasi koridor Tosari-Tutur-Puspo-Purwodadi-Purwosari;
2) Kawasan destinasi koridor gempol-prigen-pandaan-sukorejo menuju Tosari/TNBTS; dan
3) Kawasan destinasi koridor lekok-nguling-grati-winongan menuju Tosari/TNBTS
4) Pengembangan kawasan agro, mina dan industri mikro-kecil pendukung pariwisata (supply chain). Supply chain (rantai pasokan) adalah jaringan kompleks yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemasok bahan mentah hingga konsumen akhir, dalam proses produksi dan distribusi produk atau layanan. Jaringan ini melibatkan aktivitas seperti perencanaan, pengadaan, produksi, logistik, dan distribusi.

h. Kawasan pengembangan geoherritage-geopark Kabupaten Pasuruan. Prioritas pengembangan geoherritage/geopark dalam 5 tahun ke depan adalah :

1) Kawasan Geopark Bromo yang berada dalam kewenangan provinsi; dan
2) Kawasan Geopark Ranu grati-Banyu Biru-Umbulan yang berada di Kecamatan Grati dan Kecamatan Winongan.



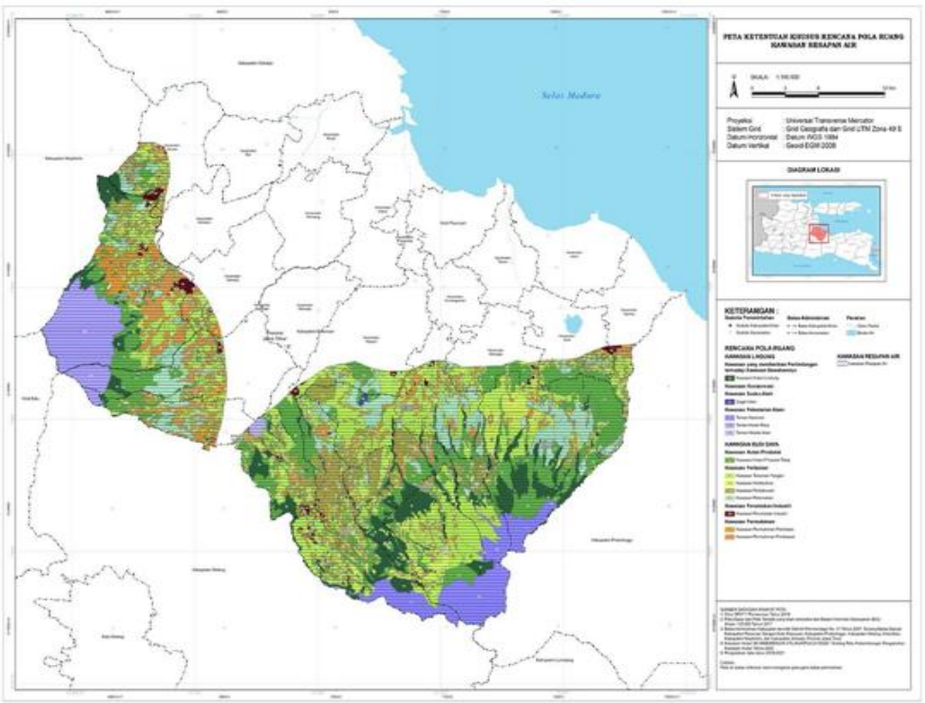
Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025, data diolah

D. Pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi

dan daya dukung lingkungan hidup, untuk pelestarian Kawasan Konservasi dan pelestarian sumber mata air yang berkelanjutan.

1) kawasan sekitar Danau Ranu Grati di Kecamatan Grati;
2) kawasan sekitar mata air Umbulan di Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Winongan;
3) kawasan sekitar Banyu Biru di Kecamatan Winongan;
4) kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di: Kecamatan Lumbang; Kecamatan Pasrepan; Kecamtan Puspo; Kecamatan Tosari; dan Kecamatan Tutu;
5) kawasan sekitar Arjuna – Welirang di: Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; dan Kecamatan Sukorejo.
6) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu: pelestarian Kawasan Konservasi dan terbatas pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan pelestarian Badan Air dan terbatas pengembangan perikanan.
7) Pengembangan kawasan konservasi perlindungan terhadap air tanah – salah satu upaya "ketahanan air. Untuk prioritas 5 tahun ke depan diprioritaskan pada :
   - Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian konservasi terhadap air;
   - upaya perlindungan pada kawasan resapan air;
   - khusus pada kawasan-kawasan yang sulit air dan kawasan sekitarnya, diprioritaskan pada upaya untuk ketersediaan air.

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR



Sumber : Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2025

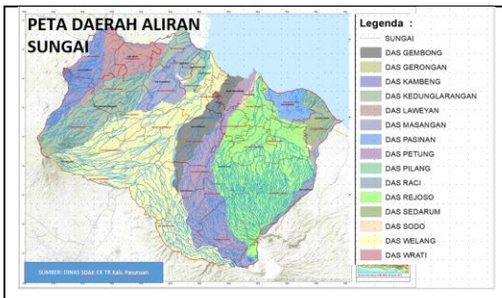
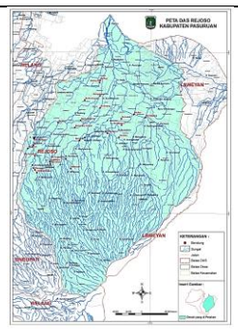
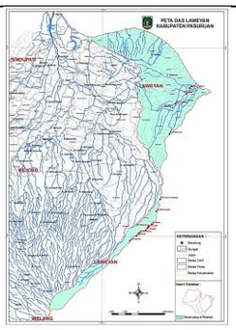
E. Pengembangan Sektor Khusus yang diprioritaskan pengembangannya, dengan pertimbangan membutuhkan biaya/anggaran yang besar, kolaborasi dengan PD lain, serta sangat penting berpengaruh terhadap pencapaian kawasan strategis sebagaimana di uraikan sebelumnya baik Nasional/Provinsi/ kabupaten. Dalam 5 lima tahun ke depan :

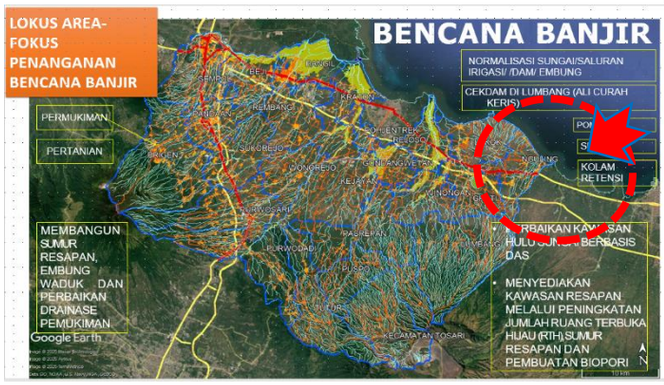
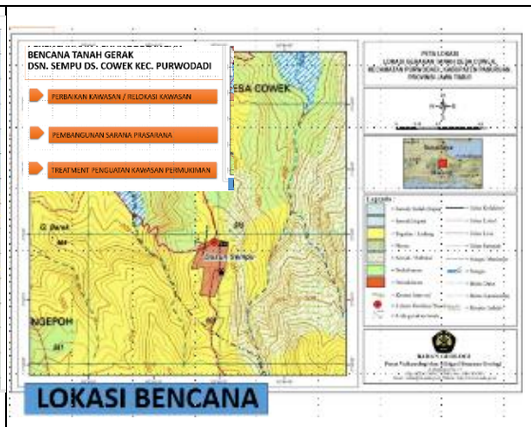
1) **Pembangunan/revitalisasi/infrastruktur SPBE dan SATU DATA** (statistik sektoral dan spasial/kewilayahan) untuk mendukung digitalisasi pembangunan (perencanaan-pelaksanaan-pengawasan-evaluasi-pengendalian) **untuk tujuan utama transparansi, optimalisasi output dan outcomes, serta kemudahan,** dengan memprioritaskan penanganan:
   a) Revitalisasi dan optimalisasi command center;
   b) Terbangunnya sistem (informasi-komunikas informasii-keamanan) data dan informasi dari dan antar: PD, Pemda-PD, Pemda/PD-Pemerintah/Pemprov, PD/Pemda-Desa/Kelompok masyarakat secara bertahap, sistematik dan berkelanjutan.
2) **Pembangunan/revitalisasi/infrastruktur jalan** lokal primer dan local sekunder di seluruh kecamatan di Wilayah Kabupaten

Pasuruan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, termasuk jalan desa poros yang menjadi kewenangan desa **untuk tujuan utama optimalisasi jalur jalan social-ekonomi utama masyarakat yang aman dan nyaman**, dengan memprioritaskan penanganan :

a) Jalan lingkar perkotaan Bangil;
b) Optimalisasi fungsi jalan MANTAB, sesuai Aturan dan Ketentuan (memenuhi standar fungsi jalan, memenuhi standar laik jalan : bagian pelengkap jalan, perlengkapan jalan) ;
c) Diprioritaskan penanganan pada :
    1. Optimalisasi fungsi jalan sebagai pendukung penanganan bencana;
    2. Optimalisasi fungsi jalan sebagai pendukung kawasan strategis nasional (PSN), kawasan strategis provinsi, maupun kawasan strategis kabupaten sebagaimana yang diuraikan pada bagian lain dokumen ini (dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah);
    3. Untuk bagian jalan dan perlengkapan jalan diprioritaskan ketersediaannya pada yang sangat berpengaruh langsung terhadap "keamanan dan kenyamanan" yaitu drainase, penerangan jalan dan sarana/prasarana terkait pengamanan lalu lintas orang/kendaraan pada jalan tersebu, agar jalan dapat berfungsi dengan baik.

3) **Penanganan bencana di Kabupaten Pasuruan:** pengendalian banjir, penanganan kekeringan, serta tanah gerak sempu, untuk tujuan utama optimalisasi pencapaian respon time dan penanganan ketika kejadian terjadi, serta pengurangan resiko dan dampak akibat kejadian dan kondisi alam/infrastruktur/kegiatan masyarakat, tuntas, hulu sampai dengan hilir, termasuk optimalisasi peran aktif desa dan kecamatan, dengan memprioritaskan penanganan **:**

		
Gambar 3.2.8. Sebaran DAS di Kabupaten Pasuruan	Gambar 3.2.9. DAS REJOSO di Kabupaten Pasuruan	Gambar 3.2.10.DAS LAWEYAN di Kabupaten Pasuruan
Sumber : Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2025		

	
Gambar 3.2.11. Skema Prioritas Penanganan Banjir Hulu-Hilir Dalam 5 (lima) tahun	Gambar 3.2.12. Skema Prioritas Penanganan Tanah Gerak Dusun Sempu Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Dalam 5 (lima) tahun
Sumber : Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2025	

a) Ketersediaan sarana-prasarana penanganan darurat kejadian bencana **untuk tujuan utama optimalisasi pencapaian respon time dan penanganan ketika kejadian terjadi;**

b) Ketersediaan sarana-prasarana penanganan (pada saat dan pasca bencana) kejadian bencana **serta pengurangan resiko dan besaran dampak kejadian di masa datang :**

- Sarana prasarana dan penanganan terkait sumberdaya air; dan
- termasuk sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan dan hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi Penanganan Banjir untuk dilakukan review terhadap konstruksi yang telah ada terkait dengan optimalisasi penanganan resiko dan dampak antara lain terkait :

➔ rekonstruksi terhadap prasarana jalan dan bangunan pelengkapannya dan/atau perkengkapannya yang mengganggu dan/atau menimbulkan pengurangan kapasitas badan air ;

➔ penertiban sampai pembongkaran terhadap bangunan dan/atau sarpras lain yang mengganggu dan/atau dibutuhkan untuk mengurangi dampak negative daya rusak air ketika darurat kejadian ke fasilitas nvital dan permukiman penduduk.

4) Penyediaan dan/atau optimalisasi sarana/prasarana pendukung pelayanan (dasar) minimal, diprioritaskan layanan pada MBR/miskin ekstrem dan/atau kaum rentan/lansia/disabilitas dan/atau wilayah yang terbatas aksessibilitasnya/rawan/diatur secara khusus lainnya :
   a) Sarana/prasarana Pendidikan
   b) Sarana/prasarana Kesehatan
   c) Sarana/prasarana social
   d) Sarana/prasarana trantibumlinmas : kebencanaan, dan kebakaran
   e) Sarana/prasarana perumahan dan permukiman;
   f) Sarana/prasarana pendukung SPAM aman
   g) Sarana/prasarana pendukung SPAL aman
5) Penyediaan sarana/prasarana pendukung Program Strategis Kabupaten prioritas 5 (lima) tahun :
   a) Pendukung kawasan strategis prioritas nasional/provinsi/kabupaten yang bersesuaian :
      - Kawasan perkotaan utama kabupaten pasuruan, PKL perkotaan Bangil
      - Kawasan sasembada pangan
      - Kawasan swasembada dan ketahanan air
      - Kawasan ketahanan energi
      - Kawasan konservasi TNBTS;
      - Kawasan pengembangan Geopark
   b) pengembangan transportasi-perhubungan massal yang bersifat umum dan khusus (pendukung perkotaan dan kawasan khusus);

c) pendukung pengembangan KSPN-TNBTSPembangunan CentraHub Purwodadi, yang berada di dekat Interchange Tol Purwodadi difungsikan yaitu berupa: subterminal khusus sebagai melayani pergantian moda transportasi khusus (untuk tahap awal untuk melayani wisata) yang dikolaborasikan dengan Aspek Wisata yaitu pusat informasi untuk melayani kawasan destinasi wisata menuju TNBTS (Kecamatan Tutur - Puspo - Tosari), serta kawasan destinasi pariwisata di Sumberejo Purwosari

- massal yang bersifat umum dan khusus (pendukung perkotaan dan kawasan khusus);
- Pembangunan CentraHub Purwodadi, yang berada di dekat Interchange Tol Purwodadi difungsikan pendukung pengembangan KSPN-TNBTS yaitu berupa: -subterminal khusus sebagai melayani pergantian moda transportasi khusus (untuk tahap awal untuk melayani wisata) yang dikolaborasikan dengan Aspek Wisata yaitu pusat informasi untuk melayani kawasan destinasi wisata menuju TNBTS (Kecamatan Tutur - Puspo - Tosari).

3.2.1.3.3. Lokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Balita Stunting, dan Anak Tidak Sekolah

A. Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebanyak 10.057 jiwa. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) menurut Bank Dunia atau Rp.322.170/orang/bulan (BPS,2021). Penduduk miskin ekstrem tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan tersebar di seluruh kecamatan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah. Jumlah kemiskinan ekstrem tertinggi di Kecamatan Lekok dengan proporsi yang cukup dominan yaitu 26,11% atau lebih dari seperempat jumlah total kemiskinan ekstrem. Secara umum sebaran kemiskinan ekstrem terkonsentrasi di sebelah Timur wilayah Kabupaten Pasuruan.

No	Kecamatan	Jumlah Miskin Ekstrem	Proporsi dari Total	No	Kecamatan	Jumlah Miskin Ekstrem	Proporsi dari Total
1	LEKOK	2.626	26,11%	13	WONOREJO	208	2,07%
2	GRATI	818	8,13%	14	PURWOSARI	199	1,98%
3	KRATON	778	7,74%	15	GEMPOL	191	1,90%
4	PASREPAN	694	6,90%	16	PUSPO	171	1,70%
5	KEJAYAN	614	6,11%	17	PANDAAN	127	1,26%
6	NGULING	578	5,75%	18	LUMBANG	109	1,08%
7	GONDANGWETAN	549	5,46%	19	TUTUR	86	0,86%
8	WINONGAN	544	5,41%	20	SUKOREJO	83	0,83%
9	REMBANG	490	4,87%	21	PRIGEN	81	0,81%
10	REJOSO	364	3,62%	22	BANGIL	74	0,74%
11	POHJENTREK	307	3,05%	23	BEJI	48	0,48%
12	PURWODADI	271	2,69%	24	TOSARI	47	0,47%
					TOTAL	**10.057**	**100%**

Sumber: Kemenko Bidang PMK, 2025 (diolah)

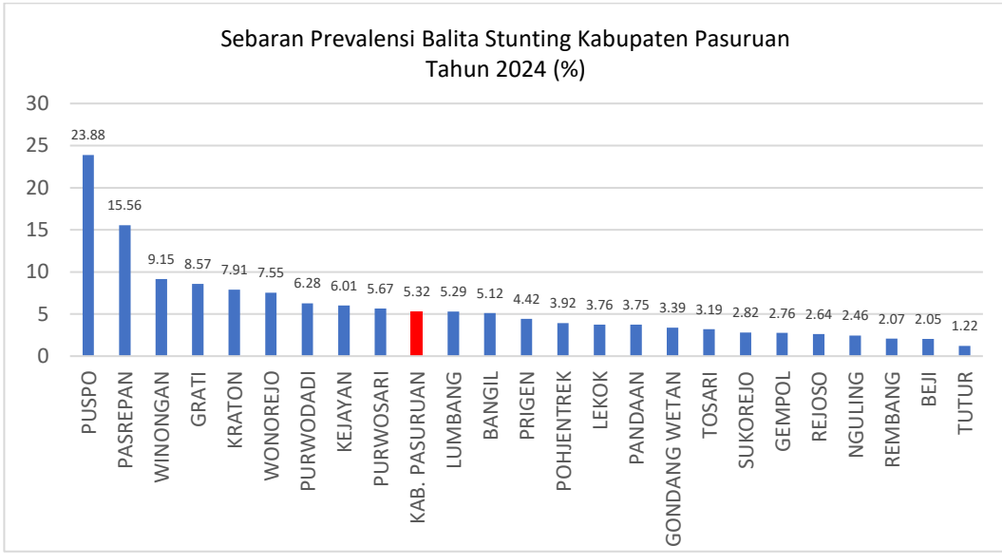
B. Balita Stunting

Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Pasuruan tahun 2024 sebesar 5,32% (bulan timbang Agustus) yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Puspo memiliki angka tertinggi sebesar 23,88% dan terendah di Kecamatan Wonorejo sebesar 7,55%. Terdapat sembilan kecamatan dengan nilai prevalensi di atas nilai Kabupaten Pasuruan, yaitu: Puspo, Pasrepan, Winongan, Grati, Kraton, Wonorejo, Purwodadi, Kejayan, dan Purwosari. Jika dipersandingkan dengan data kemiskinan ekstrem, secara umum tidak menunjukkan relasi yang kuat. Misalnya, Kecamatan Lekok memiliki jumlah kemiskinan ekstrem tertinggi, namun angka prevalensi balita stunting termasuk rendah (nomor sebelas terendah).

No	Kecamatan	Prevalensi Balita Stunting (%)	No	Kecamatan	Prevalensi Balita Stunting (%)
1	PUSPO	23,88	13	POHJENTREK	3,92
2	PASREPAN	15,56	14	LEKOK	3,76
3	WINONGAN	9,15	15	PANDAAN (PKM Pandaan dan Sebani)	3,75
4	GRATI (PKM Grati dan Kedawungwetan)	8,57	16	GONDANGWETAN	3,39
5	KRATON (PKM Kraton dan Ngempit)	7,91	17	TOSARI	3,19
6	WONOREJO	7,55	18	SUKOREJO	2,82
7	PURWODADI (PKM Purwodadi dan Nongkojajar)	6,28	19	GEMPOL (PKM Gempol dan Kepulungan)	2,76
8	KEJAYAN (PKM Kejayan dan Ambal Ambil)	6,01	20	REJOSO	2,64

No	Kecamatan	Prevalensi Balita Stunting (%)	No	Kecamatan	Prevalensi Balita Stunting (%)
9	PURWOSARI (PKM Purwosari dan Karangrejo)	5,67	21	NGULING	2,46
10	LUMBANG	5,29	22	REMBANG	2,07
11	BANGIL (PKM Bangil dan Raci)	5,12	23	BEJI	2,05
12	PRIGEN (PKM Prigen dan Bulukandang)	4,42	24	TUTUR (PKM Sumberpitu)	1,22
				KAB. PASURUAN	5,32

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2025

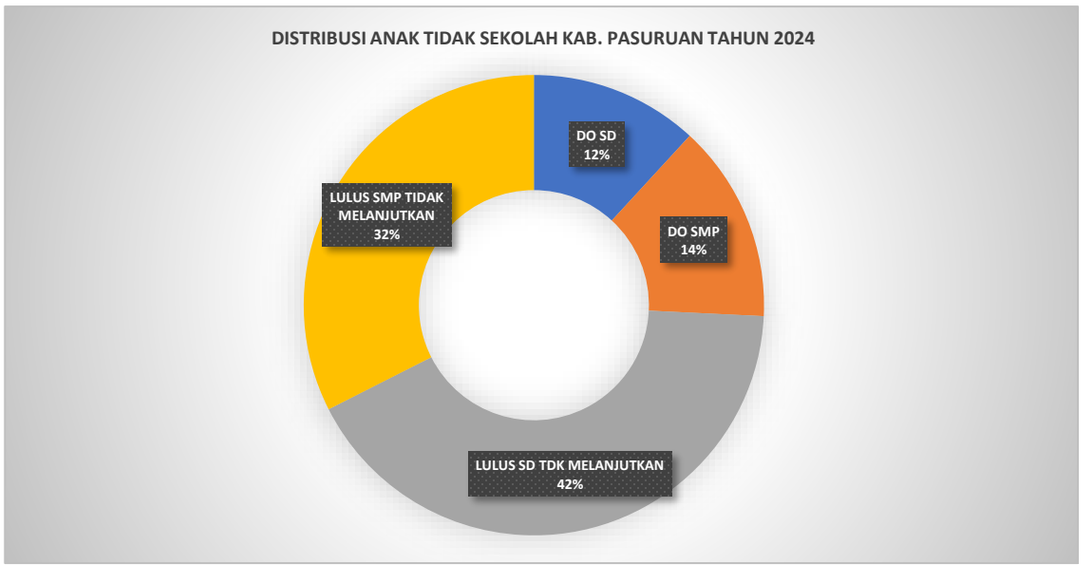
C. Anak Tidak Sekolah

Jumlah anak tidak sekolah tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan berjumlah 6.730 anak. Jumlah tersebut didominasi lulus SD/SMP/Sederajat tidak melanjutkan 74,23% dan drop out SD/SMP/Sederajat 25,77%. Secara kewilayahan jumlah anak tidak sekolah tersebar di semua kecamatan, tertinggi di Kecamatan Kraton sebesar 19,52% dan terendah di Kecamatan Prigen sebesar 1,10%. Masih adanya jumlah anak tidak sekolah tersebut menunjukkan belum tuntasnya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yaitu SD dan SMP. Kondisi ini juga menjadi penanda penyebab masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sebagai komponen pendukung perhitungan indeks pembangunan manusia (IPM).

NO	KECAMATAN	JUMLAH DROP OUT		JUMLAH LULUS TIDAK MELANJUTKAN		TOTAL	DISTRIBUSI
		SD / SEDERAJAT	SMP / SEDERAJAT	SD / SEDERAJAT	SMP / SEDERAJAT		
1	KRATON	83	51	685	495	1.314	19,52%
2	LEKOK	48	44	230	230	552	8,20%
3	KEJAYAN	95	67	289	35	486	7,22%

NO	KECAMATAN	JUMLAH DROP OUT		JUMLAH LULUS TIDAK MELANJUTKAN		TOTAL	DISTRIBUSI
		SD / SEDERAJAT	SMP / SEDERAJAT	SD / SEDERAJAT	SMP / SEDERAJAT		
4	LUMBANG	29	44	172	178	423	6,29%
5	NGULING	18	64	171	123	376	5,59%
6	GRATI	40	37	190	87	354	5,26%
7	SUKOREJO	39	32	136	78	285	4,23%
8	PURWODADI	21	57	54	128	260	3,86%
9	WONOREJO	57	26	98	77	258	3,83%
10	REMBANG	19	138	61	33	251	3,73%
11	WINONGAN	28	35	127	52	242	3,60%
12	PASREPAN	34	17	102	69	222	3,30%
13	PUSPO	21	51	70	67	209	3,11%
14	GONDANGWETAN	23	20	73	52	168	2,50%
15	REJOSO	33	22	82	22	159	2,36%
16	TUTUR	19	59	25	62	165	2,45%
17	GEMPOL	24	19	40	53	136	2,02%
18	BANGIL	28	20	53	55	156	2,32%
19	POHJENTREK	34	18	50	54	156	2,32%
20	TOSARI	6	42	16	87	151	2,24%
21	PURWOSARI	27	20	26	44	117	1,74%
22	BEJI	37	14	35	38	124	1,84%
23	PANDAAN	17	28	16	31	92	1,37%
24	PRIGEN	17	12	10	35	74	1,10%
	KAB. PASURUAN	**797**	**937**	**2.811**	**2.185**	**6.730**	**100,00%**
	KONTRIBUSI	**11,84%**	**13,92%**	**41,77%**	**32,47%**	**100,00%**	
		25,77%		**74,23%**			

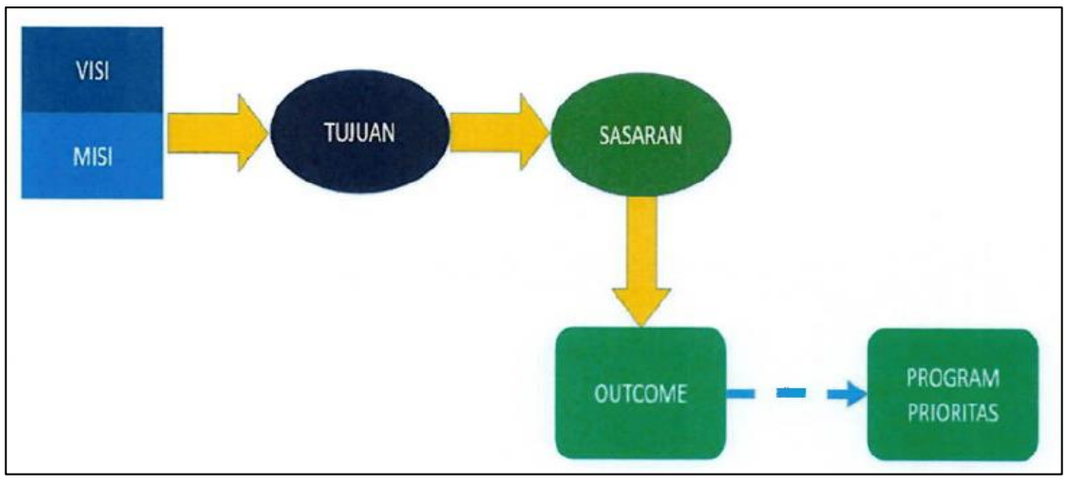
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, 2025



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, 2025

3.2.1.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas merupakan program atau sekumpulan kegiatan strategis yang dirancang dan dilaksanakan Perangkat Daerah sedemikian rupa untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Program prioritas diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja dari visi, tujuan, dan sasaran.



Gambar 3.2.13. Konsep Perumusan Program Prioritas RPJMD
Sumber : Inmendagri No.2 Tahun 2025

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

Tabel 3.2.4
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
VISI - Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan MISI: - 1. Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat - 2. Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran - 3. Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif - 4. Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai	1.1 Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung nilainilai keagamaan dan kebudayaan.			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))		
		1.1.1 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang toleran berlandaskan budaya dan kearifan lokal		Indeks Kebudayaan Daerah (IKD) (Indeks)		
			Menguatnya Kelembagaan organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Indeks)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Kabupaten (Indeks)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
Pilar Membangun Daerah - 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang Lebih Profesional dan Humanis			Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan (Sosialisasi, Upacara, Seleksi Paskibraka, TMMD) (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
		1.1.2 Meningkatnya kesetaraan dalam masyarakat.		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
			Terlaksananya penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Terselenggaranya kegiatan yang responsif gender oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	2.1 Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			Rasio Gini (Rasio)		
				Tingkat Kemiskinan (%)		
				Pertumbuhan Ekonomi (%)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		2.1.1 Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi strategis daerah		Rasio PDRB Industri Pengolahan (Rasio)		
			Meningkatkan Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase peningkatan kelembagaan penyuluhan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan petanian yang ditetapkan menjadi lp2b (ha) (ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Industri Wajib IUI yang mempunyai IUI Rekomendasi Teknis	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Kualitasnya (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas sarana pertanian	Peningkatan Sarana Produksi Tanaman Pangan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Sarana Produksi Hortikultura (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Sarana Produksi Komoditas Peternakan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Peningkatan Sarana Produksi Komoditas Perkebunan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Meningkatnya Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Pokok dan Barang Penting		POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya usaha perikanan yang mandiri	Persentase peningkatan produk olahan perikanan (%) (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan produk pangan asal hewan yang HAUS	Persentase pengawasan produk asal hewan yang HAUS (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase ternak yang dilayani (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		2.1.2 Meningkatnya daya saing investasi daerah		Incremental Capital Output Rasio (ICOR) (Indeks)		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Tercapainya kepuasan investor terhadap pengembangan iklim Penanaman Modal	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal. (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Tercapainya kesesuaian penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Tercapainya penyampaian informasi potensi daerah melalui promosi investasi	Persentase informasi potensi yg dipublikasikan (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		2.1.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan		Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif (Ton CO2 eq)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan	Persentase peningkatan tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif) (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Tersedianya akses sampah yang baik pada Rumah Tangga	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Tersedianya akses sanitasi / air limbah yang layak dan aman pada Rumah Tangga	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				/ air limbah domestik (layak & aman) (%)		
		2.1.4 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		
				PDRB Perkapita (Juta Rp) (Juta Rupiah)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	"Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor " (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%) (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi PPKS	Persentase PPKS yang memerlukan Rehabilitasi (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase masyarakat miskin yang di berdayakan (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya usaha perikanan yang mandiri	Persentase peningkatan produk olahan perikanan (%) (%)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Prosentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Terlaksananya Penempatan Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.1.5 Meningkatnya kualitas infrastrukur wilayah		Indeks Infrastruktur Wilayah (Indeks)		
			Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya cakupan pemeriksaaan laboratorium	Persentase Cakupan Standart Pelayanan minimal (SPM) Bid. Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya fasilitas kesehatan sesuai standart	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai standart (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Air Optimal	Persentase Sungai Yang Tertangani (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Terlaksananya Wilayah yang terlayani Angkutan Umum		2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Tersedianya akses air minum yang layak dan aman pada Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	3.1 Meningkatnya Daya Saing Daerah			Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)		
		3.1.1 Meningkatnya SDM yang Unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Index)		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemberdayaan pemuda (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya pelaksanaan Desa	Persentase desa siaga aktif (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Siaga Aktif strata aktif Purnama		MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Angka kelulusan warga belajar kesetaraan (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya Prestasi olahraga	Persentase Atlet yang mendapatkan medali (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	Prevalensi Depresi pada usia lebih atau sama dengan 15 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase cakupan penemuan penyakit tidak menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
					PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Persentase angka kesembuhan penyakit menular (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Terlaksananya kegiatan (poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA, PPKS yang aktif	Persentase Kegiatan Pembinaan Keluarga (poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA, PPKS yang aktif (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan medis sesuai standart	Rasio tenaga Kesehatan dan Medis terhadap Populasi penduduk (Rasio)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		3.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Teknologi Informasi				
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (%)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya layanan publik yang terintegrasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
	4.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (Indeks)		
		4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa		Nilai AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Angka)		
				Opini BPK (*)		
			Meningkatnya Hasil Pengendalian Perencanaan	Tingkat kesalarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan	Persentase Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Perekonomian dan Pembangunan	perekonomian dan pembangunan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana Sesuai Regulasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal Tuntas/ Telah Selesai (TS) (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa dan atau Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan skpd yang sesuai sap (%) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase alokasi belanja infrastuktur pelayanan publik (%) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui tkd (%) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar (%) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Terlaksananya proses penyusunan perencanaan pembangunan	Persentase usulan stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Tersusunnya data informasi perencanaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Data dan informasi perencanaan perencanaan pembangunan daerah yang terverifikasi (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		4.1.2 Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dan		Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Masyarakat Dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pemberdayaan Masyarakat	"Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%) " (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana Sesuai Regulasi (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi AKIP Minimal A (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Nilai Area Pengawasan APIP pada MCP KPK (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik yang diterima masyarakat	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		4.1.3 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Publik yang Humanis		Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)		
				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Meningkatnya kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan	Nilai aspek rencana kebutuhan, pengadaan dan informasi ASN (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Nilai aspek promosi dan mutasi ASN (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Nilai aspek pengembangan karir dalam peningkatan kompetensi pegawai (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Nilai aspek kinerja, penghargaan dan disiplin ASN (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan SIpil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan	Prosentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran penduduk (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	

Sumber : Bappelitbangda, 2025

3.2.1.5. Program Prioritas Bupati – Wakil Bupati Pasuruan

Program Prioritas Bupati – Wakil Bupati Pasuruan merupakan langkah percepatan pelaksanaan 5 (lima) Misi untuk mewujudkan Visi RPJMD tahun 2025-2029. Program prioritas tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga), yang selanjutnya disebut **"33 Program Prioritas".** 33 Program Prioritas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, yang diuraikan pada subbab sebelumnya.

33 PROGRAM PRIORITAS (33PP)					
33PP-01	Beasiswa untuk santri/siswa berprestasi, olahragawan atau pemuda berprestasi serta beasiswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu	**33PP-12**	IPAL komunal, Bio gas dan mandiri pakan untuk peternak	**33PP-23**	Fasilitasi Temu Usaha dan sinergi pola kemitraan antara dunia industri dengan kelompok ekonomi masyarakat (Kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan dan BUMDES)
33PP-02	Klinik kesehatan / ambulance untuk pondok pesantren	**33PP-13**	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata	**33PP-24**	Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan/atau taman bermain di sertiap Kecamatan
33PP-03	Santripreneur/ Wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren	**33PP-14**	Pembangunan/ pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	**33PP-25**	1 (satu) Kecamatan 1 (satu) Sekolah Olahraga atau Sepakbola
33PP-04	Dukungan Pembangunan dan Operasional Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU)	**33PP-15**	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air	**33PP-26**	Persekabpas Naik Kelas

33 PROGRAM PRIORITAS (33PP)					
33PP-05	Bantuan kelembagaan untuk ormas, ponpes, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah	**33PP-16**	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa secara merata	**33PP-27**	Penataan Kawasan Ibukota Bangil
33PP-06	Peningkatan kesejahteraan pendidik baik formal maupun non formal	**33PP-17**	Peningkatan kesejahteraan ASN dan Aparatur Pemerintahan Desa (Perangkat Desa, RT/RW, Kader Desa, Linmas dan BPD)	**33PP-28**	Revitalisasi Pasar Tradisional
33PP-07	Peningkatan kualitas sarana prasarana, akses serta kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan	**33PP-18**	Penciptaan Lapangan kerja baru dengan memprioritaskan tenaga kerja asli pasuruan	**33PP-29**	Islamic Centre dan perpustakaan daerah yang representative
33PP-08	Peningkatan layanan UHC dan ambulance gratis di semua tingkatan pelayanan kesehatan	**33PP-19**	Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan	**33PP-30**	Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal
33PP-09	Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (Orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat atau disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah	**33PP-20**	Pengembangan Pusat Lembaga sertfikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja baik Nasional maupun Internasional	**33PP-31**	Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/Cor

33 PROGRAM PRIORITAS (33PP)					
33PP-10	Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming, dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani	**33PP-21**	Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam rangka pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi produk unggulan/ Produk UMKM	**33PP-32**	Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlin-dungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja buruh
33PP-11	Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan pemba-ngunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan sarana pendukung lainnya) untuk petani tambak dan nelayan	**33PP-22**	Usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan dareah	**33PP-33**	Digitalisasi layanan publik, Pengembangan Pasuruan satu data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) selain sebagai bentuk program hasil terbaik cepat untuk mewujudkan visi, tujuan, dan sasaran daerah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional (asta cita) dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur (nawa bhakti satya). Dukungan tersebut disajikan dalam bentuk persandingan sebagai berikut:

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR (NAWA BHAKTI SATYA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PASURUAN (33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI/WAKIL BUPATI)
Memperkokoh Ideologi **Pancasila**, **Demokrasi**, dan **Hak Asasi Manusia** (PN 1)	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya **Masyarakat yang Harmonis** dan Inklusif (PP 8)	**Islamic Centre** dan perpustakaan daerah yang representatif (33PP-29)
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui **Swasembada**	Jatim **Agro**, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan (PP 4)	Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih (PPAB) untuk mengatasi **kebutuhan air bersih** di daerah kekurangan air (33PP-15)

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR (NAWA BHAKTI SATYA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PASURUAN (33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI/WAKIL BUPATI)
Pangan, Energi, **Air**, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, **Ekonomi Hijau**, dan Ekonomi Biru (PN 2)	Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian **Lingkungan Hidup** dalam Mewujudkan **Pembangunan Berkelanjutan**. (PP 9)	Merdeka pupuk, petani milenial, **Eco farming** dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani (33PP-10)
	Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas (PP 2)	**IPAL komunal**, Bio Gas dan mandiri pupuk untuk peternak (33PP-12)
Melanjutkan Pengembangan **Infrastruktur** dan Meningkatkan **Lapangan Kerja** yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN 3)	Jatim Akses, Memperkuat **Infrastruktur** Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan (PP 3)	**Peningkatan infrastruktur** jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata (33PP-13)
		Pembangunan **Jalan poros** kabupaten dengan standart Hotmix/Cor (33PP-31)
	Jatim Kerja, Memperluas **Lapangan Kerja** yang Berkualitas (PP 2)	Penciptaan **Lapangan Kerja** baru dengan memprioritaskan tenaga kerja asli pasuruan (33PP-18)
		Kemudahan Perizinan berusaha dan menjaga **hubungan industrial** yang harmonis dan saling menguntungkan (33PP-19)
		Pengembangan Pusat lembaga **sertifikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja** baik nasional maupun internasional (33PP-20)
		Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh untuk perlindungan dan peningkatan **kesejahteraan pekerja/buruh** (33PP-32)
		Pembangunan Pasuruan Coaching and Creativity (Pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam rangka pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekonomi kreatif dan sertifikasi **produk Unggulan/produk UMKM** (33PP-21)
		Santripeneur/wirausahawan baru dan hibah produktif berbasis pondok pesantren (33PP-03)
		Usaha mikro kecil naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah (33PP-22)
		Fasilitasi Temu usaha dan sinergi pola **kemitraan antara dunia Industri dengan kelompok ekonomi masyarakat** (Kelompok tani, kelompok ternak, kelompok

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR (NAWA BHAKTI SATYA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PASURUAN (33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI/WAKIL BUPATI)
		nelayan) dan BUMDES (33PP-23)
		Revitalisasi Pasar Tradisional (33PP-28)
Memperkuat Pembangunan **Sumber Daya Manusia (SDM**), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran **Perempuan**, Pemuda, dan **Penyandang Disabilitas** (PN 4)	Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu **Pendidikan yang Berkualitas**, Merata, dan Berkeadilan (PP 5)	**Bea siswa** untuk santri/siswa berprestasi, olahragawan/pemuda berprestasi serta bea siswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu (33PP-01)
	Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat **Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas**, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan (PP 6)	**Klinik kesehatan**/Ambulance untuk pondok pesantren (33PP-02)
		Dukungan Pembangunan dan Operasional Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) (33PP-04)
		Peningkatan **kesejahteraan pendidik** baik formal maupun nonformal (33PP-06)
		Peningkatan kualitas sarana / prasarana akses serta kualitas sumberdaya manusia **(SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan** (33PP-07)
		Peningkatan **layanan UHC** dan Ambulance Gratis disemua tingkatan pelayanan kesehatan (33PP-08)
		Islamic Centre dan **perpustakaan** daerah yang representatif (33PP-29)
		1 (Satu) Kecamatan 1(satu) Sekolah **olahraga** (33PP-25)
		Persekabpas Naik Kelas (33PP-26)
	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan **Inklusif** (PP 8)	Perlindungan sosial bagi **kelompok masyarakat rentan** (orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (33PP-09)
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan **Industri Berbasis Sumber Daya Alam** untuk Meningkatkan	Jatim **Agro**, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan (PP 4)	Merdeka pupuk, petani milenial, Eco farming dan **pengembangan teknologi pertanian** untuk petani (33PP-10)

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR (NAWA BHAKTI SATYA)	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PASURUAN (33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI/WAKIL BUPATI)
Nilai Tambah di Dalam Negeri (PN 5)	Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian **Lingkungan Hidup** dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. (PP 9)	Penataan kawasan kumuh nelayan/kawasan nelayan dan pembangunan infrastruktur pendukung **(tambatan perahu, tangkis laut, dan sarana pendukung lainnya**) untuk petani tambak/nelayan (33PP-11)
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, **Pemerataan Ekonomi**, dan **Pemberantasan Kemiskinan** (PN 6)	Jatim Sejahtera, Mempercepat **Pengentasan Kemiskinan** dan **Pengurangan Ketimpangan** (PP 1)	Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas) serta **peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah** (33PP-09)
	Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas (PP 2)	Bantuan Keuangan Khusus **(BKK) untuk Desa** secara **merata** (33PP-16)
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan **Birokrasi**, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (PN 7)	Jatim Berkah-Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan **Tata Kelola Pemerintahan** yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif (PP 7)	Digitalisasi layanan publik, Pengembangan Pasuruan satu data dan **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** (SPBE) (33PP-33)
		Peningkatan **kesejahteraan ASN dan Aparatur Pemerintahan Desa** (Perangkat Desa, RT/RW, Kader Desa, Linmas dan BPD) (33PP-17)
		Penataan **Kawasan Ibukota** Bangil (33PP-27)
Memperkuat Penyelarasan **Kehidupan yang Harmonis** dengan **Lingkungan Alam** dan **Budaya**, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur (PN 8)	Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang **Harmonis** dan Inklusif (PP 8)	Bantuan Kelembagaan untuk ormas, **pondok pesantren, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah** (33PP-05)
	Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian **Lingkungan Hidup** dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. (PP 9)	Pembangunan/pengadaan sarana pendukung dalam rangka **mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir** (33PP-14)
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan/atau taman bermain di tingkat kecamatan (33PP-24)
		Pengembangan, perlindungan dan pelestarian **seni budaya berbasis kearifan lokal** (33PP-30)

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

3.2.1.6 Program Pendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)

Dokumen RIPJPID menghasilkan indikasi program dalam pengembangan PUD pada 5 (lima) tahun mendatang. Jenis PUD yang

dikembangkan adalah Produk Pertanian Padi dan Produk Pertanian Daging. Indikasi program pengembangan PUD disusun berdasarkan 6 (enam) elemen ekosistem riset dan inovasi daerah. Pelaksanaan indikasi program tersebut agar lebih terarah dilakukan pemetaan/persadingan dengan program (nomenklatur) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu urusan pemerintahan yang terkait (pada tabel 4.1 di bab 4). Pemetaan tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1.6.
Indikasi Program Pengembangan Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging

Elemen/ Sub ElemenEkosistem RID	Program Indikatif	Program Nomenklatur	Urusan Pemerintahan
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Penerbitan peraturan daerah atau Peraturan Bupati terkait pengembangan usaha mikro dan PUD	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang Litbang
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung (Sekretariat Daerah)
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Membangun Basis data yang terintegrasi dengan program satu data Indonesia dalam rangka mendukung riset dan inovasi terkait Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Urusan Statistik
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang Litbang
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Menyediakan infrastruktur dasar riset dan inovasi dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi dan Usaha	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Urusan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Urusan Pertanian

Elemen/ Sub ElemenEkosistem RID	Program Indikatif	Program Nomenklatur	Urusan Pemerintahan
	Peternakan Daging	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang Litbang
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Menyusun Skema anggaran untuk pengembangan Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Urusan Pertanian
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.	Inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat, khususnya Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang Litbang
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi			
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi riset dengan para stakeholder pada usaha mikro dan PUD	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Urusan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang Litbang
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi-UKM
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Menyediakan laboratorium terpadu guna pengembangan produk Usaha Pertanian Padi dan Usaha	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Urusan Pertanian

Elemen/ Sub ElemenEkosistem RID	Program Indikatif	Program Nomenklatur	Urusan Pemerintahan
	Peternakan Daging		
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi			
Penguatan Kemitraan antar kelembagaan	Kerjasama kemitraan riset guna mengembangkan Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung (Setda)
Peningkatan difusi inovasi	Transfer inovasi kepada pelaku Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Urusan Pertanian
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Konferensi/ seminar hasil riset dan inovasi untuk pengembangan Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang (Litbang)
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi-UKM
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi			
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Urusan Pertanian

Elemen/ Sub ElemenEkosistem RID	Program Indikatif	Program Nomenklatur	Urusan Pemerintahan
		Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi-UKM
Apresiasi prestasi inovasi	*Innovation award* bagi penghasil inovasi di Kabupaten Pasuruan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang (Litbang)
Pengembangan Perusahaan pemula berbasis riset	Pendampingan/ inkubasi calon pengusaha baru di Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging, berbasis riset terkait	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi-UKM
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Menyusun kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi-UKM
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah			

Elemen/ Sub ElemenEkosistem RID	Program Indikatif	Program Nomenklatur	Urusan Pemerintahan
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi PUD	Prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang (Litbang)
Penyelenggaraan pengembangan inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan Uaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang (Litbang)
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi-UKM
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung (Setda)
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global			
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Fasilitasi pemenuhan standar produk Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Urusan Pertanian
Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama riset bersama dengan lembaga riset	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Urusan Pertanian

Elemen/ Sub ElemenEkosistem RID	Program Indikatif	Program Nomenklatur	Urusan Pemerintahan
	internasional dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk Usaha Pertanian Padi dan Usaha Peternakan Daging	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Urusan Pertanian
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Urusan Koperasi-UKM
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung (Setda)
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; Program Riset dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang (Litbang)

Sumber: Bappelitbangda, 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan **penjabaran misi** yang **selaras dengan strategi** dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Arah kebijakan juga memperhatikan arah kebijakan transformasi RPJPD dan 33 (tiga puluh tiga) Program Program Priotas Bupati/Wakil Bupati. Rumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan lima tahun mendatang, disajikan sebagai berikut:

	STRATEGI (ST-01) Menciptakan Situasi yang Aman, Kondusif dan Demokratis melalui Optimalisasi Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama dan Kehidupan Demokratis, serta Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal.
(MISI-1) Mendukung dan Mendorong Kualitas Keimanan dan Kesalehan Masyarakat	**ARAH KEBIJAKAN :**
	(33PP-5) Bantuan kelembagaan untuk ormas, ponpes, sekolah keagamaan, dan tempat ibadah
	(33PP-29) Islamic center dan perpustakaan daerah yang representatif
	(33PP-30) Pengembangan, perlindungan dan pelestarian seni budaya berbasis kearifan lokal
	Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta penegakan perda (antara lain terhadap usaha tak berizin) secara tegas dan proporsional.

	STRATEGI (ST-02) Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Ketahanan Keluarga
	ARAH KEBIJAKAN :
	Peningkatan Pemberdayaan dan Perempuan
	Perlindungan Anak dan Perempuan dari TIndak Kekerasan
	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak

	STRATEGI (ST-03) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri, Pariwisata, dan Pertanian (dalam Arti Luas) dan Produk Unggulan Daerah
(MISI-2) Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran	**ARAH KEBIJAKAN:**
	(33PP-10) Merdeka pupuk, petani milenial, eco farming dan pengembangan teknologi pertanian untuk petani
	(33PP-11) Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan
	(33PP-13) Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukung) infrastruktur menuju daerah wisata
	(33PP-20) Pengembangan pusat lembaga sertifikasi profesi berbasis kebutuhan dunia kerja baik nasional maupun internasional
	(33PP-21) Pembangunan pasuruan coaching and creativity (pusat pelatihan dan kreatifitas) dalam pengembangan kreatifitas anak muda, optimalisasi ekraf dan sertifikasi produk unggulan/produk UMKM
	(33P-23) Fasilitasi temu usaha dan sinergi pola kemitraan antra dunia industri dengan kelompok ekonomi masyarakat (poktan, pok ternak, pok nelayan) dan BUMDES
	(33PP-28) Revitalisasi Pasar Tradisional
	Pengembangan produk unggulan daerah (**usaha pertanian-padi dan usaha peternakan-daging**) : - Penyediaan regulasi pendukung - Pengembangan klaster pusat keunggulan industri. - Pengembangan produk inovatif - Penyediaan lingkungan bisnis yang kondusif - Pengembangan kerjasama, budaya inovasi, dan rantai nilai produk unggulan.
	Pengembangan produk khas daerah melalui indikasi geografis (IG)
	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas,

	amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages).
	STRATEGI (ST-04) Menciptakan Situasi Kondusif untuk Investasi Daerah
	ARAH KEBIJAKAN:
	(33PP-19) Kemudahan perizinan berusaha dan menjaga hub industrial harmonis dan saling menguntungkan
	Penyederhanaan regulasi dan birokrasi
	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah
	STRATEGI (ST-05) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
	ARAH KEBIJAKAN:
	(33PP-14) Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
	(33PP-15) Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air
	(33PP-31) Pembangunan jalan poros kab dengan standart hotmix/cor
	STRATEGI (ST-06) Mengoptimalkan Upaya Pengendalian/ Mitigasi Kerusakan Lingkungan dan Rehabilitasinya
	ARAH KEBIJAKAN:
	Peningkatan akses masyarakat secara inklusif terhadap kuantitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman yang sehat dan berwawasan lingkungan.
	Pengelolaan Perternakan Ramah Lingkungan **(33PP-12)** IPAL komunal, Bio gas dan mandiri pakan untuk peternak)
	Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan **(33PP-24)** Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan/atau taman bermain di sertiap Kecamatan
	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
	STRATEGI (ST-07) Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Usaha Mikro serta Masyarakat Miskin
(MISI-3) Membangun Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produk Asli Pasuruan yang Kompetitif	**ARAH KEBIJAKAN :**
	Optimalisasi Layanan Jaminan Sosial Kesehatan dan Tenaga Kerja
	Akurasi / Validasi data kependudukan dan kemiskinan berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN)
	Penciptaan Wirausaha Baru, serta Kelembagaan Pendukungnya,
	Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Mikro

	(33PP-03) Santripreneur/Wirausahawan Baru dan Hibah Produktif Berbasis Ponses
	(33PP-09) Perlinsos bagi kelompok masyarakat rentan (lansia, anak-anak, fakir miskin, Wanita hamil, dan penyandang cacat/disabelitas) serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
	(33PP-18) Penciptaan Lapangan kerja baru dengan memprioritaskan tenaga kerja asli Pasuruan
	(33PP-22) UMK naik kelas berbasis potensi keunggulan daerah
	(33PP-32) Optimalisasi peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh untuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja buruh
	Peningkatan kualitas dan peran koperasi dalam perekonomian daerah
	STRATEGI (ST-08) Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Peningkatan Pelayanan dan Akses Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas Merata dan Berkeadilan
	ARAH KEBIJAKAN :
	(33PP-07) Peningkatan kualitas sarpras, akses, serta kualitas SDM **Pendidikan** dan Kesehatan
	(33PP-01) Beasiswa untuk santri siswa berprestasi, olahragawan atau pemuda berprestasi serta beasiswa untuk anak yatim dan anak tidak mampu
	(33PP-06) Peningkatan **kesejahteraan pendidik** baik **formal /nonformal** serta Tenaga kesehatan
	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Prasekolah dan 12 tahun Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah) dan Dukungan Pelaksanaan Sekolah Rakyat
	Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Berbasis Pengembangan Talenta dan Karakter, Literasi, Numerasi, *Digital Literacy* dan Muatan Lokal
	Peningkatan akses, kualitas, dan inovasi layanan kesehatan masyarakat primer dan rujukan (khususnya di wilayah Selatan dan Timur), posyandu, serta pemasyarakatan olahraga
	(33PP-07) Peningkatan kualitas sarpras, akses, serta kualitas SDM Pendidikan dan **Kesehatan**
	(33PP-06) Peningkatan **kesejahteraan** pendidik baik formal /nonformal serta **tenaga kesehatan**
	(33PP-02) Klinik Kesehatan/Ambulans utuk pondok Pesantren)
	(33PP-04) Dukungan Pembangunan dan Operasional RS NU
	(33PP-25) Satu kecamatan satu sekolah olahraga atau sepakbola
	(33PP-26) Persekabpas Naik Kelas
	Perluasan Upaya Promotif-Preventif dan Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat
	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Imunisasi Dasar Lengkap

	Percepatan Penuntasan dan Pencegahan Stunting
	Percepatan Eliminasi Penyakit Menular dan Pencegahan Penyakit Degeneratif
	Peningkatan peran posyandu dalam mendukung pencapaian SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentram Ketertiban Umum, dan Sosial.
	STRATEGI (ST-09) Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi, Optimalisasi Pemanfaatan Inovasi, Teknologi Tepat Guna, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi
	ARAH KEBIJAKAN :
	Peningkatan kerjasama riset dan inovasi dengan lembaga litbang pemerintah/swasta dan perguruan tinggi lokal dan luar daerah
	Perluasan penerapan tekonologi tepat guna dan teknologi informasi-komunikasi dalam usaha/aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat
	Peningkatan akses internet di wilayah *blank spot* atau kualitas sinyal rendah
	STRATEGI (ST-10) Meningkatkan Kerjasama dan Mengoptimalkan Peran Stakeholders (Pengusaha, Lembaga / Organisasi Masyarakat, Pemerintah Daerah Lain, Individu Masyarakat, Akademisi) dalam Pembangunan
(MISI-4) Memperkuat Sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Dunia Usaha dan Masyarakat sebagai Pilar Membangun Daerah **(MISI-5)** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Teknologi Informasi serta Aparatur Pemerintah yang Lebih Profesional dan Humanis	**ARAH KEBIJAKAN :**
	Optimalisasi Pemanfaatan CSR (*corporate social responsibility*) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan untuk Mendukung Kesinambungan Pembangunan Daerah
	Peningkatan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Dunia Usaha/Organisasi Masyarakat dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah
	(33PP-16) Bantuan Keuangan Khusus untuk Desa secara Merata
	(33PP-17) Peningkatan kesejahteraan ASN dan Aparatur Desa (perangkat desa, RT/RW, kader desa, linmas, BPD)
	STRATEGI (ST-11) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Penyederhanaan Regulasi, Penataan Kelembagaan yang Tepat Fungsi, dan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit
	ARAH KEBIJAKAN :
	Percepatan Digitalisasi Layanan Publik dan Pelaksanaan Audit SPBE dalam rangka Penguatan Aspek Pemerintahan Digital
	(33PP-33) Digitalisasi Layanan Publik, Pengembangan Pasuruan Satu Data, dan SPBE
	Peningkatan Pelayanan Publik (antara lain administrasi kependudukan) yang Cepat, Efektif,

	Mudah dan Transparan serta Pemerataan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Terjangkau Bagi Kelompok Rentan
	(33PP-27) Penataan Kawasan Ibukota Bangil
	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Prioritas Daerah dengan Prioritas Nasional
	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.
	Penguatan Pengendalian Pembangunan Daerah melalui Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
	Peningkatan pengawasan pelaksanaan proyek fisik yang bersifat strategis baik secara administrasi maupun teknis
	Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Intensifikasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah berbasis digital serta Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang/Aset Milik Daerah
	Pengembangan Pembiayaan Kreatif Pembangunan
	Optimalisasi Pemanfaatan Dana Transfer yang diterima dan Peningkatan Kualitas Belanja Daerah
	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui perencanaan kebutuhan pegawai, manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja serta pembinaan dan pendampingan ASN dalam permasalahan hukum.

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2025

3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Sektoral

Strategi penahapan pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana diuraikan sebelumnya menekankan pada adanya integrasi dan kolaborasi antar pihak, sektor atau pun stakeholders dalam membangun. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 mengamanahkan bahwa RPJMD disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, sehingga pembangunan lintas sektor maupun stakeholders serta pembangunan kewilayahan menjadi sangat penting dilakukan.

Program lintas sektoral atau kewilayahan diartikan sebagai program khusus pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang harus melibatkan berbagai sektor atau urusan penyelenggaraan pemerintahan pada sub wilayah (spasial) tertentu. Melalui program ini, sebuah TEMA pembangunan disepakati untuk dilakukan di sebuah lokasi/kawasan/wilayah tertentu (SPASIAL). Untuk mewujudkannya, semua kebutuhan program/kegiatan dalam pembangunan wilayah tersebuut didaftarkan sedemikian rupa (HOLISTIK), dan selanjutnya

dikerjakan bersama-sama oleh perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan (INTEGRATIF). Melalui program kewilayahan diharapkan bahwa akan ada kawasan atau lokasi potensial tertentu di Kabupaten Pasuruan yang tumbuh cepat dan dapat memberikan *multiplier effect* kepada wilayah sekitarnya.

Arah Kebijakan pembangunan lintas sektor untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai strategi pentahapan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Pembangunan Perekonomian Kabupaten Pasuruan di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Kebijakan ini diimplementasikan guna mendukung arah kebijakan atau tema pembangunan tahun 2026 dan 2027. Arah kebijakan tahun 2026 dan 2027 akan menjadi tema pembangunan lintas sektoral pertama yang harus didukung oleh program pembangunan seluruh perangkat daerah terkait. Struktur perekonomian Kabupaten Pasurusan dimana penyokong utamanya adalah Sektor Industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 60% lebih pada tahun 2024, perlu dikelola dengan baik agar memiliki dampak (*Impact*) yang besar bagi pembangunan daerah.

Sektor pertanian, khususnya agrokultur yang berkontribusi 4,9% lebih di tahun 2024 perlu mendapatkan perhatian serius, agar sektor primer ini mendaptkan jaminan perlindungan dari desakan aktivitas sektor industri dan perdagangan, khususnya alih fungsi lahan. Terkait dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pembangunan lintas sektornya adalah:

1. Hilirisasi sektor unggulan daerah yang diorientasikan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*Value Added*) yang diprioritaskan aktor ekonomi di sektor bawah (petani, pengrajin dll);
2. Penguatan limpahan kesejahteraan ekonomi (*Multiplier Effect*) dari Sektor industri ke sektor lain melalui dorongan terjadinya keterkaitan ke depan (*Forward Linkage*) dan terjadinya keterkaitan ke belakang (*Backward Linkage*) yang memungkinkan terjadinya redistribusi pendapatan lebih cepat di daerah. Konsep ini membuka kesempatan kepada seluruh sektor untuk saling terkait sehingga putaran ekonomi daerah lebih dinamis.
3. Ekspansi ekonomi lintas daerah yang diorientasikan untuk peningkatan ekspor (*Net Export*) dan surplus perdagangan antar

daerah (*Regional Trade Surplus*) yang merupakan salah satu faktor penting peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Untuk setiap arah kebijakan lintas sektoral di atas perlu diturunkan indikasi program yang harus dilakukan. Setelah itu, sinkronisasi indikasi program ke program nomenklatur beserta perangkat daerah terkait untuk melaksanakannya, hingga penentuan dimana (lokasi/lokus) pelaksanaan program tersebut, khususnya pada kawasan strategis cepat tumbuh dari sudut ekonomi, sebagaimana telah diarahkan dalam dokumen RTRW Kabupaten Pasuruan. Proses ini dilakukan saat penyusunan rencana tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2026 dan 2027.

2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Lingkungan Hidup.

Upaya peningkatan daya saing perekonomian daerah yang difokuskan pada kawasan strategis cepat tumbuh terpilih diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* ke peningkatan kapasitas ekonomi daerah sekitarnya pada khususnya dan Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan. Pembangunan dilakukan secara holistik pada kawasan tersebut, mulai dari penyediaan sarana-prasarana wilayah yang dibutuhkan, pengembangan sumberdaya ekonomi potensial di kawasan tersebut (baik sumberdaya manusia maupun aktifitas ekonominya), kemudahan berinvestasi di kawasan tersebut, hingga berbagai program/kegiatan lain sesuai kebutuhan pengembangan ekonomi kawasan. Perangkat daerah terkait mengintegrasikan dan mensinergikan program/kegiatan/sub kegiatannya pada lokus kawasan strategis yang telah ditentukan tersebut.

Berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur tersebut, maka kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan difokuskan pada:

- Peningkatan infrastruktur dasar secara berkualitas dan merata untuk mendukung pemenuhan layanan dasar (Standar Pelayanan Mimimal/SPM)
- Percepatan pembangunan jalan akses untuk pengembangan potensi lokal, termasuk potensi agroindustri (ketahanan pangan) dan kepariwisataan yang memiliki prospek strategis ke depan.
- Penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan.

- Penyediaan infrastruktur pendukung implementasi kebijakan pembangunan kewilayahan Nasional maupun Provinsi Jawa Timur yang berlokus di Kabupaten Pasuruan, sesuai kewenangan Kabupaten Pasuruan dan kesepakatan stakeholders terkait.

3. **Percepatan Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Daerah melalui pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan pendapatan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan Iptek dan Inovasi Daerah dalam penyelesaian permasalahan pembangunan daerah.**

Kebijakan lintas sektoral ini dapat dilakukan sebagai implementasi tema pembangunan tahun 2028 dan 2029 yang harus didukung oleh program pembangunan seluruh perangkat daerah terkait. Upaya pengentasan/penanggulangan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh (**holistik**), berupa pemberian hak-hak dasar masyarakat miskin (atau termarginalkan) untuk akses layanan wajib dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pemukiman layak, perlindungan dan jaminan sosial, rasa aman dan tentram, yang didukung oleh infrastruktur wilayah yang mendukung mereka untuk berdaya (meningkat pendapatannya). Program-program yang relevan pada perangkat daerah terkait, khususnya penyelenggara urusan wajib terkait pelayanan dasar, disinergikan dan diintegrasikan untuk dilaksanakan di lokasi (*spatial*) tertentu yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.

Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan dengan melanjutkan pembangunan ekonomi yang telah dimulai di dua tahun pertama, khususnya difokuskan pada kelompok masyarakat dan/atau lokasi yang termarjinalkan. Sejumlah indikasi program untuk membuka kesempatan kerja baru, meningkatkan produktifitas tenaga kerja – baik melalui pendidikan, pelatihan, jaminan kesehatan dan layanan lainya perlu dilakukan secara holistik dan terintegrasi.

Sedemikian pentingnya pemanfaatan Iptek dan inovasi dalam percepatan penyelesaian permasalahan daerah membuat upaya ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi antar pihak terkait. Kabupaten Pasuruan telah memiliki rencana induk dan peta jalan inovasi daerah yang dilengkapi dengan rekomendasi berbagai indikasi program untuk mengimplementasikan rencana tersebut.

4. Percepatan Reformasi Birokrasi dalam mendukung Tatakelola yang Adaptif dan ASN professional, melayani, dan *Agile*.

Arah kebijakan ini diimplementasikan dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan berintegritas menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan bebas korupsi, serta mampu beradaptasi dalam memanfaatkan teknologi dan meningkatkan efesiensi serta efektivitas pelayanan publik. Arah kebijakan ini juga menjadi bentuk program "percepatan reformasi birokrasi" sekaligus **tema** pembangunan lintas sektoral yang harus didukung oleh program pembangunan oleh perangkat daerah terkait. Upaya percepatan reformasi birokrasi dilakukan oleh seluruh perangkat daerah sehingga mampu memberikan layanan terbaiknya. Reformasi Birokrasi difokuskan pada upaya implementasi 8 area perubahan, yaitu:

- Manajemen perubahan dengan mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
- Penataan peraturan perundang-undangan dengan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan
- Penataan dan penguatan organisasi dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)
- Penataan tata laksana dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja
- Penataan sumber daya manusia dengan meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan
- Penguatan akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
- Penguatan pengawasan dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
- Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas

Meskipun reformasi birokrasi menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan, namun beberapa perangkat daerah, khususnya yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan, akan menjadi *leading sector* yang mengkoordinir upaya percepatan reformasi birokrasi ini. Perangkat daerah bersinergi dalam mengoordinasikan implementasi siklus manajemen pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga upaya tindak lanjut untuk perencanaan pembangunan berikutnya.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

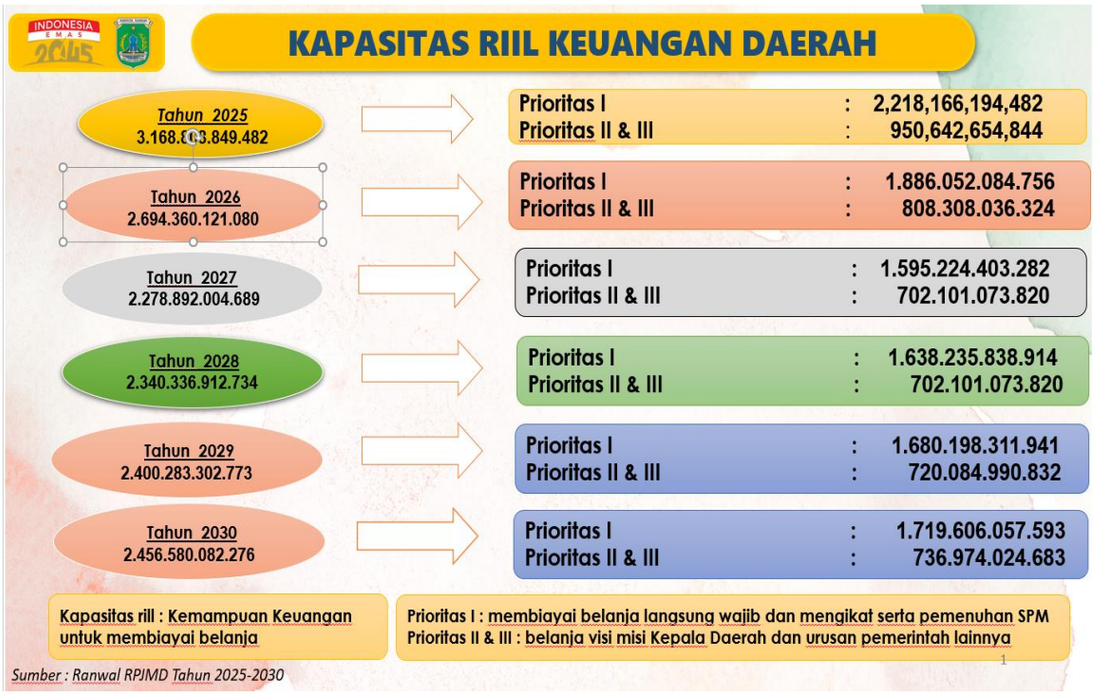
Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah menggambarkan proyeksi dana indikatif yang akan dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program-program pembangunan daerah untuk mencapai target-target indikator yang telah ditetapkan. Hal ini penting dilakukan karena rencana program pembangunan tanpa mendapatkan alokasi dana/anggaran yang cukup sesuai kebutuhan tidak akan terlaksana. Rencana program pembangunannya serta target capaian kinerjanya pun harus memperhatikan ketersediaan pendanaan daerah sehingga program kerja bersifat relavan dilaksanakan serta target indikator kinerja diperkirakan dapat dicapai.





Gambar 4.1. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2030
Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2024

Ketersediaan dana pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030 telah diproyeksikan dan penjelasannya diuraikan pada Subbab 2.2.3 dokumen RPJMD ini dan diringkas pada Gambar 4.1. Proyeksi ketersediaan dana pembangunan mempertimbangkan besaran dan komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendanaan program pembangunan identik dengan Belanja Daerah. Perumusan atau proyeksi belanja daerah umumnya memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan dapat ditingkatkan sedemikian rupa dengan asumsi-asumsi tertentu sehingga proyeksi belanja masih relevan untuk direalisasikan. Namun, di sisi lain, realiasasi belanja akan sangat tergantung pada pendapatan daerah. Selalu diharapkan bahwa belanja daerah dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Sayangnya, seringkali terjadi pendapatan daerah tidak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan belanja daerah. Karenanya, daerah dimungkinkan mengupayakan pembiayaan pembangunan daerah dari berbagai sumber yang dibenarkan oleh peraturan perundangan.



Gambar 4.2. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030
Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2024

Pada Gambar 4.2 disajikan data Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030. Data tabel tersebut bertujuan untuk memberikan pijakan mengenai penentuan pagu indikatif program dalam RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1. Berdasarkan data hasil proyeksi yang diperoleh dapat diketahui hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 hingga 2030, penurunan kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah pada Tahun 2027 hingga 2030 dikarenakan penerimaan Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran tidak dimasukan dalam penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan.

4.1.2. Program Perangkat Daerah

Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai rencana program pembangunan yang akan dilakukan oleh para perangkat daerah di Kabupaten Pasuruan. Harapannya, dana dapat dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga target indikator program dapat tercapai dan pada akhirnya berdampak pada capaian indikator kinerja daerah maupun insikator kinerja utama daerah yang telah ditetapkan. Rincian

detail program perangkat daerah, indikator kinerja beserta target dan pagu anggarannya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Program sebagaimana disajikan dalam tabel 4.2 merupakan Kumpulan program seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pasuruan tahun 2026-2030. Mengingat bahwa waktu penyusunan dokumen RPJMD ini dilaksanakan pada saat APBD tahun 2025 telah berjalan, maka periode dalam tabel tersebut tahun 2026-2030. Pencantuman target pembangunan tahun 2030 merupakan upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, kinerja tahun 2030 sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Daerah periode selanjutnya.

Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					717.704.525.574,00		642.919.714.009,00		654.492.268.861,00		665.814.985.113,00		676.401.443.376,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					609.294.841.198,00		603.604.588.000,00		603.604.588.000,00		603.604.588.000,00		603.604.588.000,00	
Meningkatnya kualitas dukungan administrasi dan teknis bagi pelaksanaan uruasan pemerintahan daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	609.294.841.198,00	100	603.604.588.000,00	100	603.604.588.000,00	100	603.604.588.000,00	100	603.604.588.000,00	PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					107.303.414.376,00		38.395.126.009,00		49.967.680.861,00		61.290.397.113,00		71.876.855.376,00	
Meningkatnya pengelolaan pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	96.20	99.88	96.40	107.303.414.376,00	96.50	38.395.126.009,00	96.60	49.967.680.861,00	96.70	61.290.397.113,00	96.80	71.876.855.376,00	PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	80.61	85.00	81.44		82.22		83.20		85.00		85.55		PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	62.97	80.38	70.05		72.10		73.01		74.15		75.00		PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
	Angka kelulusan warga belajar kesetaraan (Angka)	2117	1312	1317		1322		1327		1332		1337		PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					470.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00	
Meningkatnya Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan (%)	100	100	100	470.000.000,00	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	100	370.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					636.270.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pemenuhan kebutuhan PTK di semua jenjang pendidikan (%)	76.47	76.46	82.49	636.270.000,00	82.57	550.000.000,00	82.65	550.000.000,00	82.73	550.000.000,00	82.81	550.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.071.976.387.760,09		960.164.433.156,00		977.466.742.952,00		994.395.515.106,00		1.010.223.496.296,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					635.639.213.039,59		608.032.964.252,00		618.032.964.252,00		644.276.174.852,00		654.276.174.852,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	263.032.964.252,00	100	263.032.964.252,00	100	263.032.964.252,00	100	279.276.174.852,00	100	279.276.174.852,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit (Indeks)	90.73	90.90	91.10	303.559.550.213,91	91.40	280.000.000.000,00	91.70	285.000.000.000,00	91.90	290.000.000.000,00	92.20	295.000.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
Terpenuhinya Pemanfaatan Pelayanan Rumah Sakit Oleh Masyarakat	Persentase Pemanfaatan Rumah Sakit Grati (%)	103	100	100	69.046.698.573,68	100	65.000.000.000,00	100	70.000.000.000,00	100	75.000.000.000,00	100	80.000.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					429.534.870.221,00		347.961.739.904,00		355.264.049.700,00		345.949.611.254,00		351.777.592.444,00	
Meningkatnya cakupan pemeriksaaan laboratorium	Persentase Cakupan Standart Pelayanan minimal (SPM) Bid. Kesehatan (%)	100	100	100	1.449.500.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
Meningkatnya Cakupan SPM Bidang Kesehatan RSUD Grati	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit (RSUD Grati) (%)	98	90	91	60.000.000.000,00	92	50.600.032.582,00	93	47.680.833.169,00	94	44.716.711.583,00	94	41.620.207.297,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
Meningkatnya Cakupan SPM Rumah Sakit (RSUD Bangil)	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit (RSUD Bangil) (%)	77.32	77.50	78	80.000.000.000,00	78.50	63.592.645.082,00	79	64.777.312.693,00	79.5	65.828.460.203,00	80	66.486.132.720,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
Meningkatnya cakupan standar pelayanan minimal (Puskesmas)	Persentase Cakupan Standart Pelayanan Minimal	100	100	100	19.952.740.000,00	100	13.440.567.789,00	100	15.477.409.387,00	100	15.435.332.467,00	100	15.435.332.467,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
Meningkatnya fasilitas kesehatan sesuai standart	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai standart (%)	80	80	80	83.761.966.221,00	80	34.957.830.451,00	80	41.957.830.451,00	80	34.598.443.001,00	80	42.865.255.960,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
Meningkatnya jaminan keamanan fasillitas layanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi (Persentase)	100	100	100	2.125.000.000,00	100	2.125.000.000,00	100	2.125.000.000,00	100	2.125.000.000,00	100	2.125.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	Persentase angka kesembuhan penyakit menular (%)	83	90	90	182.245.664.000,00	90	182.245.664.000,00	90	182.245.664.000,00	90	182.245.664.000,00	90	182.245.664.000,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
	Persentase cakupan penemuan penyakit tidak menular (%)	57	60	65		70		75		80		85		PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
	Persentase cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak (%)	78	80	82		85		88		90		90		PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
	Prevalensi Depresi pada usia lebih atau sama dengan 15 tahun (%)	0.7	0.7	0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		PENGAMPU URUSAN KESEHARAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional (%)	98	98.5	99		99		99.5		99.5		100		PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					4.178.677.499,50		1.546.102.000,00		1.546.102.000,00		1.546.102.000,00		1.546.102.000,00	
Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan dan medis sesuai standart	Rasio tenaga Kesehatan dan Medis terhadap Populasi penduduk (Rasio)	2,24	2,25	2,26	4.178.677.499,50	2,27	1.546.102.000,00	2,28	1.546.102.000,00	2,29	1.546.102.000,00	2,30	1.546.102.000,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00	
Meningkatnya Sarana Farmasi, Alkes dan Makmin yang memenuhi standart	Persentase Sarana Farmasi, Alkes dan Makmin yang memenuhi standar (%)	80	80	80	325.000.000,00	80	325.000.000,00	80	325.000.000,00	80	325.000.000,00	80	325.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					2.298.627.000,00		2.298.627.000,00		2.298.627.000,00		2.298.627.000,00		2.298.627.000,00	
Meningkatnya pelaksanaan Desa Siaga Aktif (Puskesmas)	Persentase desa siaga aktif tk Puskesmas (%)	45	50	55	2.000.000.000,00	60	2.000.000.000,00	65	2.000.000.000,00	70	2.000.000.000,00	75	2.000.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
Meningkatnya pelaksanaan Desa Siaga Aktif strata aktif Purnama	Persentase desa siaga aktif (%)	45	50	55	298.627.000,00	60	298.627.000,00	65	298.627.000,00	70	298.627.000,00	75	298.627.000,00	PENGAMPU URUSAN KESEHARAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					190.987.489.629,54		171.086.593.210,00		174.166.151.888,00		177.179.226.315,00		179.996.376.014,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.407.017.565,55		23.174.377.568,84		23.443.220.159,18		24.268.783.814,29		24.001.236.560,77	
Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik/ Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	10.986.343.610,55	100	10.753.703.613,84	100	11.022.546.204,18	100	11.298.109.859,29	100	11.580.562.605,77	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	12.420.673.955,00	100	12.420.673.955,00	100	12.420.673.955,00	100	12.970.673.955,00	100	12.420.673.955,00	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					17.916.954.076,00		24.475.735.697,26		24.887.504.088,69		25.509.691.690,91		26.147.433.983,18	
Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Air Optimal	Persentase Sungai Yang Tertangani (%)	23.81	29.76	30.95	17.916.954.076,00	32.14	24.475.735.697,26	33.33	24.887.504.088,69	34.52	25.509.691.690,91	35.71	26.147.433.983,18	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	49.57	50.49	51.41		52.33		53.25		54.17		55.09		PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					12.206.312.276,50		7.884.796.745,00		4.598.521.414,00		6.763.931.883,00		5.872.633.027,00	
Tersedianya akses air minum yang layak dan aman pada Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	73.83	56.96	56.60	12.206.312.276,50	56.27	7.884.796.745,00	55.96	4.598.521.414,00	55.67	6.763.931.883,00	55.40	5.872.633.027,00	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					-		1.500.000.000,00		800.000.000,00		1.551.250.000,00		1.552.531.250,00	
Tersedianya akses sampah yang baik pada Rumah Tangga	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dg baik di perkotaan (%)	10.94	11.01	11.08	-	11.24	1.500.000.000,00	11.41	800.000.000,00	11.59	1.551.250.000,00	11.80	1.552.531.250,00	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.672.999.353,40		2.472.529.337,00		12.854.022.571,00		5.668.985.651,00		6.933.425.116,00	
Tersedianya akses sanitasi / air limbah yang layak dan aman pada Rumah Tangga	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman) (%)	69,48	96.68	96.03	3.672.999.353,40	95.42	2.472.529.337,00	94.85	12.854.022.571,00	94.31	5.668.985.651,00	93.81	6.933.425.116,00	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.400.000.000,00		2.460.000.000,00		2.521.500.000,00		2.584.537.500,00		2.649.150.937,50	
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	6.66	6.99	7.32	2.400.000.000,00	7.66	2.460.000.000,00	8.01	2.521.500.000,00	8.37	2.584.537.500,00	8.74	2.649.150.937,50	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
														PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					9.766.511.644,00		9.088.239.770,00		4.097.092.639,00		8.025.769.955,00		8.067.664.204,00	
Tersedianya bangunan gedung sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Persentase Pembangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (%)	84	79	79	9.766.511.644,00	79	9.088.239.770,00	79	4.097.092.639,00	79	8.025.769.955,00	79	8.067.664.204,00	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					1.750.000.000,00		1.600.000.000,00		1.100.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	
Tercapainya penataan bangunan dan lingkungan yang mantap	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang mantap (%)	100	100	100	1.750.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.600.000.000,00	100	1.600.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					115.384.074.929,49		93.631.091.336,96		95.245.905.196,59		96.590.019.007,78		97.757.981.432,78	
Meningkatnya Aksesbilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (%)	80.95	81.83	82.37	115.384.074.929,49	82.91	93.631.091.336,96	83.45	95.245.905.196,59	83.99	96.590.019.007,78	85.07	97.757.981.432,78	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					999.997.859,60		977.815.823,94		1.002.261.219,54		1.027.317.750,02		1.053.000.693,77	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	100	100	100	999.997.859,60	100	977.815.823,94	100	1.002.261.219,54	100	1.027.317.750,02	100	1.053.000.693,77	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					3.483.621.925,00		3.822.006.931,00		3.616.124.600,00		3.588.939.063,00		4.361.318.809,00	
Tercapainya kesesuaian penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%)	72	65	65	3.483.621.925,00	68	3.822.006.931,00	70	3.616.124.600,00	72	3.588.939.063,00	75	4.361.318.809,00	PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					13.523.243.726,00		20.049.982.643,00		20.510.656.330,00		20.774.384.585,00		21.185.804.300,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					7.067.224.848,10		8.283.982.643,00		8.374.656.330,00		8.342.384.585,00		8.526.804.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terlaksananya Administrasi Tata Kelola PD dengan Baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	93.90	100	100	7.067.224.848,10	100	8.283.982.643,00	100	8.374.656.330,00	100	8.342.384.585,00	100	8.526.804.300,00	PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					210.800.000,00		2.120.000.000,00		2.220.000.000,00		840.000.000,00		940.000.000,00	
Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	100	210.800.000,00	100	2.120.000.000,00	100	2.220.000.000,00	100	840.000.000,00	100	940.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					664.799.970,00		4.046.000.000,00		4.181.000.000,00		4.994.000.000,00		5.032.500.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani (%)	18.39	19.31	19.49	664.799.970,00	19.67	4.046.000.000,00	19.86	4.181.000.000,00	20.04	4.994.000.000,00	20.23	5.032.500.000,00	PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.982.318.750,00		2.240.000.000,00		2.240.000.000,00		2.240.000.000,00		2.240.000.000,00	
Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun (%)	100	100	100	1.982.318.750,00	100	2.240.000.000,00	100	2.240.000.000,00	100	2.240.000.000,00	100	2.240.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					3.598.000.157,90		3.340.000.000,00		3.475.000.000,00		4.338.000.000,00		4.426.500.000,00	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	3.95	4.34	5.08	3.598.000.157,90	6.27	3.340.000.000,00	7.47	3.475.000.000,00	8.69	4.338.000.000,00	10.30	4.426.500.000,00	PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengembang yang Bersertifikasi	Persentase Pengembang yang Bersertifikasi (%)	2	2	2	100.000,00	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					25.150.053.725,00		22.529.418.126,00		22.934.947.653,00		23.331.722.248,00		23.702.696.632,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.847.956.700,99		16.627.434.990,00		16.740.780.355,28		16.948.408.995,33		17.146.320.762,27	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	13.901.239.161,00	100	12.537.051.651,00	100	12.580.089.832,00	100	12.720.309.775,00	100	12.858.075.121,00	PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	3.946.717.539,99	100	4.090.383.339,00	100	4.160.690.523,28	100	4.228.099.220,33	100	4.288.245.641,27	PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					3.436.950.040,00		3.336.237.000,00		3.411.237.000,00		3.666.237.000,00		3.561.456.940,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Indeks)	98.47	98.48	98.5	3.436.950.040,00	98.6	3.336.237.000,00	98.7	3.411.237.000,00	98.8	3.666.237.000,00	98.9	3.561.456.940,00	PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.472.395.460,01		1.659.858.086,00		1.693.055.247,72		1.726.916.352,67		1.761.454.679,73	
Memingkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	309.999.700,00	100	204.627.730,00	100	208.720.284,60	100	212.894.690,29	100	217.152.584,10	PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya kualitas layanan	Persentase Cakupan Penyebaran	100	100	100	1.571.425.760,01	100	1.030.920.356,00	100	1.051.538.763,12	100	1.072.569.538,38	100	1.094.020.929,15	PENGAMPU URUSAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)													KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	590.970.000,00	100	424.310.000,00	100	432.796.200,00	100	441.452.124,00	100	450.281.166,48	PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.392.751.524,00		905.888.050,00		1.089.875.050,00		990.159.900,00		1.233.464.250,00	
Meningkatnya Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran Dan Non Kebakaran	Persentase penanggulangan kejadian kebakaran dan non kebakaran (%)	100	100	100	1.392.751.524,00	100	905.888.050,00	100	1.089.875.050,00	100	990.159.900,00	100	1.233.464.250,00	PENGAMPU URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					29.732.118.697,00		26.270.779.157,00		26.520.673.182,00		26.659.235.328,00		26.969.403.169,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.083.178.739,00		10.386.250.928,00		10.885.375.928,00		11.305.375.928,00		11.670.375.928,00	
Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	94	100	100	9.083.178.739,00	100	10.386.250.928,00	100	10.885.375.928,00	100	11.305.375.928,00	100	11.670.375.928,00	PENGAMPU URUSAN SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					3.013.638.879,00		3.077.712.899,00		3.350.000.000,00		3.635.000.000,00		3.920.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase masyarakat miskin yang di berdayakan (%)	100	100	100	3.013.638.879,00	100	3.077.712.899,00	100	3.350.000.000,00	100	3.635.000.000,00	100	3.920.000.000,00	PENGAMPU URUSAN SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					4.302.757.061,00		5.495.000.000,00		5.900.000.000,00		6.020.000.000,00		7.295.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi PPKS	Persentase PPKS yang memerlukan Rehabilitasi (%)	99	100	100	4.302.757.061,00	100	5.495.000.000,00	100	5.900.000.000,00	100	6.020.000.000,00	100	7.295.000.000,00	PENGAMPU URUSAN SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					11.530.978.667,00		5.041.815.330,00		3.860.297.254,00		2.923.859.400,00		1.059.027.241,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran	Persentase Penerima bantuan sosial sesuai data DTKS	97	100	100	11.530.978.667,00	100	5.041.815.330,00	100	3.860.297.254,00	100	2.923.859.400,00	100	1.059.027.241,00	PENGAMPU URUSAN SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.348.375.142,00		1.720.000.000,00		1.975.000.000,00		2.225.000.000,00		2.475.000.000,00	
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan (%)	100	100	100	1.348.375.142,00	100	1.720.000.000,00	100	1.975.000.000,00	100	2.225.000.000,00	100	2.475.000.000,00	PENGAMPU URUSAN SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					453.190.209,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya Taman Makam Pahlawan yang dikelola sesuai dengan standart	Persentase TMP yang dikelola sesuai dengan standart (%)	100	100	100	453.190.209,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	100	550.000.000,00	PENGAMPU URUSAN SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					19.114.795.036,00		17.122.512.393,00		17.430.807.616,00		17.732.447.088,00		18.014.472.497,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.242.823.855,00		8.605.512.393,00		8.913.807.616,00		9.215.447.088,00		9.497.472.497,00	
Terpenuhinya dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100%	100%	100%	6.242.823.855,00	100%	8.605.512.393,00	100%	8.913.807.616,00	100%	9.215.447.088,00	100%	9.497.472.497,00	PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					12.140.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Terlaksananya Penyusunan Dokumen RTKD Makro	Persentase Tersusunya Dokumen RTK Makro sesuai ketentuan (%)	100	100	100	12.140.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					7.378.771.181,00		2.735.000.000,00		2.735.000.000,00		2.735.000.000,00		2.735.000.000,00	
Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Prosentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	23.34	25	26.46	7.378.771.181,00	27.68	2.735.000.000,00	28.91	2.735.000.000,00	30.14	2.735.000.000,00	31.37	2.735.000.000,00	PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					240.530.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya Penempatan Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	44.27	44.70	45.23	240.530.000,00	45.70	250.000.000,00	45.98	250.000.000,00	46.00	250.000.000,00	46.3	250.000.000,00	PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					5.240.530.000,00		5.487.000.000,00		5.487.000.000,00		5.487.000.000,00		5.487.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perselisihan yang diselesaikan dengan Mediasi/Anjuran	Prosentase PPHI yang diselesaikan dengan anjuran/PB (%)	74	66.43	68.04	5.240.530.000,00	69.65	5.487.000.000,00	71.25	5.487.000.000,00	72.86	5.487.000.000,00	74.47	5.487.000.000,00	PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					2.820.660.000,00		2.890.000.000,00		3.165.000.000,00		3.540.000.000,00		3.710.000.000,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					880.000.000,00		920.000.000,00		1.010.000.000,00		1.210.000.000,00		1.250.000.000,00	
Terselenggaranya kegiatan yang responsif gender oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan (%)	100	100	100	880.000.000,00	100	920.000.000,00	100	1.010.000.000,00	100	1.210.000.000,00	100	1.250.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					486.880.000,00		510.000.000,00		540.000.000,00		610.000.000,00		690.000.000,00	
Terlaksananya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani instansi terkait (%)	100	100	100	486.880.000,00	100	510.000.000,00	100	540.000.000,00	100	610.000.000,00	100	690.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					500.000.000,00		540.000.000,00		580.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Terwujudnya Kabupaten Pasuruan Layak Anak	Nilai Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pasuruan (Nilai)	703	720	737	500.000.000,00	754	540.000.000,00	771	580.000.000,00	788	600.000.000,00	805	600.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					953.780.000,00		920.000.000,00		1.035.000.000,00		1.120.000.000,00		1.170.000.000,00	
Terlaksananya penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	100	100	100	953.780.000,00	100	920.000.000,00	100	1.035.000.000,00	100	1.120.000.000,00	100	1.170.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.210.874.000,00		920.000.000,00		1.000.000.000,00		1.015.000.000,00		1.047.016.380,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan					150.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KEMANDIRIAN PANGAN														
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (persen) (%)	10.22	10.27	10.32	150.000.000,00	10.37	225.000.000,00	10.42	225.000.000,00	10.47	225.000.000,00	10.52	225.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PANGAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					975.874.000,00		580.000.000,00		600.000.000,00		615.000.000,00		640.000.000,00	
MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	89.40	89.45	89.50	975.874.000,00	89.55	580.000.000,00	89.60	600.000.000,00	89.65	615.000.000,00	89.70	640.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PANGAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					65.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	32.21	32.28	33.90	65.000.000,00	32.20	75.000.000,00	30.51	75.000.000,00	28.81	75.000.000,00	27.12	75.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PANGAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					20.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		107.016.380,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	40.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	107.016.380,00	PENGAMPU URUSAN PANGAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					15.046.730.200,00		5.543.000.000,00		5.543.000.000,00		5.730.000.000,00		5.740.000.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					99.999.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi (%)	100	100	100	99.999.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					14.946.131.200,00		5.030.000.000,00		5.030.000.000,00		5.030.000.000,00		5.030.000.000,00	
Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	100	100	100	14.946.131.200,00	100	5.030.000.000,00	100	5.030.000.000,00	100	5.030.000.000,00	100	5.030.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Santunan Tanah untuk Pembangunan	untuk Pembangunan (%)													
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					500.000,00		185.000.000,00		185.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00	
Meningkatnya Ketersediaan Tanah yang Siap Diredistribusikan	Persentase Tersedianya Tanah yang siap Diredistribusikan (%)	4.10	4.15	4.17	500.000,00	8.33	185.000.000,00	12.50	185.000.000,00	16.67	200.000.000,00	20.83	210.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					100.000,00		228.000.000,00		228.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terlaksananya Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah yang Terlaksana (%)	4.16	4.22	4.17	100.000,00	8.33	228.000.000,00	12.5	228.000.000,00	16.67	300.000.000,00	20.83	300.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					72.749.965.338,50		65.169.418.950,00		66.342.468.491,00		67.490.193.196,00		68.563.287.268,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.936.830.145,00		18.827.556.506,00		19.087.832.880,00		19.286.192.577,00		19.471.868.568,00	
Meningkatnya kualitas dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	9.936.830.145,00	100	18.827.556.506,00	100	19.087.832.880,00	100	19.286.192.577,00	100	19.471.868.568,00	PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					178.700.000,00		1.067.145.600,00		965.445.000,00		720.405.100,00		736.189.400,00	
Meningkatnya pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase pemenuhan dokumen instrumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas (%)	44.44	66.67	60	178.700.000,00	60	1.067.145.600,00	60	965.445.000,00	60	720.405.100,00	60	736.189.400,00	PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.381.892.300,00		3.432.192.000,00		3.499.887.865,00		3.570.876.055,00		3.638.806.927,00	
Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan	Persentase meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan (%)	24.33	25.13	25.44	1.381.892.300,00	28.22	3.432.192.000,00	30.77	3.499.887.865,00	33.09	3.570.876.055,00	33.09	3.638.806.927,00	PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN					40.696.449.954,50		22.585.220.000,00		23.495.846.100,00		24.557.025.330,00		25.358.760.457,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
Meningkatnya tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan	Persentase peningkatan tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan (Akumulatif) (%)	11.76	12.33	21.05	40.696.449.954,50	26.32	22.585.220.000,00	31.58	23.495.846.100,00	36.84	24.557.025.330,00	42.11	25.358.760.457,00	PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					55.400.000,00		645.177.000,00		645.177.000,00		645.177.000,00		645.177.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis	Persentase Pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan teknis (%)	45	47	47	55.400.000,00	60	645.177.000,00	73	645.177.000,00	86	645.177.000,00	100	645.177.000,00	PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					228.200.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00	
Menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah	Persentase menurunnya pelanggaran Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah (%)	53	47	60	228.200.000,00	67	560.000.000,00	73	560.000.000,00	80	560.000.000,00	87	560.000.000,00	PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					25.200.000,00		223.889.000,00		244.657.000,00		244.657.000,00		244.657.000,00	
Meningkatnya MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA	Persentase MHA yang diakui sesuai dengan usulan MHA (%)	25	33	16.67	25.200.000,00	16.67	223.889.000,00	25	244.657.000,00	25	244.657.000,00	25	244.657.000,00	PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					97.460.000,00		484.655.000,00		484.655.000,00		484.655.000,00		484.655.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Persentase lembaga Sekolah, Perusahaan, Ponpes, Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	5.16	7.54	4.25	97.460.000,00	4.34	484.655.000,00	4.42	484.655.000,00	4.51	484.655.000,00	4.59	484.655.000,00	PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					20.100.000,00		174.632.300,00		174.632.300,00		174.632.300,00		174.632.300,00	
Meningkatnya Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang memiliki kinerja dalam rangka PPLH baik/sangat baik (%)	2.80	3.17	5.47	20.100.000,00	5.97	174.632.300,00	6.46	174.632.300,00	6.96	174.632.300,00	7.46	174.632.300,00	PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					56.700.000,00		205.954.000,00		205.954.000,00		205.954.000,00		205.954.000,00	
Meningkatnya ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten	Persentase ketaatan pelaku kegiatan dan/atau usaha melalui penyelesaian penanganan pengaduan di bidang PPLH Kabupaten (%)	100	100	100	56.700.000,00	100	205.954.000,00	100	205.954.000,00	100	205.954.000,00	100	205.954.000,00	PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					20.073.032.939,00		16.962.997.544,00		16.978.381.346,00		17.040.618.834,00		17.042.586.616,00	
Meningkatnya capaian target pengurangan sampah terhadap RPJPD-Meningkatnya capaian target penanganan sampah terhadap RPJPD	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap RPJPD (%)	32.10	43.7	50	20.073.032.939,00	60	16.962.997.544,00	70	16.978.381.346,00	80	17.040.618.834,00	90	17.042.586.616,00	PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap RPJPD (%)	79.3	78	83		85		88		90		92		PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					7.295.613.820,00		6.535.410.860,00		6.653.048.255,00		6.768.145.990,00		6.875.759.511,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.949.564.878,00		5.984.100.500,00		5.933.958.000,00		5.889.937.990,00		5.955.522.511,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya administrasi tata kelola perangkat daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	6.949.564.878,00	100	5.984.100.500,00	100	5.933.958.000,00	100	5.889.937.990,00	100	5.955.522.511,00	PENGAMPU URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					90.012.500,00		210.200.000,00		255.200.000,00		325.000.000,00		345.000.000,00	
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Prosentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran penduduk (%)	97.75	98	98.35	90.012.500,00	98.50	210.200.000,00	99	255.200.000,00	99.50	325.000.000,00	100	345.000.000,00	PENGAMPU URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					194.090.442,00		154.582.360,00		212.262.255,00		221.200.000,00		191.210.000,00	
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan SIpil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (%)	95	95	95.5	194.090.442,00	95	154.582.360,00	96.5	212.262.255,00	97	221.200.000,00	97.5	191.210.000,00	PENGAMPU URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					33.448.000,00		158.030.000,00		223.130.000,00		303.510.000,00		355.529.000,00	
Meningkatnya Penyediaan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Kabupaten	Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapil di tingkat Kabupaten (%)	100	100	100	33.448.000,00	100	158.030.000,00	100	223.130.000,00	100	303.510.000,00	100	355.529.000,00	PENGAMPU URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					28.498.000,00		28.498.000,00		28.498.000,00		28.498.000,00		28.498.000,00	
Ketersediaan Database yang terklasifikasi	Jumlah penyusunan buku profil Kependudukan (Buku)	200	200	200	28.498.000,00	200	28.498.000,00	200	28.498.000,00	200	28.498.000,00	200	28.498.000,00	PENGAMPU URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					16.871.032.344,00		15.113.070.774,00		15.385.106.048,00		15.651.268.382,00		15.900.123.550,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.429.230.290,00		5.065.995.530,00		5.132.055.804,00		5.229.218.138,00		5.233.073.306,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya administrasi tata kelola perangkat daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	5.429.230.290,00	100	5.065.995.530,00	100	5.132.055.804,00	100	5.229.218.138,00	100	5.233.073.306,00	PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					18.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	33.14	100	100	18.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					25.025.000,00		7.000.000,00		16.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya Kerjasama Desa dan atau dengan Pihak Ketiga	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	78.89	75	75	25.025.000,00	75	7.000.000,00	75	16.000.000,00	75	35.000.000,00	75	35.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					9.658.793.744,00		9.757.341.744,00		9.867.341.744,00		9.852.341.744,00		10.082.341.744,00	
Meningkatnya Pengelolaan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa dan atau Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	9.658.793.744,00	100	9.757.341.744,00	100	9.867.341.744,00	100	9.852.341.744,00	100	10.082.341.744,00	PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.739.983.310,00		267.733.500,00		349.708.500,00		509.708.500,00		519.708.500,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa yang meningkat volume usahanya (lembaga ekonomi desa/Pasar desa/KUB/UMKM dan atau pemanfaatkan TTG (%)	7.04	21.11	21.11	64.025.000,00	21.11	64.025.000,00	21.11	89.000.000,00	21.11	124.000.000,00	21.11	124.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pemberdayaan Masyarakat	"Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%) " (%)	82	100	100	1.675.958.310,00	100	203.708.500,00	100	260.708.500,00	100	385.708.500,00	100	395.708.500,00	PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN					1.075.000.000,00		1.075.000.000,00		1.075.000.000,00		1.075.000.000,00		1.075.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KELUARGA BERENCANA														
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					-		185.000.000,00		175.000.000,00		170.000.000,00		160.000.000,00	
Terlaksananya program pengendalian penduduk di Kabupaten	Persentase pelaksanaan program pengendalian penduduk di Kabupaten (%)	100	100	-	-	100	185.000.000,00	100	175.000.000,00	100	170.000.000,00	100	160.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.075.000.000,00		470.000.000,00		515.000.000,00		500.000.000,00		505.000.000,00	
Meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%)	76.72	77.27	77.82	1.075.000.000,00	78.37	470.000.000,00	78.92	515.000.000,00	79.47	500.000.000,00	80.02	505.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					-		420.000.000,00		385.000.000,00		405.000.000,00		410.000.000,00	
Terlaksananya kegiatan (poktan) BKB,BKR,BKL,PIK-R,UPPKA,PPKS yang aktif	Persentase Kegiatan Pembinaan Keluarga (poktan) BKB,BKR,BKL,PIK-R,UPPKA,PPKS yang aktif (%)	100	100	-	-	100	420.000.000,00	100	385.000.000,00	100	405.000.000,00	100	410.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					83.263.170.560,28		74.587.148.188,00		75.929.716.855,00		77.243.300.957,00		78.471.469.442,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39.904.690.253,96		43.027.193.772,00		43.881.270.767,00		44.437.904.652,00		45.262.662.747,00	
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	39.904.690.253,96	100	43.027.193.772,00	100	43.881.270.767,00	100	44.437.904.652,00	100	45.262.662.747,00	PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					43.358.480.306,32		31.559.954.416,00		32.048.446.088,00		32.805.396.305,00		33.208.806.695,00	
Terlaksanaan kendaraan yang melaksanakan Uji Kir Kendaraan	Persentase Kendaraan yang di uji (perbandingan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala dibandingkan dengan	96.52	96.60	96.60	1.915.900.000,00	96.65	1.532.720.000,00	96.70	1.567.566.000,00	96.75	1.606.755.150,00	96.80	1.635.260.278,00	PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dengan taman uji) (%)													
Terlaksananya audit inspeksi Keselamatan LLAJ	'Persentase Fasilitas Perhubungan yang memenuhi standar Keselamatan (jumlah perlengkapan dan prasarana perhubungan yang telah di audit inspeksi dan memenuhi syarat keselamatan) (%)	90	67	70	1.300.450.000,00	72	969.360.000,00	72	989.469.000,00	72	1.005.572.675,00	72	1.020.784.126,00	PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Persentase Pemenuhan Faskes Jalan (%)	54.81	80	80	17.519.500.000,00	80	12.985.286.916,00	81	13.273.331.454,00	82	13.568.593.252,00	83	13.859.965.117,00	PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN
Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pasuruan	Konektivitas Darat (Persentase)	44.57	40	77.27	2.228.600.000,00	81.82	1.750.680.000,00	86.36	1.803.572.000,00	90.91	1.852.575.300,00	95.45	1.898.526.806,00	PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN
Terselenggaranya penyediaan dan pembangunan prasarana perhubungan	Persentase Prasarana Perhubungan yang tersedia dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur ((Jumlah Titik parkir+jumlah Parkir khusus+jumlah terminal+ fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang) di bandingkan jumlah kebutuhan (%)	81.74	81.88	81.88	20.394.030.306,32	82	14.321.907.500,00	82.3	14.414.507.634,00	82.7	14.771.899.928,00	83	14.794.270.368,00	PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.290.912.500,00		6.261.302.018,00		6.375.621.454,00		6.496.386.505,00		6.604.623.950,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.140.413.200,00		5.572.887.018,00		5.603.206.454,00		5.631.971.505,00		5.660.208.950,00	
Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	84	100	6.140.413.200,00	100	5.572.887.018,00	100	5.603.206.454,00	100	5.631.971.505,00	100	5.660.208.950,00	PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					883.999.300,00		386.415.000,00		421.415.000,00		511.415.000,00		511.415.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui	250.16	74.97	75.09	883.999.300,00	76.92	386.415.000,00	77.53	421.415.000,00	78.14	511.415.000,00	79.36	511.415.000,00	PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%) (%)													
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					266.500.000,00		302.000.000,00		351.000.000,00		353.000.000,00		433.000.000,00	
Terselenggaranya layanan publik yang berbasis digital dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan berbasis digital dan terintegrasi (%) (%)	11.36	18.87	22.64	266.500.000,00	22.64	302.000.000,00	30.19	351.000.000,00	33.96	353.000.000,00	37.74	433.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					16.538.463.924,50		22.570.282.540,00		19.068.796.313,00		18.616.474.338,00		19.275.468.080,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.753.026.424,50		20.714.082.540,00		17.212.596.313,00		16.760.274.338,00		17.419.268.080,00	
Terlaksananya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	14.753.026.424,50	100	20.714.082.540,00	100	17.212.596.313,00	100	16.760.274.338,00	100	17.419.268.080,00	PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Koperasi yang mempunyai legalitas (%) (%)	14.55	18.18	21.82	50.000.000,00	25.45	50.000.000,00	29.09	50.000.000,00	43.64	50.000.000,00	43.64	50.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%) (%)	25.07	26.24	27.18	150.000.000,00	28.12	150.000.000,00	29.05	150.000.000,00	29.99	150.000.000,00	29.99	150.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Persentase KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat	Persentase KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat (%)	21.13	22.49	23.43	50.000.000,00	24.37	50.000.000,00	25.30	50.000.000,00	26.24	50.000.000,00	26.24	50.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN					106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00		106.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
LATIHAN PERKOPERASIAN														
Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	18.25	21	23	106.000.000,00	26	106.000.000,00	28	106.000.000,00	30	106.000.000,00	30	106.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					19.037.500,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar	Persentase Koperasi yang meningkat akses Pembiayaan dan akses pasar (%)	40	46	48	19.037.500,00	50	40.000.000,00	52	40.000.000,00	53	40.000.000,00	53	40.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.000.200.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00		1.050.000.000,00	
Pertumbuhan Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha (%) (%)	30	30	40	1.000.200.000,00	50	1.050.000.000,00	60	1.050.000.000,00	70	1.050.000.000,00	70	1.050.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					410.200.000,00		410.200.000,00		410.200.000,00		410.200.000,00		410.200.000,00	
Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	"Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor " (%)	0	1	2	410.200.000,00	3	410.200.000,00	4	410.200.000,00	5	410.200.000,00	5	410.200.000,00	PENGAMPU URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.823.344.800,00		6.112.352.272,00		6.222.374.613,00		6.330.021.694,00		6.430.669.038,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.465.568.520,00		5.395.352.272,00		5.492.468.613,00		5.737.763.037,00		5.828.934.242,49	
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik/ Sesuai Regulasi (%)	80	80	80	5.465.568.520,00	80	5.395.352.272,00	80	5.492.468.613,00	80	5.737.763.037,00	80	5.828.934.242,49	PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					621.354.000,00		330.000.000,00		335.940.000,00		180.761.170,00		183.653.348,72	
Tercapainya kepuasan investor terhadap	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim	80	81	82.5	621.354.000,00	83	330.000.000,00	83.5	335.940.000,00	84	180.761.170,00	84	183.653.348,72	PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
pengembangan iklim Penanaman Modal	penanaman modal. (%)													
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					250.000.000,00		115.000.000,00		117.070.000,00		122.279.615,00		124.236.088,84	
Tercapainya penyampaian informasi potensi daerah melalui promosi investasi	Persentase informasi potensi yg dipublikasikan (%)	60	65	72	250.000.000,00	75	115.000.000,00	77	117.070.000,00	77	122.279.615,00	77	124.236.088,84	PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					262.003.280,00		130.000.000,00		132.340.000,00		138.229.130,00		140.440.796,08	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	90	65	92	262.003.280,00	94	130.000.000,00	96	132.340.000,00	96	138.229.130,00	96	140.440.796,08	PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					204.429.000,00		125.000.000,00		127.250.000,00		132.912.625,00		135.039.227,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha (%)	65	70	71	204.429.000,00	72	125.000.000,00	73	127.250.000,00	74	132.912.625,00	74	135.039.227,00	PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					19.990.000,00		17.000.000,00		17.306.000,00		18.076.117,00		18.365.334,87	
meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%)	100	100	100	19.990.000,00	100	17.000.000,00	100	17.306.000,00	100	18.076.117,00	100	18.365.334,87	PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					17.464.797.102,00		15.644.965.244,00		15.926.574.618,00		16.202.104.359,00		16.459.717.819,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.694.224.832,00		5.430.984.019,00		5.463.636.816,00		5.496.942.667,00		5.530.914.637,00	
Dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	3.694.224.832,00	100	5.430.984.019,00	100	5.463.636.816,00	100	5.496.942.667,00	100	5.530.914.637,00	PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA					3.599.980.000,00		2.115.900.000,00		2.158.218.000,00		2.201.382.360,00		2.245.410.008,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
SAING KEPEMUDAAN														
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemberdayaan pemuda (%)	100	100	100	3.599.980.000,00	100	2.115.900.000,00	100	2.158.218.000,00	100	2.201.382.360,00	100	2.245.410.008,00	PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					9.000.547.270,00		7.597.946.225,00		7.794.584.802,00		7.983.444.332,00		8.152.654.174,00	
Meningkatnya Prestasi olahraga	Persentase Atlet yang mendapatkan medali (%)	18	20	22	9.000.547.270,00	24	7.597.946.225,00	26	7.794.584.802,00	28	7.983.444.332,00	30	8.152.654.174,00	PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.170.045.000,00		500.135.000,00		510.135.000,00		520.335.000,00		530.739.000,00	
Meningkatnya Anggota Pramuka berprestasi	Persentase Anggota Pramuka Berprestasi (%)	3	3.25	3.5	1.170.045.000,00	3.75	500.135.000,00	4	510.135.000,00	4.25	520.335.000,00	4.5	530.739.000,00	PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					42.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					42.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00	
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Statistik yang terpercaya dan berkualitas	% ketersediaan data statistik sektoral (jumlah data statistik sektoral yg berhasil dikumpulkan/jumlah data statistik sektoral yg dibutuhkan)*100% (%)	52	80	55	42.000.000,00	58	195.000.000,00	60	195.000.000,00	62	195.000.000,00	65	195.000.000,00	PENGAMPU URUSAN STATISTIK
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					5.000.000,00		117.000.000,00		121.000.000,00		116.000.000,00		116.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					5.000.000,00		117.000.000,00		121.000.000,00		116.000.000,00		116.000.000,00	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	% Sistem Elektronik Daerah yang Teramankan sertifikat elektronik atau penyandian (%)	4.55	7.55	11.36	5.000.000,00	18.18	117.000.000,00	20.45	121.000.000,00	22.73	116.000.000,00	27.27	116.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					4.350.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					4.058.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya obyek kebudayaan yang dikembangkan	Persentase pengembangan obyek kebudayaan	5.22	5.66	5.44	4.058.000.000,00	5.63	1.000.000.000,00	5.68	1.000.000.000,00	5.92	1.000.000.000,00	6.21	1.000.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					-		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Terlaksananya pelaku seni yang meningkat kapasitasnya	Persentase pelaku seni bersertifikat	10.22	11.21	-	-	10.22	400.000.000,00	11.44	400.000.000,00	13.52	400.000.000,00	14.77	400.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					56.450.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
terlaksananya sejarah lokal yang dipublikasikan	Persentase publikasi sejarah lokal	5.33	5.99	6.02	56.450.000,00	6.55	350.000.000,00	7.22	350.000.000,00	7.65	350.000.000,00	7.71	350.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					40.138.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Terlaksananya cagar budaya yang dilidungi	persentase cagar budaya yang terlindungi	4.33	4.52	5.11	40.138.000,00	10.21	1.000.000.000,00	11.23	1.000.000.000,00	12.11	1.000.000.000,00	12.15	1.000.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					195.412.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya obyek budaya yang dimanfaatkan dalam museum	Persentase pemanfaatan museum	5.66	5.82	5.95	195.412.000,00	6.32	250.000.000,00	6.52	250.000.000,00	6.66	250.000.000,00	6.44	250.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.799.004.000,00		521.000.000,00		582.866.000,00		636.866.000,00		672.866.000,00	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.615.282.500,00		446.000.000,00		510.000.000,00		564.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Persentase Perpustakaan yang Berbasis Inklusi Sosial (%)	5	10	5.70	116.138.000,00	18	65.000.000,00	22	65.000.000,00	23	65.000.000,00	24	65.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN
Meningkatnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Ber-SNP (%)	2.70	3.09	3.47	1.499.144.500,00	4.60	381.000.000,00	5.70	445.000.000,00	6.50	499.000.000,00	7.30	535.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					183.721.500,00		75.000.000,00		72.866.000,00		72.866.000,00		72.866.000,00	
Meningkatnya Koleksi Daerah Yang Ditemukan dan Dilestarikan	Persentase Koleksi Daerah yang Dilestarikan (%)	20	20	20	183.721.500,00	20	75.000.000,00	20	72.866.000,00	20	72.866.000,00	20	72.866.000,00	PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					4.780.797.876,00		5.373.186.521,00		5.417.415.878,00		5.467.220.754,00		5.528.275.734,00	
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					4.368.762.376,00		4.576.518.521,00		4.518.747.878,00		4.534.052.754,00		4.595.107.734,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terlaksananya Tata Kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	4.368.762.376,00	100	4.576.518.521,00	100	4.518.747.878,00	100	4.534.052.754,00	100	4.595.107.734,00	PENGAMPU URUSAN KEARSIPAN
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					375.903.000,00		514.000.000,00		596.000.000,00		630.500.000,00		630.500.000,00	
Meningkatnya pengelolaan, perawatan dan pelestarian Arsip	Persentase Peningkatan Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan (%)	30.00	35.00	40.00	375.903.000,00	42.50	514.000.000,00	45.00	596.000.000,00	47.50	630.500.000,00	50.00	630.500.000,00	PENGAMPU URUSAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					26.812.500,00		272.668.000,00		272.668.000,00		272.668.000,00		272.668.000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan penyelamatan Arsip Daerah (%)	5.00	5.50	5.50	26.812.500,00	5.50	272.668.000,00	5.50	272.668.000,00	5.50	272.668.000,00	5.50	272.668.000,00	PENGAMPU URUSAN KEARSIPAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					9.320.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip (%)	2	2	2	9.320.000,00	2	10.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	PENGAMPU URUSAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.910.954.900,00		3.503.433.400,00		3.566.495.200,00		3.628.195.560,00		3.685.883.869,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					2.486.990.000,00		988.000.000,00		1.005.784.000,00		1.022.882.328,00		1.039.146.157,00	
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (%)	0.42	0,43	0.44	2.486.990.000,00	0.45	988.000.000,00	0.46	1.005.784.000,00	0.47	1.022.882.328,00	0.48	1.039.146.157,00	PENGAMPU URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.133.704.900,00		1.648.000.000,00		1.677.664.000,00		1.706.184.288,00		1.733.312.618,00	
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (%)	0.57	0.58	0.59	1.133.704.900,00	0.60	1.648.000.000,00	0.61	1.677.664.000,00	0.62	1.706.184.288,00	0.63	1.733.312.618,00	PENGAMPU URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					208.415.500,00		600.000.000,00		610.800.000,00		621.183.600,00		631.060.419,00	
Meningkatnya Kelompok Masyarakat Pengawas	PERSENTASE KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS	80	81	82	208.415.500,00	83	600.000.000,00	84	610.800.000,00	85	621.183.600,00	86	631.060.419,00	PENGAMPU URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
(Pokmaswas) yang aktif	(POKMASWAS) YANG AKTIF (%) (%)													
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					81.844.500,00		267.433.400,00		272.247.200,00		277.945.344,00		282.364.675,00	
MENINGKATNYA USAHA PERIKANAN YANG MANDIRI	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUK OLAHAN PERIKANAN (%) (%)	5	7	8	81.844.500,00	9	267.433.400,00	10	272.247.200,00	11	277.945.344,00	12	282.364.675,00	PENGAMPU URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					10.949.716.576,00		10.705.486.109,00		10.952.184.859,00		11.193.557.657,00		11.419.235.224,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.807.916.576,00		6.305.486.109,00		6.352.184.859,00		6.343.557.657,00		6.319.235.224,00	
Terlaksananya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang Urusan pemerintah	100	100	100	4.807.916.576,00	100	6.305.486.109,00	100	6.352.184.859,00	100	6.343.557.657,00	100	6.319.235.224,00	PENGAMPU URUSAN PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.191.800.000,00		3.000.000.000,00		3.200.000.000,00		3.450.000.000,00		3.700.000.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	persentase peningkatan daya tarik pariwisata	100	100	100	2.191.800.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.200.000.000,00	100	3.450.000.000,00	100	3.700.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.850.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	persentase peningkatan jangkauan Pemasaran pariwisata	100	100	100	1.850.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					200.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatknya Kualitas Ekonomi Kreatif	Persentase penumbuhan ekonomi kreatif yang berkualitas	12.34	12.66	13.44	200.000.000,00	15.66	400.000.000,00	16.44	400.000.000,00	17.24	400.000.000,00	17.32	400.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					1.900.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Terlaksananya SDM Pariwisata dan	Persentase DM Pariwisata dan	100	100	100	1.900.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
ekonomi kreatif bersertifikat	ekonomi kreatif bersertifikat													
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					66.814.276.276,00		60.016.929.617,00		61.033.794.351,00		62.091.979.000,00		63.063.363.587,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					46.498.856.225,00		36.052.145.699,00		36.786.904.328,00		37.447.074.073,00		38.089.251.353,00	
Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Pd Dengan Baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	46.498.856.225,00	100	36.052.145.699,00	100	36.786.904.328,00	100	37.447.074.073,00	100	38.089.251.353,00	PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					5.861.883.100,00		6.193.676.000,00		6.277.355.268,00		6.313.378.637,00		6.447.124.616,00	
Meningkatnya kualitas sarana pertanian	Peningkatan Sarana Produksi Tanaman Pangan (%)	0.09	0.10	0.11	5.861.883.100,00	0.12	6.193.676.000,00	0.13	6.277.355.268,00	0.14	6.313.378.637,00	0.15	6.447.124.616,00	PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
	Peningkatan Sarana Produksi Hortikultura (%)	0.09	0.10	0.11		0.12		0.13		0.14		0.15		PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
	Peningkatan Sarana Produksi Komoditas Peternakan (%)	0.09	0.10	0.11		0.12		0.13		0.14		0.15		PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
	Peningkatan Sarana Produksi Komoditas Perkebunan (%)	0.09	0.10	0.11		0.12		0.13		0.14		0.15		PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					6.772.701.190,00		9.490.359.278,00		9.602.272.467,00		9.779.749.065,00		9.973.209.647,00	
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN	CAKUPAN LUAS LAHAN PETANIAN YANG DITETAPKAN MENJADI LP2B (Ha) (Ha)	26654	26654	34117.71	6.772.701.190,00	34117.71	9.490.359.278,00	34117.71	9.602.272.467,00	34117.71	9.779.749.065,00	34117.71	9.973.209.647,00	PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					195.000.000,00		474.681.000,00		477.825.258,00		480.901.635,00		483.777.971,00	
Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan produk pangan asal hewan yang HAUS	Persentase pengawasan produk asal hewan yang HAUS (%)	60	60	60	195.000.000,00	60	474.681.000,00	60	477.825.258,00	60	480.901.635,00	60	483.777.971,00	PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
	Persentase ternak yang dilayani (%)	40	40	40		40		40		40		40		PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN					35.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian (%)	75.00	75.50	76.00	35.000.000,00	77.00	150.000.000,00	78.00	200.000.000,00	79.00	300.000.000,00	80.00	300.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
	persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian (%)	100	100	100		100		100		100		100		PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					20.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (%)	66.67	100	66.87	20.000.000,00	67.07	80.000.000,00	67.27	80.000.000,00	67.47	80.000.000,00	67.67	80.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin usaha (%)	80	80	81		82		83		84		85		PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					7.430.835.761,00		7.576.067.640,00		7.609.437.030,00		7.690.875.590,00		7.690.000.000,00	
Meningkatkan Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Tani	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan (%)	3.45	100	4.31	7.430.835.761,00	5.17	7.576.067.640,00	6.03	7.609.437.030,00	6.90	7.690.875.590,00	7.76	7.690.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
	Persentase peningkatan kelembagaan penyuluhan (%)	5	8	12		12		12		12		12		PENGAMPU URUSAN PERTANIAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					22.350.000.000,00		10.145.000.000,00		14.085.000.000,00		15.085.000.000,00		14.797.500.000,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					33.590.000,00		205.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		247.500.000,00	
Meningkatnya Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	0.21	100.00	100.00	33.590.000,00	100.00	205.000.000,00	100.00	220.000.000,00	100.00	240.000.000,00	100.00	247.500.000,00	PENGAMPU URUSAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					20.116.188.500,00		6.535.000.000,00		10.100.000.000,00		10.700.000.000,00		10.085.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	60.00	100.00	100.00	20.116.188.500,00	100.00	6.535.000.000,00	100.00	10.100.000.000,00	100.00	10.700.000.000,00	100.00	10.085.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN					2.130.317.000,00		805.000.000,00		870.000.000,00		985.000.000,00		1.050.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
POKOK DAN BARANG PENTING														
Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	31.37	58.82	60.78	2.130.317.000,00	62.75	805.000.000,00	64.71	870.000.000,00	66.67	985.000.000,00	68.63	1.050.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					40.750.000,00		1.750.000.000,00		1.965.000.000,00		2.150.000.000,00		2.315.000.000,00	
Meningkatnya Nilai Ekspor Barang	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	1379733741.82	1407328416.66	1435474984.99	40.750.000,00	1464184484.69	1.750.000.000,00	1493468174.38	1.965.000.000,00	1523337537.87	2.150.000.000,00	1553804288.63	2.315.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					19.994.500,00		350.000.000,00		380.000.000,00		410.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	1.00	1.00	0.90	19.994.500,00	0.80	350.000.000,00	0.70	380.000.000,00	0.60	410.000.000,00	0.50	450.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					9.160.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00	
Meningkatnya Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	113.24	100.00	100.00	9.160.000,00	100.00	500.000.000,00	100.00	550.000.000,00	100.00	600.000.000,00	100.00	650.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					6.602.454.992,50		8.035.482.626,00		8.330.482.626,00		8.500.482.626,00		8.800.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					6.577.404.992,50		7.220.482.626,00		7.515.482.626,00		7.685.482.626,00		7.985.000.000,00	
Meningkatnya Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	100	100	100	6.577.404.992,50	100	7.220.482.626,00	100	7.515.482.626,00	100	7.685.482.626,00	100	7.985.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERINDUSTRIAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					25.012.500,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya Industri Wajib IUI yang mempunyai IUI Rekomendasi Teknis	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	11.01	3.46	3.35	25.012.500,00	3.24	40.000.000,00	3.14	40.000.000,00	3.04	40.000.000,00	2.95	40.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERINDUSTRIAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					37.500,00		775.000.000,00		775.000.000,00		775.000.000,00		775.000.000,00	
Meningkatnya Jumlah Industri yang terdata di SIINaS	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap,	40.69	46.87	51.88	37.500,00	56.00	775.000.000,00	61.07	775.000.000,00	65.66	775.000.000,00	69.73	775.000.000,00	PENGAMPU URUSAN PERINDUSTRIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Akurat, dan Terkini (Informasi)													
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Tingkat Kepuasan Transmigran	Prosentase Tingkat Kepuasan Transmigran (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	PENGAMPU URUSAN TRANSMIGRASI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					46.674.790.210,13		41.811.277.070,00		42.563.880.057,00		43.300.235.182,00		43.988.708.922,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.559.307.398,13		28.214.259.932,00		28.577.143.645,00		28.932.193.106,00		29.264.155.532,00	
Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perangkat Daerah Dengan Baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	30.559.307.398,13	100	28.214.259.932,00	100	28.577.143.645,00	100	28.932.193.106,00	100	29.264.155.532,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					14.637.914.467,00		12.265.961.604,00		12.633.008.791,00		12.992.131.838,00		13.327.902.955,00	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat Yang Terlaksana Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	14.637.914.467,00	100	12.265.961.604,00	100	12.633.008.791,00	100	12.992.131.838,00	100	13.327.902.955,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.477.568.345,00		1.331.055.534,00		1.353.727.621,00		1.375.910.238,00		1.396.650.435,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan (%)	100	100	100	1.477.568.345,00	100	1.331.055.534,00	100	1.353.727.621,00	100	1.375.910.238,00	100	1.396.650.435,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					44.832.189.312,00		40.160.675.186,00		40.883.567.339,00		41.590.853.054,00		42.252.147.618,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					42.899.929.312,00		38.228.415.186,00		38.951.307.339,00		39.658.593.054,00		40.319.887.618,00	
Meningkatnya kualitas dukungan	Persentase dokumen/laporan	100	100	100	42.899.929.312,00	100	38.228.415.186,00	100	38.951.307.339,00	100	39.658.593.054,00	100	40.319.887.618,00	SEKRETARIAT DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
administrasi dan teknis bagi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)													
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					1.932.260.000,00		1.932.260.000,00		1.932.260.000,00		1.932.260.000,00		1.932.260.000,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi terhadap pimpinan dan anggota DPRD	Persentase Program kerja DPRD yang terlaksana (%)	100	100	100	1.932.260.000,00	100	1.932.260.000,00	100	1.932.260.000,00	100	1.932.260.000,00	100	1.932.260.000,00	SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					12.077.764.000,00		11.073.607.009,00		11.225.514.490,00		11.399.074.890,00		11.752.454.490,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.586.925.120,00		7.266.895.990,00		7.291.905.990,00		7.265.466.390,00		7.269.845.990,00	
Terlaksananya dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi	100	100	100	7.586.925.120,00	100	7.266.895.990,00	100	7.291.905.990,00	100	7.265.466.390,00	100	7.269.845.990,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.499.999.280,00		2.227.608.500,00		2.227.608.500,00		2.577.608.500,00		2.877.608.500,00	
Meningkatnya Hasil Pengendalian Perencanaan	Tingkat kesalarasan antar bagian dokumen perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	952.058.500,00	100	907.608.500,00	100	907.608.500,00	100	907.608.500,00	100	907.608.500,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN
Terlaksananya proses penyusunan perencanaan pembangunan	Persentase usulan stakeholder yg berpartisipasi dalam proses perencanaan (%)	75	80	85	1.370.805.780,00	90	1.220.000.000,00	95	1.220.000.000,00	100	1.570.000.000,00	100	1.870.000.000,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	3	2	2		2		2		2		3		PENGAMPU UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN
Tersusunnya data informasi perencanaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Data dan informasi perencanaan perencanaan pembangunan daerah yang terverifikasi (%)	60	65	70	177.135.000,00	72	100.000.000,00	75	100.000.000,00	77	100.000.000,00	80	100.000.000,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.990.839.600,00		1.579.102.519,00		1.706.000.000,00		1.556.000.000,00		1.605.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	496.659.200,00	100	420.000.000,00	100	420.000.000,00	100	421.000.000,00	100	420.000.000,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	890.839.600,00	100	760.000.000,00	100	769.000.000,00	100	769.000.000,00	100	769.000.000,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100	603.340.800,00	100	399.102.519,00	100	517.000.000,00	100	366.000.000,00	100	416.000.000,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN
5.02 - KEUANGAN					1.266.075.423.833,86		1.134.150.364.670,00		1.154.565.071.234,00		1.174.539.046.967,00		1.193.214.217.814,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					504.884.129.852,00		414.706.002.089,03		460.827.901.108,52		470.470.028.508,31		470.117.263.962,52	
TERLAKSANANYA ADMINISTRASI TATA KELOLA PD DENGAN BAIK	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	1.360.883.704,00	100	1.219.079.621,00	100	1.241.023.056,00	100	1.262.492.753,00	100	1.282.566.390,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEUANGAN
TERLAKSANANYA ADMINISTRASI TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH DENGAN BAIK	Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik / Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	503.523.246.148,00	100	413.486.922.468,03	100	459.586.878.052,52	100	469.207.535.755,31	100	468.834.697.572,52	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEUANGAN
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					758.270.891.714,86		712.399.755.421,97		686.320.746.039,48		696.680.464.333,69		715.492.293.918,48	
MENINGKATNYA TATA KELOLA AKUNTANSI DAN PELAPORAN	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN SKPD YANG SESUAI SAP (%) (%)	100	100	100	194.961.960,00	100	754.000.000,00	100	767.000.000,00	100	781.000.000,00	100	794.000.000,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEUANGAN
MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN	PERSENTASE BELANJA PEGAWAI DILUAR TUNJANGAN GURU YANG DIALOKASIKAN MELALUI TKD (%) (%)	28	31	35	740.032.365,00	33	3.051.000.000,00	30	3.109.000.000,00	30	3.160.000.000,00	30	3.211.000.000,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEUANGAN
	PERSENTASE ALOKASI BELANJA INFRASTUKTUR PELAYANAN PUBLIK (%) (%)	34	32	42		45		48		50		51		PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEUANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERBENDAHARAAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR (%) (%)	92.70	92.89	93.07	757.335.897.389,86	93.26	708.594.755.421,97	93.44	682.444.746.039,48	93.63	692.739.464.333,69	93.82	711.487.293.918,48	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEUANGAN
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					947.185.971,00		5.277.000.000,00		5.617.000.000,00		5.558.000.000,00		5.745.000.000,00	
MENINGKATNYA TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE LAPORAN BARANG MILIK DAERAH YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN (%) (%)	100	100	100	947.185.971,00	100	5.277.000.000,00	100	5.617.000.000,00	100	5.558.000.000,00	100	5.745.000.000,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEUANGAN
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.973.216.296,00		1.767.607.159,00		1.799.424.086,00		1.830.554.125,00		1.859.659.933,00	
MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN DAN PELAPORAN	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PENDAPATAN (%) (%)	100	100	100	329.969.197,00	100	295.586.406,00	100	300.906.962,00	100	306.112.653,00	100	310.979.843,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEUANGAN
MENINGKATNYA PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN BERBASIS DIGITAL	PERSENTASE PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN BERBASIS DIGITAL (%) (%)	32.5	35.0	37.5	298.341.890,00	37.5	267.254.666,00	50	272.065.249,00	50	276.771.978,00	62.5	281.172.652,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEUANGAN
MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	PERSENTASE PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (%) (%)	9.67	2	4.47	1.344.905.209,00	4.64	1.204.766.087,00	4.70	1.226.451.875,00	4.88	1.247.669.494,00	5.08	1.267.507.438,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEUANGAN
5.03 - KEPEGAWAIAN					10.423.490.000,00		9.960.219.007,00		10.052.325.844,00		10.174.490.000,00		10.397.090.723,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.373.673.600,00		9.192.402.607,00		9.256.673.600,00		9.306.673.600,00		9.606.673.600,00	
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	84	86	86	9.373.673.600,00	86	9.192.402.607,00	86	9.256.673.600,00	86	9.306.673.600,00	86	9.606.673.600,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.049.816.400,00		767.816.400,00		795.652.244,00		867.816.400,00		790.417.123,00	
Meningkatnya kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan	Nilai aspek rencana kebutuhan, pengadaan dan informasi ASN (Nilai)	87.5	87.5	90.5	1.049.816.400,00	91	767.816.400,00	91.5	795.652.244,00	92	867.816.400,00	92	790.417.123,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN
	Nilai aspek promosi dan mutasi ASN (Nilai)	26.5	27.5	27.5		27.5		28		28		28		PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Nilai aspek pengembangan karir dalam peningkatan kompetensi pegawai (Nilai)	71.5	72.5	72.5		73		73		73		73		PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN
	Nilai aspek kinerja, penghargaan dan disiplin ASN (Nilai)	109	109	111.5		111.5		113		113.5		113.5		PENGAMPU UNSUR PENUNJANG KEPEGAWAIAN
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					870.377.500,00		156.827.500,00		246.827.500,00		302.838.696,00		246.827.500,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					870.377.500,00		156.827.500,00		246.827.500,00		302.838.696,00		246.827.500,00	
Meningkatnya pengembangan karier dan kompetensi pegawai	Nilai aspek pengembangan karir dalam peningkatan kompetensi pegawai (Nilai)	71.5	72.5	72.5	870.377.500,00	73	156.827.500,00	73	246.827.500,00	73	302.838.696,00	73	246.827.500,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.399.997.000,00		1.061.663.000,00		1.252.311.088,00		1.250.460.621,00		1.163.127.968,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					761.663.000,00		761.663.000,00		761.663.000,00		761.677.000,00		761.677.000,00	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian berbasis bukti dalam Permasalahan Daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah (%)	100	100	100	761.663.000,00	100	761.663.000,00	100	761.663.000,00	100	761.677.000,00	100	761.677.000,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					638.334.000,00		300.000.000,00		490.648.088,00		488.783.621,00		401.450.968,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	638.334.000,00	100	300.000.000,00	100	490.648.088,00	100	488.783.621,00	100	401.450.968,00	PENGAMPU UNSUR PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					16.749.095.996,00		15.003.840.193,00		15.273.909.317,00		15.538.147.948,00		15.785.204.500,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.187.091.216,00		13.668.539.193,00		13.865.580.993,00		13.966.143.168,00		14.220.406.220,00	
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen/ laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	15.187.091.216,00	100	13.668.539.193,00	100	13.865.580.993,00	100	13.966.143.168,00	100	14.220.406.220,00	INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					993.918.280,00		960.211.000,00		993.918.280,00		993.918.280,00		993.918.280,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal Tuntas/ Telah Selesai (TS) (%)	89	90	91	993.918.280,00	92	960.211.000,00	93	993.918.280,00	94	993.918.280,00	95	993.918.280,00	INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					568.086.500,00		375.090.000,00		414.410.044,00		578.086.500,00		570.880.000,00	
Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai Evaluasi AKIP Minimal A (%)	54	55	56	568.086.500,00	57	375.090.000,00	58	414.410.044,00	59	578.086.500,00	60	570.880.000,00	INSPEKTORAT
	Nilai Area Pengawasan APIP pada MCP KPK (Nilai)	89.47	89.48	89.49		89.50		89.51		89.52		89.53		INSPEKTORAT
	Persentase Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan ZI menuju WBK/WBBM (%)	44.44	44.44	44.44		44.44		55.56		55.56		55.56		INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					88.154.989.465,00		78.969.239.563,00		80.390.685.875,00		81.781.444.741,00		83.081.769.712,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					67.363.985.784,10		55.239.065.843,00		56.114.821.626,00		56.972.991.482,00		57.546.950.871,00	
Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	2.016.872.567,00	100	1.277.510.888,00	100	1.355.946.238,00	100	1.373.048.413,00	100	1.414.250.064,00	KECAMATAN GEMPOL
Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	2.150.681.384,00	100	1.904.422.344,00	100	1.953.473.562,00	100	1.985.620.450,00	100	2.015.352.248,00	KECAMATAN WINONGAN
Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	2.313.675.850,00	100	2.042.588.959,00	100	2.082.679.871,00	100	2.118.987.116,00	100	2.155.838.116,00	KECAMATAN REJOSO
Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik/ Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	2.122.499.000,00	100	1.864.857.806,00	100	1.846.011.747,00	100	1.877.020.204,00	100	1.877.663.599,00	KECAMATAN PASREPAN
	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PASREPAN
Terlaksananya administrasi tata	Persentase dokumen/laporan	100	100	100	2.375.479.592,00	100	2.114.733.722,00	100	2.156.379.929,00	100	2.194.659.668,00	100	2.229.423.635,00	KECAMATAN LUMBANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
kelola PD dengan baik	administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)													
Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	2.741.368.747,00	100	2.365.673.083,00	100	2.423.810.004,00	100	2.480.691.813,00	100	2.533.874.891,00	KECAMATAN KEJAYAN
Terlaksananya Administrasi Tata Kelola PD dengan Baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	1.712.455.842,00	100	1.495.679.403,00	100	1.536.102.583,00	100	1.559.647.025,00	100	1.571.938.620,00	KECAMATAN LEKOK
Terlaksananya administrasi tata kelola Pemerintah Daerah dengan baik	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik/ Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	3.266.202.580,00	100	2.812.993.495,00	100	2.884.855.378,00	100	2.949.295.376,00	100	3.006.545.172,00	KECAMATAN GRATI
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen/ laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	8.403.409.459,10	100	4.288.969.423,00	100	4.302.676.872,00	100	4.301.280.982,00	100	4.276.398.950,00	KECAMATAN BANGIL
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen/ laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	1.975.327.495,00	100	1.723.215.530,00	100	1.756.843.410,00	100	1.789.745.301,00	100	1.820.507.751,00	KECAMATAN REMBANG
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen/ laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	6,008,544,615.00	100	5,331,857,022.00	100	5.432.937.593,00	100	5.497.815.961,00	100	5.586.329.851,00	KECAMATAN PRIGEN
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen/ laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	3.654.963.262,00	100	3.116.111.293,00	100	3.156.160.619,00	100	3.237.460.619,00	100	3.155.213.921,00	KECAMATAN PRIGEN
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	2.375.647.000,00	100	2.096.429.950,00	100	2.120.954.384,00	100	2.151.500.970,00	100	2.180.781.993,00	KECAMATAN POHJENTREK
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	6.008.544.615,00	100	5.331.857.022,00	100	5.432.937.593,00	100	5.497.815.961,00	100	5.586.329.851,00	KECAMATAN REJOSO
	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN NGULING
Terlaksananya administrasi tata	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang	100	100	100	2.254.328.820,00	100	1.984.060.339,00	100	2.021.978.925,00	100	2.058.589.685,00	100	2.092.819.836,00	KECAMATAN SUKOREJO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
kelola Perangkat Daerah dengan baik	baik/sesuai regulasi (%)													
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	6.008.544.615,00	100	5.331.857.022,00	100	5.432.937.593,00	100	5.497.815.961,00	100	5.586.329.851,00	KECAMATAN PASREPAN
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	4.272.647.442,00	100	3.963.766.429,00	100	3.985.263.444,00	100	4.042.716.663,00	100	4.078.041.438,00	KECAMATAN PANDAAN
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik / Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	2.224.153.200,00	100	1.963.516.317,00	100	2.004.297.580,00	100	2.047.768.703,00	100	2.085.837.263,00	KECAMATAN TOSARI
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik/ Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	6.008.544.615,00	100	5.331.857.022,00	100	5.432.937.593,00	100	5.497.815.961,00	100	5.586.329.851,00	KECAMATAN PURWOSARI
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	2.667.557.570,00	100	2.144.888.205,00	100	2.185.706.093,00	100	2.200.583.826,00	100	2.209.522.280,00	KECAMATAN PURWODADI
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen/ laporan administrasi perangkat daerah yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	2.806.898.463,00	100	2.556.448.240,00	100	2.559.887.066,00	100	2.604.173.105,00	100	2.645.581.301,00	KECAMATAN KRATON
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik/ Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	2.019.204.920,00	100	1.563.676.550,00	100	1.596.682.728,00	100	1.628.976.339,00	100	1.659.170.063,00	KECAMATAN TUTUR
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	2.092.078.000,00	100	1.851.844.072,00	100	1.880.796.666,00	100	1.908.001.148,00	100	1.934.000.996,00	KECAMATAN PUSPO
Terlaksananya administrasi tata kelola Perangkat Daerah dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi (%)	100	100	100	2.596.731.000,00	100	2.312.485.673,00	100	2.363.449.945,00	100	2.403.369.468,00	100	2.440.453.796,00	KECAMATAN WONOREJO
Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perangkat Daerah dengan Baik	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi Perangkat Daerah yang Baik/ Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	2.923.608.208,00	100	2.598.719.643,00	100	2.638.024.417,00	100	2.688.228.011,00	100	2.718.744.462,00	KECAMATAN GONDANGWETAN
Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perangkat Daerah dengan Baik	Persentase Dokumen / Laporan Administrasi Perangkat Daerah	100	100	100	2.389.650.768,00	100	1.864.617.457,00	100	1.869.902.572,00	100	1.873.810.636,00	100	1.858.660.625,00	KECAMATAN BEJI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	yang Baik / Sesuai Regulasi (%)													
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					5.711.113.609,90		6.782.420.682,00		7.187.811.692,00		7.310.952.819,00		7.494.803.403,00	
Meningkatnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	22.750.000,00	100	30.000.000,00	100	70.637.500,00	100	73.669.375,00	100	76.852.844,00	KECAMATAN PASREPAN
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	6.950.000,00	100	15.319.986,00	100	13.282.375,00	100	8.045.494,00	100	8.447.768,00	KECAMATAN REJOSO
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	PERSENTASE DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TEPAT WAKTU (%)	100	100	100	203.534.160,00	100	212.000.000,00	100	217.000.000,00	100	217.000.000,00	100	220.000.000,00	KECAMATAN GRATI
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	PERSENTASE DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TEPAT WAKTU (%)	100	100	100	21.250.000,00	100	24.250.000,00	100	24.250.000,00	100	24.250.000,00	100	24.250.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	36.290.000,00	100	43.800.000,00	100	46.950.000,00	100	50.155.000,00	100	53.420.500,00	KECAMATAN PURWODADI
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	20.466.000,00	100	103.606.000,00	100	103.606.000,00	100	103.606.000,00	100	103.606.000,00	KECAMATAN GEMPOL
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	94.12	100	100	2.607.581.998,90	100	3.420.000.000,00	100	3.545.000.000,00	100	3.725.000.000,00	100	3.795.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	56.600.000,00	100	59.600.000,00	100	59.600.000,00	100	59.600.000,00	100	59.600.000,00	KECAMATAN REMBANG
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	747.228.934,00	100	808.539.559,00	100	955.000.000,00	100	845.000.000,00	100	885.000.000,00	KECAMATAN PRIGEN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100%	100	-	-	100	14.058.601,00	100	26.258.601,00	100	34.620.000,00	100	33.282.000,00	KECAMATAN POHJENTREK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	160.290.000,00	100	160.290.000,00	100	167.690.000,00	100	171.690.000,00	100	175.690.000,00	KECAMATAN GONDANGWETAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	PERSENTASE DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TEPAT WAKTU (%)	100	100	100	2.250.000,00	100	2.362.500,00	100	2.480.625,00	100	2.604.656,00	100	2.734.888,00	KECAMATAN WINONGAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	48.200.000,00	100	54.700.000,00	100	56.100.000,00	100	57.000.000,00	100	68.300.000,00	KECAMATAN LEKOK
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	51.160.000,00	100	56.860.000,00	100	59.860.000,00	100	63.860.000,00	100	66.860.000,00	KECAMATAN NGULING
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	847.021.224,00	100	821.520.000,00	100	861.920.000,00	100	880.000.000,00	100	908.000.000,00	KECAMATAN PANDAAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	11.000.000,00	100	12.400.000,00	100	12.590.000,00	100	10.000.000,00	100	9.450.000,00	KECAMATAN TOSARI
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	PERSENTASE DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TEPAT WAKTU (%)	100	100	100	18.775.000,00	100	6.000.000,00	100	6.120.000,00	100	6.242.400,00	100	6.554.520,00	KECAMATAN PURWOSARI
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	21.771.000,00	100	22.500.000,00	100	22.905.000,00	100	23.317.290,00	100	23.737.002,00	KECAMATAN LUMBANG
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	53.340.309,00	100	44.539.776,00	100	48.642.331,00	100	49.483.844,00	100	50.270.671,00	KECAMATAN KRATON
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	PERSENTASE DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TEPAT WAKTU (%)	100	100	100	19.026.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	KECAMATAN TUTUR
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	94.68	100	100	506.254.724,00	100	544.000.000,00	100	561.000.000,00	100	578.000.000,00	100	595.000.000,00	KECAMATAN BEJI
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang	100	100	100	11.000.000,00	100	11.700.000,00	100	12.100.000,00	100	12.500.000,00	100	12.900.000,00	KECAMATAN PUSPO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	diselesaikan tepat waktu (%)													
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	234.924.260,00	100	234.924.260,00	100	234.924.260,00	100	234.924.260,00	100	234.924.260,00	KECAMATAN KEJAYAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	3.450.000,00	100	4.450.000,00	100	4.895.000,00	100	5.384.500,00	100	5.922.950,00	KECAMATAN WONOREJO
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					14.399.599.918,00		15.237.810.488,00		15.324.317.033,00		15.754.797.047,00		16.128.918.863,00	
Meningkatnya partipasi masyarakat desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	35	35	100	4.684.000,00	100	5.250.000,00	100	5.344.500,00	100	5.440.701,00	100	5.538.633,00	KECAMATAN LUMBANG
Meningkatnya partipasi masyarakat desa/kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	28.040.000,00	100	29.442.000,00	100	30.914.100,00	100	32.459.804,00	100	34.082.793,00	KECAMATAN WINONGAN
Meningkatnya partipasi masyarakat desa/kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	1.047.960.200,00	100	1.091.000.000,00	100	1.126.500.000,00	100	1.162.000.000,00	100	1.212.500.000,00	KECAMATAN BEJI
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	9.980.000,00	100	9.980.000,00	100	22.000.000,00	100	24.000.000,00	100	25.500.000,00	KECAMATAN POHJENTREK
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	95	98	98	8.000.000,00	98	14.700.000,00	98	16.170.000,00	98	13.162.000,00	98	11.322.543,00	KECAMATAN TOSARI
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Purwodadi	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	22.374.500,00	100	107.750.000,00	100	118.825.000,00	100	129.825.000,00	100	141.807.500,00	KECAMATAN PURWODADI
Meningkatnya partisipasi masyarakat desa/kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	602.993.100,00	100	614.000.000,00	100	603.000.000,00	100	603.000.000,00	100	603.000.000,00	KECAMATAN GRATI
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	6.000.000,00	100	184.260.000,00	100	184.260.000,00	100	184.260.000,00	100	184.260.000,00	KECAMATAN GEMPOL
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	2.550.498.776,00	100	2.090.000.000,00	100	2.129.000.000,00	100	2.162.000.000,00	100	2.205.000.000,00	KECAMATAN PANDAAN
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (%)	97.63	100	100	6.503.481.866,00	100	7.728.000.000,00	100	7.869.000.000,00	100	8.030.000.000,00	100	8.208.500.000,00	KECAMATAN BANGIL
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	33.500.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	KECAMATAN REMBANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	1.669.939.800,00	100	1.396.728.440,00	100	1.225.562.500,00	100	1.370.000.000,00	100	1.436.000.000,00	KECAMATAN PRIGEN
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	401.603.000,00	100	406.950.000,00	100	412.450.000,00	100	417.200.000,00	100	421.950.000,00	KECAMATAN GONDANGWETAN
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	35.254.000,00	100	37.016.700,00	100	38.867.535,00	100	41.637.787,00	100	42.810.114,00	KECAMATAN REJOSO
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	12.900.000,00	100	13.050.000,00	100	13.300.000,00	100	13.500.000,00	100	13.800.000,00	KECAMATAN LEKOK
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	5.400.000,00	100	7.900.000,00	100	10.900.000,00	100	12.900.000,00	100	14.900.000,00	KECAMATAN NGULING
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	4.500.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	25.000.000,00	KECAMATAN PASREPAN
	Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		10		KECAMATAN PASREPAN
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100		100		100		100		100		KECAMATAN PASREPAN
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	789.510.985,00	100	755.358.555,00	100	755.670.916,00	100	787.204.280,00	100	789.108.927,00	KECAMATAN PURWOSARI
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100%	100%	100%	41.593.091,00	100%	25.478.193,00	100%	37.721.882,00	100%	38.374.475,00	100%	38.982.713,00	KECAMATAN KRATON
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	3.240.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	KECAMATAN TUTUR
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	18.000.000,00	100	20.800.000,00	100	22.500.000,00	100	25.300.000,00	100	27.100.000,00	KECAMATAN PUSPO
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	35	35	35	574.911.600,00	35	574.911.600,00	35	574.911.600,00	35	574.911.600,00	35	574.911.600,00	KECAMATAN KEJAYAN
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	15.235.000,00	100	15.235.000,00	100	15.419.000,00	100	15.621.400,00	100	15.844.040,00	KECAMATAN WONOREJO
Meningkatnya partisisipasi masyarakat desa/kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					259.490.484,00		468.298.652,00		586.492.462,00		496.952.109,00		600.122.912,00	
Meningkanya penanganan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	8.400.000,00	100	44.000.000,00	100	48.400.000,00	100	53.240.000,00	100	58.564.000,00	KECAMATAN PURWODADI
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	KECAMATAN GRATI
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	2.750.000,00	100	74.000.000,00	100	124.000.000,00	100	69.000.000,00	100	109.000.000,00	KECAMATAN PRIGEN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	2.000.000,00	100	4.000.000,00	100	7.000.000,00	100	10.000.000,00	100	12.000.000,00	KECAMATAN NGULING
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100%	100%	100%	19.744.468,00	100%	9.083.652,00	100%	18.005.462,00	100%	18.316.957,00	100%	18.608.209,00	KECAMATAN KRATON
Meningkatnya penanganan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	-	-	100	9.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
Meningkatnya penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	5.625.000,00	100	10.025.000,00	100	10.245.000,00	100	10.476.000,00	100	10.476.000,00	KECAMATAN REJOSO
Meningkatnya penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	12.600.000,00	100	15.500.000,00	100	13.400.000,00	100	17.100.000,00	100	14.100.000,00	KECAMATAN LEKOK
Meningkatnya penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	4.000.000,00	100	4.400.000,00	100	4.500.000,00	100	4.950.000,00	100	4.000.000,00	KECAMATAN TOSARI
Meningkatnya penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	13.000.000,00	100	14.300.000,00	100	15.400.000,00	100	16.500.000,00	100	17.600.000,00	KECAMATAN PUSPO
Meningkatnya penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait (%)	83	83	83	6.750.000,00	83	6.750.000,00	83	6.750.000,00	83	6.750.000,00	83	6.750.000,00	KECAMATAN KEJAYAN
Meningkatnya Penanganan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	2.500.000,00	100	10.500.000,00	100	12.500.000,00	100	14.500.000,00	100	16.500.000,00	KECAMATAN BEJI
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum (%)	100	100	100	4.000.000,00	100	30.710.000,00	100	30.710.000,00	100	30.710.000,00	100	30.710.000,00	KECAMATAN GEMPOL
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	11.160.000,00	100	84.000.000,00	100	124.000.000,00	100	69.000.000,00	100	109.000.000,00	KECAMATAN BANGIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	13.400.000,00	100	14.400.000,00	100	14.400.000,00	100	14.400.000,00	100	14.400.000,00	KECAMATAN REMBANG
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100%	100	100	8.144.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	11.000.000,00	100	11.500.000,00	KECAMATAN POHJENTREK
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	94.727.016,00	100	37.500.000,00	100	41.000.000,00	100	36.500.000,00	100	48.000.000,00	KECAMATAN GONDANGWETAN
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	17.200.000,00	100	18.060.000,00	100	18.963.000,00	100	19.911.150,00	100	20.906.706,00	KECAMATAN WINONGAN
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum (%)	100	100	100	7.700.000,00	100	6.470.000,00	100	6.850.000,00	100	13.500.000,00	100	15.850.000,00	KECAMATAN PANDAAN
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	3.000.000,00	100	8.000.000,00	100	6.120.000,00	100	6.150.600,00	100	6.458.130,00	KECAMATAN PURWOSARI
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	83	83	100	9.650.000,00	100	10.500.000,00	100	10.689.000,00	100	10.881.402,00	100	11.077.267,00	KECAMATAN LUMBANG
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan trantibum (%)	100	100	100	2.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	KECAMATAN TUTUR
Meningkatnya Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan Trantibum (%)	100	100	100	4.600.000,00	100	4.600.000,00	100	5.060.000,00	100	5.566.000,00	100	6.122.600,00	KECAMATAN WONOREJO
Persentase Penanganan gangguan Trantibum (%)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	2.040.000,00	100	8.000.000,00	100	11.000.000,00	100	11.000.000,00	100	11.000.000,00	KECAMATAN PASREPAN
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					296.733.901,00		651.235.384,00		681.042.399,00		684.974.970,00		704.545.754,00	
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	2.880.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	KECAMATAN GRATI
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	35.040.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	4.575.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	72.995.000,00	100	80.525.000,00	KECAMATAN PURWODADI
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	9.260.000,00	100	19.500.000,00	100	21.500.000,00	100	23.500.000,00	100	25.500.000,00	KECAMATAN BEJI
Meningkatnya kerukunan masyarakat	Persentase konflik SARA sosial yang	100	100	100	1.150.000,00	100	1.150.000,00	100	1.265.000,00	100	1.391.500,00	100	1.530.650,00	KECAMATAN WONOREJO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	diselesaikan sesuai kewenangan (%)													
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	4.000.000,00	100	63.420.000,00	100	63.420.000,00	100	63.420.000,00	100	63.420.000,00	KECAMATAN GEMPOL
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	6.160.000,00	100	128.000.000,00	100	128.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	-	-	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	-	-	100	16.500.000,00	100	19.110.000,00	100	24.211.613,00	100	20.065.500,00	KECAMATAN PRIGEN
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase konflik SARA sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan (%)	100	100	100	9.074.000,00	100	7.000.000,00	100	7.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.500.000,00	KECAMATAN POHJENTREK
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	6.000.000,00	100	7.000.000,00	100	8.000.000,00	100	9.000.000,00	KECAMATAN GONDANGWETAN
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	18.510.000,00	100	15.000.000,00	100	15.100.000,00	100	15.200.000,00	100	15.300.000,00	KECAMATAN WINONGAN
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	9.700.000,00	100	9.700.000,00	100	9.700.000,00	100	9.700.000,00	100	9.700.000,00	KECAMATAN LEKOK
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	51.330.000,00	100	46.300.000,00	100	58.300.000,00	100	58.700.000,00	100	61.170.000,00	KECAMATAN PANDAAN
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	2.000.000,00	100	8.000.000,00	100	5.000.000,00	100	2.500.000,00	100	2.000.000,00	KECAMATAN TOSARI
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	23.115.000,00	100	5.000.000,00	100	5.100.000,00	100	5.100.000,00	100	5.355.000,00	KECAMATAN PURWOSARI
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	17.868.000,00	100	18.000.000,00	100	18.324.000,00	100	18.653.832,00	100	18.989.601,00	KECAMATAN LUMBANG
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	8.401.901,00	100	3.865.384,00	100	7.661.899,00	100	7.794.450,00	100	7.918.387,00	KECAMATAN KRATON
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	100	100	100	1.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	KECAMATAN TUTUR
Meningkatnya Kerukunan Masyarakat	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial (%)	50	50	50	10.000.000,00	50	11.000.000,00	50	12.000.000,00	50	13.000.000,00	50	14.000.000,00	KECAMATAN PUSPO
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase konflik SARA sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan (%)	100	100	100	45.070.000,00	100	45.070.000,00	100	45.070.000,00	100	45.070.000,00	100	45.070.000,00	KECAMATAN KEJAYAN
Terlaksananya Koordinasi penanganan konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan	Persentase konflik SARA sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan (%)	100	100	100	-	100	3.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	13.000.000,00	KECAMATAN PASREPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala DaerahTerlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase konflik SARA sosial yang diselesaikan sesuai kewenangan (%)	100	100	100	32.600.000,00	100	34.230.000,00	100	35.941.500,00	100	37.738.575,00	100	38.501.616,00	KECAMATAN REJOSO
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					124.065.768,00		590.408.514,00		496.200.663,00		560.776.314,00		606.427.909,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	-	-	100	30.000.000,00	100	60.000.000,00	100	90.000.000,00	100	120.000.000,00	KECAMATAN PRIGEN
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	4.500.000,00	100	10.500.000,00	100	10.500.000,00	100	10.500.000,00	100	10.500.000,00	KECAMATAN GRATI
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	4.650.000,00	100	57.000.000,00	100	35.750.000,00	100	38.670.000,00	100	42.102.500,00	KECAMATAN PURWODADI
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	6.000.000,00	100	183.457.000,00	100	138.195.000,00	100	153.550.000,00	100	142.695.000,00	KECAMATAN GEMPOL
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	75	75	100	1.104.000,00	100	57.000.000,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	20.000.000,00	KECAMATAN BANGIL
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	6.700.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	KECAMATAN REMBANG
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	77	88	-	-	100	15.000.000,00	100	5.000.000,00	-	-	100	5.000.000,00	KECAMATAN POHJENTREK
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	2.700.000,00	100	18.835.000,00	100	2.976.750,00	100	3.125.586,00	100	3.281.865,00	KECAMATAN WINONGAN
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	4.400.000,00	100	9.400.000,00	100	6.238.815,00	100	8.209.637,00	100	4.400.000,00	KECAMATAN REJOSO
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	10.300.000,00	100	29.325.000,00	100	18.475.000,00	100	18.625.000,00	100	24.375.000,00	KECAMATAN LEKOK
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	1.000.000,00	100	6.928.000,00	100	10.428.000,00	100	13.928.000,00	100	17.228.000,00	KECAMATAN NGULING
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	-	-	100	6.500.000,00	-	-	-	-	-	-	KECAMATAN SUKOREJO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	9.200.000,00	100	4.000.000,00	100	15.500.000,00	100	22.000.000,00	100	25.000.000,00	KECAMATAN PANDAAN
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	3.600.000,00	100	15.000.000,00	100	11.783.030,00	100	11.500.000,00	100	10.500.000,00	KECAMATAN TOSARI
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	3.550.000,00	100	8.500.000,00	100	5.072.000,00	100	4.145.296,00	100	4.219.912,00	KECAMATAN LUMBANG
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	33.829.268,00	100	15.563.514,00	100	30.849.736,00	100	31.383.438,00	100	31.882.456,00	KECAMATAN KRATON
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	2.500.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	KECAMATAN TUTUR
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	187.500,00	100	14.000.000,00	100	16.000.000,00	100	18.000.000,00	100	20.000.000,00	KECAMATAN BEJI
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	15.500.000,00	100	17.000.000,00	100	18.400.000,00	100	19.800.000,00	KECAMATAN PUSPO
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	KECAMATAN KEJAYAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	9.000.000,00	100	10.250.000,00	100	11.500.000,00	100	12.750.000,00	100	14.000.000,00	KECAMATAN GONDANGWETAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	40	50	60	1.150.000,00	70	11.150.000,00	80	1.265.000,00	90	1.391.500,00	100	1.530.650,00	KECAMATAN WONOREJO
Meningkatnya tata kelola Pemerintah Desa	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	6.295.000,00	100	7.000.000,00	100	6.167.332,00	100	6.097.857,00	100	6.412.526,00	KECAMATAN PURWOSARI
Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik (%)	100	100	100	5.900.000,00	100	12.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	KECAMATAN PASREPAN
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					23.330.591.140,00		20.899.543.543,00		21.275.735.327,00		21.643.805.548,00		21.987.942.056,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.584.418.140,00		4.022.443.543,00		4.210.635.327,00		4.275.205.548,00		4.300.842.056,00	
Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang	100	100	100	3.584.418.140,00	100	4.022.443.543,00	100	4.210.635.327,00	100	4.275.205.548,00	100	4.300.842.056,00	PENAMPU URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	baik/sesuai regulasi (%)													
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					291.382.000,00		1.205.000.000,00		1.486.000.000,00		1.568.000.000,00		1.593.000.000,00	
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat tentang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter kebangsaan (Sosialisasi, Upacara, Seleksi Paskibraka, TMMD) (%)	90	91	91	291.382.000,00	92	1.205.000.000,00	92	1.486.000.000,00	93	1.568.000.000,00	93	1.593.000.000,00	PENAMPU URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					10.497.006.000,00		9.750.000.000,00		9.860.000.000,00		9.910.000.000,00		10.021.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Kabupaten (Indeks)	74	76	78	10.497.006.000,00	79	9.750.000.000,00	80	9.860.000.000,00	81	9.910.000.000,00	81	10.021.000.000,00	PENAMPU URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					647.171.500,00		898.100.000,00		973.100.000,00		1.023.100.000,00		1.023.100.000,00	
Menguatnya Kelembagaan organisasi kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	49	52	55	647.171.500,00	56	898.100.000,00	58	973.100.000,00	60	1.023.100.000,00	69	1.023.100.000,00	PENAMPU URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					4.493.946.000,00		517.000.000,00		518.000.000,00		618.000.000,00		619.000.000,00	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kejadian ekonomi, sosial, budaya (FKUB, PAKEM, BNN, Pagelaran) yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	4.493.946.000,00	100	517.000.000,00	100	518.000.000,00	100	618.000.000,00	100	619.000.000,00	PENAMPU URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN					3.816.667.500,00		4.507.000.000,00		4.228.000.000,00		4.249.500.000,00		4.431.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
Meningkatnya Respon dan antisipasi terhadap potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	Persentase kejadian konflik dan potensi konflik sosial yang ditindaklnjuti (%)	100	100	100	3.816.667.500,00	100	4.507.000.000,00	100	4.228.000.000,00	100	4.249.500.000,00	100	4.431.000.000,00	PENAMPU URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
TOTAL KESELURUHAN					3.948.837.091.813,90		3.537.430.158.552,42		3.601.228.022.115,01		3.663.485.110.447,54		3.721.799.443.036,02	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan melalui penetapan indikator kinerja daerah, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimanifestasikan dalam dokumen RPJMD. Berbagai indikator kinerja daerah yang dituangkan dalam bab ini sangat penting karena akan menjadi acuan dalam perumusan target kinerja perencanaan pembangunan jangka pendek daerah (RKPD) maupun Perangkat Daerah (Renja).

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas;

1) **Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan dan sasaran RPJMD;
2) **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Penetapan IKU dan IKD serta penentuan target pencapaiannya dalam dokumen RPJMD sangat penting karena menggambarkan tujuan pembangunan jangka menengah daerah yang indentik dengan gambaran kesejahteraan masyarakat. Penetapan target IKU dan IKD didasarkan atas evaluasi terhadap keberhasilan/capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026. Pada sisi lain target IKU dan IKD merupakan ukuran yang dipergunakan untuk pengendalian dan evaluasi proses pembangunan ke depan, untuk mengetahui apakah sudah berada di arah yang tepat sebagaimana dimaksud dalam substansi Visi dan Misi RPJMD.

lndikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 sejumlah 32 yang terdiri atas 6 indikator tujuan RPJMD dan 17 indikator sasaran RPJMD yang termuat pada tabel 4.2.

Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dimuat dalam empat Aspek pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama
RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
A.	**INDIKATOR TUJUAN RPJMD**							
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	81,82	82,19	82,94	83,69	84,44	85,19
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,15-5,40	4,23-5,45	4,26-5,70	4,42-5,93	4,49-6,38	4,54-6,51
3	Rasio Gini	Rasio	0,318-0,358	0,317-0,357	0,316-0,356	0,315-0,355	0,313-0,353	0,312-0,352
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,14-8,39	7,1-8,12	6,96-7,77	6,81-7,5	4,73-7,05	4,46-6,16
5	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,42	3,48	3,54	3,60	3,66	3,72
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,80	86,20	87,70	89,10	90,50	92,00
B.	**INDIKATOR SASARAN RPJMD**							
7	Indeks Kebudayaan Daerah (IKD)	Indeks	59,61	61,07	62,54	64	65,47	66,93
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,335	0,324	0,313	0,308	0,291	0,280
9	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	60,66	60,68	60,69	60,70	60,72	60,73
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase PDRB ADHK)	Persen	27,62-30,15	27,80-30,16	27,86-30,17	27,90-30,18	27,93-30,20	27,95-30,21
11	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio	6,03	6,01	5,96	5,91	5,87	5,82
12	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	68,76	68,79	68,82	68,85	68,88	68,90
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,68	71,76	71,84	71,92	72	72,08
14	Penurunan emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	4.143,26	4.226,12	4.310,65	4.396,86	4.484,8	4.575,49
15	PDRB Perkapita	Juta Rp	121,89-128,16	122,23-130,33	122,83-138,11	123,21-144,07	123,91-151,98	124,19-158,94
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,38-4,67	5,37-4,43	5,36-4,19	5,25-4,01	5,19-3,91	5,13-3,83
17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.21-72,56	72,28-72,88	72,54-73,44	72,81-74,01	73,07-75,27	73,44-76,00
18	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	44,00	44,60	45,20	45,80	46,40	47,00
19	Nilai AKIP	Nilai	77,66	78,67	80,07	80,77	81,26	81,89
20	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	58,79	61,03	63,28	65,52	67,76	70
22	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.52	4.53	4.54	4.55	4.56	4.57
23	Indeks SPBE *	Indeks	4,18	-	-	-	-	-
	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	-	1,6-1,92	1,7-2,07	1,8-2,21	1,9-2,36	2,0-2,5

*) : instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai Tahun 2026 sehingga target disesuaikan

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah
RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,68	71,76	71,84	71,92	72	72,08
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	5,99	6,8	7,61	8,41	9,22	10,03
3	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	15,54	16,19	16,84	17,50	20,70	24,10
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	20	25	30	35	40	43
5	Jumlah Sampah Terproses di TPA	Ton	50.101,60	47.847	45.555	43.227	40.862	38.460
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	4.143,26	4.226,12	4.310,65	4.396,86	4.484,8	4.575,49
7	Indeks Risiko Bencana *	Indeks	121,52-118,55	118,55-115,73	115,73-113,04	113,04-110,48	110,48-108,02	108,02-104,77
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	7,48	7,18	6,88	6,58	6,29	5,99
9	Konsumsi Listrik perKapita	kWh/kapita	7.126,77	7.438,30	7.763,45	8.102,82	8.457,02	8.826,70
10	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	18,43	23,05	27,67	32,29	36,92	40
11	Rasio Kebutuhan Air baku dan Ketersediaan Air Baku							
	Irigasi	Persen	73,31	73,39	73,49	73,59	73,70	73,82
	Air minum	Persen	15,56	15,65	15,73	15,82	15,91	16
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,73	0,70	0,66	0,62	0,58	0,56
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
II.1	**Kesejahteraan Ekonomi**							
13	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,15-5,40	4,23-5,45	4,26-5,70	4,42-5,93	4,49-6,38	4,54-6,51
14	Rasio Gini	Rasio	0,318-0,358	0,317-0,357	0,316-0,356	0,315-0,355	0,313-0,353	0,312-0,352
15	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,14-8,39	7,1-8,12	6,96-7,77	6,81-7,5	4,73-7,05	4,46-6,16
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,38-4,67	5,37-4,43	5,36-4,19	5,25-4,01	5,19-3,91	5,13-3,83
17	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,28-72,88	72,54-73,44	72,81-74,01	73,07-75,27	73,44-76,00	72.21-72,56

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,74	74,99	75,25	75,51	75,76	76,02
19	PDRB perkapita	Juta Rupiah	121,89-128,16	122,23-130,33	122,83-138,11	123,21-144,07	123,91-151,98	124,19-158,94
20	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	76,41-86,81	74,41-85,81	72,41-84,81	70,41-83,81	68,41-82,81	66,41-81,81
21	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	20,46	19,73	18,99	18,26	15,74	15,08
22	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	Persen	90	90	90	90	90	90
23	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Succes Rate)	Persen	90	90	90	90	90	90
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	100	100	100	100	100
25	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen literasi (Angka literasi)							
	SD/MI	Persen	83,00	83,85	84,70	85,55	86,40	87,25
	SMP/MTs	Persen	83,00	83,85	84,70	85,55	86,40	87,25
26	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum asesmen numerasi (Angka Numerasi)							
	SD/MI	Persen	84,00	84,80	85,60	86,40	87,20	88,00
	SMP/MTs	Persen	84,00	84,80	85,60	86,40	87,20	88,00
27	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	Tahun	8,05	8,16	8,29	8,47	8,57	8,64
28	Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 7 Tahun	Tahun	12,79	12,81	12,88	12,97	13,03	13,07
29	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,90	8,99	9,13	9,27	9,61	10,79
30	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	31,97	33,51	36,04	37,58	40,11	41,92
31	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persen	37,59	47	54	62	64	67
32	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	81,82	82,19	82,94	83,69	84,44	85,19

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
33	Indeks Kebudayaan Daerah	Indeks	59,61	61,07	62,54	64	65,47	66,93
34	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,75	63,25	63,75	64,25	63,75	64,25
35	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,335	0,324	0,313	0,308	0,291	0,280
36	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,34	91,52	91,69	91,86	92,03	92,20
37	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	64,62	65,11	65,60	66,09	66,58	67,07
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
38	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	60,66	60,68	60,69	60,70	60,72	60,73
39	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,38-4,23	3,43-4,42	3,46-4,58	3,52-4,72	3,54-4,84	3,58-4,95
40	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	32.106	33.069	34.392	35.768	37.198	38.686
41	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	Persen	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56
42	Proporsi Jumlah Industri Menengah dan Besar	Persen	8,79	9,39	9,83	10,17	10,44	10,66
43	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ADHB	Persen	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76
44	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	7,31	8,14	9,33	9,51	9,70	9,83
45	Rasio Pajak Daerah dalam PDRB	Persen	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32
46	Realisasi Investasi	Triliun (Rp)	16,50	16,51	16,51	16,51	16,54	16,61
47	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	0,48-1,54	0,57-1,82	0,64-1,87	0,71-2,16	0,78-2,69	0,84-2,97
48	Indeks Ekonomi Berkelanjutan	Indeks	72,60	72,61	72,62	72,63	72,64	72,65
49	Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap Jawa Timur	Persen	6,56	6,57	6,58	6,59	6,60	6,63
50	Rasio kewirausahaan	Rasio	1,81	2,05	2,28	2,52	2,76	3,00
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	63,80	64,32	64,84	65,36	65,88	66,4
51	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	68,32	68,93	69,55	70,16	70,78	71,39
52	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,42	3,48	3,54	3,6	3,66	3,72
53	Indeks TIK	Indeks	5,00	5,12	5,25	5,37	5,50	5,62
54	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	44,00	44,60	45,20	45,80	46,40	47,00
55	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB ADHK	Persen	27,62-30,15	27,80-30,16	27,86-30,17	27,90-30,18	27,93-30,20	27,95-30,21

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
56	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	10,79	10,63	10,47	10,31	10,15	9,98
57	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rasio	6,03	6,01	5,96	5,91	5,87	5,82
58	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	68,76	68,79	68,82	68,85	68,88	68,90
59	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	78	79,28	80,94	82,6	84,12	85,79
60	Persentase Desa Mandiri (realisasi 2024 meggunakan IDM, target mulai 2025 menggunakan indeks desa)	Persen	9,97	12,32	14,08	15,84	17,595	19,35
61	Tingkat Inflasi	Persen	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
62	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,01	3,06	3,11	3,17	3,22	3,25
63	Indeks Zakat Nasional	Poin Indeks	0,54	0,58	0,62	0,66	0,70	0,74
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
64	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,80	86,20	87,70	89,10	90,50	92,00
65	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.52	4.53	4.54	4.55	4.56	4.57
66	Indeks Integritas	Indeks	70,60	71,90	73,20	74,50	75,80	77,10
67	Indeks SPBE **	Indeks	4,18	-	-	-	-	-
	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	-	1,6-1,92	1,7-2,07	1,8-2,21	1,9-2,36	2,0-2,5
68	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,68	93,94	94,21	94,47	94,74	95,00
69	Persentase pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100

*) :Indeks Resiko Bencana menggunakan data H&V tahun 2021

**) : instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai Tahun 2026 sehingga target disesuaikan

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
1	**Pendidikan**	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	84,26	86,69	89,12	91,55	93,98	96,41
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,85	98,95	99,05	99,15	99,25	99,35
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	97,74	98,10	98,46	98,81	99,17	99,52
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	43,68	51,88	58,37	64,86	71,35	72,12
2	**Kesehatan**	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,07876	0,08022	0,08168	0,08314	0,0846	0,08606
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	100	100	100

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	73,84	73,85	73,86	73,87	73,88	73,89
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh	Persen	69,49	69,5	69,51	69,52	69,53	69,54

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		layanan pengolahan air limbah domestic							
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Persen	68,87	68,89	68,91	68,93	68,95	68,97
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	81,83	82,37	82,91	83,45	83,99	85,07
		Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	36,17	37,46	38,75	40,03	41,32	42,61
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	100	100	100
4	**Perumahan Rakyat**	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	0	100	100	100	100	100
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	Persen	24,87	24,89	24,91	24,93	24,94	24,96

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	2,56	3,50	3,49	3,48	3,47	3,45
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	29,83	29,93	30,03	30,13	30,23	30,33
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	68,80	68,90	69	69,10	69,20	69,30
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	65.732	65.732	65.732	65.732	65.732	65.732
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15
6	**Sosial**	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100
7	**Tenaga Kerja**	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	77,10	77,20	77,30	77,40	77,50	77,60
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	25	26	28	29	30	31
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Tahun	139.235.482,13	140.627.837	142.034.115	143.454.456	144.889.001	146.337.891
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB. LKS Bipartit.	Persen	9,80	9,89	9,99	10,09	10,19	10,30

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		Struktur Skala Upah. dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)							
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	44,70	45,23	45,70	45,98	46	46,25
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	23,23	23,28	23,33	23,38	23,43	23,48
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	5,82	5,62	5,42	5,22	5,02	4,82
9	**Pangan**	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	51,7667	54,3550	57,0726	59,9261	62,922	66,0681
10	**Pertanahan**	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya	Persen	100	100	100	100	100	100

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan							
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0	100	100	100	100	100
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	48,82	48,84	48,86	48,88	48,90	48,92
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	0	100	100	100	100	100
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	0	100	100	100	100	100
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	100
11	**Lingkungan Hidup**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Indeks	71,68	71,76	71,84	71,92	72	72,08
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	Persen	30	32,30	34,50	37,30	39,90	42,70
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	Persen	19,73	19,71	18,77	17,82	17,10	16,53

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
12	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Perekaman KTP Elektronik	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50	55	60	65	70	75
		Kepemilikan akta Kelahiran	Persen	92	93	93,40	93,90	94,45	94,95
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	19,36	25,80	32,25	38,70	45,16	51,61
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	3,57	3,70	3,85	4	4,17	4,35
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,90	1,92	1,94	1,96	1,98	2
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	Persen	77,27	77,82	78,37	78,92	79,47	80,02

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)							
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	3,28	3,18	3,08	2,98	2,88	2,78
15	**Perhubungan**	Rasio Konektivitas	Persen	51,52	77,27	81,82	86,36	90,91	95,45
		Kinerja Lalu lintas Kabupaten/kota	Persen	0,36	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35
16	**Komunikasi dan Informatika**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	13,64	15,91	18,18	20,45	22,73	25
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik. Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	74,97	75,09	76,92	77,53	78,14	79,36

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
17	**Kopertasi. Usaha Kecil dan Menengah**	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	67,04	68,02	69,37	70,37	71,38	72,38
18	**Penanaman Modal**	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pasuruan	Persen	5,31	5,32	5,33	5,34	5,35	5,36
19	**Kepemudaan dan Olahraga**	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,67	0,67	0,68	0,69	0,69	0,70
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	23,37	23,61	23,84	24,08	24,32	24,56
		Peningkatan prestasi olahraga	Medali	110	100	113	102	115	105
20	**Statistik**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
21	**Persandian**	Tingkat keamanan informasi Pemerintah	Persen	49,92	54,26	57,36	60,47	62,02	72,09
22	**Kebudayaan**	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100
23	**Perpustakaan**	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	74,50	75	77	79	80	82
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	60,69	62,79	64,99	67,29	69,79	71,99
24	**Kearsipan**	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Persen	100	100	100	100	100	100
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan	Persen	46	46,50	47	47,50	48,00	48,50

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat							
25	**Kelautan dan Perikanan**	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	47.857,01	48.058	48.269,46	48.491,50	48.724,26	48.967,88
26	**Pariwisata**	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	69,15	70,38	71,19	72	72,82	73,65
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	13,05	13,59	14,13	14,67	15,22	15,77
		Tingkat hunian akomodasi	Persen	0,6696	0,7031	0,7382	0,7751	0,8139	0,8546
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	16,78	16,94	17,11	17,28	17,46	17,63
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	1,769	2,072	2,077	2,085	2,111	2,132
27	**Pertanian**	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	622,27	622,96	630,43	638,63	647,57	657,28

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-9	-9,25	-9,5	-9,75	-10	-10,25
28	**Perdagangan**	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	0,435	0,440	0,445	0,450	0,455	0,460
		Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	64,7386	64,7407	64,7428	64,7449	64,7470	64,7490
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100	100
29	**Perindustrian**	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	36,09	10,51	12,68	12,66	14,98	15,20
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri	Persen	100	100	100	100	100	100

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)							
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100	100
30	**Pengadaan**	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0	0

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	98,235	98,236	98,237	98,238	98,239	98,240
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	25	26	27	28	29	30
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	40	41	42	43	44	45
31	**Kepegawaian**	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (Persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)							
		a. Pendidikan Tinggi	Persen	56,08	56,10	56,12	56,14	56,16	56,18
		b. Menengah	Persen	39,24	39,22	39,20	39,18	39,16	39,14
		c. Dasar	Persen	4,70	4,68	4,66	4,64	4,62	4,60
		Rasio pegawai Fungsional (Persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehat)	Persen	14,90	14,92	14,94	14,96	14,98	15
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (Persen) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	58,20	58,22	58,24	58,26	58,28	58,30

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
32	**Manajemen Keuangan**	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-9,95	-9	-8,5	-8	-7,5	-7
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	16	15,50	15	14,50	14	13,50
		Manajemen Aset :	Nilai	4	4	4	4	4	4
		1. Apakah ada daftar asset tetap?		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran?		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	8,32	8,27	7,08	6,88	6,68	6,47
33	**Perencanaan dan Keuangan**	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 (3,245)	Level 3 (3,250)	Level 3 (3,255)	Level 3 (3,260)	Level 3 (3,265)	Level 3 (3,270)

V	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,04)	Level 3 (3,06)	Level 3 (3,08)	Level 3 (3,10)
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	Persen	35,39	33,04	32,69	32,06	31,47	30,93
		Rasio PAD	Persen	27,06	32,25	33,35	34,42	35,37	36,26
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	68,46	69,03	67,80	69,29	69,25	69,46
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34	**Transparansi dan Partisipasi Publik**	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	75,30	70,56	70,97	71,43	71,87	71,99
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
35	**Tambahan**	Persentase realisasi belanja urusan pelayanan dasar	Persen	92,89	93,07	93,26	93,44	93,63	93,82
		Persentase penurunan SILPA	Persen	-0,55	-0,75	-1,00	-1,25	-1,50	-2,00
		Pertambahan nilai asset tetap	Persen	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6

Selanjutnya berbagai target kinerja yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana dituang dalam tabel-tabel di atas menjadi acuan dalam penyusunan target kinerja dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, baik perencanaan jangka menengah (Rencana Strategis Perangkat Daerah) maupun rencana jangka pendek (Rencana Kerja Perangkat Daerah).

BAB V
PENUTUP

Bagian ini memuat paling sedikit tentang kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Pedoman Transisi merupakan pedoman yang diperlukan untuk menyusun acuan kebijakan pada akhir periode RPJMD. Kaidah Pelaksanaan merupakan petunjuk yang perlu disampaikan kepada *stakeholder* perencanaan pembangunan daerah, khususnya Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan pengendalian dan evaluasi adalah suatu proses pemantauan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan dan menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara efisien dan efektif.

5.1 Kesimpulan

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 menerjemahkan rencana realisasi janji politik (visi, misi dan program prioritas) Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan tahun 2025-2030, yaitu **H.M. Rusdi Sutejo** dan **H.M. Shobih Asrori**. Dokumen ini berisi: (i) hasil evaluasi pembangunan daerah lima tahun terakhir dan telaahan berbagai isu eksternal, baik internasional, nasional, provinsi, maupun arahan dokumen rencana jangka panjang sektoral di kabupaten, yang dijadikan dasar dalam perumusan permasalahan dan isu strategis daerah yang harus dijawab melalui rencana pembangunan lima tahun ke depan; (ii) penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati (yang sekaligus menjadi visi dan misi pembangunan daerah) dalam menjawab isu strategis pembangunan tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan pada periode tersebut; (iii) program perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah ditentukan untuk mencapai sasaran, tujuan, dan visi pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan di tahun

2029; (iv) seluruh rencana indikator kinerja pemerintahan daerah beserta target-targetnya selama tahun 2025-2030.

Proses penyusunan dokumen telah mengikuti ketentuan aturan perundangan yang berlaku sehingga memastikan adanya keselarasan rencana pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah tahap I, serta pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dokumen ini pun menjadi acuan bagi penjabaran rencana pembangunan jangka menengah (Rencana Strategis) seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan dan rencana pembangunan jangka pendek tahunan (rencana kerja pemerintah daerah) hingga tahun 2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan menyajikan berbagai hal penting terkait pelaksanaan RPJMD dan menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan program. Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dalam melaksanakan program dan kegiatan agar melakukan koordinasi, baik pada tiap rumpun atau lintas rumpun (*Cross Cutting Program*) untuk memastikan pencapaian *outcome* RPJMD berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Apabila pada penyusunan RKPD selama periode RPJMD ini terjadi perubahan asumsi dan adanya faktor eksternal yang berakibat pada penentuan target kinerja program/IKU/IKD di RKPD berada di atas/di bawah target kinerja RPJMD, maka diharapkan tetap mempertahankan target akhir periode RPJMD (*agregate*).

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan meliputi: pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan evaluasi terhadap hasil RPJMD.

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang bidang perencanaan daerah.
2. Pengendalian pelaksanaan RPJMD bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan telah dilaksanakan melalui RKPD.
3. Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.
4. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
5. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan dokumen evaluasi hasil RKPD, yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD periode berikutnya.

5.4 Pedoman Transisi

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan acuan umum pada saat periodesasi RPJMD ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD ini, maka permasalahan pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari RPJMD periode selanjutnya, agar dapat ditanggulangi dengan program-program pada periode selanjutnya.
2. Program prioritas daerah yang telah dilaksanakan pada periode RPJMD ini dan masih relevan / perlu dilanjutkan pada periode selanjutnya direkomendasikan untuk diakomodasi dalam RPJMD periode berikutnya.

Demikian kesimpulan, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 sebagai

acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BUPATI PASURUAN

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

KABUPATEN PASURUAN

GUNA KARYA SARANA BHAKTI

